# BUPATI PADANG LAWAS
# PROVINSI SUMATERA UTARA

## KABUPATEN PADANG LAWAS



## TENTANG
## PENETAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
## TAHUN ANGGARAN 2026

Daftar Isi

Batang Tubuh KUPA ..... 1
SIPD-RI - Lampiran Tabel 2.1 KUPA - Kab. Padang Lawas ..... 268
SIPD-RI - Lampiran Tabel 3.1 KUPA - Kab. Padang Lawas ..... 269
SIPD-RI - Lampiran Tabel 3.2 KUPA - Kab. Padang Lawas ..... 271
SIPD-RI - Lampiran Tabel 3.3 KUPA - Kab. Padang Lawas ..... 272
SIPD-RI - Lampiran Tabel 3.4 KUPA - Kab. Padang Lawas ..... 274
SIPD-RI - Lampiran Tabel 4.1 KUPA - Kab. Padang Lawas ..... 375
SIPD-RI - Lampiran Tabel 4.2 KUPA - Kab. Padang Lawas ..... 422
SIPD-RI - Lampiran Tabel 5.1 KUPA - Kab. Padang Lawas ..... 423

# BAB I
# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan Prubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dilakukan karena adanya perubahan asumsi ekonomi makro, perubahan kebijakan fiskal dan adanya kebutuhan mendesak yang perlu diakomodasi dalam anggaran daerah.

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat Perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Perubahan KUA tahun 2026 pada umumnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2025. Perubahan kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran, perubahan rancangan KUA ini disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pembangunan di segala bidang dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya serta dapat berkarya nyata dalam membangun daerahnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti dalam operasionalisasi anggaran daerah lebih ditekankan pada alokasi sumber daya dan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan Perubahan

Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasioanal anggaran yang memuat target dari pencapaian dari kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah melalui program-program yang akan dilaksanakan dan disertai dengan kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Substansi dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat kesepakatan yang merupakan petunjuk dan ketentuan umum sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan Perubahan- APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya dijabarkan dan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026, yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

**Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas bertujuan untuk :

1. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2026;
2. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yangtransparan dan akuntabel;
4. Upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

**Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02);
25. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 10).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 Nomor 2)
27. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 Nomor 24).
28. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 Nomor 2).

**Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan Perubahan RKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 merupakan acuan Penyusunan Perubahan PPAS dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025, dituangkan secara detail di

dalam Perubahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah.

# BAB II
# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

## 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

### 2.1.1 Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian global pada tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 3,4 persen, namun diproyeksikan mengalami perlambatan menjadi 3,1 persen pada tahun 2026 berdasarkan rilis International Monetary Fund (IMF) bulan April 2026. Dinamika penurunan ini utamanya dipicu oleh tingginya ketidakpastian kebijakan tarif dagang serta eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kebijakan tarif unilateral dan investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara mitra, termasuk Indonesia, menjadi faktor risiko yang berpotensi menekan kinerja perdagangan internasional dan mengganggu stabilitas rantai pasok global.

Ekskalasi konflik geopolitik tersebut turut memperbesar risiko lonjakan harga energi dan komoditas global. Pada pertengahan April 2026, harga minyak mentah telah menembus kisaran USD 100 per barel, atau meningkat signifikan sebesar 76,43 persen secara year to date (YtD). Kondisi ini meningkatkan risiko inflasi bawaan (imported inflation), mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter, dan mendorong terjadinya pelarian modal ke aset yang lebih aman (safe haven assets). Volatilitas juga melanda komoditas batu bara dan crude palm oil (CPO) sebagai komoditas ekspor unggulan nasional, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 23,95 persen dan 12,98 persen (YtD). Kendati demikian, aktivitas manufaktur global masih menunjukkan tren ekspansif yang tercermin dari angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur per Maret 2026 yang berada pada level 51,30.

Memasuki pertengahan 2026 ditandai oleh pertumbuhan global yang moderat, dengan prospek yang sangat bergantung pada apakah risiko geopolitik mereda atau justru meningkat. Teknologi menjadi motor pertumbuhan utama, sementara energi dan konflik tetap menjadi sumber ketidakpastian terbesar.

2.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional

Stabilitas ekonomi makro pada tahun 2025 tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, laju inflasi yang terkendali, posisi cadangan devisa yang kuat, serta surplus pada neraca perdagangan. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut utamanya didorong oleh performa konsumsi rumah tangga, aktivitas ekspor, iklim investasi yang kondusif, serta kontribusi positif dari sektor lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Dinamika positif ini berlanjut pada Triwulan I-2026, di mana perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara year on year (YoY). Akselerasi ini dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat secara signifikan yang memanfaatkan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), optimalisasi implementasi berbagai program prioritas pembangunan, serta peningkatan kapasitas produksi domestik guna merespons lonjakan permintaan pasar. Kinerja triwulanan yang impresif ini menjadi sinyal optimistis dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen, sekaligus meletakkan fondasi struktural yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif pada tahun 2027.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, motor penggerak utama perekonomian pada tahun 2026 diproyeksikan tetap bersumber dari konsumsi rumah tangga, realisasi investasi, dan kinerja ekspor. Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan utama akan didominasi oleh sektor industri pengolahan—yang didorong oleh kebijakan hilirisasi pada sektor-sektor prioritas—serta keberlanjutan program strategis di sektor pertanian.

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antarkawasan melalui akselerasi hilirisasi di wilayah timur serta penguatan sektor manufaktur dan jasa di wilayah barat. Pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) diproyeksikan mampu mencapai angka 6,0 persen, dipicu oleh masifnya aktivitas hilirisasi komoditas nikel di wilayah Maluku dan Sulawesi, pemulihan sektor pariwisata di Bali-Nusa Tenggara, peningkatan kinerja sektor pertambangan, serta keberlanjutan konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Di sisi lain, Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen, ditopang oleh ketahanan sektor industri dan jasa di wilayah Jawa, serta optimalisasi permintaan komoditas unggulan dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera.

Ketahanan sektor eksternal juga menunjukkan performa yang solid pada tahun 2025, tecermin dari defisit transaksi berjalan yang berada pada level rendah sebesar USD 1,45 miliar atau 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), serta posisi cadangan devisa yang mencapai USD 156,47 miliar (setara dengan 6,2 bulan pembiayaan impor). Memasuki tahun 2026, neraca perdagangan barang diproyeksikan tetap mencatat surplus sebesar USD 47,23 miliar, didukung oleh ekspor produk hasil hilirisasi bernilai tambah tinggi yang berdaya saing global, optimalisasi pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA), penguatan kerja sama internasional, serta keberlanjutan reformasi kebijakan perdagangan dan iklim usaha. Melalui berbagai kondisi tersebut, neraca pembayaran secara keseluruhan pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami

surplus sebesar USD 1,23 miliar dengan posisi cadangan devisa yang meningkat menjadi USD 157,70 miliar.

Di sisi keuangan negara, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tetap solid, ditandai dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.765,2 triliun (11,61 persen dari PDB) dan belanja negara sebesar Rp3.434,7 triliun (14,42 persen dari PDB). Instrumen APBN secara konsisten menjalankan peran krusialnya dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga kesinambungan fiskal, serta mengakselerasi pelaksanaan program prioritas pembangunan. Pengelolaan fiskal yang pruden berhasil menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas kedaruratan (3 persen), yaitu sebesar 2,81 persen dari PDB, dengan rasio utang yang terkendali jauh di bawah batas aman 60 persen dari PDB.

Pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal APBN difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, dengan proyeksi pendapatan negara sebesar 12,26 persen dari PDB, belanja negara sebesar 14,94 persen dari PDB, defisit fungsional di level 2,68 persen dari PDB, serta keseimbangan primer yang terjaga negatif 0,35 persen dari PDB.

Kebijakan moneter sepanjang tahun 2025 cenderung bersifat ekspansif, yang diindikasikan oleh penurunan BI-Rate sebesar 125 bps menjadi 4,75 persen. Memasuki tahun 2026, tingkat inflasi diproyeksikan tetap berada dalam rentang kendali, namun ruang bagi penurunan suku bunga domestik diperkirakan menjadi lebih terbatas akibat tingginya dinamika ketidakpastian global. Kendati demikian, ketahanan sektor keuangan nasional tetap tangguh dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini tecermin dari kecukupan likuiditas, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2), serta fungsi intermediasi perbankan yang berjalan optimal.

Terjaganya fungsi intermediasi tersebut ditunjukkan oleh angka Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada pada level 85,35 persen pada tahun 2025. Performa intermediasi ini ditopang oleh pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 9,63 persen serta ekspansi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 13,83 persen sepanjang tahun 2025. Kondisi industri perbankan yang solid juga dikonfirmasi oleh rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang kuat pada level 25,87 persen serta keberhasilan menekan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) menjadi 2,05 persen pada periode yang sama.

Meskipun demikian, ruang ekspansi penyaluran kredit di masa mendatang masih terbuka lebar. Hal ini terindikasi dari tingginya angka komitmen kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) yang mencapai Rp

2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari total plafon kredit yang tersedia pada Desember 2025, dan sedikit meningkat menjadi 22,6 persen pada Maret 2026. Guna mengoptimalkan potensi ini, upaya perbaikan iklim investasi dan penguatan akses pembiayaan pada sektor-sektor prioritas perlu terus dipertegas. Di sisi lain, industri keuangan non-bank (IKNB) turut menunjukkan performa positif pada tahun 2025, di mana rasio aset asuransi dan dana pensiun terhadap PDB tetap stabil dan melanjutkan tren pertumbuhan positif pada awal tahun 2026, sehingga memperkuat ketersediaan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian.

Pendalaman pasar modal domestik mencatatkan penguatan yang signifikan pada akhir tahun 2025, ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di level 8.646,93 dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 66,53 persen terhadap PDB. Memasuki tahun 2026, pasar saham mengalami koreksi teknis akibat sentiment global, tecermin dari posisi IHSG per April 2026 yang berada di level 6.956,80 (tumbuh 2,81 persen secara YoY) dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp12.382 triliun (tumbuh 5,78 persen secara YoY). Perkembangan ini utamanya dipengaruhi oleh keputusan penangguhan sementara perubahan indeks saham Indonesia oleh MSCI serta peningkatan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sejalan dengan dinamika pasar saham, hingga pertengahan Mei 2026, tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun tercatat berada pada level 6,69 persen, mengindikasikan bahwa persepsi risiko investor global mulai bergerak termoderasi.

### 2.1.3 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026 berada dalam situasi yang cukup kompleks karena diwarnai oleh resiliensi sekaligus perlambatan pertumbuhan yang gradual. Pada pertengahan tahun 2026, perekonomian Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kinerja yang relatif tangguh di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas dunia. Ketahanan ekonomi daerah didukung oleh kuatnya permintaan domestik, meningkatnya investasi, serta kinerja ekspor komoditas unggulan yang masih terjaga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 4,98 persen (year-on-year) dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp320,03 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya dan mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai sektor.

Meskipun demikian, perekonomian Sumatera Utara masih menghadapi sejumlah tantangan. Inflasi pada Triwulan I 2026 masih berada di atas sasaran nasional, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan, normalisasi tarif listrik, meningkatnya harga emas global, serta gangguan distribusi akibat dampak bencana banjir dan longsor pada akhir tahun 2025. Di sisi eksternal, ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga energi, serta dinamika perdagangan internasional juga berpotensi memengaruhi kinerja ekspor dan investasi daerah.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi Sumatera Utara sepanjang tahun 2026 masih cukup positif. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,9–5,7 persen, yang didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta terjaganya permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan. Dengan tetap menjaga stabilitas inflasi, memperkuat investasi produktif, dan meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan, Sumatera Utara memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

### 2.1.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Tahun 2026, kondisi ekonomi Kabupaten Padang Lawas menunjukkan kinerja yang relatif stabil di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang masih diwarnai ketidakpastian. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat sekaligus kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketahanan sektor pertanian menjadikan perekonomian Kabupaten Padang Lawas tetap mampu tumbuh meskipun menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2025 yang menjadi dasar kondisi ekonomi tahun 2026 mencapai nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp20,56 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19 persen. Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,02 persen, capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap

tumbuh positif dan memiliki daya tahan yang cukup baik. Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Kabupaten Padang Lawas masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi sekitar 54,63 persen terhadap total PDRB. Dari sisi pertumbuhan sektoral, kategori transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,81 persen, seiring meningkatnya mobilitas barang dan masyarakat.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu pada kisaran 5,36–5,65 persen. Target tersebut didukung oleh upaya peningkatan investasi, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2026 menunjukkan arah yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, didukung oleh sektor pertanian sebagai basis ekonomi, berkembangnya sektor industri pengolahan dan konstruksi, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan transportasi. Ke depan, transformasi ekonomi melalui hilirisasi hasil pertanian, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

## 2.1 Kerangka Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

Kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah yang sehat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga sasaran pembangunan daerah tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Kerangka ekonomi makro tahun 2026 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Padang Lawas berdasarakan hasil evaluasi tahun berjalan, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun berjalan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Lawas yang ***MAJU (MANDIRI AMANAH JAYA UNGGUL).*** Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Kemajuan ekonomi Kabupaten Padang Lawas dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Kerangka ekonomi suatu daerah diperoleh melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dan skala global, nasional, dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas dapat tercapai sesuai dengan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas diperkirakan meningkat seiring dengan Harga dan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan akan mengalami akselerasi yang sejalan dengan kondusifnya kegiatan dan kebutuhan komoditi bidang industri pengolahan terkait, konstruksi dan industri pengolahan juga akan terus mengalami perkembangan. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik. Selain itu bebrapa faktor lainnya juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk terus meningkat yaitu tingkat inflasi, indeks gini, kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

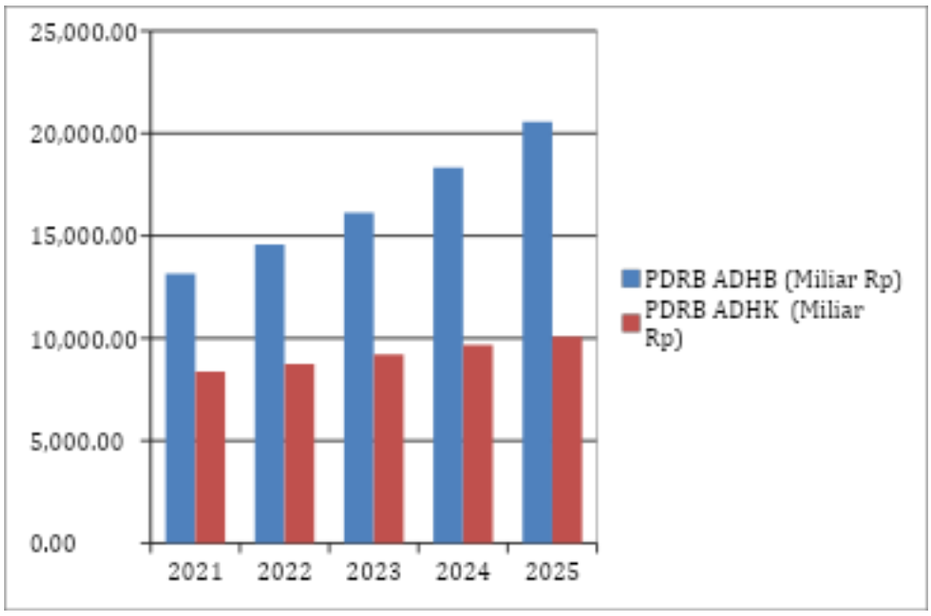
Diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus meningkat lagi secara signifikan sesuai dengan yang di harapkan, serta peran aktif pendukung pertumbuhan ekonomi maupun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomipun sesajalan untuk terus tumbuh dan berkembang lebih baik. Jika di analisis apabila faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun peran struktur ekonomi aktif terus meningkat dan atau faktor lainnya maka pertumbuhan Kabupaten Padang Lawas akan meningkat dan sesuai dengan harapan dan target yang sudah di tentukan.

### 2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan pembangunan daerah yakni suatu proses yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan riil perkapita

penduduk. Dari nilai PDRB tesebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan inflasi.

**Gambar 2.1**
**Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas**
**Tahun 2021-2025**




*Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2026*

Mencermati gambar di atas, tampak peningkatan yang signifikan pada tahun 2025 sebesar 20.555,91 milyar rupiah untuk PDRB ADHB, dan sebesar 10.064,06 milyar rupiah untuk PDRB ADHK. Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB ADHB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 11.230.659,83 juta. Sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3.295.162,31 juta. Selain itu diikuti oleh sektor konstruksi sebesar Rp 2.723.566,07 juta yang juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang lainnya sebesar Rp. 164,40 juta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**

**Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB**

**Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 – 2025**

| No | Sektor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp (Juta) | Rp (Juta) | Rp (Juta) | Rp (Juta) | Rp (Juta) |
| 1 | Pertanian,kehutanan, dan perikanan | 6.502.567,9 | 7.338.872,5 | 8.290.904,4 | 9.716.868,95 | 11.230.659,83 |
| 2 | Pertambangan & penggalian | 64.408,8 | 71,976,5 | 77.034,7 | 80.661,79 | 86.787,79 |
| 3 | Industri pengolahan | 2.296,562,4 | 2.526.542,1 | 2.664,015,8 | 2.991.692,20 | 3.295.162,31 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan gas | 25.168,9 | 26.299,3 | 28.261,5 | 30.912,41 | 31.863,30 |
| 5 | Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang | 136,7 | 140,9 | 137,5 | 150,17 | 164,40 |
| 6 | Konstruksi | 1.980,755,9 | 2.191,992,7 | 2.436.432,1 | 2.597.254,19 | 2.723.566,07 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor | 889,899,7 | 949.289,9 | 1.022.232,2 | 1.140.024,82 | 1.257.532,96 |
| 8 | Trasportasi dan pergudangan | 148,984,2 | 165,338,7 | 200,979,1 | 231.539,50 | 260.129,95 |
| 9 | Penyediaan akomodasi dan makan minum | 125.790,2 | 133.281,8 | 148.481,1 | 165.336,92 | 181.242,00 |
| 10 | Informasi dan komunikasi | 80.436,2 | 86.297,1 | 93.368,1 | 99.365,90 | 105.417,90 |
| 11 | Jasa keuangan dan asuransi | 104.100,1 | 112.472,3 | 119.271,4 | 127.813,96 | 137.811,56 |
| 12 | Real estate | 460.150,2 | 502.619,4 | 536.431,4 | 582.521,40 | 649.286,47 |
| 13 | Jasa perusahaan | 6.936,5 | 7.274,1 | 8.079,5 | 8.747,64 | 9.484,10 |
| 14 | Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib | 342.801,3 | 353.851,6 | 369.187,7 | 411.025,38 | 425.928,04 |

| No | Sektor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp (Juta) | Rp (Juta) | Rp (Juta) | Rp (Juta) | Rp (Juta) |
| 15 | Jasa pendidikan | 47.277,5 | 49.308,6 | 53.354,9 | 58.919,74 | 64.406,89 |
| 16 | Jasa kesehatan dan kegiatan social | 58.637,3 | 66.260,7 | 73.439,9 | 81.512,11 | 89.870,37 |
| 17 | Jasa lainnya | 4.532,9 | 4.946,2 | 5.467,2 | 6.052,89 | 6.600,91 |
| **PDRB Kabupaten Padang Lawas** | | **13.139.141,7** | **14.586.764,4** | **16.127.078,5** | **18.330.399,95** | **20.555.914,86** |
| **PDRB Provinsi Sumatera Utara** | | **859.934,26** | **955.193,09** | **1.050.995,41** | **1.146.919,75** | **1.236.193,57** |

*Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2026*

*Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2026*

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2025 masih didominasi oleh lima sektor, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dan Real estate. Sedangkan sektor yang masih memberikan kontribusi rendah adalah Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Jasa lainnya dan Jasa Perusahaan.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2025 atas dasar harga konstan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 5.466,13 Milyar sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi sebesar Rp. 1.391,89 Milyar dan industri pengolahan sebesar Rp. 1.404,18 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021 - 2025**
**Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas**

| No | Sektor | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp (Milyar) | % (Persen) | Rp (Milyar) | % (Persen) | Rp (Milyar) | % (Persen) | Rp (Milyar) | % (Persen) | Rp (Milyar) | % (Persen) |
| 1 | Pertanian,kehutanan, dan perikanan | 4.494,70 | 5,39 | 4.724,62 | 5,12 | 4.973,10 | 5,26 | 5.218,80 | 4,94 | 5.466,13 | 4,74 |
| 2 | Pertambangan & penggalian | 44,09 | 3,78 | 47,74 | 8,28 | 49,61 | 3,91 | 51,13 | 3,06 | 53,53 | 4,69 |
| 3 | Industri pengolahan | 1.196,36 | 2,47 | 1.241,14 | 3,74 | 1.283,51 | 3,41 | 1.344,26 | 4,73 | 1.404,18 | 4,46 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan gas | 24 | 3,67 | 25,04 | 4,34 | 26,46 | 5,65 | 28,72 | 8,55 | 29,86 | 3,96 |
| 5 | Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang | 12,18 | - | 12,55 | 3,02 | 12,15 | -3,2 | 13,11 | 7,91 | 13,93 | 6,3 |
| 6 | Konstruksi | 1.198,51 | 1,77 | 1.247,94 | 4,12 | 1.329,71 | 6,55 | 1.386,93 | 4,3 | 1.391,89 | 0,36 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor | 541,85 | 2,86 | 565,42 | 4,35 | 592,33 | 4,76 | 630,29 | 6,41 | 669,4 | 6,21 |
| 8 | Trasportasi dan pergudangan | 91,95 | 3,33 | 96,58 | 5,04 | 105,7 | 9,44 | 111,23 | 5,23 | 121,03 | 8,81 |
| 9 | Penyediaan akomodasi dan makan minum | 84,62 | 1,1 | 88,1 | 4,11 | 95,62 | 8,53 | 102,66 | 7,37 | 110,02 | 7,17 |
| 10 | Informasi dan komunikasi | 67,8 | 5,7 | 71,42 | 5,35 | 76,87 | 7,63 | 81,57 | 6,11 | 86,34 | 5,86 |

| No | Sektor | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp (Milyar) | % (Persen) | Rp (Milyar) | % (Persen) | Rp (Milyar) | % (Persen) | Rp (Milyar) | % (Persen) | Rp (Milyar) | % (Persen) |
| 11 | Jasa keuangan dan asuransi | 63,35 | 5,98 | 66,53 | 5,03 | 70,13 | 5,41 | 74,14 | 5,72 | 78,53 | 5,91 |
| 12 | Real estate | 243,72 | 0,12 | 251,76 | 3,3 | 265,01 | 5,26 | 281,93 | 6,38 | 299,7 | 6,3 |
| 13 | Jasa perusahaan | 4 | -1,03 | 4,1 | 2,5 | 4,42 | 7,78 | 4,66 | 5,37 | 4,96 | 6,49 |
| 14 | Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib | 229,7 | -0,18 | 236,63 | 3,02 | 239,12 | 1,05 | 250,9 | 4,93 | 250,09 | -0,32 |
| 15 | Jasa pendidikan | 33,16 | 3,13 | 34,19 | 3,1 | 36,37 | 6,39 | 38,86 | 6,83 | 41,27 | 6,2 |
| 16 | Jasa kesehatan dan kegiatan social | 41,61 | -1,52 | 43,89 | 5,5 | 46,65 | 6,27 | 50,3 | 7,83 | 53,68 | 6,72 |
| 17 | Jasa lainya | 2,6 | 5,83 | 2,71 | 4,3 | 2,89 | 6,6 | 3.11 | 7,55 | 3.30 | 6,13 |
| PDRB Kabupaten Padang Lawas | | 8.362,13 | 3,83 | 8.747,96 | 4,61 | 9.197,63 | 5,14 | 9.659,71 | 5,02 | 10.064,06 | 4,19 |
| PDRB Provinsi Sumatera Utara | | 547.651,82 | 2,61 | 573.528,77 | 4,73 | 602.235,95 | 5,01 | 632.534,73 | 5,03 | 661.204,18 | 4,54 |

*Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2026*
*Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2026*

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja pembangunan daerah dalam mendorong peningkatan produksi barang dan jasa di berbagai sektor. Pada tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas sebesar 5,35-5,65 persen. Namun terjadi tren penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2024 ke tahun 2025, yaitu dari 5,02 persen menjadi 4,19 persen, walaupun perekonomian daerah tetap mengalami pertumbuhan positif. Perlambatan tersebut menunjukkan adanya penurunan laju ekspansi ekonomi, namun sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi masih menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Padang Lawas. Mengacu peda kondis tersebut pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi disesuaikan pada Perubahan RKPD menjadi 4,20-4,50 persen.

**Tabel 2.3**

**Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas**

| Indikator | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | Target RKPD | Realisasi | RKPD | PRKPD |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,35-5,64 | 4,19 | 5,36 - 5,65 | 4,20-4,50 |

*Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2026*

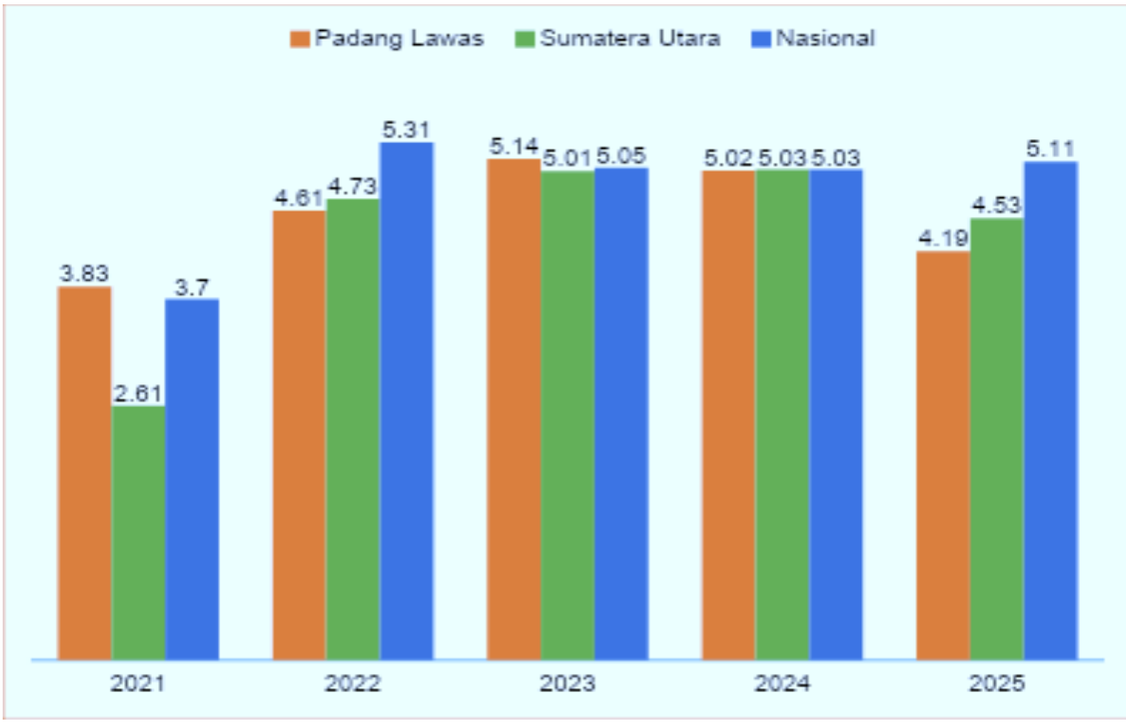
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi yang signifikan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas pasca pandemi terus mengalami kenaikan, angka tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 5,14 persen, namun menurun pada tahun 2025 menjadi 4,19 persen. Hal serupa terjadi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, dimana pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,61 persen sementara pada tahun 2025 sebesar 4,53 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional meningkat hingga tahun 2025 mencapai 5,11 persen, Pertumbuahan ekonomi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara, serta nasional hampir setara. Sebagaimana pada gambar berikut :

**Gambar 2.2**

**Persentase Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,**

**Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas**

**Tahun 2021-2025**




*Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2026*
*Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2026*

2.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 masih menunjukkan karakteristik ekonomi daerah berbasis sumber daya alam dengan dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penggerak utama perekonomian. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada sektor primer, terutama subsektor perkebunan dan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025 yang menjadi gambaran awal kondisi ekonomi tahun 2026, perekonomian Kabupaten Padang Lawas memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar sekitar Rp20,56 triliun. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 54,63 persen, kemudian diikuti oleh industri pengolahan sebesar 16,03 persen dan konstruksi sebesar 13,25 persen. Ketiga sektor tersebut menjadi penopang utama pembentukan nilai

tambah ekonomi daerah.

Selain itu, sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa-jasa lainnya mulai menunjukkan perkembangan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan relatif tinggi, yang menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan distribusi barang dan jasa dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Struktur ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 diarahkan tidak hanya mempertahankan kekuatan sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah, tetapi juga mempercepat transformasi menuju ekonomi yang lebih beragam, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

**Tabel 2.4**

**PDRB Laju Pertumbuhan Atas Harga Konstan Wilayah Pantai Barat Tahun 2021-2025**

| No | Kabupaten / Kota | Pertumbuhan Ekonomi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Kota Padangsidimpuan | 2,75 | 4,77 | 5,09 | 5,01 | 4,82 |
| 2 | Kabupaten Padang Lawas | 3,83 | 4,61 | 5,14 | 5,02 | 4,19 |
| 3 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 3,24 | 4,78 | 5,11 | 5,12 | 4,39 |
| 4 | Kabupaten Mandailing Natal | 3,2 | 4,34 | 4,93 | 4,83 | 4,38 |
| 5 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 3,26 | 4,12 | 4,92 | 4,99 | 4,27 |
| 6 | Kota Sibolga | 2,1 | 4,15 | 4,2 | 3,92 | 3,03 |
| 7 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 2,56 | 4,18 | 4,23 | 4,15 | 3,25 |
| **Rata-rata** | | 2,99 | 4,42 | 4,8 | 4,72 | 4,04 |

*Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2026*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas, ekonomi Kabupaten Padang Lawas tumbuh sebesar 4,19 persen pada tahun 2025, menurun dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang mencapai 5,02 persen. Dimana

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 berada pada tingkat kelima setelah Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu pemerintah kabupaten padang lawas perlu melakukan transformasi ekonomi dari yang berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi juga dengan Dengan kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, Kabupaten Padang Lawas memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

#### 2.2.2.1 Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Inflasi mencerminkan perubahan tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, sehingga pengendaliannya sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tahun 2026 Kabupaten Padang Lawas menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga kelompok bahan makanan, khususnya komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, daging, dan komoditas hortikultura lainnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi, distribusi, serta faktor cuaca. Sebagai daerah dengan karakter ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian, perubahan musim dan gangguan produksi dapat memberikan pengaruh terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Dari sisi eksternal, perkembangan harga energi, biaya transportasi, serta perubahan harga komoditas global juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi tingkat inflasi daerah. Kenaikan biaya distribusi dan harga input produksi berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pasokan dari luar wilayah Kabupaten Padang Lawas. Secara keseluruhan, kondisi inflasi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 diproyeksikan terkendali dengan kisaran yang sejalan dengan sasaran inflasi nasional, meskipun tetap terdapat risiko tekanan harga dari komoditas pangan dan energi. Stabilitas harga menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Padang Lawas bukan merupakan salah satu kota tempat survei inflasi. Inflasi di Kabupaten Padang Lawas mengacu pada Kota Padangsidimpuan seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**

**Laju Inflasi Kota Padangsidimpuan**

**Tahun 2021-2025**

| Kelompok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laju Inflasi | 0,48 | 4,46 | 4,46 | 2,46 | 5,46 |

*Sumber : Padangsidimpuan Dalam Angka, Tahun 2026*

### 2.2.2.2 Gini Ratio

Gini Ratio merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dari aspek pemerataan. Semakin rendah nilai Gini Ratio, maka semakin merata distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Sebaliknya, nilai Gini Ratio yang semakin tinggi menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang lebih besar antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan kebijakan pemerataan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu 2021 -2025 termasuk dalam kategori ketimpangan yang merata. Gini ratio Kabupaten Padang Lawas yang terkecil terdapat pada tahun 2025 yakni sebesar 0,192 poin, sedangkan yang tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 0,252 poin. Sementara gini ratio Provinsi Sumatera Utara gini ratio yang terkecil terjadi pada tahun 2025 yaitu sebesar 0,295 poin sedangkan untuk yang tertinggi terdapat di tahun 2021 yaitu sebesar 0,314 poin. Ketimpangan tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Padang Lawas masih dalam tingkat kesenjangan yang baik. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel perbandingan Gini Rasio Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.6**
**Gini Rasio Kabupaten Padang Lawas**
**dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2025**

| No | Tahun | Kabupaten Padang Lawas | Provinsi Sumatera Utara |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 0,252 | 0,314 |
| 2 | 2022 | 0,227 | 0,312 |
| 3 | 2023 | 0,225 | 0,309 |
| 4 | 2024 | 0,224 | 0,306 |
| 5 | 2025 | 0,192 | 0,295 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2026*

Sedangkan jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat Tahun 2025 Gini Rasio Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 2 (dua) dengan nilai sebesar 0,192 poin setelah Kabupaten

Tapanuli Selatan dengan nilai 0,179 poin Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit gini rasio dari daerah semakin bagus, yang artinya tingkat pemerataan dan kesenjangan lebih baik.

**Tabel 2.7**

**Gini Ratio Wilayah Pantai Barat 2021-2025**

| No | Kab/Kota | Gini Ratio (Poin) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Kota Padangsidimpuan | 0,317 | 0,275 | 0,267 | 0,296 | 0,297 |
| 2 | Kabupaten Padang Lawas | 0,252 | 0,227 | 0,225 | 0,224 | 0.192 |
| 3 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 0,256 | 0,209 | 0,219 | 0,206 | 0,179 |
| 4 | Kabupaten Mandailing Natal | 0,24 | 0,244 | 0,249 | 0,25 | 0,242 |
| 5 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 0,255 | 0,245 | 0,241 | 0,223 | 0,205 |
| 6 | Kota Sibolga | 0,276 | 0,346 | 0,246 | 0,313 | 0,314 |
| 7 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 0,292 | 0,233 | 0,241 | 0,234 | 0,251 |
| | Rata-rata | **0,11** | **0,254** | **0,241** | **0,249** | **0,212** |

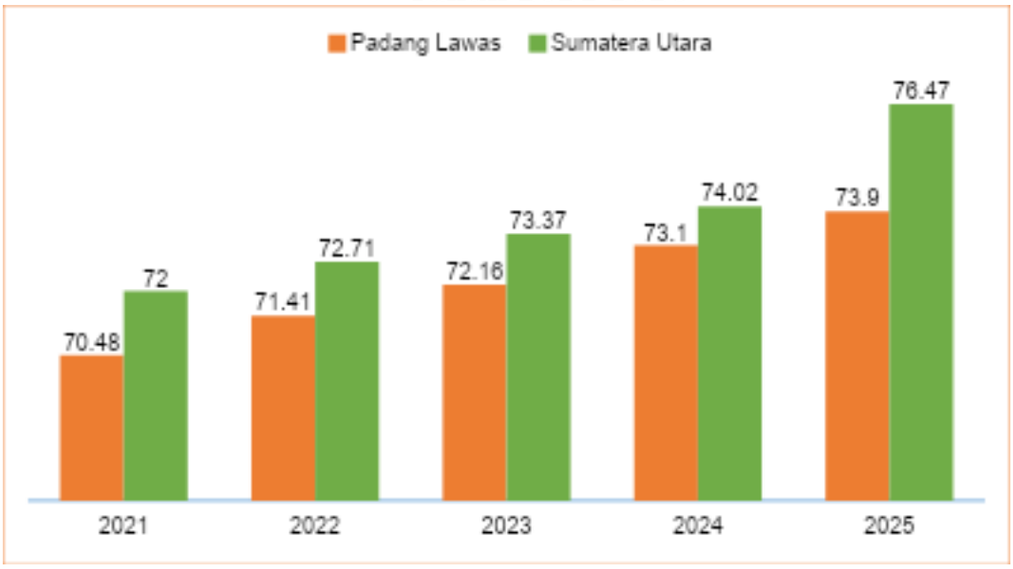
*Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Tahun 2026*

### 2.2.2.3 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial bertujuan untuk menilai sejauh mana pembangunan memberikan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada indikator-indikator sosial yang mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam analisis kesejahteraan sosial Kabupaten Padang Lawas meliputi, Kemiskinan, Ketenagakerjaan, Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio), Inflasi. Fokus ini dapat juga dilihat melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 70,48 hingga tahun 2025 menjadi sebesar 73,90. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut.

**Gambar 2.3**
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia**
**Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara**
**Tahun 2021-2025**




*Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2026*
*Sumatera Utara Dalam Angka, tahun 2026*

### 2.2.2.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah, baik di tingkat nasional maupun regional. Kondisi kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam proses pembangunan daerah.

Kabupaten Padang Lawas sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara juga menghadapi tantangan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Meskipun perekonomian daerah mengalami pertumbuhan dan berbagai program pembangunan telah dilaksanakan, pengurangan kemiskinan tetap menjadi perhatian penting agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami perubahan setiap tahunnya, berikut adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas.

**Tabel 2.8**
**Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin**
**Kabupaten padang Lawas Tahun 2021-2025**

| NO. | Wilayah | Jumlah (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah |
| 1 | Kabupaten Padang Lawas | 8,69 | 25,78 | 8,05 | 24,45 | 7,89 | 24,51 | 7,87 | 24,96 | 7,32 | 23,69 |

*Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2026*

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan dari 8,69 persen pada tahun 2021 menjadi 7,32 persen pada tahun 2025, Persentase penurunan ini juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2021 sebesar 25,78 ribu jiwa menurun menjadi 22,69 ribu jiwa pada tahun 2025. Penurunan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas harus terus dioptimalkan guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1,44 Poin dan terendah pada tahun 2025 sebesar 0,75 poin. Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,42 poin dan terendah tahun 2025 sebesar 0,14 poin. Hal ini dapat di lihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel. 2.9**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021-2025

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | 1,33 | 0,93 | 1,44 | 1,12 | 0,75 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan | 0,34 | 0,17 | 0,42 | 0,3 | 0,14 |

*Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2025*

**Tabel. 2.10**

**Kemiskinan Wilayah Pantai Barat Tahun 2021-2025**

| No | Kab/Kota | Kemiskinan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah (ribu orang) | | | | | Persen | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Kota PadangSidimpuan | 17,28 | 16,03 | 15,94 | 14,88 | 13,57 | 7,53 | 6,89 | 6,85 | 6,23 | 5,61 |
| 2 | Kab. Padang Lawas | 25,78 | 24,45 | 24,51 | 24,96 | 23,69 | 8,69 | 8,05 | 7,89 | 7,87 | 7,32 |
| 3 | Kab. Tapsel | 25,01 | 23,05 | 20,02 | 19,9 | 17,77 | 8,80 | 8,07 | 7,01 | 6,92 | 6,16 |
| 4 | Kab. Madina | 43,24 | 40,98 | 40,7 | 40.56 | 37,16 | 9,49 | 8,92 | 8,86 | 8,69 | 7,91 |
| 5 | Kab. Paluta | 28,37 | 26,09 | 25,65 | 24.47 | 24,8 | 9,92 | 8,94 | 8,79 | 8,97 | 8,04 |
| 6 | Kota . Sibolga | 10,8 | 10,05 | 10,01 | 11.36 | 9,02 | 12,33 | 11,47 | 11,42 | 11,39 | 10,28 |
| 7 | Kab. Tapteng | 49,95 | 47,07 | 46,22 | 49,21 | 46,79 | 12,67 | 11,71 | 11,5 | 11,8 | 11,03 |
| | **Rata-rata** | **28,63** | **26,82** | **26,15** | **15,56** | **24,69** | **9,91** | **9,15** | **8,9** | **8,84** | **8,05** |

*Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2026*

Jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 3 terendah dengan persentase 7,32 persen. Dengan begitu dapat di asumsikan Pemerintah Kabupaten berusaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di daerah Padang Lawas dengan menerapkan dan menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dan berpengaruh langsung menurunkan kemiskinan.

2.2.2.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan ketersediaan tenaga kerja pada suatu daerah, baik yang sedang bekerja atau pun yang sedang mencari kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Padang Lawas menunjukkan tren positif, meningkat dari 75,23% pada tahun 2021 menjadi 78,89% pada tahun 2025. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan signifikan pada pasokan (supply) tenaga kerja daerah yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas guna mendukung percepatan pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui program pelatihan serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan industri saat ini maupun masa depan. Sedangkan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari 69,10 Persen pada tahun 2021 menjadi 73,82 pada tahun 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah penduduk penganggur terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah pada periode tertentu. Kenaikan angka pengangguran secara langsung berpotensi menurunkan produktivitas daerah secara agregat. Di samping itu, tingginya tingkat pengangguran juga memberikan dampak rambatan (multiplier effect) negatif terhadap perekonomian makro, khususnya memicu penurunan daya beli masyarakat akibat hilangnya sumber pendapatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat meningkat dari 4,07 persen pada tahun 2021 menjadi 5,90 persen pada tahun 2022, sebelum akhirnya konsisten menurun hingga mencapai 5,03 persen pada tahun 2025. Tren penurunan yang signifikan hingga tahun 2025 ini juga sejalan dengan capaian di tingkat provinsi dan nasional. Kendati demikian, lonjakan TPT yang bertahan di atas 5 persen sejak tahun 2022 mengindikasikan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Padang Lawas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang

Lawas perlu mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi angkatan kerja serta memperluas ketersediaan lapangan kerja.

**Tabel 2.11**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 - 2025 (%)**

| NO | Wilayah | TPAK | | | | | TPT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Kabupaten Padang Lawas | 75,23 | 75,1 | 78,14 | 77,52 | 74,34 | 4,07 | 5,9 | 5,75 | 5,47 | 5,03 |
| 2 | Provinsi Sumatera Utara | 69,10 | 69,53 | 71,06 | 71,36 | 73,82 | 6,33 | 6,16 | 5,89 | 5,6 | 5,32 |

*Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam Angka, Tahun 2026*

*Kabupaen Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2026*

## 2.3 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026 disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar mampu menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal dan hasil pelaksanaan Evaluasi pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan yang tersaji pada bab II. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan, kebutuhan belanja, perubahan asumsi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Oleh karena itu, perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan memiliki keterkaitan yang erat terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam menjaga keberlanjutan pendanaan program prioritas sekaligus mempertahankan keseimbangan struktur APBD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026 berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

serta pengawasan keuangan daerah yang didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

### 2.3.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 12 Nomor 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Perubahan target pendapatan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyesuaian target pendapatan harus didasarkan pada kondisi dan potensi penerimaan yang realistis sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara target dan realisasi pada akhir tahun anggaran. Peningkatan pendapatan daerah akan memberikan tambahan ruang fiskal bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk memperkuat pendanaan program dan kegiatan prioritas. Sebaliknya, apabila terdapat potensi penurunan pendapatan dari target awal, maka diperlukan langkah penyesuaian belanja secara selektif dengan tetap mempertahankan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah antar daerah. Dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 pada KUA sebesar Rp. 1.035.668.481.862,00 APBD sebesar Rp. 1.042.668.481.862,00 sedangkan pada PKUA tahun 2026 sebesar Rp. 1.184.632.477.732,00 dengan selisih KUA dan PKUA sebesar RP. 148.963.995.870,00 dan selisih APBD dan PKUA pada Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 sebanyak Rp. 141.963.995.870,00 dimana dengan realisasi angggaran Pendapatan Daerah pada Triwulan II sebesar Rp. 526.958.474.630,33.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 pada KUA sebesar Rp. 58.153.306.303,00 dan APBD dengan besaran Rp. 58.153.306.303,00 sedangkan pada PRKPD sebesar Rp. 59.099.234.895,87 dan selisih RKPD dan PKUA sebesar RP. 1.445.928.593,00 dan selisih APBD dan PRKPD pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2026

sebanyak Rp 1.445.928.593,00 dimana dengan realisasi pada Pendapatan Asli Daerah Triwulan II sebesar Rp. 29.969.202.791,33. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas masih sangat rendah perlu untuk perubahan dan trobosan baru agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas bisa meningkat.

Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 pada KUA sebesar Rp. 950.610.175.559,00 sedangkan pada APBD sebesar RP. 950.610.175.559,00 dan untuk PKUA sebesar Rp. 1.071.878.242.836,00 selisih antara KUA dengan PRKPD sebesar Rp 121.268.067.277,00 dan selisih antara APBD dan PKUA pada Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 sebanyak Rp. 121.268.067.277,00 dimana dengan realisasi pada Pendapatan Transfer Triwulan II sebesar Rp. 483.791.829.824,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan anggaran transfer di Kabupaten Padang Lawas masih sangat tinggi, berbanding lurus dengan PAD yang sedikit. Dari analisis data tersebut dapat diartikan bahwa dari segi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas masih rendah sehingga mempengaruhi tingkat keuangan dan belanja daerah, dan OPD juga masih terbatas dalam hal penggunaan anggaran.

Realisasi dari penggunaan anggaran dari setiap OPD yang di berikan beban anggaran sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dan pelaksaan realisasi baik program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah sesuai dan berjalan dengan selaras dan tepat sasaran. OPD juga sudah lebih fokus dan mampu menganalisa kemampuan daya anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berjalan dengan searah demi mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan faktor maupun indokator penyebab yang bisa mempengaruhi keberhasilan OPD.

Untuk lebih jelasnya berikut tabel anggaran pendapatan, perubahan pendapatan, dan realisasi pendapatan Triwulan II Kabupaten Padang Lawas tahun2026.

**Tabel 2.12**

**Anggaran Pendapatan, Perubahan Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Triwulan II**
**Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KUA (Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | KUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.035.668.481.862,00** | **1.042.668.481.862,00** | **1.184.632.477.732,00** | **148.963.995.870,00** | **141.963.995.870,00** | **526.958.474.630,33** |
| **4,01** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **58.153.306.303,00** | **58.153.306.303,00** | **59.599.234.896,00** | **1.445.928.593,00** | **1.445.928.593,00** | **29.969.202.791,33** |
| 04.01.01 | Pajak Daerah | 37.637.420.659,00 | 37.637.420.659,00 | 38.242.845.606,00 | 605.424.947,00 | 605.424.947,00 | 13.474.438.235,00 |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah | 4.053.784.132,00 | 4.053.784.132,00 | 4.269.684.132,00 | 215.900.000,00 | 215.900.000,00 | 1.470.872.616,00 |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.958.461.193,00 | 3.958.461.193,00 | 3.561.124.949,00 | -397.336.244,00 | -397.336.244,00 | 3.561.124.949,00 |
| 04.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 12.503.640.319,00 | 12.503.640.319,00 | 13.525.580.209,00 | 1.021.939.890,00 | 1.021.939.890,00 | 11.462.766.991,33 |
| **4,02** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **950.610.175.559,00** | **950.610.175.559,00** | **1.071.878.242.836,00** | **121.268.067.277,00** | **121.268.067.277,00** | **483.791.829.824,00** |
| 04.02.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 924.744.217.000,00 | 924.744.217.000,00 | 1.005.796.803.000,00 | 81.052.586.000,00 | 81.052.586.000,00 | 471.290.149.861,00 |
| 04.02.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 25.865.958.559,00 | 25.865.958.559,00 | 66.081.439.836,00 | 40.215.481.277,00 | 40.215.481.277,00 | 12.501.679.963,00 |
| **4,03** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **26.905.000.000,00** | **33.905.000.000,00** | **53.155.000.000,00** | **26.250.000.000,00** | **19.250.000.000,00** | **13.197.442.015,00** |
| 04.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan | 26.905.000.000,00 | 33.905.000.000,00 | 53.155.000.000,00 | 26.250.000.000,00 | 19.250.000.000,00 | 13.197.442.015,00 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2026*

### 2.3.2 Perubahan Belanja Daerah

Perubahan belanja diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengalokasian anggaran. Penyesuaian belanja tidak semata-mata dilakukan berdasarkan perubahan pagu anggaran, tetapi mempertimbangkan tingkat urgensi, capaian kinerja, manfaat pembangunan, kesiapan pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas, khususnya peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan pelayanan publik, perlu tetap menjadi perhatian dalam penetapan alokasi belanja setelah perubahan.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada Belanja KUA tahun 2026 sebesar Rp. 1.047.668.481.862,00 APBD 2026 sebesar Rp. 1. .069.381.180.862,00 dan Perubahan KUA 2026 sebesar Rp. 1. .230.166.686.303,00 sedangkan selisih pada KUA dan PKUA sebesar Rp. 182.498.204.441,00 dan selisih dari APBD dan PKUA sebesar Rp. 160.785.505.441,00 dengan realisasi Belanja sampai pada Triwulan II sebesar Rp. 403.009.039.532,00.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 difokuskan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi baik secara lokal dan nasional. Perubahan belanja juga dilakukan untuk optimalisasi belanja rutin perangkat daerah serta penyesuain belanja yang tertentu. Kebijakan belanja daerah secara terperinci diarahkan sebagai berikut:

a. Percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas;
    1) Aman, belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung akselerasi dan implementasi pembangunan daerah yang relevan dan tepat;
    2) Sehat, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong percepatan kemandirian pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur;
    3) Berdaya, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong penyaluran belanja sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran;
    4) Tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lainnya; dan
    5) Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk lokal Padang Lawas.
b. Perubahan belanja terdapat pada belanja pegawai, barang dan jasa;
c. Perubahan belanja untuk penggunaan dana tertentu pada anggaran 2026;
d. Perubahan penjabaran menyesuaikan/mengakomodir pada sebelumnya yang sudah ada/murni;

e. Perubahan belanja dengan melakukan beberapa pergesaran anggaran yang sudah ada sebelumnya;
f. Perubahan belanja juga untuk mendukung tingkat keberhasilan Padang Lawas dengan menjalankan SPM OPD; dan
g. Perubahan juga dilakukan dengan mengganti beberapa Program kegiatan OPD.

Dari analisis data tersebut dapat diartikan bahwa dari segi Belanja Operasi pada KUA Padang Lawas Tahun 2026 sebesar Rp. 733.368.117.721,00 sedangkan pada APBD Tahun 2026 Rp. 733.368.117.721,00 dan pada PKUA Tahun 2026 sebesar 816.794.140.987,00 dan selisih antara KUA dengan PKUA sebesar Rp. 83.426.023.266,00 dan selisih antara APBD dengan PKUA Rp., 61.176.485.266,00 Hal ini menunjukkan bahwa belanja operasi Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan pada PKUA bahwa dapat diasumsikan bahwa Kemampuan belanja daerah dalam membiayai daerahnya sedikit dan tingkat penggunaan belanja dalam hal penggunaan anggaran sangat sedikit baik dari segi pengadaan, honorarium maupun hibah dan bantuan sosial.

Sedangkan segi Belanja Modal pada KUA lebih besar yakni sebesar Rp. 60.159.560.096,00 di bandingkan dengan APBD sebesar Rp. 59.622.721.096,00 dan mengalami kenaikan penganggaran pada PKUA sebesar Rp. 151.217.575.471,00 dengan selisih antara KUA dan PKUA sebesar Rp. 91.058.015.375,00 antara APBD dengan PKUA sebesar Rp. 91.594.854.375,00 dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar Rp. 16.936.074.501,00 Sedangkan pada Belanja Tidak Terduga tidak mengalami peningkatan dan penurunan dengan APBD dan PKUA dengan KUA dengan PKUA sebesar Rp. 504.503.800,00 dan antara APBD ke PKUA Rp. 504.503.800,00 dan yang terealisasi sampai Triwulan II sebanyak Rp. 607.196.000,00

Pada Belanja Transfer dengan penganggaran yang di KUA dengan APBD dan pada PKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 tidak mengalami kenaikan dan penurunan sebesar Rp. 7.509.662.000,00.

Realisasi dari penggunaan anggaran dari setiap OPD yang di berikan beban anggaran sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dan pelaksaan realisasi baik program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah sesuai dan berjalan dengan selaras dan tepat sasaran. OPD juga sudah lebih fokus dan mampu menganalisa kemampuan daya anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berjalan dengan searah demi mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan faktor maupun indokator penyebab yang bisa mempengaruhi keberhasilan OPD. Disamping itu semua perubahan dalam wacana tabel di bawah ini sudah dibahas bersama dengan semua OPD bersama dengan kepala daerah dan terkait dengan perubahan RKPD tersebut dalam hal ini disampaikan perubahan

penjabaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam hal ini mengakomodir pada yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Anggaran Belanja, Perubahan Belanja dan Realisasi Belanja Triwulan II Kabupaten Padang Lawas tahun 2026.

**Tabel 2.13**
**Anggaran Belanja, Perubahan Belanja dan Realisasi Belanja Triwulan II**
**Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KUA(Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | KUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| **5** | **BELANJA** | **1.047.668.481.862,00** | **1.069.381.180.862,00** | **1.230.166.686.303,00** | **182.498.204.441,00** | **160.785.505.441,00** | **403.009.039.532,00** |
| **05.01** | **BELANJA OPERASI** | **733.368.117.721,00** | **755.617.655.721,00** | **816.794.140.987,00** | **83.426.023.266,00** | **61.176.485.266,00** | **357.603.337.101,00** |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai | 477.311.364.175,00 | 489.217.394.705,00 | 486.416.417.155,00 | 9.105.052.980,00 | -2.800.977.550,00 | 250.727.199.053,00 |
| 05.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 241.592.224.534,00 | 251.880.732.004,00 | 314.081.163.120,00 | 72.488.938.586,00 | 62.200.431.116,00 | 100.269.702.275,00 |
| 5.01.04 | Belanja Subsidi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05.01.05 | Belanja Hibah | 12.475.768.606,00 | 12.530.768.606,00 | 14.507.800.306,00 | 2.032.031.700,00 | 1.977.031.700,00 | 5.766.485.773,00 |
| 05.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.788.760.406,00 | 1.788.760.406,00 | 1.588.760.406,00 | -200.000.000,00 | -200.000.000,00 | 839.950.000,00 |
| **05.02** | **BELANJA MODAL** | **60.159.560.096,00** | **59.622.721.096,00** | **151.217.575.471,00** | **91.058.015.375,00** | **91.594.854.375,00** | **16.936.074.501,00** |
| 05.02.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.284.397.716,00 | 18.491.747.716,00 | 19.407.101.109,00 | 122.703.393,00 | 915.353.393,00 | 1.396.390.933,00 |
| 05.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.530.000.000,00 | 9.075.000.000,00 | 17.924.234.350,00 | 6.394.234.350,00 | 8.849.234.350,00 | 2.165.734.350,00 |
| 05.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 23.458.695.000,00 | 26.169.506.000,00 | 101.508.843.500,00 | 78.050.148.500,00 | 75.339.337.500,00 | 8.934.573.258,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KUA(Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | KUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| 05.02.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.886.467.380,00 | 5.886.467.380,00 | 7.362.396.512,00 | 1.475.929.132,00 | 1.475.929.132,00 | 4.439.375.960,00 |
| 5.02.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 0 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| **05.03** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.200.000.000,00** | **1.200.000.000,00** | **1.704.503.800,00** | **504.503.800,00** | **504.503.800,0** | **607.196.000,00** |
| 05.03.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.704.503.800,00 | 504.503.800,00 | 504.503.800,0 | 607.196.000,00 |
| **05.04** | **BELANJA TRANSFER** | **252.940.804.045,00** | **252.940.804.045,00** | **260.450.466.045,00** | **7.509.662.000,00** | **7.509.662.000,00** | **27.862.431.930,00** |
| 05.04.01 | Belanja Bagi Hasil | 4.428.737.545,00 | 4.428.737.545,00 | 4.428.737.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 248.512.066.500,00 | 248.512.066.500,00 | 256.021.728.500,00 | 7.509.662.000,00 | 7.509.662.000,00 | 27.862.431.930,00 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026*

### 2.3.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan terutama berkaitan dengan pemanfaatan SiLPA, penerimaan pembiayaan, maupun pengeluaran pembiayaan. Apabila terdapat SiLPA yang dapat digunakan, sumber tersebut dapat memberikan tambahan kapasitas pendanaan bagi program prioritas tanpa harus meningkatkan beban pendapatan pada tahun berjalan. Namun, penggunaannya perlu mempertimbangkan legalitas, peruntukan, kesiapan kegiatan, serta kemampuan pelaksanaan sampai akhir tahun anggaran.

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, pada dokumen RKPD dialokasikan pembiayaan sebesar Rp12.000.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya. Selanjutnya, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026, nilai penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan menjadi Rp 26.712.699.000,00

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan anggaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah, pada Perubahan KUA (P-KUA) Tahun Anggaran 2026, penerimaan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sebesar Rp 46.134.208.571,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 19.421.509.571,00 dibandingkan dengan target pada RKPD, serta meningkat sebesar Rp 46.134.208.570,00 dibandingkan dengan APBD murni sebesar Rp. 26.712.699.000,00. Peningkatan tersebut sepenuhnya berasal dari penyesuaian besaran SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan daerah.

Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, realisasi penerimaan pembiayaan telah mencapai Rp 46.134.208.571,00. Sementara itu, pada komponen Pengeluaran Pembiayaan, baik dalam KUA maupun APBD Tahun Anggaran 2026 belum dialokasikan anggaran sedangkan pada PKUA Tahun

2026 di alokasikan sebesar Rp.600.000.00. Dengan demikian, terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan, termasuk untuk Penyertaan Modal Daerah. sehingga seluruh pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp. 45.534.208.571,00.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Anggaran Pembiayaan, Perubahan Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan Triwulan II Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026.

## Tabel 2.14

## Anggaran Pembiayaan, Perubahan Pembiayaan, dan Realisasi Pembiayaan Triwulan II Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKUA (Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | RKUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **06.01** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **12.000.000.000,00** | **26.712.699.000,00** | **46.134.208.571,00** | **34.134.208.571,00** | **19.421.509.571,00** | 46.134.208.571,00 |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.000.000.000,00 | 26.712.699.000,00 | 46.134.208.571,00 | 34.134.208.571,00 | 19.421.509.571,00 | 46.134.208.571,00 |
| | Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 12.000.000.000,00 | 26.712.699.000,00 | 0,00 | -12.000.000.000,00 | -26.712.699.000,00 | 0,00 |
| | *Dau Kes 2025* | 0,00 | 0,00 | 765.316.721,00 | 765.316.721,00 | 765.316.721,00 | 765.316.721,00 |
| | *Dau PU 2025* | 0,00 | 0,00 | 432.080.489,00 | 432.080.489,00 | 432.080.489,00 | 432.080.489,00 |
| | *Dau Pendidikan 2025* | 0,00 | 0,00 | 1.108.750.323,00 | 1.108.750.323,00 | 1.108.750.323,00 | 1.108.750.323,00 |
| | *Dak Non fisik* | 0,00 | 0,00 | 1.957.336.060,00 | 1.957.336.060,00 | 1.957.336.060,00 | 1.957.336.060,00 |
| | *DAK FISIK* | 0,00 | 0,00 | 5.281.089.957,00 | 5.281.089.957,00 | 5.281.089.957,00 | 5.281.089.957,00 |
| | *HIBAH* | 0,00 | 0,00 | 4.096.497.600,00 | 4.096.497.600,00 | 4.096.497.600,00 | 4.096.497.600,00 |
| | *DAU* | 0,00 | 0,00 | 17.196.965.409,15 | 17.196.965.409,15 | 17.196.965.409,15 | 17.196.965.409,15 |
| | *PBJT 2025* | 0,00 | 0,00 | 4.139.902.129,00 | 4.139.902.129,00 | 4.139.902.129,00 | 4.139.902.129,00 |
| | *DBH PAJAK ROKOK 2025* | 0,00 | 0,00 | 4.039.245.678,81 | 4.039.245.678,81 | 4.039.245.678,81 | 4.039.245.678,81 |
| | *DBH CHT* | 0,00 | 0,00 | 48.124.157,00 | 48.124.157,00 | 48.124.157,00 | 48.124.157,00 |
| | *DBH SAWIT* | 0,00 | 0,00 | 2.935.552.200,00 | 2.935.552.200,00 | 2.935.552.200,00 | 2.935.552.200,00 |
| | *BPJS RSUD* | 0,00 | 0,00 | 2.389.028.847,00 | 2.389.028.847,00 | 2.389.028.847,00 | 2.389.028.847,00 |
| | *Sisa Penghematan Belanja TA 2025* | 0,00 | 0,00 | 1.744.319.000,00 | 1.744.319.000,00 | 1.744.319.000,00 | 1.744.319.000,00 |
| **06.02** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 0,00 | 0,00 | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | 0,00 |
| 06.02.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **12.000.000.000,00** | **26.712.699.000,00** | **45.534.208.571,00** | **33.534.208.571,00** | **18.821.509.571,00** | |

*Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026*

Berikut Struktur Penganggaran Keuangan RKUA, APBD dan PRKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 secara utuh disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.15**
**Struktur Penganggaran dan Selisih Keuangan RKUA, APBD dan PKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKUA (Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | RKUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.035.268.481.862,06** | **1.042.668.481.862,00** | **1.184.132.477.731,87** | **148.863.995.869,81** | **141.463.995.869,87** | **526.958.474.630,33** |
| **4,01** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **57.753.306.303,06** | **58.153.306.303,00** | **59.099.234.895,87** | **1.345.928.592,81** | **945.928.592,87** | **29.969.202.791,33** |
| 04.01.01 | Pajak Daerah | 37.237.420.659,00 | 37.637.420.659,00 | 38.242.845.606,00 | 1.005.424.947,00 | 605.424.947,00 | 13.474.438.235,00 |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah | 4.053.784.132,00 | 4.053.784.132,00 | 4.269.684.132,00 | 215.900.000,00 | 215.900.000,00 | 1.470.872.616,00 |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.958.461.193,00 | 3.958.461.193,00 | 3.561.124.949,00 | -397.336.244,00 | -397.336.244,00 | 3.561.124.949,00 |
| 04.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 12.503.640.319,06 | 12.503.640.319,00 | 13.025.580.208,87 | 521.939.889,81 | 521.939.889,87 | 11.462.766.991,33 |
| **4,02** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **950.610.175.559,00** | **950.610.175.559,00** | **1.071.878.242.836,00** | **121.268.067.277,00** | **121.268.067.277,00** | **483.791.829.824,00** |
| 04.02.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 924.744.217.000,00 | 924.744.217.000,00 | 1.005.796.803.000,00 | 81.052.586.000,00 | 81.052.586.000,00 | 471.290.149.861,00 |
| 04.02.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 25.865.958.559,00 | 25.865.958.559,00 | 66.081.439.836,00 | 40.215.481.277,00 | 40.215.481.277,00 | 12.501.679.963,00 |
| **4,03** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **26.905.000.000,00** | **33.905.000.000,00** | **53.155.000.000,00** | **26.250.000.000,00** | **19.250.000.000,00** | **13.197.442.015,00** |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKUA (Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | RKUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| 04.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 26.905.000.000,00 | 33.905.000.000,00 | 53.155.000.000,00 | 26.250.000.000,00 | 19.250.000.000,00 | 13.197.442.015,00 |
| **5** | **BELANJA** | **1.047.668.481.862,00** | **1.069.381.180.862,00** | **1.230.166.686.303,00** | **182.498.204.441,00** | **160.785.505.441,00** | **403.009.039.532,00** |
| **05.01** | **BELANJA OPERASI** | **733.368.117.721,00** | **755.617.655.721,00** | **816.794.140.987,00** | **83.426.023.266,00** | **61.176.485.266,00** | **357.603.337.101,00** |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai | 477.311.364.175,00 | 489.217.394.705,00 | 486.416.417.155,00 | 9.105.052.980,00 | -2.800.977.550,00 | 250.727.199.053,00 |
| 05.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 241.592.224.534,00 | 251.880.732.004,00 | 314.081.163.120,00 | 72.488.938.586,00 | 62.200.431.116,00 | 100.269.702.275,00 |
| 5.01.04 | Belanja Subsidi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05.01.05 | Belanja Hibah | 12.475.768.606,00 | 12.530.768.606,00 | 14.507.800.306,00 | 2.032.031.700,00 | 1.977.031.700,00 | 5.766.485.773,00 |
| 05.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.788.760.406,00 | 1.788.760.406,00 | 1.588.760.406,00 | -200.000.000,00 | -200.000.000,00 | 839.950.000,00 |
| **05.02** | **BELANJA MODAL** | **60.159.560.096,00** | **59.622.721.096,00** | **151.217.575.471,00** | **91.058.015.375,00** | **91.594.854.375,00** | **16.936.074.501,00** |
| 05.02.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.284.397.716,00 | 18.491.747.716,00 | 19.407.101.109,00 | 122.703.393,00 | 915.353.393,00 | 1.396.390.933,00 |
| 05.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.530.000.000,00 | 9.075.000.000,00 | 17.924.234.350,00 | 6.394.234.350,00 | 8.849.234.350,00 | 2.165.734.350,00 |
| 05.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 23.458.695.000,00 | 26.169.506.000,00 | 101.508.843.500,00 | 78.050.148.500,00 | 75.339.337.500,00 | 8.934.573.258,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.02.05** | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | **5.886.467.380,00** | **5.886.467.380,00** | **7.362.396.512,00** | **1.475.929.132,00** | **1.475.929.132,00** | **4.439.375.960,00** |
| 04.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 26.905.000.000,00 | 33.905.000.000,00 | 53.155.000.000,00 | 26.250.000.000,00 | 19.250.000.000,00 | 13.197.442.015,00 |
| **05.03** | BELANJA TIDAK TERDUGA | **1.200.000.000,00** | **1.200.000.000,00** | **1.704.503.800,00** | **504.503.800,00** | **504.503.800,0** | **607.196.000,00** |
| **05.03.01** | Belanja Tidak Terduga | **1.200.000.000,00** | **1.200.000.000,00** | **1.704.503.800,00** | **504.503.800,00** | **504.503.800,0** | **607.196.000,00** |
| **05.04** | BELANJA TRANSFER | **252.940.804.045,00** | **252.940.804.045,00** | **260.450.466.045,00** | **7.509.662.000,00** | **7.509.662.000,00** | **27.862.431.930,00** |
| **05.04.01** | Belanja Bagi Hasil | **4.428.737.545,00** | **4.428.737.545,00** | **4.428.737.545,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **05.04.02** | Belanja Bantuan Keuangan | **248.512.066.500,00** | **248.512.066.500,00** | **256.021.728.500,00** | **7.509.662.000,00** | **7.509.662.000,00** | **27.862.431.930,00** |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **06.01** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **12.000.000.000,00** | **26.712.699.000,00** | **46.134.208.571,00** | **34.134.208.571,00** | **19.421.509.571,00** | 46.134.208.571,00 |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.000.000.000,00 | 26.712.699.000,00 | 46.134.208.571,00 | 34.134.208.571,00 | 19.421.509.571,00 | 46.134.208.571,00 |
| **06.02** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 0,00 | 0,00 | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | 0,00 |
| 06.02.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **12.000.000.000,00** | **26.712.699.000,00** | **45.534.208.571,00** | **33.534.208.571,00** | **18.821.509.571,00** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **170.083.643.669,33** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026*

Analisis dari Perubahan pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara keseluruhan akan menentukan ruang fiskal Kabupaten Padang Lawas dalam membiayai program prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan perubahan APBD perlu menerapkan prinsip bahwa setiap tambahan kapasitas fiskal diarahkan terutama untuk mendukung program yang memiliki dampak strategis terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila terjadi keterbatasan ruang fiskal, penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan tetap melindungi belanja yang bersifat wajib, pelayanan dasar, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta program yang memiliki tingkat urgensi dan manfaat pembangunan yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan keseimbangan struktur APBD, perubahan anggaran harus tetap memperhatikan keselarasan antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Keseimbangan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan secara nominal antara sumber penerimaan dan kebutuhan pengeluaran, tetapi juga mencerminkan kualitas dan keberlanjutan fiskal daerah. Struktur APBD setelah perubahan perlu memastikan bahwa belanja daerah dapat dibiayai oleh sumber pendanaan yang realistis, kredibel, dan berkelanjutan, serta tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan demikian, perubahan APBD Kabupaten Padang Lawas diharapkan mampu menjaga kesinambungan pendanaan terhadap program-program prioritas sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah. Penyesuaian pendapatan perlu dilakukan secara realistis, belanja diarahkan pada program yang memiliki manfaat dan dampak pembangunan yang lebih besar, sedangkan pembiayaan digunakan secara terukur untuk menjaga keseimbangan APBD. Kebijakan tersebut menjadi penting dalam memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, dampak perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan terhadap pendanaan program prioritas Kabupaten Padang Lawas sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penajaman prioritas dan pengendalian fiskal. Melalui pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil, perubahan APBD tidak hanya berfungsi sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah, tetapi juga sebagai

instrumen untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

Dengan pendekatan tersebut, struktur APBD setelah perubahan diharapkan tetap berada dalam kondisi yang sehat, seimbang, dan berkelanjutan, dengan tetap memberikan ruang yang memadai bagi pembiayaan program prioritas daerah serta menjaga kemampuan fiskal Kabupaten Padang Lawas untuk mendukung pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

# BAB III
# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Sasaran pembangunan dirumuskan sebagai kondisi yang ingin dicapai secara terukur dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Sasaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, prioritas pembangunan disusun dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Penetapan prioritas pembangunan bertujuan untuk memperkuat efektivitas program dan kegiatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan dengan dokumen perencanaan lainnya menjadi fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down). Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu;dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026, Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, amanat Penerapan

Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dan Dokumen Perencanaan Strategis lainnya.

Lebih lanjut, Perwujudan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 difokuskan pada pencapaian target-target pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus tersebut diarahkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing, pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan inovatif, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dari RPJMN Tahun 2025-2029 dengan visi besar yang ingin dicapai yaitu "**Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**". RPJMN menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan kemiskinan dan Sumber daya manusia Berkualitas dengan Pencapaian visi yang diwujudkan dengan 8 (delapan) Misi (Asta Cita) yaitu :

Misi 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Misi 2 Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Misi 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Misi 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi

olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disa5bilitas.

Misi 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Misi 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Misi 7 Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Misi 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dengan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) yaitu :

a) Memberi makan bergizi gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Balita.
b) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
c) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
d) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
e) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
f) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
g) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi

milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

h) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Selain itu telah ditetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas yaitu :

1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5) Pemberantasan kemiskinan
6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya.
15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah

17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Melalui Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 akan mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,6 - 6,2 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,06 - 5,59 %
3. Tingkat Kemiskinan 4,60 - 5,60 %
5. Rasio Gini (nilai) 0,284 - 0,290
6. Indeks Modal Manusia (nilai) 0,55
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK 1,00-2,77 %
8. PDRB per Kapita 83,2 - 85,7 Juta
9. Indek Kualitas Lingkungan Hidup 77,37 %

### 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah RKPD tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2026. Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Visi yang ingin dicapai yaitu **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Kolaborasi,** bermakna Proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara bersama menuju visi bersama;

**SUMUT,** Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

**Berkah,** bermakna Harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak;

**Unggul,** bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global;

**Maju,** bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan;

**Berkelanjutan,** bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkanlah 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win), yaitu :

1) Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja
2) Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup
3) Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani
4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan
5) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan
6) Meningkatkan Peran Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah

Dalam mewujudkan visi Sumatera Utara "Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan" dan mendukung Program Prioritas Nasional untuk pencapaian sasaran utama Trisula Pembangunan maka sasaran utama pembangunan Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**
**Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Sumatera Utara Tahun 2026**

| Indikator Sasaran Pembangunan | Satuan | Baseline 2024 | Target 2026 |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,03 | 5,80-6,20 |
| PDRB Per Kapita | Nilai (Rp. Juta) | 73,57 | 87,6 |
| Kontribusi PDRB Provinsi | Persen | 5,2 | 5,2 |
| Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,19 | 6,75-5,75 |
| Gini Rasio | Poin | 0,306 | 0,301-0,303 |
| Indeks Modal Manusia | Poin | N/A | 0,53-0,55 |
| Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | Persen | N/A | 4,97 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Persen | 73,96 | 77,36 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,6 | 5,14-5,47 |

### 3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

Tujuan pembangunan merupakan arah atau sasaran utama yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan dirumuskankan dengan mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan yang telah dirumuskan akan dijabarkan kedalam sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional maupun provinsi.

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD. Sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, Visi Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas adalah **"BERSAMA MEWUJUDKAN PADANG LAWAS MAJU"**.

Makna dari visi PADANG LAWAS yang MAJU adalah kondisi dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera, damai, dan saling menghormati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, serta kearifan lokal. Kata MAJU dijabarkan sebagai berikut :

**MANDIRI**, bermakna masyarakat Padang Lawas yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola sumber daya lokal dengan baik;

**AMANAH**, bermakna pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab, serta menjaga kepercayaa masyarakat dengan menjalankan tugas sesuai amanat;

**JAYA**, bermakna menghadirkan kejayaan melalui pembangunan ekonomi yang kuat, pengelolaan potensi daerah yang optimal, dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah;

**UNGGUL**, bermakna menjadi daerah yang unggul dalam kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 10 (Sepuluh) misi pembangunan daerah yaitu :

1. **Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan layanan kesehatan**
   Membangun layanan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses masyarakat, kompetensi pendidik yang kuat, proses pembelajaran yang didukung oleh sarana dan prasarana modern, dan manajemen pendidikan yang berorientasi mutu. Membangun layanan kesehatan dengan fasilitas yang terjangkau, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan integrasi teknologi kesehatan guna mempermudah akses layanan.
2. **Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**
   Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang memadukan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, berwawasan ekonomi jangka panjang, dan bermanfaat sosial, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta mengutamakan penghematan dan efisiensi energi dalam setiap tahap perencanaannya.
3. **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan mendorong terwujudnya masyarakat yang religius**
   Membangun masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong harmoni antar umat beragama yang dilandasi sikap toleransi dan saling menghargai, serta mengembangkan fungsi rumah ibadah dan lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan spiritual sekaligus wadah pemberdayaan sosial dan pendidikan bagi masyarakat
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa**
   Membangun pemerintahan yang transparansi danakuntabilitas, mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah, pengembangan

sumber daya manusia aparatur yang kompeten, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

5. **Pembangunan sentra ekonomi rakyat melalui pengembangan UMKM**

   Membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas, memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal, dan beridentitas khas yang mengangkat keunikan daerah sebagai daya tarik dan keunggulan kompetitif.

6. **Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan**

   Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis, memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang, dan efisiensi sumber daya.

7. **Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara merata dan berkeadilan**

   Penyediaan akses jalan dan jembatan yang merata di seluruh wilayah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara adil tanpa diskriminasi

8. **Peningkatan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan**

   Penyediaan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur pendukung irigasi, jalan dam transportasi, serta penataan dan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

9. **Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja**

   Meningkatkan kualitas pencari kerja, aksesibilitas dan pemerataan kesempatan kerja melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem.

10 **Pengembangan destinasi wisata dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal**

   Mengangkat identitas budaya sebagai daya tarik utama, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama

Dari 10 misi yang telah ditentukan tersebut akan dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran yang ingin di raih. Tujuan dan sasaran ini akan berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan seluruh urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, guna mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perda

RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029, capaian keberhasilan setiap misi dapat dievaluasi melalui indikator kinerja sasaran yang disertai target pencapaian yang terukur. Adapun tujuan dan sasaran dari visi, misi Bupati dan wakil bupati pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 yaitu :

**Tabel. 3.2**
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pada Perubahan RKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| No | Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator | Realisasi 2025 | Target 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKUA | P KUA |
| 1 | Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | | | | | | |
| | | 1.1 | Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,24 | 14,28 | 14,28 |
| | | | | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 100 | 9,70 | 9.70 |
| | | 1.1.1 | Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah | Literasi SD (Poin) | 61,02 | 64,15 | 64,15 |
| | | | | Literasi SMP (Poin) | 49,9 | 59,88 | 59,88 |
| | | | | Numerasi SD (Poin) | 64,29 | 61,59 | 61,59 |
| | | | | Numerasi SMP (Poin) | 51,6 | 58,31 | 58,31 |
| | | 1.1.2 | Meningkatnya literasi masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin) | 52,55 | 63.91 | 63.91 |
| | | 1.1.3 | Meningkatnya prestasi olahraga | Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%) | 20 | 72,77 | 72.77 |
| | | 1.2 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Umur Harapan Hidup (Tahun) | 71,87 | 72,33 | 72,33 |
| | | 1.2.1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 71,1 | 73,77 | 73.77 |
| | | | | Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) (%) | 45,67 | 88,40 | 88,40 |
| | | | | Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH) | 133,3 | 109,00 | 109,00 |
| | | | | Prevalensi (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 5,32 | 13,93 | 13,93 |
| 2 | | Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan | | | | | |
| | | 2.1 | Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan resilien terhadap bencana | Indeks Infrastruktur (Poin) | N/A | 70,47 | 70,47 |
| | | 2.1.1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin) | | 53,48 | 53,48 |
| | | 2.1.2 | Terwujudnya daerah yang tangguh bencana | Indeks Risiko Bencana (Poin) | 170,53 | 152,50 | 152,50 |

| No | Misi | | Tujuan/Sasaran | Indikator | Realisasi 2025 | Target 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKUA | P KUA |
| | | 2.1.3 | Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) | 64,56 | 75,47 | 75,47 |
| | | | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 66 | 68,33 | 68,33 |
| | | | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) | 24 | 4,54 | 4,54 |
| | | 2.1.4 | Meningkatnya kualitas jembatan | Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%) | 43,3 | 65,00 | 65,00 |
| | | 2.1.5 | Meningkatnya akses transportasi dari desa ke ibukota kabupaten | Rasio konektivitas (%) | 20 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | | | Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | | | | |
| | 3.1 | | Tersedianya Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Indeks Infrastruktur (Poin) | N/A | 70,47 | 70,47 |
| | | 3.1.1 | Meningkatnya pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik (Poin) | 2,54 | 4,24 | 4,24 |
| 4 | | | Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Religius dan Harmonis | | | | |
| | 4.1 | | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib | Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin) | N/A | 70,24 | 70,24 |
| | | 4.1.1 | Terwujudnya keluarga yang berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga (Poin) | 62,9 | 61,10 | 63.00 |
| | | 4.1.2 | Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak | Indeks Ketimpangan Gender (Poin) | 0,855 | 0,720 | 0,720 |
| | | | | Indeks Perlindungan Anak (Poin) | 71,82 | 74,00 | 74,00 |
| | | 4.1.3 | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin) | 81,36 | 81,91 | 81,91 |
| | | 4.1.4 | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmoni | Indeks Harmoni Indonesia (Poin) | 56 | 53,48 | 53,48 |
| 5 | | | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa | | | | |
| | 5.1 | | Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) | 63,83 | 62,00 | 62,00 |
| | | 5.1.1 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Pelayanan Publik (Poin) | 2,54 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) | 88,07 | 96,36 | 89,24 |

| No | Misi | | Tujuan/Sasaran | Indikator | Realisasi 2025 | Target 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKUA | P KUA |
| | | 5.1.2 | Terwujudnya layanan publik berbasis digital | Indeks SPBE (Poin) | 2,26 | 2,48 | 2,48 |
| | | 5.1.3 | Meningkatnya tata kelola arsip | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah (Poin) | 14,69 | 40,00 | 40,00 |
| | | 5.1.4 | Meningkatnya profesionalitas ASN | Indeks Profesionalitas ASN (Poin) | 77 | 73,00 | 73,00 |
| | | 5.1.5 | Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level) | | 3,00 | 3,00 |
| | | 5.1.6 | Meningkatya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin) | N/A | 71,89 | 71,89 |
| | | 5.1.7 | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel | Opini BPK atas Laporan Keuangan (Level) | WTP | WTP | WTP |
| | | | | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | 4,49 | 4,80 | 4,80 |
| | | 5.1.8 | Meningkatnya peran BUMD | RoA BUMD (%) | N/A | 0,72 | 0,72 |
| 6 | | | Membangun Sentra Ekonomi Rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM | | | | |
| | 6.1 | Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,19 | 5,36-5,65 | 4,20-4,50 |
| | | 6.1.1 | Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian | Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%) | - | 2,50 | 2,9 |
| | | | | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | - | 18,31 | 1.5 |
| | | 6.1.2 | Meningkatnya daya saing industri | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%) | | 17,72-17,86 | 17,72-17,86 |
| | | 6.1.3 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa | Indeks Desa (%) | 60,77 | 53,48 | 53,48 |
| 7 | Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan | | | | | | |
| | 7.1 | Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam | | Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan (%) | | 0,49 | 0,49 |
| | | | | Kontribusi Sub- Sektor Perkebunan (%) | | 40,78 | 40,78 |
| | | 7.1.1 | Meningkatnya nilai tambah hilirisasi produk Perkebunan dan pertambangan | Nilai Tambah Sektor Penggalian dan Pertambangan (Rp Juta) | | 85.574,09 | 85.574,09 |

| No | Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator | Realisasi 2025 | Target 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKUA | P KUA |
| | | | | Nilai Tambah Sub- Sektor Perkebunan (Rp Juta) | | 8.002.462,89 | 8.002.462,89 |
| | | 7.2 | Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 77,46 | 70,35 | 77,46-82,00 |
| | | 7.2.1 | Meningkatnya pengelolaan persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin) | 20 | 19,78 | 19,78 |
| | | 7.2.2 | Menurunnya emisi gas rumah kaca | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton co2 eq) | N/A | 1.148,70 | 1.148,70 |
| 8 | Meningkatkan Produktivitas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan | | | | | | |
| | | 8.1 | Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan (Rp juta) | 125,85 | 156,10 | 156,10 |
| | | 8.1.1 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Pertanian (%) | | 6,78 | 6,78 |
| | | | | Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Peternakan (%) | | 6,36 | 6,36 |
| | | 8.1.2 | Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Perikanan (%) | | 5,88 | 5,88 |
| | | 8.1.3 | Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau | Indeks Ketahanan Pangan (Poin) | 68,89 | 77,20 | 77,20 |
| 9 | Menciptakan Lapangan Kerja dan Pemerataan Kesempatan Kerja | | | | | | |
| | | 9.1 | Menurunnya angka kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin (%) | 7,32 | 7,72-7,61 | 7,32-7,00 |
| | | 9.1.1 | Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif | Persentase PPKS yang tertangani (%) | 79 | 71,89 | 71,89 |
| | | 9.2 | Meningkatnya lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kewirausahaan | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,03 | 5,01 | 5,01 |
| | | 9.2.1 | Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/kapita) | 125,85 | 142,45 | 142,45 |
| | | 9.2.2 | Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Persentase Peningkatan Investasi (%) | 3,5 | 6,60 | 6,60 |
| | | 9.2.3 | Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha | Rasio Kewiarusahaan (%) | 3,74 | 6,16 | 6,16 |

| No | Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator | Realisasi 2025 | Target 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKUA | P KUA |
| 10 | Mengembangkan Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal | | | | | | |
| | 10.1 | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata daerah | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%) | 0,88 | 1,56 | 1,56 |
| | | 10.1.1 | Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif | Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%) | 1,00 | 2,00 | 3.5 |
| | | | | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%) | N/A | 20,60 | 20,60 |
| | | 10.1.2 | Terwujudnya berkebudayaan maju | Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin) | 54,9 | 52,30 | 52,30 |

*Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029*

**Tabel. 3.5**
**Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan**
**Kabupaten Padang Lawas, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara**

| No | Nasional | Tahun 2026 | Provinsi Sumatera Utara | Tahun 2026 | Kabupaten Padang Lawas | Perubahan Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5,6 -6,2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5,80-6,20 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) %) | 4,20-4,50 |
| 2 | PDRB Per Kapita (Rp Juta) | 83,2-85,7 | PDRB per Kapita (Rp juta) | 87,6 | PDRB per Kapita (Rp juta) | 75.024,37 |
| 3 | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 5,2 | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 5,2 | Kontribusi PDRB Kab/kota (%) | |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | 4,60-5,60 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,75-5,75 | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,32-7,00 |
| 5 | Rasio Gini | 0,284-0,290 | Rasio Gini | 0,301-0,303 | Rasio Gini | 0.192 |
| 6 | Indeks Modal Manusia | 0,55 | Indeks Modal Manusia | 0,53- 0,55 | Indeks Pembangunan Manusia | 74,30 |
| 7 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 1,00-2,77 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 4,97 | Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq) | 10 |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77,37 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77,36 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77,46-82,00 |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,06-5,59 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,14- 5,47 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,01 |

*Sumber : Bapperida, data diolah*

## 3.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

### 3.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mcncapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intenrvensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis stratcgis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun tema RKP Tahun 2026 yaitu "**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif".**

**Tabel 3.6**
**Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029**

| No | Prioritas Nasional | Kegiatan Prioritas Utama |
|---|---|---|
| 1 | **PN 1.** Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Indusri (BEJO'S) |
| 2 | **PN2.** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Transformasi Tata Kelola lndustri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to lnvest* |
| | | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah |
| | | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan |
| | | Pengembangan Kawasan S€ntra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan |
| | | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya |
| | | Pcngembangan Pangan Akuatik *(Blue Food)* |
| | | Pengembangan Pangan Hewani |
| | | Pengembangan Pangan lokal dan Nabati |
| | | Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan |
| | | Peningkatan Penyediaan Energi |
| | | Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi |
| | | Penguatan lmplementasi Transisi Energi Berkeadilan |
| | | Konservasi Sumber Daya Air |
| | | Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir |
| | | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS |
| | | Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa |
| | | Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital |
| | | Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya |
| | | Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan |
| | | Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik |
| | | Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau |
| | | Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut |
| | | Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan |
| | | Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR |
| | | Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan hasil laut |
| 3 | **PN3**. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Pembangunan lnfrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya |
| | | Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital |
| | | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta- Prambanan |

| No | Prioritas Nasional | Kegiatan Prioritas Utama |
|---|---|---|
| | | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas lombok-Gili Tramena |
| | | Pcrcepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba |
| | | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo |
| | | Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim |
| | | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi |
| 4 | **PN4.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan genberazi Z), dan penyandang disabilitas | Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini |
| | | Revitelisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas |
| | | Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak sekolah |
| | | Pembangunan dan Penyelengaraan Sekolah Unggul |
| | | Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja |
| | | Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi |
| | | Peningkatan Fungsi lntermediasi dan Layanan Pemanfaatan lptek dan lnovasi |
| | | Penurunan Kematian lbu dan Anak |
| | | Pencegahan dan Penurunan Stunting |
| | | Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis |
| | | Penuntasan TBC |
| | | Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita |
| | | Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi |
| | | Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis |
| | | Investasi pelayanan kesehatan primer |
| | | Pembangunan RS lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses |
| | | Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan |
| | | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya |
| | | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi |
| | | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga |
| 5 | **PN5.** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Pengembangan Hilirisasi Nikel |
| | | Pengembangan Hilirisasi Tembaga |
| | | Pengembangan Hilirisasi Bauksit |
| | | Pengembangan Hilirisasi Timah |
| | | Pengembangan Hilirisasi Kelapa sawit |
| | | Pengembangan Hilirisasi Kelapa |
| | | Pengembangan Hilirisasi Rumput laut |
| | | Pengembangan Industri Kimia |

| No | Prioritas Nasional | Kegiatan Prioritas Utama |
|---|---|---|
| | | Pembangunan Industri Semikonduktor |
| | | Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil |
| | | Penguatan Industri logam Dasar, Besi dan Baja |
| | | Pengembangan Industri Dirgantara |
| | | Pengembangan KEK Sei Mangkei |
| | | Pengembangan KIT Batang |
| | | Pengembangan KI Weda Bay |
| 6 | **PN6.** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan |
| | | Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif |
| | | Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif |
| | | Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara |
| | | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU |
| | | Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa |
| 7 | **PN7.** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
| | | Peningkatan Kesejahteraan ASN mclalui Penerapan Konsep Total Reuard Berbasis Kinerja ASN |
| | | Transformasi Digital layanan Publik Prioritas |
| | | Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan |
| | | Intensifikasi Pcnerimaan Negara Bukan Pajak |
| 8 | **PN8.** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Penguatan krakter dan Jati Diri Bangsa |
| | | Pemanfaatan Khzanah Budaya dan Pengembangan kawasan Pemajuan Kebudayaan |
| | | Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut |

### 3.2.2 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2026

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Sumatera Utara Tahun 2026 berpedoman pada Visi Misi serta Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah maka tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 yaitu: "Merajut Kolaborasi Untuk Mewujudkan Sumut Berkah Dan Indonesia Maju" Dalam mewujudkan Visi Sumatera Utara 2025-2029 diwujudkan melalui 5 (lima) Misi (Pilar Pembangunan) yang merupakan **Prioritas Unggulan** Provinsi.

Misi 1 **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender

Misi 2 **Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah**

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global

Misi 3 **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum

Misi 4 **Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan**

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah

Misi 5 **Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh**

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 17 (tujuh belas) prioritas pembangunan yaitu :

1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.
2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi.
3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.
4. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan PemberdayaanMasyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran
5. Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah.
6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.
7. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal
8. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)
9. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.
12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.
13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.

14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.
15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.
16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.
17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib

### 3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

Program prioritas adalah program utama yang dipilih sebagai fokus utama dalam suatu periode perencanaan untuk mencapai target pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan. Program ini diprioritaskan karena memiliki dampak strategis, mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional atau daerah, serta menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Penetapan program prioritas mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, urgensi, serta potensi hasil yang akan dicapai. Tahun 2026 ini Kabupaten Padang Lawas memiliki tema **pembangunan "Merajut Kolaborasi untuk Mewujudkan Padang Lawas MAJU (Mandiri, Amanah, Jaya, Unggul)".** Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2026 difokuskan pada Pembangunan Dasar yakni : meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah unggulan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, meningkatkan akses masyarakat terkategori miskin pada pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menguatkan sistem pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kualitas infrastruktur.

Untuk me0ncapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029, pemerintah daerah Padang Lawas menuangkan ke dalam 17 (Tujuh belas) prioritas pembangunan yaitu :

1) Peningkatan Kualitas Pendidikan
2) Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata
3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur
4) Peningkatan Ketahanan Daerah
5) Pembangunan Saran dan Prasarana Pemerintah
6) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
7) Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
8) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

9) Peningkatan Ekonomi Rakyat
10) Penggalian Potensi Sumber Daya Alam
11) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
12) Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
13) Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
14) Penurunan Kemiskinan
15) Peningkatan Kesempatan Kerja
16) Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya
17) Peningkatan Kemandirian Daerah

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan prioritas yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, karena berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan makro dan indikator kinerja utama daerah. Adapun kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Padang Lawas dari setiap Program Prioritas yaitu :

1. **Peningkatan Kualitas Pendidikan**

   dengan Kegiatan strategis:

   a. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahun 2026
   a. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP sesuai standar pendidikan nasional;
   b. Pemenuhan distribusi guru dan peningkatan kualitas guru;

2. **Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata**

   dengan Kegiatan strategis:

   a. Penguatan program UHC;
   b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan ke setiap Puskesmas;
   c. Gerakan massif untuk sosialisasi masyarakat hidup sehat

3. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur**

   dengan Kegiatan strategis:

   a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
   b. Peningkatan akses rumah layak huni melalui bedah rumah;
   c. Peningkatan akses air minum aman;
   d. Peningkatan akses sanitasi aman;
   e. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung (konektivitas) antar Desa dan antar Kecamatan.

**4. Peningkatan Ketahanan Daerah**

dengan Kegiatan strategis:

a. Pemetaan desa rawan bencana;

b. Pembentukan desa tangguh bencana dan budaya sadar bencana bagi masyarakat.

**5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah**

a. Pengembangan Pusat Pemerintahan Terpadu

**6. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama**

a. Optimalisasi peran FKUB dan para pemuka adat dalam menjaga kerukunan umat.

**7. Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender**

a. Peguatan regulasi dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak;

b. Edukasi parenting sebelum pernikahan.

**8. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah**

a. Peningkatan kualitas SDM ASN untuk penyelenggara pelayanan publik;

b. Optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online);

c. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

**9. Peningkatan Ekonomi Rakyat**

a. Pembangunan Pusat Kuliner dan pusat UKM di Lapangan Merdeka

b. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;

c. Pemetaan dan pengembangan produk-produk unggulan Daerah.

d. Peningkatan kemandirian desa melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih

**10. Penggalian Potensi Sumber Daya Alam**

a. Pengembangan Tanaman Hortikultura

**11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

a. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pengolahan Sampah (Circular Economy);

b. Peningkatan layanan persampahan.

**12. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan**

a. Pemberian bantuan bibit unggul dan alat-alat mesin pertanian;

b. Pemberian bantuan benih unggul untuk budidaya perikanan;

**13. Penataan dan Peningkatan ProduktivitasPerkebunan**

a. Penertiban administrasi Perizinan perkebunan

b. Penyediaan bantuan bibit unggul perkebunan

**14. Program Penurunan Kemiskinan**

a. Pemetaan keluarga miskin/rentan menurut desa/kelurahan;

b. Pemberian bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin/rentan;

c. Peningkatan jaminan sosial kepada keluarga miskin;

**15. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

a. Menyusun potensi dan peluang investasi melalui pengembangan situs dan cagar budaya;

**16. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya**

a. Peningkatan daya tarik destinasi wisata melalui pengembangan situs dan cagar budaya;

b. Pagelaran event budaya dengan kalender event.

**17. Peningkatan Kemandirian Daerah**

a. Optimalisasi perangkat daerah untuk penerimaan daerah;

b. Penentuan target pendapatan berdasarkan potensi melalui kajian sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah;

c. Pemanfaatan aset-aset yang belum produktif;

d. Pendirian dan pengembangan BUMD sebagai sumber PAD

**Tabel 3.7**
**Penyelarasan program prioritas Kabupaten Padang Lawas dengan Program Prioritas Nasional**

| NO | Program Prioritas Nasional | NO | Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mencapai swasembada pangan, energi, dan air | 12 | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan |
| 2 | Penyempurnaan sistem penerimaan Negara | 8 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah |
| | | 17 | Peningkatan Kemandirian Daerah |
| 3 | Reformasi politik, hukum, dan birokrasi | 8 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah |
| 4 | Pencegahan dan pemberantasan korupsi | 8 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah |
| 5 | Pemberantasan kemiskinan | 14 | Penurunan Kemiskinan |
| 6 | Pencegahan dan pemberantasan narkoba | | |
| 7 | Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat | 2 | Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata |
| 8 | Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi | 1 | Peningkatan Kualitas Pendidikan |

| NO | Program Prioritas Nasional | NO | Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas |
|---|---|---|---|
| 9 | Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif | | |
| 10 | Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas | 7 | Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender |
| 11 | Menjamin pelestarian lingkungan hidup | 11 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup |
| 12 | Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani | 12 | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan |
| | | 13 | Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan |
| 13 | Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan | 3 | Peningkatan Kualitas Infrastruktur |
| | | 12 | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan |
| 14 | Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya. | 3 | Peningkatan Kualitas Infrastruktur |
| | | 4 | Peningkatan Ketahanan Daerah |
| | | 5 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan |
| | | 9 | Peningkatan Ekonomi Rakyat |
| | | 14 | Penurunan Kemiskinan |
| | | 15 | Peningkatan Kesempatan Kerja |
| | | 16 | Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya |
| 15 | Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi | 9 | Peningkatan Ekonomi Rakyat |
| | | 10 | Penggalian Potensi Sumber Daya Alam |
| | | 13 | Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan |
| | | 15 | Peningkatan Kesempatan Kerja |
| 16 | Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah | 6 | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama |
| 17 | Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga | 6 | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama |
| | | 16 | Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya |

**Tabel 3.8**
**Penyelarasan Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara**

| NO | Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara | NO | Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal. | 1 | Peningkatan Kualitas Pendidikan |
| | | 15 | Peningkatan Kesempatan Kerja |

| NO | Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara | NO | Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas |
|---|---|---|---|
| 2 | Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi. | 7 | Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender |
| 3 | Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu. | 2 | Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata |
| 4 | Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran | 8 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah |
| | | 17 | Peningkatan Kemandirian Daerah |
| 5 | Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah. | 10 | Penggalian Potensi Sumber Daya Alam |
| 6 | Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru. | 12 | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan |
| | | 13 | Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan |
| 7 | Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal | 9 | Peningkatan Ekonomi Rakyat |
| | | 16 | Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya |
| 8 | Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) | 9 | Peningkatan Ekonomi Rakyat |
| 9 | Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi | 14 | Penurunan Kemiskinan |
| 10 | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan | 5 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan |
| | | 8 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah |
| 11 | Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat. | 5 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan |
| | | 8 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah |
| 12 | Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal. | 3 | Peningkatan Kualitas Infrastruktur |
| | | 4 | Peningkatan Ketahanan Daerah |
| | | 5 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan |
| 13 | Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing. | 3 | Peningkatan Kualitas Infrastruktur |
| 14 | Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana. | 10 | Penggalian Potensi Sumber Daya Alam |
| | | 11 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup |
| 15 | Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa. | | |
| 16 | Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun. | 6 | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama |
| | | 16 | Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya |
| 17 | Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib | 6 | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama |

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta tantangan global dan nasional. Strategi pembangunan daerah dirancang untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Strategi mencakup rencana jangka menengah hingga panjang yang mendefinisikan prioritas, sasaran, serta pendekatan yang akan ditempuh untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, sementara arah kebijakan adalah garis besar kebijakan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengalokasian sumber daya. Adapun Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah sebagaimana tercantum di Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dijabarkan sebagai berikut:

## Tabel. 3.9
## Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Padang Lawas

| No | Misi | Tujuan/Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan dan Layanan Kesehatan** | | | | |
| | 1.1 | Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing | | | |
| | | 1.1.1 | Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah | Meningkatkan partisipasi siswa pada sekolah | Percepatan wajib belajar 13 tahun |
| | | | | | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan |
| | | | | | Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat |
| | | | | | Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik serta kesejahteraannya |
| | | | | | Pengembangan kurikulum yang adaptif berbasis teknologi |
| | | | | | Penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi siswa |
| | | 1.1.2 | Meningkatnya literasi masyarakat | Meningkatkan minat baca masyarakat | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan |
| | | | | | Pengembangan perpustakaan digital |
| | | | | | Penyelenggaraan gerakan membaca masyarakat |
| | | | | | Peningkatan ketersediaan pojok baca |
| | | | | | Peningkatan peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung kebiasaan membaca sejak usia dini. |
| | | 1.1.3 | Meningkatnya prestasi olahraga | Meningkatkan daya saing atlet daerah dan prestasi olahrag | Pembinaan atlet berbasis talent scouting dan pelatihan berkelanjutan |
| | | | | | Peningkatan Infrastruktur dan Akses Fasilitas Olahraga |
| | 1.2 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | | | |
| | | 1.2.1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan akses layanan kesehatan | Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan |
| | | | | | Peningkatan akses layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Daerah berstandar nasional |
| | | | | | Peningkatan akreditasi Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas |
| | | | | | Peningkatan kualitas dokter dan tenaga kesehatan |
| | | | | | Pemerataan distribusi dokter dan tenaga kesehatan |
| | | | | | Percepatan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat |
| | | | | | Peningkatan gerakan masyarakat untuk hidup sehat |
| 2 | **Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** | | | | |
| | 2.1 | Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan resilien terhadap bencana | | | |
| | | 2.1.1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas | Meningkatkan kualitas infrastruktur yang adil dan merata | Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum |
| | | | | | Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah |
| | | | | | Peningkatan kualitas sistem drainase |
| | | | | | Penataan dan pembangunan pusat pemerintahan terpadu |
| | | | | | Pembangunan fasilitas publik (Alun-alun kota dan stadion) |
| | | 2.1.2 | Terwujudnya daerah yang tangguh bencana | Meningkatkan infrastruktur kebencanaan | Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana |
| | | | | | Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
| | | | | | Peningkatan desa tangguh bencana |
| | | 2.1.3 | Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni | Peningkatan kualitas kawasan permukiman |
| | | | | | Penurunan kawasan kumuh |
| | | | | | Peningkatan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) umum permukiman |
| | | 2.14 | Meningkatnya kualitas jembatan | Meningkatkan kualitas konstruksi jembatan | Renovasi dan pembangunan jembatan baru sesuai kebutuhan dan standar keselamatan |
| | | | | | Pemeliharaan dan inspeksi rutin untuk menjaga kondisi jembatan |
| | | | | | Pembangunan dan peningkatan jembatan gantung bagi desa yang dilintasi perairan sungai |
| | | | | | Percepatan pembangunan jembatan pada jalan penghubung antara desa dengan kecamatan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2.1.5 | Meningkatnya akses transportasi dari desa ke ibukota kabupaten | Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan | Penerapan teknologi bahan dan konstruksi yang berkualitas tinggi untuk daya tahan jalan. |
| | | | | Peningkatan pemeliharaan rutin dan preventif untuk memperpanjang umur jalan |
| | | | | Peningkatan akses masyarakat terhadap jalan yang aman dan nyaman |
| | | | | Percepatan pembangunan jalan untuk daerah terpencil dan tertinggal |
| | | | | Peningkatan konektivitas transportasi antara desa dengan kecamatan |
| **3** | **Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan** | | | |
| 3.1 | Tersedianya Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | | | |
| | 3.1.1 | Meningkatnya pelayanan publik | Membangun sarana dan prasarana pelayanan publik | Pembangunan infrastruktur pelayanan publik |
| **4** | **Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Religius dan Harmonis** | | | |
| 4.1 | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib | | | |
| | 4.1.1 | Terwujudnya keluarga yang berkualitas | Meningkatkan kualitas keluarga | Peningkatan pemberdayaan dalam mewujudkan keluarga sejahtera |
| | | | | Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan edukasi nilai-nilai toleransi |
| | | | | Pembangunan Islamic Center sebagai wujud peningkatan nilai- nilai religi |
| | 4.1.2 | Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak | Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindugnan anak | Peningkatan akses perempuan dalam pendidikan dan kesehatan |
| | | | | Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah |
| | | | | Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak |
| | | | | Peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak |
| | 4.1.3 | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Meningkatkan keamanan lingkungan | Peningkatan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat |
| | | | | Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah |
| | | | | Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat |
| | 4.1.4 | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmoni | Meningkatkan kohesi sosial melalui pemberdayaan masyarakat | Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesadaran Multikultural |
| | | | | Peningkatan mediasi dan penyelesaian konflik |
| | | | | Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan |
| **5** | **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa** | | | |
| 5.1 | Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel | | | |
| | 5.1.1 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatkan kualitas pelayaan publik | Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
| | | | | Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik |
| | 5.1.2 | Terwujudnya layanan publik berbasis digital | Meningkatkn kualitas sistem pemerntahan berbasis elektronik | Peningkatan integrasi antar perangkat daerah melalui digitalisasi |
| | | | | Peningkatan skill SDM ASN berbasis digital |
| | | | | Peningkaan cyber security dalam situs dan aplikasi pemerintah |
| | 5.1.3 | Meningkatnya tata kelola arsip | Meningkatkan kualitas kearsipan daerah | Penerapan digitalisasi dalam pengarsipan dokumen pentng pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola arsp pada setiap perangkat daerah |
| | 5.1.4 | Meningkatnya profesionalitas ASN | Meningkatkan kualtias ASN yang profesional | Peningkatan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah |
| | | | | Penerapan Sistem Merit |
| | 5.1.5 | Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatan pengawasan pemerintahan | Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah |
| | | | | Peningkatan manajemen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |
| | 5.1.6 | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Meningkatkan perencanaan | Peningkatan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pembangunan yang sinergis | Peningkatan sinergitas perencanaan antar perangkat daerah |
| | 5.1.7 | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel | Meningkatkan sistem kuangan daerah | Pengoptimalisasian pengelolaan aset dan kekayaan daerah |
| | | | | Penerapan sistem digitalisasi dalam penerimaan daerah |
| | 5.1.8 | Meningkatnya peran BUMD | Meningkatkan kapasitas BUMD | Penreapan GCG dalam tata kelola BUMD |
| | | | | Penerapan model bisnis yang adaptif dan responsif |
| **6** | **Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM** | | | |
| 6.1 | Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah | | | |
| | 6.1.1 | Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian | Meningkatkan daya saing produk UMKM | Pengembangan kapasitas dan kualitas produk UMKM melalui pelatihan teknis, standarisasi, HaKI dan sertifikasi produk. |
| | | | | Fasilitasi akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM |
| | | | | Peningkatan penggunaan teknologi digital dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran produk UMKM |
| | | | | Peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan institusi keuangan, universitas dan swasta |
| | | | | Revitalisasi pasar tradisional Sibuhuan |
| | | | | Pengembangan kawasan pasar modern sebagai sentra ekonomi kreatif dan UMKM |
| | 6.1.2 | Meningkatnya daya saing industri | Meningkatkan hilirisasi berbasis agroindustri | Penguatan integrasi antara sektor pertanian dengan industri pengolahan |
| | | | | Penyediaan insentif dan kemudahan regulasi bagi pelaku usaha agroindustri |
| | | | | Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan |
| | 6.1.3 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa | Meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa |
| | | | | Pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang ekonomi di wilayah desa |
| | | | | Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa |
| | | | | Pengembangan BUMDes dan Koperasi untuk mendorong perekonomian desa |
| | | | | Pengembangan potensi lokal desa melalui diversifikasi usaha dan inovasi berbasis kearifan lokal. |
| | | | | Penguatan kelembagaan desa untuk meningkatkan tata kelola pembangunan dan pengelolaan ekonomi secara partisipatif dan berkelanjutan. |
| **7** | **Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan** | | | |
| 7.1 | Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam | | | |
| | 7.1.1 | Meningkatnya nilai tambah hilirisasi produk Perkebunan dan pertambangan | Meningkatkan Kapasitas Pengolahan dan Diversifikasi Produk untuk Meningkatkan Nilai Tambah | Peningkatan investasi pada sektor penggalian dan pertambangan<br>Peningkatan R&D dalam pengolahan hasil tambang dan perkebunan |
| | | | | Peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk pengolaan hasil tambang dan perkebunan |
| 7.2 | Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan | | | |
| | 7.2.1 | Meningkatnya pengelolaan persampahan | Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan | Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan lingkungan hidup |
| | | | | Penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup. |
| | | | | Peningkatan sistem pengelolaan persampahan melalui pembangunan TPA |
| | 7.2.2 | Menurunnya emisi gas rumah kaca | Meningkatkan transisi energi baru terbarukan | Pembangunan berbasis teknologi ramah lingkungan |
| | | | | Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait emisi gas rumah kaca |
| | | | | Pengembangan transportasi rendah emisi |
| | 7.2.3 | Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan | Transisi Energi Berkelanjutan melalui Pengembangan Energi Terbarukan | Pengembangan infrastruktur Energi Baru Terbarukan |
| | | | | Peningkatan akses rumah tangga terhadap EBT |
| **8** | **Meningkatan Produktivitas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan** | | | |
| 8.1 | Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan | | | |
| | 8.1.1 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani | Penyediaan bibit unggul, pupuk, dan teknologi tepat guna bagi petani. |
| | | | | Peningkatan akses pembiayaan petani |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan pasar produk pertanian. |
| | | | | | Pembangunan dan peningkatan irigasi, jalan perkebunan dan pertanian sebagai sarana transportasi angkutan produksi perkebunan dan pertanian |
| | | | | | Penataan dan pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian |
| | | | | | Peningkatan kualitas produksi perkebunan dan pertanian serta modernisasi perkebunan dan pertanian |
| | | 8.1.2 | Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan | Peningkatan hasil budidaya dan pendapatan pembudidaya perikanan | Penyediaan benih unggul dan teknologi budidaya yang efisien. |
| | | | | | Fasilitasi akses pembiayaan dan pelatihan bagi pembudidaya perikanan. |
| | | | | | Pengembangan jaringan pemasaran dan penguatan kelembagaan pembudidaya perikanan. |
| | | 8.1.3 | Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau | Pengelolaan cadangan pangan dan peningkatan produksi pangan berkualitas | Optimalisasi produksi pangan melalui penggunaan teknologi dan bibit unggul. |
| | | | | | Pengelolaan dan distribusi cadangan pangan secara efisien. |
| | | | | | Peningkatan akses pasar dan stabilisasi harga pangan |
| **9** | **Menciptakan Lapangan Kerja dan Pemerataan Kesempatan Kerja** | | | | |
| | 9.1 | Menurunnya angka kemiskinan | | | |
| | | 9.1.1 | Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif | Penguatan program sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkeadilan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan dan marginal. | Pengembangan dan perluasan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan. |
| | | | | | Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. |
| | | | | | Pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi kelompok marjinal. |
| | 9.2 | Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerja, dan kewirausahaan | | | |
| | | 9.2.1 | Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja | Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan perluasan lapangan kerja. | Pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. |
| | | | | | Fasilitasi penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor strategis dan padat karya. |
| | | | | | Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja |
| | | | | | Menjalin kemitraan dan meningkatkan peranan swasta dan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam Padang Lawas |
| | | | | | Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembukaan lapangan kerja baru |
| | | 9.2.2 | Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing | Penyederhanaan regulasi dan perizinan |
| | | | | | Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi untuk sektor prioritas |
| | | | | | Penguatan transparansi dan kepastian hukum |
| | | 9.2.3 | Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha | Meningkatkan Akses dan Dukungan terhadap Kewirausahaan bagi pemuda | Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan |
| | | | | | Fasilitasi pendanaan dan akses kredit untuk pemula |
| | | | | | Pemberian insentif kepada pelaku usaha |
| **10** | **Mengembangkan Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal** | | | | |
| | 10.1 | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata daerah | | | |
| | | 10.1.1 | Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif | Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif | Peningkatan sarana dan prasarana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | | | | Peningkatan promosi destinasi wisata dan produk kreatif di pasar domestik dan internasional. |
| | | | | | Peningkatan keterampilan SDM Pariwisata |
| | | | | | Fasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | 10.1.2 | Terwujudnya berkebudayaan maju | Penguatan pelestarian budaya dan adaptasi budaya | Perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta nilai-nilai tradisional. |
| | | | | | Pengembangan nilai-nilai budaya dalam pendidikan |
| | | | | | Pelestarian budaya melalui pembangunan rumah adat Padang Lawas |
| | | | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional |

## 3.3. Target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

### 3.3.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Lawas

Indikator makro pembangunan merupakan cerminan kondisi umum sosial Indikator Kinerja Makro merupakan ukuran kunci dalam menilai capaian pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator ini mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi hasil (outcome) dari seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya. Indikator Makro digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan serta sebagai dasar perumusan strategi dan program prioritas ke depan. Pemerintah daerah harus terus melakukan penguatan data, monitoring, serta integrasi lintas sektor agar capaian indikator makro benar-benar mencerminkan kondisi riil dan arah pembangunan yang diinginkan.

Melalui pencapaian indikator kinerja makro yang positif dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi dalam jangka panjang. Target indikator makro pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang ingin dicapai dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**
**Perubahan Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan**
**Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| NO | INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN | SATUAN | REALISASI 2025 | TARGET RKPD 2026 | TARGET RPJMD | TARGET PRKPD 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,19 | 5,36 - 5,65 | 5,36 - 5,65 | 4,20-4,50 |
| 2 | PDRB per Kapita | Nilai (Ribu Rp) | 71948,29 | 75,024,37 | 75,024,37 | 75,024,37 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,32 | 7,72-7,61 | 7,72-7,61 | 7,32-7,00 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,03 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| 5 | Rasio Gini | Persen | 0,192 | 0,2108 | 0,2108 | 0,192 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 73,9 | 74,30 | 74,30 | 74,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Intensitas Emisi GRK | Ton Co2eq | N/A | 1,148,70 | 1,148,70 | 1,148,70 |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Poin | 77,46 | 70,35 | 70,35 | 77,46-82,00 |

*Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan target pada indikator makro. Dengan mengacu pada indikator makro, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan angka semata, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Padang Lawas secara merata. Oleh karena itu, indikator makro menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Padang Lawas.

### 3.3.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran. Adapun target Indikator Kinerja utama Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**
**Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| NO | Indikator | Baseline | Target 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | RPJMD | RKPD | P RKPD |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | 73,9 | 73,9 | 74,30 | 74,30 |
| 2 | Indeks Infrastruktur (Poin) | N/A | 70,47 | 70,47 | 70,47 |
| 3 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin) | N/A | 70,24 | 70,24 | 70,24 |
| 4 | Indeks Pelayanan Publik (Poin) | 2,54 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |

| No | Indikator | Baseline | Target 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | RPJMD | RKPD | P RKPD |
| 5 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,19 | 5,36-5,65 | 5,36 - 5,65 | 4,20-4,50 |
| 6 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 7,32 | 7,72-7,61 | 7,72-7,61 | 7,32-7,00 |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 77,46 | 77,46 | 70,35 | 77,46-82,00 |
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,03 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |

*Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029*

### 3.3.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dalam berbagai aspek strategis. IKD disusun untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut cascading yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (impact) sampai paling rendah (output). Adapun capaian dan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan KUA Tahun 2026**

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET KUA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | KUA | P KUA |
| I | **Aspek Geografi dan Demografi** | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan (Poin) | 68,89 | 77,2 | 77,20 |
| 2 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) | 4,69 | 5,2 | 5,20 |
| 3 | Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/kapita) | N/A | 544,22 | 544,22 |
| 4 | Porsi EBT dalam bauran energi (%) | N/A | 6,23 | 6,23 |
| 5 | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | 0,025 | 0,85 | 0,850 |
| 6 | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) | 24 | 26,86 | 26,86 |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 77,46 | 70,35 | 77,46-82,00 |
| 8 | Penurunan Emisi GRK (Ton Co2Eq) | N/A | 1.148,70 | 10 |
| 9 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 66 | 70 | 70,00 |
| 10 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin) | 20 | 19,78 | 19,78 |
| 11 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) | 13,79 | 35,61 | 35,65 |
| 12 | Indeks Risiko Bencana (Poin) | 170,53 | 152,5 | 152,50 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET KUA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | KUA | P KUA |
| 13 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 1,36 | 1,85 | 1,85 |
| **II** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,19 | 5,36-5,65 | 4,20-4,50 |
| 2 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 7,32 | 7,72-7,61 | 7,32-7,00 |
| 3 | PDRB Per Kapita (Rp ribu) | 71.948,29 | 75.024,37 | 75.024,37 |
| 4 | Gini Ratio (Poin) | 0,192 | 0,2108 | 0,192 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,03 | 5,01 | 5,010 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | 73,9 | 74,3 | 74,30 |
| 7 | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,87 | 72,33 | 72,33 |
| 8 | Prevalensi stunting (%) | 5,32 | 13,93 | 13,93 |
| 9 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 5,32 | 73,77 | 73,77 |
| 10 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) | 45,67 | 88,4 | 88,40 |
| 11 | Indeks Pendidikan | 0,71 | 0,74 | 0,74 |
| 12 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) | 9,67 | 9,7 | 9,70 |
| 13 | Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) | 14,24 | 14,28 | 14,28 |
| 14 | Literasi SD (Poin) | 61,02 | 64,15 | 64,15 |
| 15 | Literasi SMP (Poin) | 49,9 | 59,88 | 59,88 |
| 16 | Numerasi SD (Poin) | 64,29 | 61,59 | 61,59 |
| 17 | Numerasi SMP (Poin) | 51,6 | 58,31 | 58,31 |
| 18 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin) | 52,55 | 63,91 | 63,91 |
| 19 | Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 81 | 85,98 | 85,98 |
| 20 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 27,36 | 24,41 | 33,48 |
| 21 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin) | N/A | 70,24 | 70,24 |
| 22 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin) | 54,9 | 52,3 | 52,30 |
| 23 | Indeks Perlindungan Anak (Poin) | 71,82 | 74 | 74,00 |
| 24 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin) | 71,82 | 74 | 74,00 |
| 25 | Indeks Pembangunan Keluarga (Poin) | 62,9 | 61,1 | 63,00 |
| 26 | Indeks Pembangunan Gender (Poin) | 87,35 | 88,18 | 88,18 |
| 27 | Indeks Pemberdayaan Gender (Poin) | 56,85 | 55,78 | 58,00 |
| 28 | Indeks Ketimpangan Gender (Poin) | 0,855 | 0,72 | 0,72 |
| 29 | Indeks Pembangunan Pemuda (Poin) | 55 | 56,87 | 1,48 |
| **III** | **Aspek Daya Saing Daerah** | | | |
| 1 | Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk) | 54,28 | 54,18 | 54,18 |
| 2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 16,03 | 17,72-17,86 | 17,72-17,86 |
| 3 | Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%) | 0,88 | 1,56 | 1,56 |
| 4 | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) | 0,67 | 0,9 | 0,90 |
| 5 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB) | N/A | 0,019 | 0,019 |
| 6 | Total Kredit/PDRB ADHB (%) | N/A | 0,075 | 0,075 |
| 7 | Rasio Kewirausahaan (%) | 3,74 | 6,16 | 6,16 |
| 8 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 78,89 | 78,34 | 78,34 |
| 9 | Indeks Inovasi Daerah (Poin) | 7,3 | 23,19 | 23,19 |
| 10 | Indeks Ekonomi Hijau (Poin) | N/A | 52,06 | N/A |
| 11 | Indeks Ekonomi Biru (Poin) | N/A | 30,45 | N/A |
| 12 | Indeks Masyarakat Digital (Poin) | 36,21 | 53,33 | N/A |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET KUA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | KUA | P KUA |
| 13 | Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%) | N/A | 23,32 | 23,32 |
| 14 | Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%) | N/A | 49,99 | 49,99 |
| 15 | Indeks Infrastruktur (Poin) | N/A | 70,47 | 70,47 |
| 16 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin) | N/A | 53,48 | 53,48 |
| 17 | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%) | 48,01 | 75,47 | 75,47 |
| 18 | Indeks Desa (%) | 60,77 | 53,48 | 53,48 |
| 19 | Persentase Desa Mandiri (%) | 1,32 | 0,66 | 0,66 |
| 20 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | N/A | 0,123 | 0,123 |
| 21 | Inflasi [Kota Padang Sidimpuan] (%) | 5,46 | Mengacu Kota Padangsidempuan | |
| **IV** | **Aspek Pelayanan Umum** | | | |
| **A** | **Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif** | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum (Poin) | 87,76 | 98,5 | 88,80 |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) | 63,83 | 62 | 62,00 |
| 3 | Indeks SPBE (Poin) | 2,26 | 2,48 | 2,48 |
| 4 | Indeks Pelayanan Publik (Poin) | 2,54 | 4,24 | 4,24 |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,07 | 89,24 | 89,24 |
| 6 | Indeks Integritas Nasional (Poin) | N/A | 77,41 | 77,41 |
| **B** | **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial** | | | |
| 1 | Persentase Penegakan Perda (%) | 100 | 100 | 100,00 |
| 2 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin) | 81,36 | 81,91 | 81,91 |
| 3 | Indeks Harmoni Indonesia | 56 | 53,48 | 53 |
| **C** | **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan** | | | |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah (Poin) | 3,21 | 3,35 | 3,35 |

**Tabel 3.13**
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada P.KUA Tahun 2026**

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| **A** | **Pendidikan** | | |
| 1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 40,31 | 62,25 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 97,1 | 100 |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 88,41 | 100 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | 40,31 | 53,45 |
| 5 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | 92,07 | 99,73 |
| 6 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 88,43 | 88,35 |
| 7 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | N/A | 0 |
| 8 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | N/A | 0 |
| 9 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 92,07 | 99,73 |
| 10 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 88,43 | 88,35 |
| 11 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A | 92,07 | 0 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| 12 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B | 88,43 | 0 |
| 13 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan (PAUD) | 76,27 | 97,65 |
| 14 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) | 100 | 100 |
| 15 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) | 100 | 99 |
| 16 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 88,16 | 98 |
| 17 | Angka Putus Sekolah SD/MI (%) | 0,01 | 0,10 |
| 18 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) | 0,01 | 0,20 |
| 19 | Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) | 88,56 | 94,10 |
| 20 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (%) | 54 | 72 |
| 21 | Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%) | 98 | 99 |
| 22 | Rasio guru/murid sekolah SD/MI | 799 | 724 |
| 23 | Rasio guru/murid sekolah SMP/MTs | 982 | 847 |
| 24 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI | 79 | 50 |
| 25 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTS | 98 | 94 |
| 26 | Ruang kelas SD/MI kondisi baik (%) | 43,49 | 83,55 |
| 27 | Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik (%) | 71,71 | 70,00 |
| 28 | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | 43,03 | 60 |
| 29 | Indeks pemerataan guru | N/A | 0 |
| 30 | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan | 43,03 | 90,00 |
| 31 | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui | N/A | 00 |
| 32 | Persentase pengembangan bahasa dan sastra | N/A | 00 |
| **B** | **Kesehatan** | | |
| 1 | Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 KH) | 5,62 | 6,70 |
| 2 | Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH) | 5,62 | 7,43 |
| 3 | Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) | 5,92 | 7,79 |
| 4 | Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH) | 133,3 | 109,00 |
| 5 | Balita Gizi Kurang (%) | 1,93 | 1,86 |
| 6 | Balita Gizi Buruk (%) | 0,25 | 0,49 |
| 7 | Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan | N/A | 60 |
| 8 | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | N/A | 87 |
| 9 | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan | N/A | 55 |
| 10 | Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | N/A | 80,00 |
| **C** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | |
| 1 | Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%) | 18,44 | 19,20 |
| 2 | Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik | 43,3 | 65,00 |
| 3 | Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%) | 50 | 53,00 |
| 4 | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%) | 42 | 48 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| 5 | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | 78 | 79,00 |
| 6 | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas | 43,3 | 45,00 |
| 7 | Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah | 26 | 62,00 |
| 8 | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional | N/A | 10 |
| 9 | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | N/A | 0,00 |
| 10 | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 42 | 48,00 |
| 11 | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik | N/A | 0,00 |
| 12 | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | 62,89 | 65,2 |
| 13 | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | N/A | |
| 14 | Tingkat Kemantapan Jalan | 41,3 | 47 |
| 15 | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | N/A | 0,00 |
| 16 | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah | N/A | 90,00 |
| **D** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | |
| 1 | Persentase Rumah Layak Huni (%) | 72 | 75,00 |
| 2 | Luasan Kawasan Kumuh (%) | 29 | 28,00 |
| 3 | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | 0,5 | 80,00 |
| 4 | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni | N/A | 75,00 |
| 5 | Persentase Luas Kawasan Kumuh+I38 | 50 | 53,00 |
| 6 | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) | 40 | 44,00 |
| **E** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | |
| 1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%) | 100 | 95,00 |
| 2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%) | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan Pelayanan Kebakaran (%) | 90 | 85 |
| 4 | Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (menit) | > 15 | > 15 |
| 5 | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | 53 | 52 |
| 7 | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | 64 | 62 |
| 8 | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya | N/A | 45 |
| 9 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | 100 | 60 |
| 10 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | 100 | 57 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| 11 | Persentase Penanganan Pasca Bencana | 40 | 85 |
| 12 | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | 77 | 74 |
| 13 | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 63 | 57 |
| **F** | **Sosial** | | |
| 1 | Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | 2,2 | 3,48 |
| 2 | Persentase PPKS yang Tertangani (%) | 79 | 71,89 |
| 3 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial | 85 | 90 |
| 4 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | 52,94 | 82 |
| 5 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | 85 | 50 |
| 6 | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | 2 | 64 |
| 7 | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | N/A | 75 |
| 8 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 2,89 | 54 |
| 9 | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 22,38 | 58,5 |
| 10 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 9,9 | 62,7 |
| 11 | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 5 | 68,5 |
| 12 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 2,61 | 54 |
| 13 | Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas | 55,23 | 68 |
| 14 | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia | 51,43 | 57,5 |
| 15 | Indeks Peranan Sosial | N/A | 57 |
| 16 | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 52,61 | 59,85 |
| 17 | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | N/A | 45,15 |
| 18 | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin | 12,57 | 46,2 |
| 19 | Indeks Kebutuhan Dasar | N/A | 31,5 |
| 20 | Indeks Keberdayaan Ekonomi | N/A | 36,75 |
| 21 | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan | 3,13 | 52,5 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| | Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | | |
| 22 | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | 100 | 81,6 |
| 23 | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya | N/A | 71,4 |
| 24 | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | 100 | 76,5 |
| **G** | **Tenaga Kerja** | | |
| 1 | Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 (%) | 15,8 | 9,93 |
| 2 | Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%) | 0,33 | 0,63 |
| 3 | Dokumen Rencana Tenaga Kerja | N/A | 1 |
| 4 | Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya | 16 | 51,5 |
| 5 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | 18 | 80 |
| 6 | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial | 27,36 | 25 |
| **H** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | |
| 1 | TPAK Perempuan (%) | 42,46 | 47 |
| 2 | Kasus KDRT (Kasus) | 1 | 1 |
| 3 | Status Kabupaten Layak Anak (Kategori) | N/A | Pratama |
| 4 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 12,1 | 15 |
| 5 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | 42,46 | 50 |
| 6 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 78,6 | 80 |
| 7 | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | 48,5 | 50 |
| 8 | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan | 52,2 | 55 |
| 9 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | 60 | 69,11 |
| 10 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 | 100 |
| 11 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 71,82 | 74 |
| **I** | **Pangan** | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (Poin) | 91,02 | 89,2 |
| 2 | Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%) | 65 | 66,04 |
| 3 | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | 65 | 66,04 |
| 4 | Skor Pola Pangan Harapan | 91,02 | 89,2 |
| 5 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 8,01 | 27 |
| 6 | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | N/A | 73,5 |
| **J** | **Lingkungan Hidup** | | |
| 1 | Indeks Kualitas Air (Poin) | 70,19 | 69,53 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (Poin) | 86,15 | 83,73 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin) | 72,9 | 72,8 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| 4 | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | 98 | 85 |
| 5 | Persentase RTH | N/A | N/A |
| 6 | Persentase Limbah B3 yang Terkelola | N/A | 0 |
| 7 | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH | 80 | 80 |
| 8 | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | N/A |
| 9 | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya | N/A | 75 |
| 10 | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | N/A | N/A |
| 11 | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | N/A | 100 |
| 12 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | N/A | 19,78 |
| **K** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | |
| 1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%) | 96,96 | 99 |
| 2 | Rasio bayi berakte kelahiran (%) | 93,14 | 95 |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah (%) | 58,68 | 60 |
| 4 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 19,6 | 77 |
| 5 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 0,033 | 60 |
| 6 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 47,24 | 50 |
| 7 | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | 41,08 | 45 |
| **L** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | |
| 1 | Desa Mandiri | 4 | 5 |
| 2 | Desa Maju | 29 | 32,00 |
| 3 | Desa Berkembang | 170 | 173,00 |
| 4 | Desa Tertinggal | 81 | 79,00 |
| 5 | Desa Sangat Tertinggal | 19 | 14,00 |
| 6 | Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 60 | 62,70 |
| 7 | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | 55 | 57,48 |
| 8 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | 50 | 52,25 |
| 9 | Persentase Fasilitasi Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | 40 | 47,03 |
| **M** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | |
| 1 | Total Fertility Rate (Anak Per Wanita) | 2,9 | 2,90 |
| 2 | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Anak Per 1.000 Wanita) | 27,8 | 23,00 |
| 3 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) | 51 | 55 |
| 4 | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | 23,4 | 18,00 |
| 5 | Rasio Akseptor KB (%) | 73 | 84,00 |
| 6 | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | 63,5 | 67,50 |
| **N** | **Perhubungan** | | |
| 1 | Rasio Konektivitas (%) | 20 | 20,00 |
| 2 | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah | 55,02 | 65,00 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| | Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%) | | |
| **O** | **Komunikasi dan Informatika** | | |
| 1 | Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) | 73 | 72,77 |
| 2 | Persentase rumah tangga dengan akses internet (%) | 83,86 | 81,91 |
| 3 | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah | 65 | 63 |
| **P** | **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | |
| 1 | Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%) | - | 2,9 |
| 2 | Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%) | 14 | 2 |
| 3 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | N/A | 1,5 |
| 4 | Persentase Koperasi Aktif (%) | 59,32 | 60,5 |
| 5 | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 5 | 72,45 |
| 6 | Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan | 41 | 67,28 |
| 7 | Persentase Koperasi yang Berkualitas | 5 | 25 |
| 8 | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | 0,7 | 10,5 |
| 9 | Pertumbuhan Wirausaha | 20 | 20,10 |
| 10 | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | N/A | 0,45 |
| **Q** | **Penanaman Modal** | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi (%) | 3,5 | 6,60 |
| 2 | Realisasi PMDN/PMA (Rp Miliar) | 7.847,99 | 906,73 |
| 3 | Jumlah Investor PMDN/PMA (Perusahaan) | 37 | 30,00 |
| 4 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%) | 1,92 | - |
| 5 | Realisasi Total terhadap Target Investasi | 29,25 | 77,25 |
| 6 | Persentase Peningkatan Investor | 54,17 | 100,00 |
| 7 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | 99,72 | 100,00 |
| 8 | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha | 92 | 81,60 |
| 9 | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | 100 | 88,00 |
| **R** | **Kepemudaan dan Olahraga** | | |
| 1 | Persentase Wirausaha Muda (%) | 0,1 | 74,26 |
| 2 | Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%) | 20 | 72,77 |
| 3 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) | 5 | 65,00 |
| 4 | Jumlah atlet berprestasi (Orang) | 25 | 50,00 |
| 5 | Jumlah prestasi olahraga | 5 | 6,00 |
| 6 | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | 40 | 45,00 |
| **S** | **Statistik** | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik (Poin) | N/A | 2,3 |
| 2 | Buku Kabupaten dalam Angka | 100 | Ada |
| 3 | Buku PDRB dalam Angka | 100 | Ada |
| **T** | **Persandian** | | |
| 1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%) | N/A | 24,02 |
| **U** | **Kebudayaan** | | |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kegiatan) | 10 | 10 |
| 2 | Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan (Objek) | 26 | 26 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Objek) | 20 | 20 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Objek) | 26 | 26 |
| 5 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | N/A | 0 |
| 6 | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | N/A | 0 |
| 7 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | N/A | 0 |
| **V** | **Perpustakaan** | | |
| 1 | Indeks Minat Baca (Poin) | 52 | 52,50 |
| 2 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang) | 1.200 | 1,500 |
| 3 | Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%) | 4 | 6,00 |
| 4 | Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional | 82,37 | 83,20 |
| **W** | **Kearsipan** | | |
| 1 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Poin) | 14,69 | 40,00 |
| 2 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | 18,5 | 19,00 |
| 3 | Tingkat Ketersediaan Arsip | 39,9 | 69,01 |
| 4 | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 28,1 | 56,65 |
| 5 | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | N/A | 20,60 |
| **X** | **Pariwisata** | | |
| 1 | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 2500 | 2550 |
| 2 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | 1 | 3,5 |
| 3 | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | N/A | 0 |
| 4 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual | N/A | 0 |
| 5 | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | N/A | 0 |
| **Y** | **Kelautan dan Perikanan** | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) | 0,22 | 0,22 |
| 2 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 3.734,68 | 4.100,00 |
| 3 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 168,75 | 150,40 |
| 4 | Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 20 | 25,00 |
| 5 | Angka Konsumsi Ikan | 29,73 | 29,90 |
| **Z** | **Pertanian** | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%) | 5,3 | 4,30 |
| 2 | Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%) | 43,75 | 40,78 |
| 3 | Kontribusi Sektor Peternakan terhadap | 1,89 | 1,84 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| | PDRB (%) | | |
| 4 | Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (Rp Juta/kapita) | 125,85 | 156,10 |
| 5 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 2 | 2,30 |
| 6 | Peningkatan Produksi Hortikultura | N/A | 0,99 |
| 7 | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | 3% | 6 |
| 8 | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | 70 | 73,50 |
| 9 | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | 50 | 52,50 |
| 10 | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV | N/A | 45,15 |
| 11 | Persentase Penanganan Bencana Pertanian | 71,66 | 68,25 |
| 12 | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian | 60,64 | 57,75 |
| 13 | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan | 44,1 | 42,00 |
| **AA** | **Perdagangan** | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) | 6,22 | 6,35 |
| 2 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%) | 56,67 | 77,78 |
| 3 | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | N/A | 22 |
| 4 | Nilai Ekspor Barang | N/A | 1,4 |
| 5 | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | N/A | 100 |
| 6 | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan | 5,71 | 65 |
| **AB** | **Perindustrian** | | |
| 1 | Proporsi jumlah IKM (%) | 82 | 100 |
| 2 | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | N/A | 84 |
| 3 | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini | 21,05 | 36,05 |
| **AC** | **Perencanaan Pembangunan** | | |
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin) | N/A | 71,89 |
| 2 | Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda | Ada | Ada |
| 3 | Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada | Ada | Ada |
| 4 | Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada | Ada | Ada |
| 5 | Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda | Ada | Ada |
| 6 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 91,97 | Ada |
| 7 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 100 | 10 |
| 8 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 | 100 |
| 9 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 | 100 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| 10 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | 100 | 100 |
| **AD** | **Keuangan** | | |
| 1 | Opini BPK atas Pelaporan Keuangan (Level) | WTP | WTP |
| 2 | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | 4,49 | 4,80 |
| 3 | RoA BUMD (%) | N/A | 0,72 |
| 4 | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | 32 | 10,00 |
| 5 | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | 26,52 | 10,00 |
| 6 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 95 | 30,00 |
| 7 | Persentase Penurunan SILPA | 3,93 | 15,00 |
| 8 | Persentase laporan keuangan tepat waktu | 100 | 100,00 |
| 9 | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | 5 | 100,00 |
| 10 | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | N/A | 74,16 |
| 11 | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital | 100 | 78,28 |
| **AE** | **Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan** | | |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN (Poin) | 77 | 73,00 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%) | 8 | 8,00 |
| 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%) | 8 | 8,00 |
| 4 | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | 100 | 100,00 |
| 5 | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 15 | 72,45 |
| 6 | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | 79 | 76,59 |
| 7 | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | 80 | 77,63 |
| 8 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional | 15 | 83,20 |
| 9 | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan | 85 | 80,85 |
| 10 | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi | 15 | 68,25 |
| 11 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis | 15 | 73,50 |
| **AF** | **Penelitian dan Pengembangan** | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan (%) | 90 | 31,78 |
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%) | 90 | 40,95 |
| 3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%) | 90 | 22,37 |
| 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%) | 90 | 17,23 |
| 5 | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan | N/A | 100 |
| | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam | N/A | 100,00 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | TARGET PKUA 2026 |
|---|---|---|---|
| 6 | Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | | |
| 7 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | N/A | 100,00 |
| 8 | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah | N/A | 100,00 |
| 9 | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | N/A | 100,00 |
| 10 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah | N/A | 100,00 |
| 11 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah | N/A | 100,00 |
| 12 | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah | N/A | 100,00 |
| **AG** | **Pengawasan** | | |
| 1 | Indeks Persepsi Korupsi | 53,7 | 80,00 |
| 2 | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%) | N/A | 100,00 |
| 3 | Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti | 80 | 85,00 |
| 4 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level) | N/A | 3,00 |
| 5 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level) | N/A | 3,00 |
| 6 | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | N/A | 85,00 |
| 7 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | N/A | 3 |
| 8 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | N/A | 3 |
| **AH** | **Sekretariat Daerah** | | |
| 1 | Nilai Evaluasi SAKIP (Poin) | CC | B |
| 2 | Efektivitas Kerjasama Daerah | N/A | 80,34 |
| 3 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | N/A | 2,0 |
| 4 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | N/A | 77,25 |
| 5 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | N/A | 78,80 |
| **AI** | **Pemerintahan Umum** | | |
| 1 | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 40 | 46,2 |
| 2 | Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | N/A | 55,65 |
| 3 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | 100 | 46,20 |
| 4 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | 90 | 90 |
| 5 | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | 76,2 | 100 |

**Tabel 3.14**

**Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara**

| NO | RPJMN 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,68 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 73,93 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 72,33 |
| 2 | Kesehatan Ibu dan Anak: | | Kesehatan Ibu dan Anak: | | | |
| | a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 109 | a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 133,00 | a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 109,00 |
| | b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 17,50 | b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 20-19 | b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 13,93 |
| 3 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 25 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | | | |
| | a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%) | 90,00 | a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%) | 90 | a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%) | 73,77 |
| | b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%) | 90,00 | b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%) | 90 | b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%) | 88,40 |
| 4 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) | 98,70 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) | 98,70 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) | 85,98 |
| 5 | Hasil Pembelajaran: | | Hasil Pembelajaran: | | Hasil Pembelajaran: | |
| | a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>- Literasi membaca<br>- Numerasi | | a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>- Literasi membaca<br>- Numerasi | 12,01-16,01<br>1,5-4,57 | a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>untuk:<br>- Literasi membaca<br>- Numerasi | 64,15<br>61,59 |
| | b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>- Literasi membaca<br>- Numerasi | | b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>- Literasi membaca<br>- Numerasi | 37,37-39,88<br>34,70-39,20 | b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>- Literasi membaca<br>- Numerasi | 59,88<br>58,31 |
| | c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,45 | c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 10,43-10,46 | b) C) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,70 |
| | d) Harapan Lama Sekolah | 13,36 | d) Harapan Lama Sekolah | 13,67-13,69 | c) d) Harapan Lama Sekolah | 14,28 |

| NO | RPJMN 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%) | tl,49 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%) | 11,12-11,30 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%) | 15,63 |
| 7 | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 68,50 | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 72,47 | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 36,50 |
| 8 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,5-7 ,5 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,75-5,75 | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,65-7,56 |
| 9 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 34,99 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 32,1 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(%) | 24,41 |
| 10 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 10,40 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 27,20 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | 3,48 |
| 11 | a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%) | 21,2 | a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%) | 19,35-19,87 | a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%) | 17,72-17,86 |
| | b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PErikanan | 2,8-3,1 | b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PErikanan | | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) | |
| 12 | Pengembangan Pariwisata | | Pengembangan Pariwisata | | Pengembangan Pariwisata | |
| | a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | | a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 2,50 | a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 1,56 |
| | b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) | | b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang | | Wisatawan Mancanegara (Jiwa) | |
| 13 | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)* | | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)* | 5,5 | | |
| 14 | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN | | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN | | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN | |
| | a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | | a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | 3,51 | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) | |
| | b. Rasio kewirausahaan daerah (%) | 3,18 | b. Rasio kewirausahaan daerah (%) | 3,74 | Rasio Kewirausahaan Daerah (%) | |
| | c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | 1,1 | c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | 0,80 | c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | 1,20 |
| | d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%) | | d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%) | | Return on Asset (RoA) BUMD (%) | |
| 15 | Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik | | Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik | | Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik | |
| | a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,44-4,96 | a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,14-5,47 | a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,01 |
| | b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | 37 ,95 | b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | 44,85 | | |
| 16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 56,40 - 59,31 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 59,33-62,22 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 67,50 |

| NO | RPJMN 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 17 | Tingkat Penguasaan IPTEK | | Tingkat Penguasaan IPTEK | | | |
| | Disesuaikan dengan karakteristik daerah | | Disesuaikan dengan karakteristik daerah | | | |
| 18 | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | |
| | a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah | 71,8 | a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah | 51,14 | a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah | 52,06 |
| | b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 16,00 -20,00 | b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 19,19 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 6,23 |
| 19 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4. | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,23 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 21,69 |
| 20 | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi | | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi | 9,95 | | |
| 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 29,75 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 23,32 |
| 22 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 16,62-16,76 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 49,99 |
| 23 | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan | | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan | | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan | |
| | a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) | 44,58 | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan | | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan | |
| | b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 60 | b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 76,02 | b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 75,47 |
| | c. Persentase Desa Mandiri (%) | 23,9r | c. Persentase Desa Mandiri (%) | 8,56 | c. Persentase Desa Mandiri (%) | 0,66 |
| 24 | Indeks Materi Hukum<br>Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 0,5 | Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah:<br>Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 70,38 | Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah:<br>Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 98,50 |
| 25 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,52 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,48 |
| 26 | Indeks Pelayanan Publik | 3,48 | Indeks Pelayanan Publik | 3,60 | Indeks Pelayanan Publik | 4,24 |
| 27 | Indeks Integritas Nasional | - | Indeks Integritas Nasional | 67,46 | Indeks Integritas Nasional | 77,41 |
| 28 | *Disesuaikan dengan karakteristik Daerah*<br>*Usulan Proksi:* | | *Disesuaikan dengan karakteristik daerah*<br>*Usulan Proksi:* | | Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi: | |
| | *a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah* | 0,74 | *a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah* | 71,43 | Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%) | 100,00 |
| | *b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM* | 60,00 | *b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM* | 62,50 | *b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM* | 71,89 |

| NO | RPJMN 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) | 68 | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) | 59,38 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin) | |
| 30 | Indeks Demokrasi Indonesia | 82,r2-a5,66 | Indeks Demokrasi Indonesia | 83,65-86,89 | Indeks Demokrasi Indonesia | 82,30 |
| 31 | Rasio Pajak terhadap PDB (%) | 10,08 - 11,54 | Rasio Pajak terhadap PDB (%) | 1,42 | Rasio Pajak terhadap PDRB (%) | |
| 32 | Tingkat Inflasi (%) | 2,5 -1,0 | Tingkat Inflasi (%) | 1,70-3,70 | Tingkat Inflasi (%) | |
| 33 | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | |
| | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | 30,06 | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)6 | 0,019 |
| | b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 7 ,63 | b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,13 | | |
| | c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) | 18,81 | c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) | 8.677.816,12 | | |
| | d. Total Kredit/PDRB (%) | 38,46 | d. Total Kredit/PDRB (%) | 27,15 | d. Total Kredit/PDRB (%) | 0,019 |
| 34 | Inklusi Keuangan (%) | 91,50 | Inklusi Keuangan (%) | 97,61 | Rasio Sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB (%) | |
| 35 | Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah<br>Usulan Proksi: | | Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah<br>Usulan Proksi: | | Disesuaikan dengan karakteristik daerah | |
| | Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (*Sister Province/ Sister City*) | | Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (*Sister Province/ Sister City*) | 20 | | |
| 36 | Disesuaikan dengan karakteristik daerah *(Asia Power Indeks - Military Capability)* | | Disesuaikan dengan karakteristik daerah *(Asia Power Indeks - Military Capability)* | | Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability) | |
| 37 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 58,99 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 55,98- 56,05 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 52,30 |
| 38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 77,1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 81,57 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 70,24 |
| 39 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 73,83 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 72,36 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 61,1 |
| 40 | Indeks Ketimpangan Gender (' IKG) | 0,394 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,389 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,720 |
| 41 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | o,47 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,567 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | |
| 42 | Kualitas Lingkungan Hidup | | Kualitas Lingkungan Hidup | | | |
| | a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 76,67 | a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77,37 | a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 70,35 |
| | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | 17 | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | 11,25 | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | 68,33 |
| | c. Pengelolaan Sampah | 60 | c. Pengelolaan Sampah | 19,00 | Pengelolaan Sampah | |

| NO | RPJMN 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 | RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029<br>Indikator Utama Pembangunan | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | | -Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 19,00 | -Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 10,68 |
| | - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | | -Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 49,75 | -Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 35,61 |
| 43 | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan | | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan | | Ketahanan Energi, Air dan Pangan | |
| | a. Ketahanan Energi | 6,82 | a. Ketahanan Energi | 5,85 | Ketahanan Energi | |
| | - Konsumsi listrik per kapita (kWh) | l.520 | - Konsumsi listrik per kapita (kWh) | 958,00 | - Konsumsi listrik per kapita (kWh) | 544,22 |
| | - Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar) | 145,40 | - Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar) | 163,22 | | |
| | b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%) | 6,55 | b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%) | 6,63 | b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%) | 5,20 |
| | c. Ketahanan Air | | c. Ketahanan Air | | | |
| | Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | 59,39 | Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | | | |
| | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 42,24 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 43,96 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 68,33 |
| 44 | Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi) | 1,2 | Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi) | 155,6775 | Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi) | 152,50 |
| 45 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | | |
| | a. Kumulatif | | a. Kumulatif | 10,78 % | a. Kumulatif | |
| | b. Tahunan | 27,35 | b. Tahunan | 20,63 % | b. Tahunan | 1.148,70 |

*Sumber : Bapperida, data di olah*

## 3.4 Inovasi

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Padang Lawas perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Inovasi pembangunan (inovasi pelayanan publik) Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 adalah Sebagai berikut :

1. **Optimalisasi percepatan pelaporan BMD dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web**.

   Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sendiri merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Perbup No. 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan BMD dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah.

2. **Efektivitas Pembuatan Notulen Rapat Dengan Sistem Informasi Manajemen E-Risalah (Sim-Eri) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas.**

   Dalam upaya memaksimalkan efektivitas pekerjaan Risalah atau notulen yang diterapkan selama ini membutuhkan waktu yang lama, baik dalam proses pengetikan dan koreksi pimpinan DPRD Sementara banyak rapat dan kegiatan yang mesti dilakukan alat kelengkapan dewan (AKD) sehingga dibutuhkan cara yang lebih cepat dan memiliki kualitas baik dalam penyajiannya perlu penerapan teknologi dan informasi dalam penyajian risalah tersebut.

3. **Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan Pelaporan online untuk pemeliharaan jaringan irigasi Melalui aplikasi "LE OPJI".**

Dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas diharapkan dapat meminimalisir waktu yang diperlukan dalam proses pelaporan dan pelaksanaan operasional/pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai aturan yang berlaku.

# BAB IV
# KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

## 4.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 12 Nomor 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Perubahan target pendapatan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyesuaian target pendapatan harus didasarkan pada kondisi dan potensi penerimaan yang realistis sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara target dan realisasi pada akhir tahun anggaran. Peningkatan pendapatan daerah akan memberikan tambahan ruang fiskal bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk memperkuat pendanaan program dan kegiatan prioritas. Sebaliknya, apabila terdapat potensi penurunan pendapatan dari target awal, maka diperlukan langkah penyesuaian belanja secara selektif dengan tetap mempertahankan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah antar daerah. Dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 pada KUA sebesar Rp. 1.035.668.481.862,00 APBD sebesar Rp. 1.042.668.481.862,00 sedangkan pada PKUA tahun 2026 sebesar Rp. 1.184.632.477.732,00 dengan selisih KUA dan PKUA sebesar RP. 148.963.995.870,00 dan selisih APBD dan PKUA pada Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 sebanyak Rp. 141.963.995.870,00 dimana dengan realisasi angggaran Pendapatan Daerah pada Triwulan II sebesar Rp. 526.958.474.630,33.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 pada KUA sebesar Rp. 58.153.306.303,00 dan APBD dengan besaran Rp. 58.153.306.303,00 sedangkan pada PRKPD sebesar Rp. 59.099.234.895,87 dan selisih RKPD dan PKUA sebesar RP. 1.445.928.593,00 dan selisih APBD dan PRKPD pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2026

sebanyak Rp 1.445.928.593,00 dimana dengan realisasi pada Pendapatan Asli Daerah Triwulan II sebesar Rp. 29.969.202.791,33. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas masih sangat rendah perlu untuk perubahan dan trobosan baru agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas bisa meningkat.

Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 pada KUA sebesar Rp. 950.610.175.559,00 sedangkan pada APBD sebesar RP. 950.610.175.559,00 dan untuk PKUA sebesar Rp. 1.071.878.242.836,00 selisih antara KUA dengan PRKPD sebesar Rp 121.268.067.277,00 dan selisih antara APBD dan PKUA pada Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 sebanyak Rp. 121.268.067.277,00 dimana dengan realisasi pada Pendapatan Transfer Triwulan II sebesar Rp. 483.791.829.824,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan anggaran transfer di Kabupaten Padang Lawas masih sangat tinggi, berbanding lurus dengan PAD yang sedikit.

Dari analisis data tersebut dapat diartikan bahwa dari segi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas masih rendah sehingga mempengaruhi tingkat keuangan dan belanja daerah, dan OPD juga masih terbatas dalam hal penggunaan anggaran.

Realisasi dari penggunaan anggaran dari setiap OPD yang di berikan beban anggaran sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dan pelaksaan realisasi baik program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah sesuai dan berjalan dengan selaras dan tepat sasaran. OPD juga sudah lebih fokus dan mampu menganalisa kemampuan daya anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berjalan dengan searah demi mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan faktor maupun indokator penyebab yang bisa mempengaruhi keberhasilan OPD.

Untuk lebih jelasnya berikut tabel anggaran pendapatan, perubahan pendapatan, dan realisasi pendapatan Triwulan II Kabupaten Padang Lawas tahun2026.

## Tabel 4.1
## Anggaran Pendapatan, Perubahan Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Triwulan II
## Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KUA (Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | KUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.035.668.481.862,00** | **1.042.668.481.862,00** | **1.184.632.477.732,00** | **148.963.995.870,00** | **141.963.995.870,00** | **526.958.474.630,33** |
| **4,01** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **58.153.306.303,00** | **58.153.306.303,00** | **59.599.234.896,00** | **1.445.928.593,00** | **1.445.928.593,00** | **29.969.202.791,33** |
| 04.01.01 | Pajak Daerah | 37.637.420.659,00 | 37.637.420.659,00 | 38.242.845.606,00 | 605.424.947,00 | 605.424.947,00 | 13.474.438.235,00 |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah | 4.053.784.132,00 | 4.053.784.132,00 | 4.269.684.132,00 | 215.900.000,00 | 215.900.000,00 | 1.470.872.616,00 |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.958.461.193,00 | 3.958.461.193,00 | 3.561.124.949,00 | -397.336.244,00 | -397.336.244,00 | 3.561.124.949,00 |
| 04.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 12.503.640.319,00 | 12.503.640.319,00 | 13.525.580.209,00 | 1.021.939.890,00 | 1.021.939.890,00 | 11.462.766.991,33 |
| **4,02** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **950.610.175.559,00** | **950.610.175.559,00** | **1.071.878.242.836,00** | **121.268.067.277,00** | **121.268.067.277,00** | **483.791.829.824,00** |
| 04.02.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 924.744.217.000,00 | 924.744.217.000,00 | 1.005.796.803.000,00 | 81.052.586.000,00 | 81.052.586.000,00 | 471.290.149.861,00 |
| 04.02.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 25.865.958.559,00 | 25.865.958.559,00 | 66.081.439.836,00 | 40.215.481.277,00 | 40.215.481.277,00 | 12.501.679.963,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,03** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **26.905.000.000,00** | **33.905.000.000,00** | **53.155.000.000,00** | **26.250.000.000,00** | **19.250.000.000,00** | **13.197.442.015,00** |
| 04.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan | 26.905.000.000,00 | 33.905.000.000,00 | 53.155.000.000,00 | 26.250.000.000,00 | 19.250.000.000,00 | 13.197.442.015,00 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2026*

# BAB V
# KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

## 5.1 Perubahan Belanja Daerah

Perubahan belanja diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengalokasian anggaran. Penyesuaian belanja tidak semata-mata dilakukan berdasarkan perubahan pagu anggaran, tetapi mempertimbangkan tingkat urgensi, capaian kinerja, manfaat pembangunan, kesiapan pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas, khususnya peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan pelayanan publik, perlu tetap menjadi perhatian dalam penetapan alokasi belanja setelah perubahan.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada Belanja KUA tahun 2026 sebesar Rp. 1.047.668.481.862,00 APBD 2026 sebesar Rp. 1. .069.381.180.862,00 dan Perubahan KUA 2026 sebesar Rp. 1. .230.166.686.303,00 sedangkan selisih pada KUA dan PKUA sebesar Rp. 182.498.204.441,00 dan selisih dari APBD dan PKUA sebesar Rp. 160.785.505.441,00 dengan realisasi Belanja sampai pada Triwulan II sebesar Rp. 403.009.039.532,00.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 difokuskan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi baik secara lokal dan nasional. Perubahan belanja juga dilakukan untuk optimalisasi belanja rutin perangkat daerah serta penyesuain belanja yang tertentu. Kebijakan belanja daerah secara terperinci diarahkan sebagai berikut:

a. Percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas;
    1) Aman, belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung akselerasi dan implementasi pembangunan daerah yang relevan dan tepat;
    2) Sehat, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong percepatan kemandirian pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur;
    3) Berdaya, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong penyaluran belanja sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran;
    4) Tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lainnya; dan
    5) Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk lokal Padang Lawas.
b. Perubahan belanja terdapat pada belanja pegawai, barang dan jasa;

c. Perubahan belanja untuk penggunaan dana tertentu pada anggaran 2026;
d. Perubahan penjabaran menyesuaikan/mengakomodir pada sebelumnya yang sudah ada/murni;
e. Perubahan belanja dengan melakukan beberapa pergesaran anggaran yang sudah ada sebelumnya;
f. Perubahan belanja juga untuk mendukung tingkat keberhasilan Padang Lawas dengan menjalankan SPM OPD; dan
g. Perubahan juga dilakukan dengan mengganti beberapa Program kegiatan OPD.

Dari analisis data tersebut dapat diartikan bahwa dari segi Belanja Operasi pada KUA Padang Lawas Tahun 2026 sebesar Rp. 733.368.117.721,00 sedangkan pada APBD Tahun 2026 Rp. 733.368.117.721,00 dan pada PKUA Tahun 2026 sebesar 816.794.140.987,00 dan selisih antara KUA dengan PKUA sebesar Rp. 83.426.023.266,00 dan selisih antara APBD dengan PKUA Rp., 61.176.485.266,00 Hal ini menunjukkan bahwa belanja operasi Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan pada PKUA bahwa dapat diasumsikan bahwa Kemampuan belanja daerah dalam membiayai daerahnya sedikit dan tingkat penggunaan belanja dalam hal penggunaan anggaran sangat sedikit baik dari segi pengadaan, honorarium maupun hibah dan bantuan sosial.

Sedangkan segi Belanja Modal pada KUA lebih besar yakni sebesar Rp. 60.159.560.096,00 di bandingkan dengan APBD sebesar Rp. 59.622.721.096,00 dan mengalami kenaikan penganggaran pada PKUA sebesar Rp. 151.217.575.471,00 dengan selisih antara KUA dan PKUA sebesar Rp. 91.058.015.375,00 antara APBD dengan PKUA sebesar Rp. 91.594.854.375,00 dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar Rp. 16.936.074.501,00 Sedangkan pada Belanja Tidak Terduga tidak mengalami peningkatan dan penurunan dengan APBD dan PKUA dengan KUA dengan PKUA sebesar Rp. 504.503.800,00 dan antara APBD ke PKUA Rp. 504.503.800,00 dan yang terealisasi sampai Triwulan II sebanyak Rp. 607.196.000,00

Pada Belanja Transfer dengan penganggaran yang di KUA dengan APBD dan pada PKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 tidak mengalami kenaikan dan penurunan sebesar Rp. 7.509.662.000,00.

Realisasi dari penggunaan anggaran dari setiap OPD yang di berikan beban anggaran sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dan pelaksaan realisasi baik program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah sesuai dan berjalan dengan selaras dan tepat sasaran. OPD juga sudah lebih fokus dan mampu menganalisa kemampuan daya anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berjalan dengan searah demi mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan faktor

maupun indokator penyebab yang bisa mempengaruhi keberhasilan OPD. Disamping itu semua perubahan dalam wacana tabel di bawah ini sudah dibahas bersama dengan semua OPD bersama dengan kepala daerah dan terkait dengan perubahan KUA tersebut dalam hal ini disampaikan perubahan penjabaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam hal ini mengakomodir pada yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Anggaran Belanja, Perubahan Belanja dan Realisasi Belanja Triwulan II Kabupaten Padang Lawas tahun 2026.

**Tabel 5.1**
**Anggaran Belanja, Perubahan Belanja dan Realisasi Belanja Triwulan II**
**Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KUA(Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | KUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| **5** | **BELANJA** | **1.047.668.481.862,00** | **1.069.381.180.862,00** | **1.230.166.686.303,00** | **182.498.204.441,00** | **160.785.505.441,00** | **403.009.039.532,00** |
| **05.01** | **BELANJA OPERASI** | **733.368.117.721,00** | **755.617.655.721,00** | **816.794.140.987,00** | **83.426.023.266,00** | **61.176.485.266,00** | **357.603.337.101,00** |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai | 477.311.364.175,00 | 489.217.394.705,00 | 486.416.417.155,00 | 9.105.052.980,00 | -2.800.977.550,00 | 250.727.199.053,00 |
| 05.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 241.592.224.534,00 | 251.880.732.004,00 | 314.081.163.120,00 | 72.488.938.586,00 | 62.200.431.116,00 | 100.269.702.275,00 |
| 5.01.04 | Belanja Subsidi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05.01.05 | Belanja Hibah | 12.475.768.606,00 | 12.530.768.606,00 | 14.507.800.306,00 | 2.032.031.700,00 | 1.977.031.700,00 | 5.766.485.773,00 |
| 05.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.788.760.406,00 | 1.788.760.406,00 | 1.588.760.406,00 | -200.000.000,00 | -200.000.000,00 | 839.950.000,00 |
| **05.02** | **BELANJA MODAL** | **60.159.560.096,00** | **59.622.721.096,00** | **151.217.575.471,00** | **91.058.015.375,00** | **91.594.854.375,00** | **16.936.074.501,00** |
| 05.02.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.284.397.716,00 | 18.491.747.716,00 | 19.407.101.109,00 | 122.703.393,00 | 915.353.393,00 | 1.396.390.933,00 |
| 05.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.530.000.000,00 | 9.075.000.000,00 | 17.924.234.350,00 | 6.394.234.350,00 | 8.849.234.350,00 | 2.165.734.350,00 |
| 05.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 23.458.695.000,00 | 26.169.506.000,00 | 101.508.843.500,00 | 78.050.148.500,00 | 75.339.337.500,00 | 8.934.573.258,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KUA(Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | KUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| 05.02.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.886.467.380,00 | 5.886.467.380,00 | 7.362.396.512,00 | 1.475.929.132,00 | 1.475.929.132,00 | 4.439.375.960,00 |
| 5.02.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 0 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| **05.03** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.200.000.000,00** | **1.200.000.000,00** | **1.704.503.800,00** | **504.503.800,00** | **504.503.800,0** | **607.196.000,00** |
| 05.03.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.704.503.800,00 | 504.503.800,00 | 504.503.800,0 | 607.196.000,00 |
| **05.04** | **BELANJA TRANSFER** | **252.940.804.045,00** | **252.940.804.045,00** | **260.450.466.045,00** | **7.509.662.000,00** | **7.509.662.000,00** | **27.862.431.930,00** |
| 05.04.01 | Belanja Bagi Hasil | 4.428.737.545,00 | 4.428.737.545,00 | 4.428.737.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 248.512.066.500,00 | 248.512.066.500,00 | 256.021.728.500,00 | 7.509.662.000,00 | 7.509.662.000,00 | 27.862.431.930,00 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026*

# BAB VI
# KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

## 6.1 Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan terutama berkaitan dengan pemanfaatan SiLPA, penerimaan pembiayaan, maupun pengeluaran pembiayaan. Apabila terdapat SiLPA yang dapat digunakan, sumber tersebut dapat memberikan tambahan kapasitas pendanaan bagi program prioritas tanpa harus meningkatkan beban pendapatan pada tahun berjalan. Namun, penggunaannya perlu mempertimbangkan legalitas, peruntukan, kesiapan kegiatan, serta kemampuan pelaksanaan sampai akhir tahun anggaran.

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, pada dokumen RKPD dialokasikan pembiayaan sebesar Rp12.000.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya. Selanjutnya, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026, nilai penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan menjadi Rp 26.712.699.000,00

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan anggaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah, pada Perubahan KUA (P-KUA) Tahun Anggaran 2026, penerimaan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sebesar Rp 46.134.208.571,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 19.421.509.571,00 dibandingkan dengan target pada RKPD, serta meningkat sebesar Rp 46.134.208.570,00 dibandingkan dengan APBD murni sebesar Rp. 26.712.699.000,00. Peningkatan tersebut sepenuhnya berasal dari penyesuaian besaran SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan daerah.

Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, realisasi penerimaan pembiayaan telah mencapai Rp 46.134.208.571,00. Sementara itu, pada komponen Pengeluaran Pembiayaan, baik dalam KUA maupun APBD Tahun Anggaran 2026 belum dialokasikan anggaran sedangkan pada PKUA Tahun 2026 di alokasikan sebesar Rp.600.000.00. Dengan demikian, terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan, termasuk untuk Penyertaan Modal Daerah. sehingga seluruh pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp. 45.534.208.571,00.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Anggaran Pembiayaan, Perubahan Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan Triwulan II Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026.

## Tabel 6.1

## Anggaran Pembiayaan, Perubahan Pembiayaan, dan Realisasi Pembiayaan Triwulan II Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKUA (Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | RKUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **06.01** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **12.000.000.000,00** | **26.712.699.000,00** | **46.134.208.571,00** | **34.134.208.571,00** | **19.421.509.571,00** | 46.134.208.571,00 |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.000.000.000,00 | 26.712.699.000,00 | 46.134.208.571,00 | 34.134.208.571,00 | 19.421.509.571,00 | 46.134.208.571,00 |
| | Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 12.000.000.000,00 | 26.712.699.000,00 | 0,00 | -12.000.000.000,00 | -26.712.699.000,00 | 0,00 |
| | *Dau Kes 2025* | 0,00 | 0,00 | 765.316.721,00 | 765.316.721,00 | 765.316.721,00 | 765.316.721,00 |
| | *Dau PU 2025* | 0,00 | 0,00 | 432.080.489,00 | 432.080.489,00 | 432.080.489,00 | 432.080.489,00 |
| | *Dau Pendidikan 2025* | 0,00 | 0,00 | 1.108.750.323,00 | 1.108.750.323,00 | 1.108.750.323,00 | 1.108.750.323,00 |
| | *Dak Non fisik* | 0,00 | 0,00 | 1.957.336.060,00 | 1.957.336.060,00 | 1.957.336.060,00 | 1.957.336.060,00 |
| | *DAK FISIK* | 0,00 | 0,00 | 5.281.089.957,00 | 5.281.089.957,00 | 5.281.089.957,00 | 5.281.089.957,00 |
| | *HIBAH* | 0,00 | 0,00 | 4.096.497.600,00 | 4.096.497.600,00 | 4.096.497.600,00 | 4.096.497.600,00 |
| | *DAU* | 0,00 | 0,00 | 17.196.965.409,15 | 17.196.965.409,15 | 17.196.965.409,15 | 17.196.965.409,15 |
| | *PBJT 2025* | 0,00 | 0,00 | 4.139.902.129,00 | 4.139.902.129,00 | 4.139.902.129,00 | 4.139.902.129,00 |
| | *DBH PAJAK ROKOK 2025* | 0,00 | 0,00 | 4.039.245.678,81 | 4.039.245.678,81 | 4.039.245.678,81 | 4.039.245.678,81 |
| | *DBH CHT* | 0,00 | 0,00 | 48.124.157,00 | 48.124.157,00 | 48.124.157,00 | 48.124.157,00 |
| | *DBH SAWIT* | 0,00 | 0,00 | 2.935.552.200,00 | 2.935.552.200,00 | 2.935.552.200,00 | 2.935.552.200,00 |
| | *BPJS RSUD* | 0,00 | 0,00 | 2.389.028.847,00 | 2.389.028.847,00 | 2.389.028.847,00 | 2.389.028.847,00 |
| | *Sisa Penghematan Belanja TA 2025* | 0,00 | 0,00 | 1.744.319.000,00 | 1.744.319.000,00 | 1.744.319.000,00 | 1.744.319.000,00 |
| **06.02** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 0,00 | 0,00 | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | 0,00 |
| 06.02.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **12.000.000.000,00** | **26.712.699.000,00** | **45.534.208.571,00** | **33.534.208.571,00** | **18.821.509.571,00** | |

*Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026*

Berikut Struktur Penganggaran Keuangan RKUA, APBD dan PKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 secara utuh disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.2**
**Struktur Penganggaran dan Selisih Keuangan RKUA, APBD dan PKUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKUA (Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | RKUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.035.268.481.862,06** | **1.042.668.481.862,00** | **1.184.132.477.731,87** | **148.863.995.869,81** | **141.463.995.869,87** | **526.958.474.630,33** |
| **4,01** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **57.753.306.303,06** | **58.153.306.303,00** | **59.099.234.895,87** | **1.345.928.592,81** | **945.928.592,87** | **29.969.202.791,33** |
| 04.01.01 | Pajak Daerah | 37.237.420.659,00 | 37.637.420.659,00 | 38.242.845.606,00 | 1.005.424.947,00 | 605.424.947,00 | 13.474.438.235,00 |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah | 4.053.784.132,00 | 4.053.784.132,00 | 4.269.684.132,00 | 215.900.000,00 | 215.900.000,00 | 1.470.872.616,00 |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.958.461.193,00 | 3.958.461.193,00 | 3.561.124.949,00 | -397.336.244,00 | -397.336.244,00 | 3.561.124.949,00 |
| 04.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 12.503.640.319,06 | 12.503.640.319,00 | 13.025.580.208,87 | 521.939.889,81 | 521.939.889,87 | 11.462.766.991,33 |
| **4,02** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **950.610.175.559,00** | **950.610.175.559,00** | **1.071.878.242.836,00** | **121.268.067.277,00** | **121.268.067.277,00** | **483.791.829.824,00** |
| 04.02.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 924.744.217.000,00 | 924.744.217.000,00 | 1.005.796.803.000,00 | 81.052.586.000,00 | 81.052.586.000,00 | 471.290.149.861,00 |
| 04.02.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 25.865.958.559,00 | 25.865.958.559,00 | 66.081.439.836,00 | 40.215.481.277,00 | 40.215.481.277,00 | 12.501.679.963,00 |
| **4,03** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **26.905.000.000,00** | **33.905.000.000,00** | **53.155.000.000,00** | **26.250.000.000,00** | **19.250.000.000,00** | **13.197.442.015,00** |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKUA (Rp) | APBD (Rp) | PKUA (Rp) | SELISIH 2026 | | REALISASI TA. 2026 TRIWULAN II |
| | | 2026 | 2026 | 2026 | RKUA dan PKUA | APBD dan PKUA | |
| 04.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 26.905.000.000,00 | 33.905.000.000,00 | 53.155.000.000,00 | 26.250.000.000,00 | 19.250.000.000,00 | 13.197.442.015,00 |
| **5** | **BELANJA** | **1.047.668.481.862,00** | **1.069.381.180.862,00** | **1.230.166.686.303,00** | **182.498.204.441,00** | **160.785.505.441,00** | **403.009.039.532,00** |
| **05.01** | **BELANJA OPERAI** | **733.368.117.721,00** | **755.617.655.721,00** | **816.794.140.987,00** | **83.426.023.266,00** | **61.176.485.266,00** | **357.603.337.101,00** |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai | 477.311.364.175,00 | 489.217.394.705,00 | 486.416.417.155,00 | 9.105.052.980,00 | -2.800.977.550,00 | 250.727.199.053,00 |
| 05.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 241.592.224.534,00 | 251.880.732.004,00 | 314.081.163.120,00 | 72.488.938.586,00 | 62.200.431.116,00 | 100.269.702.275,00 |
| 5.01.04 | Belanja Subsidi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05.01.05 | Belanja Hibah | 12.475.768.606,00 | 12.530.768.606,00 | 14.507.800.306,00 | 2.032.031.700,00 | 1.977.031.700,00 | 5.766.485.773,00 |
| 05.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.788.760.406,00 | 1.788.760.406,00 | 1.588.760.406,00 | -200.000.000,00 | -200.000.000,00 | 839.950.000,00 |
| **05.02** | **BELANJA MODAL** | **60.159.560.096,00** | **59.622.721.096,00** | **151.217.575.471,00** | **91.058.015.375,00** | **91.594.854.375,00** | **16.936.074.501,00** |
| 05.02.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.284.397.716,00 | 18.491.747.716,00 | 19.407.101.109,00 | 122.703.393,00 | 915.353.393,00 | 1.396.390.933,00 |
| 05.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.530.000.000,00 | 9.075.000.000,00 | 17.924.234.350,00 | 6.394.234.350,00 | 8.849.234.350,00 | 2.165.734.350,00 |
| 05.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 23.458.695.000,00 | 26.169.506.000,00 | 101.508.843.500,00 | 78.050.148.500,00 | 75.339.337.500,00 | 8.934.573.258,00 |
| **05.02.05** | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | **5.886.467.380,00** | **5.886.467.380,00** | **7.362.396.512,00** | **1.475.929.132,00** | **1.475.929.132,00** | **4.439.375.960,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 26.905.000.000,00 | 33.905.000.000,00 | 53.155.000.000,00 | 26.250.000.000,00 | 19.250.000.000,00 | 13.197.442.015,00 |
| **05.03** | BELANJA TIDAK TERDUGA | **1.200.000.000,00** | **1.200.000.000,00** | **1.704.503.800,00** | **504.503.800,00** | **504.503.800,0** | **607.196.000,00** |
| **05.03.01** | Belanja Tidak Terduga | **1.200.000.000,00** | **1.200.000.000,00** | **1.704.503.800,00** | **504.503.800,00** | **504.503.800,0** | **607.196.000,00** |
| **05.04** | BELANJA TRANSFER | **252.940.804.045,00** | **252.940.804.045,00** | **260.450.466.045,00** | **7.509.662.000,00** | **7.509.662.000,00** | **27.862.431.930,00** |
| **05.04.01** | Belanja Bagi Hasil | **4.428.737.545,00** | **4.428.737.545,00** | **4.428.737.545,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **05.04.02** | Belanja Bantuan Keuangan | **248.512.066.500,00** | **248.512.066.500,00** | **256.021.728.500,00** | **7.509.662.000,00** | **7.509.662.000,00** | **27.862.431.930,00** |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **06.01** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **12.000.000.000,00** | **26.712.699.000,00** | **46.134.208.571,00** | **34.134.208.571,00** | **19.421.509.571,00** | 46.134.208.571,00 |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.000.000.000,00 | 26.712.699.000,00 | 46.134.208.571,00 | 34.134.208.571,00 | 19.421.509.571,00 | 46.134.208.571,00 |
| **06.02** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 0,00 | 0,00 | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | 0,00 |
| 06.02.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **12.000.000.000,00** | **26.712.699.000,00** | **45.534.208.571,00** | **33.534.208.571,00** | **18.821.509.571,00** | |
| | **SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **170.083.643.669,33** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026*

Analisis dari Perubahan pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara keseluruhan akan menentukan ruang fiskal Kabupaten Padang Lawas dalam membiayai program prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan perubahan APBD perlu menerapkan prinsip bahwa setiap tambahan kapasitas fiskal diarahkan terutama untuk mendukung program yang memiliki dampak strategis terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila terjadi keterbatasan ruang fiskal, penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan tetap melindungi belanja yang bersifat wajib, pelayanan dasar, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta program yang memiliki tingkat urgensi dan manfaat pembangunan yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan keseimbangan struktur APBD, perubahan anggaran harus tetap memperhatikan keselarasan antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Keseimbangan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan secara nominal antara sumber penerimaan dan kebutuhan pengeluaran, tetapi juga mencerminkan kualitas dan keberlanjutan fiskal daerah. Struktur APBD setelah perubahan perlu memastikan bahwa belanja daerah dapat dibiayai oleh sumber pendanaan yang realistis, kredibel, dan berkelanjutan, serta tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan demikian, perubahan APBD Kabupaten Padang Lawas diharapkan mampu menjaga kesinambungan pendanaan terhadap program-program prioritas sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah. Penyesuaian pendapatan perlu dilakukan secara realistis, belanja diarahkan pada program yang memiliki manfaat dan dampak pembangunan yang lebih besar, sedangkan pembiayaan digunakan secara terukur untuk menjaga keseimbangan APBD. Kebijakan tersebut menjadi penting dalam memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, dampak perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan terhadap pendanaan program prioritas Kabupaten Padang Lawas sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penajaman prioritas dan pengendalian fiskal. Melalui pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil, perubahan APBD tidak hanya berfungsi sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dan meningkatkan manfaatb pembangunan bagi masyarakat kabupaten padang lawas.

Dengan pendekatan tersebut, struktur APBD setelah perubahan diharapkan tetap berada dalam kondisi yang sehat, seimbang, dan berkelanjutan, dengan tetap memberikan ruang yang memadai bagi pembiayaan program prioritas daerah serta menjaga kemampuan fiskal Kabupaten Padang Lawas untuk mendukung pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

# BAB VII
# STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Evaluasi pelaksanaan KUA Kabupaten Padang Lawas sampai dengan triwulan II tahun 2026 dilaksanakan untuk menilai tingkat pencapaian target program dan kegiatan pembangunan daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan, tantangan, serta merumuskan langkah penanganan yang strategis. Pelaksanaan evaluasi ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengandaskan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kua secara berkala. Melalui evaluasi ini, ketercapaian kebijakan, program, dan kegiatan dapat dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan umpan balik yang valid bagi perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan tersebut, diidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan awal dengan dinamika dan perkembangan kondisi terkini. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 menjadi langkah strategis agar dokumen perencanaan daerah tetap adaptif, responsif, serta mampu mengomodasi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan pembangunan daerah secara optimal.

Hasil evaluasi pelaksanaan kua Tahun 2026 menunjukkan adanya beberapa perkembangan yang menjadi dasar dilakukannya perubahan, yaitu:

1) Adanya pergeseran anggaran, penambahan subkegiatan baru/alternatif, penghapusan subkegiatan, penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif, serta perubahan lokasi maupun kelompok sasaran penerima manfaat pada perangkat daerah;
2) Perubahan KUA Tahun 2026 perlu segera dilaksanakan mengingat dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026 terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian jumlah, jenis dan perinciannya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II. Program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Tahun 2026 merupakan respon atau berbagai masalah yang masih timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat;
3) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Prioritas Nasional untuk percepatan pembangunan daerah, serta penambahan program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik

yang diakomodasi melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun 2026.

Dengan dilakukannya Perubahan KUA Tahun 2026, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Padang Lawas dapat tetap selaras dengan perkembangan kondisi aktual, mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah.

### 7.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Indikator makro pembangunan merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi, kinerja, dan perkembangan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh dalam periode tertentu**.** Indikator ini menjadi alat untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan.

**Tabel 7.1**
**Capaian Indikator Makro Kabupaten Padang Lawas sampai dengan Triwulan II Tahun 2026**

| No | Indikator Makro Pembangunan | Satuan | Target KUA 2026 | Realisasi KUA 2025 | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Capaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,36-5,65 | 4,19 | 4,19 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 2 | PDRB per Kapita | Juta | 75,02 | 71,948,29 | 71,948,29 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,72-7,61 | 7,32 | 7,32 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,01 | 5,03 | 5,03 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 5 | Rasio Gini | Poin | 0,2108 | 0,192 | 0,192 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 74,30 | 73,9 | 73,9 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 7 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | Ton Co2Eq | 1,148,70 | 5,52 | 1,0 | Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Poin | 70,35 | 77,46 | 20 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |

Capaian indikator makro Kabupaten Padang Lawas sampai dengan triwulan II tahun 2026 pada umumnya masih merefleksikan realisasi capaian tahun 2025. Hal ini disebabkan sebagian besar indikator makro disusun berdasarkan hasil pengolahan data tahunan oleh instansi yang berwenang

sehingga data tahun 2026 belum sepenuhnya tersedia pada periode triwulan II.

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator makro Kabupaten Padang Lawas masih banyak indikator yang belum tercapai, salah satu nya pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,9 poin. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Strategi yang akan di lakukan antara lain Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP sesuai standar pendidikan nasional, Dukungan Pembangunan sekolah rakyat, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan, Penguatan program UHC, Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan, Peningkatan kualitas layanan Fasilitas kesehatan Dasar, Peningkatan kualitas Fasilitas kesehatan layanan Rujukan, Peningkatan Daya saing Olahraga dan Kepemudaan, dengan OPD pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda Olaharaga dan Pariwisata.

Sementara itu persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 4,19 persen dan PDRB per Kapita 71,948,29 Juta. Strategi yang akan di lakukan antara lain Pemberian bantuan bibit unggul pertanian, Pemberian bantuan benih unggul untuk budidaya perikanan, Penyediaan bantuan bibit perkebunan, Pemelirahaan dan Pemenuhan Prasarana Perikanan, Kajian kelayakan Penataan Pasar Rakyat, dengan OPD pelaksana anatara lain Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan, Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan Capaian pada Tw II Tahun 2026 sebesar 20 persen, Strategi yang akan di lakukan antara lain Peningkatan Layanan Persampahan, Pemenuhan Prasarana Pengolahan Sampah, dengan OPD Pengampu Dinas Lingkungan Hidup. Secara keseluruhan, capaian indikator makro pembangunan daerah hingga triwulan II tahun 2026 menunjukkan tren yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, diperlukan upaya penguatan lebih lanjut, agar target RKPD Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

### 7.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi pemerintah. IKU disusun berdasarkan mandat

dan fungsi utama pemerintah daerah, serta menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kabupaten Padang Lawas menetapkan 8 Indikator Kinerja Utama pada KUA Tahun 2026. Capaian IKU Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.2**
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas sampai dengan Triwulan II Tahun 2026**

| No | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Predikat Kinerja | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target KUA 2026 | Realisasi 2025 | Realisasi s/d Tw II 2026 | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | 74,30 | 73,9 | 73,9 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 2 | Indeks Infrastruktur (Poin) | 70.47 | N/A | 45,75 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 3 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin) | 70.24 | N/A | 67,30 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 4 | Indeks Pelayanan Publik (Poin) | 4,24 | 2,54 | 2,54 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 5 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,36-5,65 | 4,19 | 4,19 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 6 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 7,72-7,61 | 7,32 | 7,32 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 70,35 | 77,46 | 20 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,01 | 5,03 | 5,03 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2026 indikator kinerja utama belum sepenuhnya tercapai. Beberapa indikator masih memakai data realisasi tahun 2025 dan data yang masih kosong disebabkan data capaiannya diperoleh di akhir tahun 2026.

## 7.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas sampai dengan triwulan II rata-rata masih dibawah 50 persen. Namun terdapat 8 (tujuh) Perangkat Daerah yang capaian programnya sudah di atas 50 persen yaitu Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Satpol PP dan Damkar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembanguan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Kecamatan Batang Lubu Sutam.

**Tabel 7.3**
**Rata-rata Capaian Kinerja Program dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026**

| No | Nama Perangkat Daerah | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | | Program | Anggaran |
| 1 | Pendidikan dan Kebudayaan | 15,39 | 45,94 |
| 2 | Kesehatan | 19,31 | 35,42 |
| 3 | RSUD | 12,91 | 36,78 |
| 4 | Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 74,08 | 28,02 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan | 27,89 | 50,66 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 31,98 | 49,46 |
| 7 | Satpol PP dan Damkar | 76,27 | 39,99 |
| 8 | Dinas Sosial | 16,33 | 59,64 |
| 9 | Dinas Ketenagakerjaan | 34,52 | 36,06 |
| 10 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 85,94 | 89,86 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 22,53 | 48,95 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 77,72 | 45,22 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 26,56 | 49,58 |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15,44 | 46,84 |
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 45,67 | 47,73 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 55,71 | 32,72 |
| 17 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 3,58 | 68,83 |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 49,50 | 24,76 |
| 19 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | 82,96 | 24,56 |
| 20 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 4,75 | 36,46 |
| 21 | Sekretariat Daerah | 43,04 | 28,14 |
| 22 | Sekretariat DPRD | 14,79 | 82,34 |
| 23 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 48,12 | 39,17 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembanguan, Riset dan Inovasi Daerah | 92,28 | 41,00 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 23,72 | 40,50 |
| 26 | Inspektorat Daerah | 23,53 | 35,44 |
| 27 | Kecamatan Aek Nabara Barumun | 38,18 | 49,70 |
| 28 | Kecamatan Barumun Selatan | 50,00 | 68,14 |
| 29 | Kecamatan Sihapas Barumun | 25,00 | 50,41 |
| 30 | Kecamatan Barumun Barat | 42,50 | 57,37 |
| 31 | Kecamatan Barumun Tengah | 26,67 | 32,84 |
| 32 | Kecamatan Hutaraja Tinggi | 16,67 | 52,08 |
| 33 | Kecamatan Sosa Timur | 12,46 | 12,46 |
| 34 | Kecamatan Sosa Julu | 43,33 | 41,79 |
| 35 | Kecamatan Ulu Sosa | 40,00 | 59,96 |
| 36 | Kecamatan Barumun Baru | 10,00 | 63,33 |
| 37 | Kecamatan Huristak | 20,00 | 56,02 |
| 38 | Kecamatan Ulu Barumun | 30,00 | 48,85 |
| 39 | Kecamatan Barumun | 25,00 | 49,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Kecamatan Sosa | 36,76 | 64,46 |
| 41 | Kecamatan Batang Lubu Sutam | 83,33 | 63,67 |
| 42 | Kecamatan Sosopan | 20,00 | 65,34 |
| 43 | Kecamatan Lubuk Barumun | 48,11 | 48,11 |
| 44 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 26,76 | 26,76 |
| **Rata-Rata** | | **36,80** | **47,17** |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Padang Lawas Triwulan II*

Capaian kinerja merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran publik. Realisasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Hal ini ditunjukkan melalui realisasi dari indikator kinerja dari berbagai aspek terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Realisasi kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan II tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.4**
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah s/d Triwulan II Tahun 2026**

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| **I** | **Aspek Geografi dan Demografi** | | | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan (Poin) | Poin | 68,89 | 77,20 | 68,89 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 2 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) | Persen | 4,69 | 5,20 | 4,69 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 3 | Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/kapita) | kWh/kapita | N/A | 544,22 | | | |
| 4 | Porsi EBT dalam bauran energi (%) | Persen | N/A | 6,23 | | | |
| 5 | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | $m^3$/detik | 0,025 | 0,85 | 0,025 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 6 | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) | Persen | 24 | 4,54 | 24 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | Poin | 77,46 | 70,35 | 20 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 8 | Penurunan Emisi GRK (Ton Co2Eq) | Ton Co2Eq | 5.52 | 1.148,70 | 1.00 | Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 9 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | Persen | 66 | 68,33 | 66 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 10 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin) | Poin | 20 | 19,78 | 6 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 11 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) | Persen | 13,79 | 35,61 | 18 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 12 | Indeks Risiko Bencana (Poin) | Poin | 170,53 | 152,50 | 170,53 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 13 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | Persen | 1,36 | 1,85 | 1,36 | Belum Tercapai | Data 2025 |
| **II** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Persen | 4,19 | 5,36-5,65 | 4,19 | Belum Tercapai | Data 2025 |
| 2 | Persentase Penduduk Miskin (%) | Persen | 7,32 | 7,72-7,61 | 7,32 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 3 | PDRB Per Kapita (Rp ribu) | Rp ribu | 71.948,29 | 75.024,37 | 71.948,29 | Belum Tercapai | Data Tahunj 2025 |
| 4 | Gini Ratio (Poin) | Poin | 0,192 | 0,2108 | 0,192 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | Persen | 5,03 | 5,01 | 5,03 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | Poin | 73,9 | 74,30 | 73,9 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 7 | Usia Harapan Hidup (Tahun) | Tahun | 71,87 | 72,33 | 71,87 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 8 | Prevalensi stunting (%) | Persen | 5,36 | 13,93 | 5,36 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 9 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | Persen | 71,10 | 73,77 | 71,10 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 10 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) | Persen | 45,67 | 88,40 | 45,67 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 11 | Indeks Pendidikan | | 0,71 | 18,46 | 0,71 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 12 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) | Tahun | 9,67 | 9,70 | 9,67 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 13 | Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) | Tahun | 14,24 | 14,28 | 14,24 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 14 | Literasi SD (Poin) | Poin | 61,02 | 64,15 | 61,02 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 15 | Literasi SMP (Poin) | Poin | 49,9 | 59,88 | 49,9 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 16 | Numerasi SD (Poin) | Poin | 64,29 | 61,59 | 64,29 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 17 | Numerasi SMP (Poin) | Poin | 51,6 | 58,31 | 51,6 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 18 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin) | Poin | 52,55 | 26,75 | 52,55 | Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 19 | Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | Persen | 81,00 | 85,98 | 82,00 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 20 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | Persen | 27,36 | 24,41 | 13,95 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 21 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin) | Poin | N/A | 70,24 | 67,30 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 22 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin) | Poin | 54,9 | 52,30 | 54,9 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 23 | Indeks Perlindungan Anak (Poin) | Poin | 71,82 | 74,00 | 72,00 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 24 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin) | Poin | 71,82 | 74,00 | 72,00 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 25 | Indeks Pembangunan Keluarga (Poin) | Poin | 62,9 | 61,10 | 62,90 | Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 26 | Indeks Pembangunan Gender (Poin) | Poin | 87,35 | 88,18 | 87,50 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 27 | Indeks Pemberdayaan Gender (Poin) | Poin | 56,85 | 55,78 | 57,00 | Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 28 | Indeks Ketimpangan Gender (Poin) | Poin | 0,855 | 0,720 | 0,810 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| 29 | Indeks Pembangunan Pemuda (Poin) | Poin | 55 | 56,87 | 23,5 | Belum Tercapai | Data Tahun 2026 |
| **III** | **Aspek Daya Saing Daerah** | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 1 | Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk) | | 54,28 | 54,18 | 54,28 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | Persen | 16,03 | 17,72-17,86 | 16,03 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 3 | Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%) | Persen | 0,88 | 1,56 | 0,88 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 4 | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) | Persen | 0,67 | 0,90 | 0,67 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 5 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB) | | N/A | 0,019 | | | |
| 6 | Total Kredit/PDRB ADHB (%) | Persen | N/A | 0,075 | | | |
| 7 | Rasio Kewirausahaan (%) | Persen | 3,74 | 6,16 | 3,74 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 8 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | Persen | 78,89 | 78,34 | 78,89 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 9 | Indeks Inovasi Daerah (Poin) | Poin | 7,3 | 23,19 | 23,19 | Tercapai | |
| 10 | Indeks Ekonomi Hijau (Poin) | Poin | N/A | 52,06 | | | |
| 11 | Indeks Ekonomi Biru (Poin) | Poin | N/A | 30,45 | | | |
| 12 | Indeks Masyarakat Digital (Poin) | Poin | 36,21 | 53,33 | 36,21 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 13 | Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%) | Persen | N/A | 23,32 | | | |
| 14 | Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%) | Persen | N/A | 49,99 | | | |
| 15 | Indeks Infrastruktur (Poin) | Poin | N/A | 70,47 | 45,75 | Belum Tercapai | |
| 16 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin) | Poin | N/A | 53,48 | | | |
| 17 | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%) | Persen | 48,01 | 75,47 | 48,01 | Belum Tercapai | Data Tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 18 | Indeks Desa (%) | Persen | 60,77 | 53,48 | 60,77 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 19 | Persentase Desa Mandiri (%) | Persen | 1,32 | 0,66 | 1,32 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 20 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | Persen | N/A | 0,123 | | | |
| 21 | Inflasi [Kota Padangsidimpuan] (%) | Persen | 5,46 | Mengacu Kota Padangsidimpuan | 5,46 | | Data Tahun 2025 |
| **IV** | **Aspek Pelayanan Umum** | | | | | | |
| **A** | **Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif** | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum (Poin) | Poin | 87,76 | 98,50 | 88,80 | Belum Tetcapai | |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) | Poin | 63,83 | 62,00 | 63,83 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 3 | Indeks SPBE (Poin) | Poin | 2,26 | 2,48 | 2,26 | Tercapai | Data Tahun 2025 |
| 4 | Indeks Pelayanan Publik (Poin) | Poin | 2,54 | 4,24 | 2,54 | Belum Tetcapai | Data Tahun 2025 |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 88,07 | 96,36 | 88,07 | Belum Tetcapai | Data Tahun 2025 |
| 6 | Indeks Integritas Nasional (Poin) | Poin | N/A | 77,41 | | | |
| **B** | **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial** | | | | | | |
| 1 | Persentase Penegakan Perda (%) | Persen | 100 | 100,00 | 95 | Belum Tetcapai | Data Tahun 2026 |
| 2 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin) | Poin | 81,36 | 81,91 | 85,00 | Belum Tetcapai | Data Tahun 2026 |
| 3 | Indeks Harmoni Indonesia | Poin | 56 | 53,48 | 56,0 | Tercapai | Data Tahun 2026 |
| **C** | **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan** | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah (Poin) | Poin | 3,21 | 3,35 | 3,35 | Tercapai | Data Tahun 2026 |

**Tabel 7.5**
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci s/d Triwulan II Tahun 2026**

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| **A** | **Pendidikan** | | | | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Persen | 40,31 | 62,25 | 40,31 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | Persen | 97,1 | 100,00 | 97,1 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Persen | 88,41 | 100,00 | 88,41 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | Persen | 40,31 | 53.45 | 40,31 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | 92,07 | 99.73 | 92,07 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | 88,43 | 88.35 | 88,43 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 7 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | Persen | N/A | 15,63 | | | |
| 8 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | Persen | N/A | 36,50 | | | |
| 9 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 92,07 | 97.82 | 92,07 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 10 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 88,43 | 92.53 | 88,43 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 11 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A | Persen | 92,07 | 97.82 | 92,07 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 12 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B | Persen | 88,43 | 92.53 | 88,43 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 13 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan (PAUD) | Persen | 76,27 | 97,65 | 76.27 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 14 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) | Persen | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 15 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) | Persen | 100 | 99,00 | 100 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 16 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Poin | 88,16 | 98,00 | 88,16 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 17 | Angka Putus Sekolah SD/MI (%) | Persen | 0,01 | 0,10 | 0,01 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 18 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) | Persen | 0,01 | 0,20 | 0,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 19 | Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) | Persen | 88,56 | 94,10 | 88,56 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 20 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (%) | Persen | 54 | 72 | 54,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 21 | Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%) | Persen | 98 | 99 | 98,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 22 | Rasio guru/murid sekolah SD/MI | Poin | 799 | 724 | 799,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 23 | Rasio guru/murid sekolah SMP/MTs | Poin | 982 | 847 | 982,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 24 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI | Poin | 79 | 50 | 79,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 25 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTS | Poin | 98 | 94 | 98,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 26 | Ruang kelas SD/MI kondisi baik (%) | Persen | 43,49 | 83,55 | 43,49 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 27 | Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik (%) | Persen | 71,71 | 70,00 | 71,71 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 28 | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | Persen | 43,03 | 60,00 | 43,03 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 29 | Indeks pemerataan guru | Poin | N/A | 45,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 30 | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan | Persen | 43,03 | 90,00 | 43,03 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 31 | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui | Persen | N/A | 90,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 32 | Persentase pengembangan bahasa dan sastra | Persen | N/A | 80,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| **B** | **Kesehatan** | | | | | | |
| 1 | Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 KH) | Angka | 5,62 | 6,70 | 5,62 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH) | Angka | 5,62 | 7,43 | 5,62 | Tercapai | Data tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 3 | Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) | Angka | 5,92 | 7,79 | 5,92 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH) | Angka | 133,3 | 109,00 | 0,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Balita Gizi Kurang (%) | Persen | 1,93 | 1,86 | 0,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Balita Gizi Buruk (%) | Persen | 0,25 | 0,49 | 0,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 7 | Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan | Persen | N/A | 60,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 8 | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | Persen | N/A | 87,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 9 | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 10 | Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | Persen | N/A | 80,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| **C** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | |
| 1 | Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%) | Persen | 18,44 | 19,20 | 18,44 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik | Persen | 43,3 | 65,00 | 43,3 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%) | Persen | 50 | 53,00 | 50,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%) | Persen | 42 | 48,00 | 42 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | Persen | 78 | 55,00 | 78,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas | Persen | 43,3 | 45,00 | 43,30 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 7 | Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah | Persen | 26 | 62,00 | 26,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 8 | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional | Persen | N/A | 10,00 | | | |
| 9 | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | Persen | N/A | 77,00 | | | |
| 10 | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | Persen | 42 | 48,00d | 42,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 11 | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik | Persen | N/A | 0,00 | | | |
| 12 | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | Persen | 62,89 | 45,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 13 | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persen | N/A | N/A | | | |
| 14 | Tingkat Kemantapan Jalan | Persen | 41,3 | 47,00 | 41,30 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 15 | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Persen | N/A | N/A | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 16 | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah | Persen | N/A | 90,00 | | | |
| **D** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | |
| 1 | Persentase Rumah Layak Huni (%) | Persen | 72 | 75,00 | 75,75 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Luasan Kawasan Kumuh (%) | Persen | 29 | 28,00 | 29,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | Persen | 0,5 | 80,00 | 0,50 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni | Persen | N/A | 75,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase Luas Kawasan Kumuh+I38 | Persen | 50 | 53,00 | 50,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) | Persen | 40 | 44,00 | 40,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| **E** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | |
| 1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%) | Persen | 100 | 100 | 95,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%) | Persen | 100 | 100 | 95,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Cakupan Pelayanan Kebakaran (%) | Persen | 90 | 85,00 | 95,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (menit) | Menit | > 15 | > 15 | > 15 | Tercapai | Data tahun 2026 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 5 | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | Persen | 100 | 100,00 | 95,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 6 | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | Persen | 53 | 51,50 | 95,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 7 | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | Persen | 64 | 62,00 | 95,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 8 | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persen | N/A | 45,00 | | | |
| 9 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | Persen | 100 | 60,00 | 10,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 10 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100 | 57,00 | 50,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 11 | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Persen | 40 | 85,00 | 20,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 12 | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | Poin | 77 | 74,00 | 77 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 13 | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Poin | 63 | 57,00 | 63 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| **F** | **Sosial** | | | | | | |
| 1 | Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | Persen | 2,2 | 3,48 | 2,20 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase PPKS yang Tertangani (%) | Persen | 79 | 71,89 | 79,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial | Persen | 85 | 90,00 | 85,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | Persen | 52,94 | 82,00 | 52,94 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa | Persen | 85 | 50,00 | 85,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| | Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | | | | | | |
| 6 | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | Persen | 2 | 64,00 | 2,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 7 | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | Persen | N/A | 75,00 | | | |
| 8 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 2,89 | 54,00 | 2,89 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 9 | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 22,38 | 58,50 | 22,38 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 10 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 9,9 | 62,70 | 9,90 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 11 | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 5 | 68,50 | 5,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 12 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 2,61 | 54,00 | 2,61 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 13 | Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas | Poin | 55,23 | 68,00 | 55,23 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 14 | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia | Poin | 51,43 | 57,50 | 51,43 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 15 | Indeks Peranan Sosial | Poin | N/A | 57,00 | | | |
| 16 | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 52,61 | 59,85 | 52,61 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 17 | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | Persen | N/A | 45,15 | | | |
| 18 | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin | Persen | 12,57 | 46,20 | 12,57 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 19 | Indeks Kebutuhan Dasar | Poin | N/A | 31,50 | | | |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 20 | Indeks Keberdayaan Ekonomi | Poin | N/A | 36,75 | | | |
| 21 | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | Persen | 3,13 | 52,50 | 3,13 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 22 | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100 | 81,60 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 23 | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya | Persen | N/A | 71,40 | 0.00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 24 | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | Persen | 100 | 76,50 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| **G** | **Tenaga Kerja** | | | | | | |
| 1 | Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 (%) | Persen | 15,8 | 9,93 | | | |
| 2 | Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%) | Persen | 0,33 | 0,63 | 0,31 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Dokumen Rencana Tenaga Kerja | Dokumen | N/A | 1,00 | 0,5 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya | Persen | 16 | 51,50 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | Persen | 18 | 80,00 | 0,50 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 6 | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial | Angka | 27,36 | 25,00 | 18,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| **H** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | |
| 1 | TPAK Perempuan (%) | Persen | 42,46 | 67,50 | 45,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Kasus KDRT (Kasus) | Kasus | 1 | 1 | 0,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Status Kabupaten Layak Anak (Kategori) | Kategori | N/A | Pratama | - | | |
| 4 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persen | 12,1 | 0,90 | 14,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 5 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | Persen | 42,46 | 67,50 | 45,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 6 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 78,6 | 77,00 | 75,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 7 | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | | 48,5 | 45,00 | 43,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 8 | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan | | 52,2 | 55,00 | 53,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 9 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Poin | 60 | 69,11 | 62,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 10 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 100 | 100,00 | 75,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 11 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Poin | 71,82 | 74,00 | 72,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **I** | **Pangan** | | | | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (Poin) | Poin | 91,02 | 89,20 | 91,02 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%) | Persen | 65 | 66,04 | 65 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 91,02 | 89,20 | 91,02 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | Persen | 8,01 | 27,00 | 8,01 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | Persen | N/A | 73,50 | | | |
| **J** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Air (Poin) | Poin | 70,19 | 56,00 | 20,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (Poin) | Poin | 86,15 | 91,44 | 20,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin) | Poin | 72,9 | 56,00 | 20,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | Persen | 98 | 85,00 | 20,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 5 | Persentase RTH | Persen | N/A | 46,35 | | | |
| 6 | Persentase Limbah B3 yang Terkelola | Persen | N/A | 0,00 | | | |
| 7 | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH | | 80 | 80,00 | 30,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 8 | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persen | | 0,00 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 9 | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persen | N/A | 75,00 | 25,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 10 | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persen | N/A | 73,50 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 11 | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | Persen | N/A | 100,00 | 40,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 12 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Poin | N/A | 70,00 | 6,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **K** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%) | Persen | 96,96 | 99,17 | 98,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Rasio bayi berakte kelahiran (%) | Persen | 93,14 | 94,00 | 94,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah (%) | Persen | 58,68 | 58,00 | 58,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Persen | 19,6 | 76,22 | 74,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 5 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persen | 0,033 | 56,93 | 55,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 6 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persen | 47,24 | 59,00 | 45,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 7 | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | Persen | 41,08 | 41,40 | 40,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **L** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | |
| 1 | Desa Mandiri | Persen | 4 | 5 | 4,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Desa Maju | Persen | 29 | 32 | 29,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Desa Berkembang | Persen | 170 | 173 | 170,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Desa Tertinggal | Persen | 81 | 79 | 81,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Desa Sangat Tertinggal | Persen | 19 | 14 | 19,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persen | 60 | 62,70 | 60,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 7 | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persen | 55 | 57,48 | 25,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 8 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | Persen | 50 | 52,25 | 30,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 9 | Persentase Fasilitasi Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | Persen | 40 | 47,03 | 15,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **M** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | |
| 1 | Total Fertility Rate (Anak Per Wanita) | Angka | 2,9 | 2,95 | 2,90 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Anak Per 1.000 Wanita) | Angka | 27,8 | 27,00 | 26,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) | Angka | 51 | 45,00 | 53,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | Persen | 23,4 | 20,00 | 23,40 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 5 | Rasio Akseptor KB (%) | Persen | 73 | 84,00 | 74,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 6 | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | Persen | 63,5 | 65,00 | 64,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **N** | **Perhubungan** | | | | | | |
| 1 | Rasio Konektivitas (%) | Persen | 20 | 20,00 | 20 | Tercapai | Data tahun 202 |
| 2 | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%) | Persen | 55,02 | 65,00 | 55,02 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| **O** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | |
| 1 | Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) | Persen | 73 | 72,77 | 72,80 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Persentase rumah tangga dengan akses internet (%) | Persen | 83,86 | 81,91 | 81,90 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah | Persen | 65 | 63,00 | 65,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| **P** | **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | | | | | |
| 1 | Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%) | Persen | - | 1,50 | 2,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%) | Persen | 14 | 2,50 | 1,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | Persen | N/A | 1,20 | 1,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Persentase Koperasi Aktif (%) | Persen | 59,32 | 32,75 | 56,85 | Tercapai | Data tahun 2026 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 5 | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persen | 5 | 72,45 | 37,22 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 6 | Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan | Persen | 41 | 67,28 | 43,86 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 7 | Persentase Koperasi yang Berkualitas | Persen | 5 | 25,00 | 56,85 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 8 | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | Persen | 0,7 | 10,50 | 1,09 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 9 | Pertumbuhan Wirausaha | Persen | 20 | 18,00 | 20 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 10 | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | Persen | N/A | 0,70 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **Q** | **Penanaman Modal** | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi (%) | Persen | 3,5 | 6,60 | 4,77 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Realisasi PMDN/PMA (Rp Miliar) | Rp | 7.847,99 | 906,73 | 43,22 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Jumlah Investor PMDN/PMA (Perusahaan) | Perusahaan | 37 | 30,00 | 39,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%) | Persen | 1,92 | - | - | - | - |
| 5 | Realisasi Total terhadap Target Investasi | Angka | 29,25 | 77,25 | 4,77 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 6 | Persentase Peningkatan Investor | Persen | 54,17 | 4,28 | 130,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 7 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persen | 99,72 | 53,50 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 8 | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha | Persen | 92 | 81,60 | 50,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 9 | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | Persen | 100 | 88,00 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| **R** | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | |
| 1 | Persentase Wirausaha Muda (%) | Persen | 0,1 | 74,26 | 0,10 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%) | Persen | 20 | 72,77 | 20,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) | Persen | 5 | 25 | 5,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Jumlah atlet berprestasi (Orang) | Orang | 25 | 25 | 25,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Jumlah prestasi olahraga | Angka | 5 | 6 | 5,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | Persen | 40 | 45,00 | 40,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| **S** | **Statistik** | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik (Poin) | Poin | N/A | 2,30 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Buku Kabupaten dalam Angka | Dokumen | 100 | Ada | 100 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Buku PDRB dalam Angka | Dokumen | 100 | Ada | 100 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| **T** | **Persandian** | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%) | Persen | N/A | 24,02 | | | |
| **U** | **Kebudayaan** | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kegiatan) | Kegiatan | 10 | 10 | 10,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan (Objek) | Objek | 26 | 26 | 26,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Objek) | Objek | 20 | 20 | 20,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Objek) | Objek | 26 | 26 | 26,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Angka | N/A | 52,50 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | Persen | N/A | 73,50 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 7 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persen | N/A | 78,75 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| **V** | **Perpustakaan** | | | | | | |
| 1 | Indeks Minat Baca (Poin) | Poin | 52 | 51,89 | 49,05 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang) | Orang | 1.200 | 1.500 | 1400 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%) | Persen | 4 | 4,00 | 4,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional | Nilai | 82,37 | 83,20 | 83,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **W** | **Kearsipan** | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 1 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Poin) | Poin | 14,69 | 40,00 | 14,69 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | Persen | 18,5 | 19,00 | 14,80 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Tingkat Ketersediaan Arsip | Dokumen | 39,9 | 69,01 | 15,60 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persen | 28,1 | 56,65 | 15,60 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 5 | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persen | N/A | 20,60 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| X | Pariwisata | | | | | | |
| 1 | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Angka | 2500 | 2.550 | 2.500,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | Persen | 1 | 2,00 | 1,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | Persen | N/A | 82,40 | | | |
| 4 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual | Persen | N/A | 5,35 | | | |
| 5 | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | Persen | N/A | 21,00 | | | |
| Y | Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) | Persen | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Persen | 3.734,68 | 4.100,00 | 980,12 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Angka | 168,75 | 150,40 | 42,74 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Angka | 20 | 25,00 | 25,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 5 | Angka Konsumsi Ikan | Angka | 29,73 | 29,90 | 29,62 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **Z** | **Pertanian** | | | | | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%) | Persen | 5,3 | 4,30 | 5,30 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%) | Persen | 43,75 | 40,78 | 43,75 | Tercapai | Data tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 3 | Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) | Persen | 1,89 | 1,84 | 1,89 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (Rp Juta/kapita) | | 125,85 | 156,10 | 125,85 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Poin | 2 | 2,30 | 2,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 6 | Peningkatan Produksi Hortikultura | Poin | N/A | 0,99 | 1,08 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 7 | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | Poin | 3% | 0,60 | 3,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 8 | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | | 70 | 73,50 | 70 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 9 | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Poin | 50 | 52,50 | 50,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 10 | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV | Persen | N/A | 45,15 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 11 | Persentase Penanganan Bencana Pertanian | Persen | 71,66 | 68,25 | 71,66 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 12 | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian | Persen | 60,64 | 57,75 | 60,64 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 13 | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan | Persen | 44,1 | 42,00 | 44,10 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| **AA** | **Perdagangan** | | | | | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) | Persen | 6,22 | 6,20 | 6,22 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%) | Persen | 56,67 | 77,78 | 67,65 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | Persen | N/A | 21,00 | 20,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Nilai Ekspor Barang | Nilai | N/A | 1,35 | 1,30 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | Persen | N/A | 100,00 | 90,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan | Persen | 5,71 | 65,00 | 10,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| **AB** | **Perindustrian** | | | | | | |
| 1 | Proporsi jumlah IKM (%) | Persen | 82 | 100,00 | 50,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | Persen | N/A | 83,43 | 82 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini | Persen | 21,05 | 36,05 | 60,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| **AC** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | |
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin) | Poin | 70,00 | 71,89 | 70,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | Persen | 91,97 | 100,00 | 91,97 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 7 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 8 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 9 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 10 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| **AD** | **Keuangan** | | | | | | |
| 1 | Opini BPK atas Pelaporan Keuangan (Level) | Level | WTP | WTP | WTP | Tercapai | Data tahun 2026 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 2 | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | Persen | 4,49 | 4,80 | 0,06 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | RoA BUMD (%) | Persen | N/A | 0,72 | | | |
| 4 | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | Persen | 32 | 10,00 | 3,05 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 5 | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | Persen | 26,52 | 10,00 | 6,90 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 6 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | Persen | 95 | 30,00 | 44,16 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 7 | Persentase Penurunan SILPA | Persen | 3,93 | 15,00 | 0,82 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 8 | Persentase laporan keuangan tepat waktu | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| 9 | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | Persen | 5 | 100,00 | 5 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 10 | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | | N/A | 74,16 | | | |
| 11 | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital | Persen | 100 | 78,28 | 100,00 | Tercapai | Data tahun 2026 |
| **AE** | **Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN (Poin) | Poin | 77 | 73,00 | 77 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%) | Persen | 8 | 8,00 | 8 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%) | Persen | 8 | 8,00 | 8 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | Persen | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persen | 15 | 72,45 | 15 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | Persen | 79 | 76,59 | 79 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 7 | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | Persen | 80 | 77,63 | 80 | Tercapai | Data tahun 2025 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 8 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional | Persen | 15 | 83,20 | 15 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 9 | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan | Persen | 85 | 80,85 | 85 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 10 | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi | Persen | 15 | 68,25 | 15 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 11 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis | Persen | 15 | 73,50 | 15 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| **AF** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan (%) | Persen | 90 | 31,78 | 90 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%) | Persen | 90 | 40,95 | 90 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%) | Persen | 90 | 22,37 | 90 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%) | Persen | 90 | 17,23 | 90 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan | Persen | N/A | 100,00 | | | |
| 6 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persen | N/A | 100,00 | | | |
| 7 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persen | N/A | 100,00 | | | |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 8 | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah | Persen | N/A | 100,00 | | | |
| 9 | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | Persen | N/A | 100,00 | | | |
| 10 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah | Persen | N/A | 100,00 | | | |
| 11 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah | Persen | N/A | 100,00 | | | |
| 12 | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah | Persen | N/A | 100,00 | | | |
| **AG** | **Pengawasan** | | | | | | |
| 1 | Indeks Persepsi Korupsi | Poin | 53,7 | 80 | 53,70 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%) | Persen | N/A | 100 | 92,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 3 | Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti | Angka | 80 | 85 | 58,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level) | Level | N/A | 3 | 2,08 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level) | Level | N/A | 3 | 2,14 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 6 | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | | N/A | 85,00 | 80,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **AH** | **Sekretariat Daerah** | | | | | | |
| 1 | Nilai Evaluasi SAKIP (Poin) | Poin | CC | B | CC | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 2 | Efektivitas Kerjasama Daerah | Poin | N/A | 80,34 | 80,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Poin | N/A | 85,00 | 1,42 | Belum Tercapai | Data tahun 2025 |
| 4 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Peresen | N/A | 77,25 | 55,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |

| No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Realisasi 2025 | Tahun 2026 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target RKUA | Realisasi s/d Tw II 2026 | Predikat Kinerja | |
| 5 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persen | N/A | 78,80 | 35,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| **AI** | **Pemerintahan Umum** | | | | | | |
| 1 | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Poin | 40 | 42,00 | 50,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 2 | Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Persen | N/A | 55,65 | 0,00 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 3 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 46,20 | 34,5 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |
| 4 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | Persen | 90 | 90,00 | 90,00 | Tercapai | Data tahun 2025 |
| 5 | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | Persen | 76,2 | 100,00 | 66,7 | Belum Tercapai | Data tahun 2026 |

Dari tabel diatas, capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih banyak yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan dari kegiatan tersebut dilaksanakan sebagian besar pada triwulan selanjutnya atau pada akhir tahun.

## 7.4. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian indikator SPM menggambarkan tingkat pemenuhan pelayanan dasar wajib oleh pemerintah daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pelaporan capaian SPM menjadi instrumen krusial dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Rincian capaian indikator SPM Kabupaten Padang Lawas Sampai dengan Triwulan II tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7.6**
**Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Satuan | Realisasi | | | | | | Ket | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TW II 2026 | | |
| I | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| A. | Pendidikan Dasar Dan Menengah | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun | Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 95,39 | 96,44 | 96,67 | 98,40 | 92,92 | 88,43 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | Kemampuan Literasi SD/MI | Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar) | Nilai | 45,19 | 46,54 | 52,47 | 53,32 | 61,02 | 54,06 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | Kemampuan Numerasi SD/MI | Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar) | Nilai | 26,91 | 32,79 | 47,54 | 51,09 | 64,29 | 52,53 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4 | Iklim Keamanan SD/MI | Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan | Nilai | 68,40 | 69,77 | 70,61 | 73,92 | 73,92 | 70,92 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5 | Iklim Kebinekaan SD/MI | Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan | Nilai | 56,19 | 58,71 | 66,85 | 67,20 | 67,2 | 61,27 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 6 | Iklim Inklusivitas SD/MI | Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan | Nilai | 50,83 | 53,55 | 56,37 | 57,41 | 57,4 | 55,17 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Satuan | Realisasi | | | | | | Ket | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TW II 2026 | | |
| 7 | Kemampuan Literasi SMP/MTs | Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar) | Nilai | 28,75 | 31,96 | 46,14 | 57,72 | 49,90 | 62,14 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 8 | Kemampuan Numerasi SMP/MTs | Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar) | Nilai | 51,44 | 52,68 | 53,22 | 55,45 | 51,60 | 59,15 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 9 | Iklim Keamanan SMP/MTs | Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan | Nilai | 59,21 | 61,89 | 64,61 | 67,03 | 67,03 | 65,87 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 10 | Iklim Kebinekaan SMP/MTs | Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan | Nilai | 52,20 | 57,52 | 64,16 | 67,29 | 67,29 | 61,93 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 11 | Iklim Inklusivitas SMP/MTs | Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan | Nilai | 45,73 | 50,34 | 54,95 | 54,03 | 54,03 | 55,6 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| B | Pendidikan Kesetaraan | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan | Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 15,38 | 15,62 | 15,76 | 21,16 | 55,89 | 57,39 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| C | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Persen | 59,76 | 61,52 | 63,42 | 80,01 | 65,85 | 85,94 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | Persen | 8,72 | 10,84 | 12,22 | 15,87 | 1,67 | 2,04 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4 | Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV | Persen | 48,22 | 49,64 | 49,83 | 50,23 | 49,3 | 88,56 | Data Tahun 2026 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| II | KESEHATAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 51,33 | 51,33 | 61,1 | 66,9 | 67,81 | 67,81 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 2 | Pelayanan ksehetan ibu bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 44 | 44 | 62,6 | 63,2 | 63,81 | 63,81 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 3 | Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan | Persen | 51,2 | 51,2 | 66,4 | 63 | 66 | 66 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Satuan | Realisasi | | | | | | Ket | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TW II 2026 | | |
| | | pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 46,3 | 46,3 | 45 | 66 | 78,08 | 78,08 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 99,03 | 99,03 | 98 | 100 | 97,87 | 97,87 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 26,3 | 6,5 | 31,1 | 38 | 40,4 | 40,4 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 74 | 48 | 48 | 98 | 98,75 | 98,75 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 3,6 | 10,25 | 75,82 | 84 | 62,5 | 62,5 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 9 | Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 31,7 | 30 | 310 | 184 | 106,1 | 106,1 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 79 | 68,38 | 100,9 | 127 | 120,5 | 120,5 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 11 | Pelayanan Kesehatan orang terduga tuborkulosis | Jumlah warga negara dterduga tuborkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 24,7 | 53,34 | 96,9 | 69,5 | 104,56 | 104,56 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic ien cy Virus) | Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 100 | 100 | 73,2 | 88,7 | 71,64 | 71,64 | Data Tahun 2025 | DINAS KESEHATAN |
| III | PEKERJAAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan air minum sehari-hari | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persen | 15,66 | 20,5 | 22 | 25 | 14,56 | 14,56 | Data Tahun 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Satuan | Realisasi | | | | | | Ket | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TW II 2026 | | |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| IV | PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Data Tahun 2025 | DINAS PERKIMHUB |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | DINAS PERKIMHUB |
| V | TRANTIBUMLINMAS | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum | Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Data Tahun 2025 | SATPOL PP & DAMKAR |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 10 | Data Tahun 2026 | BPBD |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 30 | Data Tahun 2026 | BPBD |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 | Data Tahun 2026 | BPBD |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 48 | Data Tahun 2025 | SATPOL PP & DAMKAR |
| VI | SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 0 | 0 | 29,5 | 14,2 | 40 | 60 | Data Tahun 2026 | DINAS SOSIAL |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Satuan | Realisasi | | | | | | Ket | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TW II 2026 | | |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 20 | 20 | 60 | 46 | 52 | 50 | Data Tahun 2026 | DINAS SOSIAL |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 100 | 100 | 98 | 44,5 | 59 | 40 | Data Tahun 2026 | DINAS SOSIAL |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 26,6 | 29,4 | 46 | 34 | 45 | 100 | Data Tahun 2026 | DINAS SOSIAL |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 77,7 | 78,9 | 80,1 | 80,9 | 100 | 18 | Data Tahun 2026 | DINAS SOSIAL |

Capaian indikator SPM tahun sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan variasi kinerja antar urusan pelayanan dasar yang dikelola oleh perangkat daerah. Secara umum, terdapat beberapa capaian yang menunjukkan hasil positif, namun masih terdapat sejumlah urusan yang memerlukan perhatian dan peningkatan signifikan.

Capaian urusan pendidikan mencatatkan rata-rata sebesar 61,4 persen, yang mengindikasikan masih besarnya tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar. Kendati tingkat partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun telah mendekati kondisi ideal, pemenuhan indikator mutu-seperti kemampuan literasi, numerasi, serta iklim kebinekaan dan inklusivitas di satuan pendidikan-masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan mutu pembelajaran dan penyediaan lingkungan belajar yang aman serta inklusif. Sementara, urusan kesehatan mencatat capaian indikator mencapai 81,50 persen, mencerminkan peningkatan layanan terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peningkatan cakupan dan

kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, serta implementasi program promotif dan preventif yang terintegrasi.

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) juga menunjukkan kinerja baik dengan rata-rata capaian indikator sebesar 47,6 persen. Urusan sosial mencatat capaian rendah, yakni 53,6 persen, menunjukkan perlunya penguatan intervensi untuk kelompok rentan seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, serta korban bencana, baik dalam bentuk rehabilitasi sosial maupun perlindungan dan jaminan sosial.

Capaian sangat rendah ditemukan pada urusan pekerjaan umum, dengan rata-rata capaian hanya 14,56 persen, serta urusan perumahan rakyat yaitu 0,5 persen. Hal ini menjadi perhatian utama, mengingat layanan air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

## 7.5 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan dan isu strategis daerah mengacu pada tantangan utama yang dihadapi suatu wilayah dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini bisa meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian dan solusi terencana. Identifikasi isu strategis penting untuk menentukan prioritas kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Isu strategis daerah biasanya berkaitan dengan permasalahan yang berdampak luas dan berkelanjutan, seperti kemiskinan, pengangguran, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, keterbatasan sumber daya, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam. Penanganan isu-isu ini memerlukan sinergi antar sektor dan pemangku kepentingan serta perencanaan yang adaptif untuk menghadapi dinamika perkembangan daerah. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi yaitu :

| No | Permasalahan Utama | Strategi |
|---|---|---|
| 1 | Belum optimalnya penurunan kemiskinan | ● Pemetaan keluarga miskin/rentan menurut desa/kelurahan<br>● Pemberian bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin/rentan. |
| 2 | Belum optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia | ● Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP sesuai standar pendidikan nasional<br>● Dukungan Pembangunan sekolah rakyat<br>● Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan<br>● Penguatan program UHC |

| No | Permasalahan Utama | Strategi |
|---|---|---|
| | | ● Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan<br>● Peningkatan kualitas layanan Fasilitas kesehatan Dasar<br>● Peningkatan kualitas Fasilitas kesehatan layanan Rujukan<br>● Peningkatan Daya saing Olahraga dan Kepemudaan |
| 3 | Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi | ● Pemberian bantuan bibit unggul pertanian<br>● Pemberian bantuan benih unggul untuk budidaya perikanan<br>● Penyediaan bantuan bibit perkebunan<br>● Pemelirahaan dan Pemenuhan Prasarana Perikanan<br>● Kajian kelayakan Penataan Pasar Rakyat |
| 4 | Masih rendahnya kualitas infrastruktur | ● Peningkatan kualitas jalan dan jembatan;<br>● Peningkatan akses rumah layak huni melalui bedah rumah;<br>● Peningkatan akses air minum aman;<br>● Peningkatan akses sanitasi aman;<br>● Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung (konektivitas) antar Desa dan antar Kecamatan<br>● Pengembangan Pusat Pemerintahan Terpadu<br>● Peningkatan kapasitas Kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan Pemulihan Pascabencana<br>● Pembangunan infrastruktur Mitigasi Bencana |
| 5 | Degradasi Lingkungan Hidup | ● Peningkatan Layanan Persampahan<br>● Pemenuhan Prasarana Pengolahan Sampah |
| 6 | Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan | ● Optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online)<br>● Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik |

Berdasarkan hasil perumusan masalah maka isu strategis pembangunan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

   Sumber Daya Manusia merupakan modal dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Padang Lawas secara umum masih berada pada tingkat SMP kelas 3. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas dan pemerataan guru ke berbagai wilayah, serta peningkatan jaringan infrastruktur menuju sekolah. Dari sisi kesehatan, Kabupaten Padang Lawas masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Padang

Lawas akan meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan dokter dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

2. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan serta sumber daya daerah secara berkelanjutan.

   Kabupaten Padang Lawas memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonominya. Mayoritas aktivitas perekonomian hingga saat ini masih didominasi sektor primer, terutama pertanian. Kabupaten Padang Lawas juga terdapat wilayah yang memiliki potensi pertambangan. Kabupaten Padang Lawas harus memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya melalui hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk yang bernilai tambah hingga pada akhirnya diharapkan dapat bersaing di pasar ekspor. Di samping itu, Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi pada Sektor Pariwisata, di mana terdapat sebanyak 20 destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memperhatikan hal ini mengingat sektor pariwisata merupakan sektor pertumbuhan ekonomi baru yang dapat berperan sebagai katalis bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisatanya.

3. Peningkatan kualitas Infrastruktur yang resilien terhadap bencana.

   Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk kepentingan publik. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas penting untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan perekonomian. Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi sejumlah isu yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya kualitas jalan, jembatan yang rusak, dan saluran irigasi yang kurang baik. Ketersediaan jalan dan jembatan yang berkualitas penting bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan transportasi barang antar daerah. Saluran irigasi yang baik juga berperan penting bagi peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan kualitas infrastruktur yang melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

4. Pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

   Isu lingkungan hingga saat ini masih menjadi perhatian dari tingkat global hingga daerah. Lingkungan yang bersih dan aman memberikan

kenyamanan bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan menjalankan aktivitasnya. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan akan memperhatikan kondisi lingkungan dan sumber daya alam sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak akan merusak lingkungan. Kabupaten Padang Lawas juga akan berupaya untuk menggali potensi PLT EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber listrik masyarakat dan non-domestik. Kabupaten Padang Lawas juga akan berupaya untuk meningkatkan pengelolaan persampahan daerahnya dengan membangun fasilitas pengolahan sampah daerah.

5. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.

   Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas harus diwujudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui pengembangan sistem pemerintahan yang transparan berbasis teknologi dan program-program yang inovatif. Pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan SDM yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**7.6. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**

Rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, perkembangan kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah serta mampu menjawab berbagai dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Penyesuaian rencana kerja mencakup perubahan target kinerja, penambahan maupun pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta penyempurnaan indikator kinerja sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pada semester pertama tahun anggaran. Perubahan juga diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan yang bersifat mendesak, strategis, dan prioritas, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari aspek pendanaan, perubahan dilakukan melalui penyesuaian pagu anggaran berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah, perubahan kebijakan fiskal, optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan, serta hasil efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, serta pemerataan pembangunan. Rencana perubahan anggaran pada perangkat daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.7**
**Jumlah Pagu Anggaran RKUA Dan Perubahan KUA Tahun 2026**

| NO | KODE SKPD | NAMA SKPD | PAGU KUA | APBD | PKUA | SELISIH ( PKUA-APBD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 326.392.914.358,00 | 338.786.325.408,00 | 339.193.131.998 | 406.806.590 |
| 2 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN | 130.560.318.426,00 | 130.266.318.526,00 | 141.310.486.343 | 11.044.167.817 |
| 3 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 56.362.077.098,00 | 63.703.077.038,00 | 83.831.875.144 | 20.128.798.106 |
| 4 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 46.658.261.789,00 | 47.688.617.387,00 | 130.038.253.110 | 82.349.635.723 |
| 5 | 1.04.2.15.1.03.01.0000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 8.482.746.397,00 | 8.539.618.297,00 | 11.133.648.882 | 2.594.030.585 |
| 6 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 4.154.802.283,00 | 4.154.802.283,00 | 4.454.294.448 | 299.492.165 |
| 7 | 1.05.0.00.0.00.03.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.406.012.086,00 | 3.356.012.086,00 | 10.787.186.261 | 7.431.174.175 |
| 8 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL | 4.870.779.188,00 | 4.848.779.138,00 | 5.126.063.635 | 277.284.497 |
| 9 | 2.07.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KETENAGAKERJAAN | 2.441.888.798,00 | 2.602.431.948,00 | 2.688.936.497 | 86.504.549 |
| 10 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 6.360.075.414,00 | 6.306.543.494,00 | 5.795.876.954 | (510.666.540) |
| 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6.805.872.808,00 | 6.653.270.308,00 | 7.700.320.013 | 1.047.049.705 |
| 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.701.890.386,00 | 3.658.890.286,00 | 3.749.945.323 | 91.055.037 |

| NO | KODE SKPD | NAMA SKPD | PAGU KUA | APBD | PKUA | SELISIH ( PKUA-APBD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA | 3.848.697.363,00 | 3.798.623.013,00 | 4.145.516.957 | 346.893.944 |
| 14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10.073.828.198,00 | 10.015.815.198,00 | 10.096.439.449 | 80.624.251 |
| 15 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.211.333.605,00 | 3.251.333.005,00 | 3.574.963.120 | 323.630.115 |
| 16 | 2.17.3.31.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 3.643.329.900,00 | 3.629.329.850,00 | 10.196.475.143 | 6.567.145.293 |
| 17 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2.253.340.242,00 | 2.256.340.242,00 | 2.138.363.183 | (117.977.059) |
| 18 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 3.497.297.355,00 | 4.111.780.307,00 | 5.600.762.707 | 1.488.982.400 |
| 19 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2.448.948.341,00 | 2.327.947.453,00 | 2.444.085.428 | 116.137.975 |
| 20 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3.754.499.811,00 | 3.704.499.361,00 | 5.080.910.174 | 1.376.410.813 |
| 21 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN | 30.066.634.242,00 | 31.700.433.512,00 | 34.024.485.158 | 2.324.051.646 |
| 22 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN | 30.220.348.042,00 | 38.170.348.042,00 | 42.990.489.299 | 4.820.141.257 |
| 23 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5.998.639.116,06 | 5.950.636.916,00 | 6.246.196.143 | 295.559.227 |

| NO | KODE SKPD | NAMA SKPD | PAGU KUA | APBD | PKUA | SELISIH ( PKUA-APBD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | 299.080.417.143,00 | 293.275.818.786,00 | 312.087.167.374 | 18.811.348.588 |
| 25 | 5.03.5.04.0.00.03.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4.446.929.261,00 | 4.396.914.261,00 | 4.365.536.746 | (31.377.515) |
| 26 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS | 10.428.698.017,00 | 8.695.697.867,00 | 8.656.556.565 | (39.141.302) |
| 27 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KECAMATAN BARUMUN | 2.429.364.986,00 | 2.412.698.986,00 | 2.624.159.938 | 211.460.952 |
| 28 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN LUBUK BARUMUN | 2.153.685.759,00 | 2.135.440.559,00 | 2.122.927.028 | (12.513.531) |
| 29 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KECAMATAN HURISTAK | 1.433.601.825,00 | 1.412.599.825,00 | 1.367.411.711 | (45.188.114) |
| 30 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KECAMATAN BARUMUN SELATAN | 1.090.546.643,00 | 1.088.546.443,00 | 1.137.974.372 | 49.427.929 |
| 31 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM | 2.049.027.969,00 | 2.022.979.969,00 | 1.681.678.073 | (341.301.896) |
| 32 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KECAMATAN HUTARAJA TINGGI | 2.495.104.033,00 | 2.451.648.033,00 | 2.182.079.662 | (269.568.371) |
| 33 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN | 1.664.031.283,00 | 1.655.392.233,00 | 1.526.462.159 | (128.930.074) |
| 34 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | KECAMATAN SOSA | 2.162.408.132,00 | 2.087.191.982,00 | 2.066.160.090 | (21.031.892) |
| 35 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | KECAMATAN BARUMUN TENGAH | 2.058.735.097,00 | 2.056.683.897,00 | 1.866.262.992 | (190.420.905) |
| 36 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN | 1.573.520.422,00 | 1.546.501.427,00 | 1.396.914.264 | (149.587.163) |
| 37 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | KECAMATAN ULU BARUMUN | 1.497.929.953,00 | 1.471.908.903,00 | 1.329.199.308 | (142.709.595) |

| NO | KODE SKPD | NAMA SKPD | PAGU KUA | APBD | PKUA | SELISIH ( PKUA-APBD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | KECAMATAN SOSOPAN | 1.535.747.057,00 | 1.500.738.557,00 | 1.365.003.336 | (135.735.221) |
| 39 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | KECAMATAN BARUMUN BARU | 1.425.348.756,00 | 1.353.305.356,00 | 1.354.688.380 | 1.383.024 |
| 40 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | KECAMATAN BARUMUN BARAT | 1.365.536.090,00 | 1.292.219.940,00 | 1.311.103.600 | 18.883.660 |
| 41 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | KECAMATAN SOSA JULU | 1.468.975.537,00 | 1.444.975.537,00 | 1.436.044.135 | (8.931.402) |
| 42 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 | KECAMATAN ULU SOSA | 1.389.840.458,00 | 1.355.840.208,00 | 1.282.128.978 | (73.711.230) |
| 43 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 | KECAMATAN SOSA TIMUR | 1.714.048.588,00 | 1.646.855.388,00 | 1.423.381.499 | (223.473.889) |
| 44 | 8.01.2.19.0.00.01.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4.590.449.607,00 | 4.595.449.607,00 | 5.235.140.724 | 639.691.117 |
| **TOTAL** | | | **1.047.268.481.862,06** | **1.069.381.180.862,00** | **1.230.166.686.303** | **160.785.505.441** |

Berdasarkan Tabel 7.7, pagu anggaran dalam RKUA Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, target kinerja, serta kemampuan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, dilakukan evaluasi capaian hingga Triwulan II Tahun 2026 untuk menilai kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi program, kegiatan, dan subkegiatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyesuaian pagu anggaran pada masing-masing perangkat daerah dalam Perubahan RKUA Tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat capaian kinerja, realisasi anggaran, perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat, perubahan kebijakan, serta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, selisih antara pagu RKUA awal dan Perubahan RKUA Tahun 2026 merupakan langkah penyesuaian perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program prioritas tetap efektif dan seluruh target kinerja akhir tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Seperti misalnya pada sektor perlindungan dan jaminan kesehatan, perubahan pagu diarahkan untuk mendukung pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC). Penyesuaian anggaran didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, khususnya terkait kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat, cakupan kepesertaan, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta keberlanjutan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, perubahan pagu pada program perlindungan dan jaminan sosial kesehatan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pencapaian target UHC.

Berdasarkan hasil perbandingan pagu anggaran RKUA dan Perubahan RKUA Tahun 2026, terdapat beberapa perangkat daerah yang mengalami kenaikan pagu anggaran cukup signifikan, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada Dinas PUPR, peningkatan pagu anggaran diprioritaskan pada kebutuhan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah. seperti peningkatan kondisi dan kemantapan jalan, peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, peningkatan kualitas jaringan irigasi, serta peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur sesuai kewenangan daerah. Dengan demikian, kenaikan pagu tidak hanya menunjukkan tambahan belanja, tetapi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, pada BPBD, kenaikan pagu anggaran diprioritaskan pada kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. *Outcome* yang diharapkan antara lain meningkatnya kapasitas penanganan bencana, berkurangnya risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat, meningkatnya kecepatan respons terhadap kejadian bencana, serta meningkatnya cakupan wilayah dan masyarakat yang memperoleh pelayanan penanggulangan bencana.

**Tabel 7.8**
**JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PADA RKUA, APBD DAN PERUBAHAN RKUA TAHUN 2026**

| NO | NAMA OPD | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKUA | APBD | P RKUA | RKUA | APBD | P RKUA | RKUA | APBD | P RKUA |
| 1. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 19 | 77 | 79 | 79 |
| 2. | DINAS KESEHATAN | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | 61 | 63 | 64 |
| 3. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 50 | 50 | 50 |
| 5. | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 21 | 23 | 23 |
| 6. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 7. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 17 | 18 | 18 |
| 8. | DINAS SOSIAL | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 |
| 9. | DINAS KETENAGAKERJAAN | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| 10. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 11. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | 21 |
| 12. | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 13. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 7 | 7 | 17 | 19 | 19 | 35 | 40 | 40 |
| 14. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 15. | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 25 | 25 | 28 |
| 16. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 |
| 17. | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 29 | 30 | 31 |
| 18. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | 6 | 6 | 10 | 19 | 19 | 37 | 65 | 65 |
| 19. | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 7 | 7 | 9 | 15 | 15 | 18 | 28 | 28 | 30 |
| 20. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 25 | 25 | 29 |
| 21. | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 | 60 | 60 | 60 |

| NO | NAMA OPD | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKUA | APBD | P RKUA | RKUA | APBD | P RKUA | RKUA | APBD | P RKUA |
| | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 28 | 28 | 28 |
| 22. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 40 | 40 | 41 |
| 23. | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 54 | 57 | 60 |
| 24. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 |
| 25. | INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| 26. | KECAMATAN BARUMUN | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 27. | KECAMATAN LUBUK BARUMUN | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 28. | KECAMATAN HURISTAK | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 29. | KECAMATAN BARUMUN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 14 | 14 |
| 30. | KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 16 | 15 | 15 |
| 31. | KECAMATAN HUTARAJA TINGGI | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 32. | KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 33. | KECAMATAN SOSA | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| 34. | KECAMATAN BARUMUN TENGAH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 35. | KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| 36. | KECAMATAN ULU BARUMUN | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| 37. | KECAMATAN SOSOPAN | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| 38. | KECAMATAN BARUMUN BARU | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| 39. | KECAMATAN BARUMUN BARAT | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 |
| 40. | KECAMATAN SOSA JULU | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 41. | KECAMATAN ULU SOSA | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 42. | KECAMATAN SOSA TIMUR | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 43. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 |

**Tabel 7.9**
**Prioritas Kabupaten, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKUA**
**Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| 1. | Peningkatan Kualitas Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 250.000.000 | 250.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.200.000.000 | 1.260.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pengadaan Mebel Sekolah | 480.000.000,00 | 420.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.280.000.000,00 | 1.920.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.400.000.000,00 | 1.760.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 120.000.000,00 | 120.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 340.000.000,00 | 340.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.005.000.000,00 | 1.005.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 600.000.000,00 | 150.103.100 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | 68.046.000,00 | 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 105.593.000,00 | 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 133.856.000,00 | 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 109.500.000,00 | 188.971.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.675.000.000,00 | 3.840.734.350,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 530.949.000,00 | 530.949.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 6.071.867.501,00 | 2.765.004.932,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 2.413.935.800,00 | 1.742.954.568,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 907.500.000,00 | 235.802.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 10.500.000,00 | 431.341.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 245.461.200,00 | 245.461.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 938.849.000,00 | 828.495.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 10.500.000,00 | 0 | DINAS KESEHATAN |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 979.289.950,00 | 1.375.336.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3.738.894.000,00 | 2.904.479.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 314.801.000,00 | 0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 608.500.000,00 | 913.578.050,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 188.100.000,00 | 409.066.450,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1.195.261.101,00 | 1.317.958.602,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 34.100.000.000,00 | 42.683.072.300,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | 4.228.010.400,00 | 8.121.004.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.600.691.900,00 | 1.467.091.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 854.850.000,00 | 979.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Peningkatan Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | 18.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 913.390.000,00 | 1.907.687.789,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 949.227.469,00 | 1.304.980.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 3.000.000.000,00 | 4.315.138.500,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| | | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1.223.580.000,00 | 1.463.580.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| | | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 2.040.734.899,00 | 1.659.698.800,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 7.885.608.060,00 | 11.073.094.500,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.074.503.000,00 | 974.177.278,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | Peningkatan Kualitas Infrastruktur | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 451.001.900,00 | 451.001.900,00 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 465.978.900,00 | 135.941.200,00 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 670.000.000,00 | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Rekonstruksi Jalan | 17.488.695.000,00 | 43.118.265.160,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | 850.000.000,00 | 2.167.803.450,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pembangunan Jembatan | 2.800.000.000,00 | 42.206.642.750,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 4. | Peningkatan Ketahanan Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 22.500.000,00 | 0 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 46.514.400,00 | 22.027.800,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 1.133.750.000,00 | 895.504.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | 450.000.000,00 | 900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 400.000.000,00 | 741.050.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | 84.277.650,00 | 88.818.850,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 13.000.000.000,00 | 16.470.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 6. | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 69.919.350,00 | 56.744.350,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 66.980.000,00 | 66.980.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 68.566.800,00 | 145.089.600,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 90.000.000,00 | 44.999.900,0 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 7. | Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 214.800.000,00 | 214.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | 201.700.000,00 | 250.700.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 275.000.000,00 | 257.300.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 8 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penataan Organisasi | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 57.255.900,00 | 54.255.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 123.911.200,00 | 117.911.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 32.541.400,00 | 7.679.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1.905.199.950,00 | 1.672.555.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 1.265.846.900,00 | 938.745.100,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | | | Reviu Laporan Kinerja | 627.371.950,00 | 522.306.650,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 85.206.450,00 | 104.706.450,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 1.318.572.262,00 | 572.097.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 227.868.800,00 | 326.868.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 13.297.050,00 | 13.297.050,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 141.737.700,00 | 117.059.300,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 161.204.650,00 | 150.168.650,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 82.401.900,00 | 88.334.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | 140.001.900,00 | 110.281.300,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 201.883.200,00 | 0 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Mutasi dan Promosi ASN | Pengelolaan Promosi ASN | 267.690.000,00 | 218.502.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | | | | SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | Pengembangan Kompetensi ASN | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 165.500.000,00 | 165.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 182.413.400,00 | 215.413.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Pembinaan Disiplin ASN | 50.054.500,00 | 50.054.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 342.533.550,00 | 342.533.550,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 9. | Peningkatan Ekonomi Rakyat | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | 92.510.887,00 | 45.030.450,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 109.000.000,00 | 81.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 152.695.280,00 | 486.297.130,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 49.998.100,00 | 49.998.100,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 50.001.000,00 | 50.001.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Pembangunan Kawasan Pusat Kuliner) | 2.000.000.000,00 | 16.470.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 49.999.950,00 | 49.999.950,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 500.000.000,00 | 599.999.000,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| 10. | Penggalian Potensi Sumber Daya Alam | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 578.737.750,00 | 557.539.750,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 11. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 239.866.450,00 | 317.760.100,0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 48.828.900,00 | 48.828.900,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | 99.903.000,00 | 99.903.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Pengelolaan Sampah | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 2.317.600.000,00 | 2.828.147.500,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | Penanganan sampah melalui pengangkutan | 1.835.580.000,00 | 2.299.308.784,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 12. | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 578.737.750,00 | 557.539.750,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 24.439.300,00 | 92.177.279,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 27.150.000,00 | 27.150.000,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 13. | Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Penanaman Modal | 79.999.900,00 | 79.999.900,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 72.250.000,00 | 216.775.700,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | 99.989.650,00 | 75.539.200,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 14. | Penurunan Kemiskinan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 1.721.499.900,00 | 1.561.949.300,00 | DINAS SOSIAL |
| 15. | Peningkatan Kesempatan Kerja | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 316.890.000,00 | 348.490.000,00 | DINAS KETENAGA KERJAAN |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Kesempatan Kerja | 60.224.600,00 | 60.224.600,00 | DINAS KETENAGA KERJAAN |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 16. | Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 146.928.500,00 | 111.639.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 184.456.200,00 | 184.456.200,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi | 100.000.000,00 | 0 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| No | Prioritas Kabupaten Padang Lawas | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| 17. | Peningkatan Kemandirian Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 37.602.900,00 | 204.161.100,00 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 223.510.450,00 | 433.553.550,00 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | 176.946.500,00 | 194.646.500,00 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 262.668.100,00 | 161.707.800,00 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 227.817.000,00 | 227.817.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |

## 7.7. Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

Rencana pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyusun rencana program dan kegiatan disertai anggaran, yang juga diarahkan untuk menunjang pelaksanaan prioritas nasional dan Provinsi Tahun 2026. Adapun ringkasan dari dukungan program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas terhadap prioritas nasional dan Provinsi disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel7.10**
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026**

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| PN1 | Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pembentukan Paskibraka | 213.834.284,00 | 513.814.394,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 97.885.400,00 | 77.570.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| PN2 | Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 27.750.000,00 | 0,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 109.000.000,00 | 81.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 152.695.280,00 | 486.297.130,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 24.000.000,00 | 0,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keci | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | 92.510.887,00 | 45.030.450,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | 99.989.650,00 | 75.539.200,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 578.737.750,00 | 557.539.750,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 24.439.300,00 | 92.177.279,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | | | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 72.250.000,00 | 116.775.700,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 50.001.000,00 | 50.001.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 239.866.450,00 | 317.760.100,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| PN3 | Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 0,00 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 100.000.000,00 | 136.655.950,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 85.000.000,00 | 95.000.000,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | 39.999.950,00 | 39.999.950,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 49.999.950,00 | 49.999.950,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 406.971.850,00 | 406.971.850,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 25.999.950,00 | 25.999.950,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 500.000.000,00 | 599.999.000,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 1.143.000.000,00 | 1.537.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Rekonstruksi Jalan | 17.488.695.000,00 | 43.118.265.160,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | | | | |
| | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 214.000.000,00 | 2.936.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 550.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pembangunan Jembatan | 2.800.000.000,00 | 42.206.642.750,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | 850.000.000,00 | 2.167.803.450,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 229.374.500,00 | 39.824.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | 140.000.000,00 | 973.042.800,00 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| **PN4** | Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangun | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.200.000.000,00 | 1.260.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | | | Pengadaan Mebel Sekolah | 480.000.000,00 | 420.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 48.906.300,00 | 45.238.300,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 258.995.100,00 | 202.343.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 33.136.518.000,00 | 32.860.970.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 40.500.000,00 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 142.049.100,00 | 142.049.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 763.246.900,00 | 488.996.900,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 173.683.600,00 | 101.113.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 19.223.250,00 | 19.223.250,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.280.000.000,00 | 1.920.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.400.000.000,00 | 1.760.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 133.460.406,00 | 133.460.406,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 315.401.900,00 | 267.318.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 32.000.000,00 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 5.162.452.000,00 | 5.438.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 33.000.000,00 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 40.127.050,00 | 40.127.050,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 275.200.000,00 | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 93.539.600,00 | 44.039.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 41.316.600,00 | 41.316.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.005.000.000,00 | 1.005.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 156.853.100,00 | 150.103.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4.186.640.000,00 | 4.186.640.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 37.075.800,00 | 7.825.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 128.000.000,00 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 9.460.400,00 | 9.460.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | 26.528.000,00 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 41.326.100,00 | 28.846.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.524.990.000,00 | 1.524.990.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 23.964.100,00 | 7.515.300,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 70.001.200,00 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 480.000.000,00 | 480.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 21.246.150,00 | 18.585.950,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 762.855.376,00 | 510.234.976,00 | DINAS SOSIAL |
| | | | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 1.721.499.900,00 | 1.561.949.300,00 | DINAS SOSIAL |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.675.000.000,00 | 3.840.734.350,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 530.949.000,00 | 530.949.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 176.493.000,00 | 85.274.850,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 6.071.867.501,00 | 2.765.004.932,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 244.841.200,00 | 237.240.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 2.413.935.800,00 | 1.742.954.568,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 907.500.000,00 | 235.802.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 10.500.000,00 | 431.341.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 245.461.200,00 | 245.461.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 938.849.000,00 | 828.495.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 10.500.000,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 51.300.000,00 | 51.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 524.267.000,00 | 451.917.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 979.289.950,00 | 1.375.336.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 45.996.800,00 | 15.900.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3.738.894.000,00 | 2.904.479.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 314.801.000,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 291.314.000,00 | 729.840.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 362.680.000,00 | 329.079.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 608.500.000,00 | 913.578.050,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 188.100.000,00 | 409.066.450,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1.195.261.101,00 | 1.317.958.602,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 34.100.000.000,00 | 42.683.072.300,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 113.345.000,00 | 228.625.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | 4.228.010.400,00 | 8.121.004.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.600.691.900,00 | 1.467.091.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 24.000.000,00 | 29.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 22.500.000,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 9.000.000,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 4.500.000,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 15.000.000,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 323.199.000,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 45.200.000,00 | 45.200.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 361.850.000,00 | 688.208.850,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 248.700.000,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 854.850.000,00 | 979.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 158.299.550,00 | 158.299.550,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 108.369.800,00 | 119.050.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.074.503.000,00 | 974.177.278,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 88.055.000,00 | 96.858.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 254.383.000,00 | 250.227.980,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 35.295.650,00 | 273.253.650,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 196.752.000,00 | 548.428.250,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | RSUD |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 161.496.200,00 | 624.581.700,00 | RSUD |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150.000.000,00 | 210.000.000,00 | RSUD |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.001.000,00 | 50.001.000,00 | RSUD |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 101.440.000,00 | 173.440.000,00 | RSUD |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 199.933.000,00 | 199.933.000,00 | RSUD |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.000.000,00 | 75.000.000,00 | RSUD |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 714.979.632,00 | 753.764.632,00 | RSUD |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 270.815.600,00 | 300.815.600,00 | RSUD |
| | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 18.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | RSUD |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 913.390.000,00 | 1.907.687.789,00 | RSUD |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 949.227.469,00 | 1.304.980.000,00 | RSUD |
| | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 3.000.000.000,00 | 4.315.138.500,00 | RSUD |
| | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 | RSUD |
| | | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat | 1.223.580.000,00 | 1.463.580.000,00 | RSUD |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |
| | | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 2.040.734.899,00 | 1.659.698.800,00 | RSUD |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | | | | PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.349.050,00 | 15.349.050,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | 201.700.000,00 | 250.700.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.182.500,00 | 20.182.500,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | | | | PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.753.764.208,00 | 3.378.888.459,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.817.100,00 | 22.817.100,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.458.900,00 | 9.458.900,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.003.000,00 | 12.003.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.005.000,00 | 6.005.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 131.280.000,00 | 112.347.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35.602.240,00 | 35.602.240,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | | | | BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.722.712.000,00 | 2.071.212.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52.820.000,00 | 52.820.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | | | | PERLINDUNGAN ANAK |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 214.800.000,00 | 214.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 50.000.000,00 | 32.300.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 934.252.000,00 | 934.252.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan | 38.567.000,00 | 25.187.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 2.178.000.000,00 | 2.178.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| PN6 | Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 316.890.000,00 | 348.490.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Kesempatan Kerja | 60.224.600,00 | 60.224.600,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 21.186.600,00 | 242.736.600,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 44.162.500,00 | 44.160.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 98.750.000,00 | 82.120.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |
| | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 40.060.700,00 | 60.046.900,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |
| | | | | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 110.333.800,00 | 152.062.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 188.200,00 | 76.230.750,00 | DINAS SOSIAL |
| **PN7** | Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 13.297.050,00 | 13.297.050,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba | | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 141.737.700,00 | 117.059.300,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 161.204.650,00 | 150.168.650,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 82.401.900,00 | 88.334.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 783.701.800,00 | 120.211.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 20.663.050,00 | 11.943.050,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 26.636.000,00 | 17.366.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 17.545.500,00 | 9.042.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 31.447.850,00 | 38.344.750,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 28.668.100,00 | 13.638.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 15.462.600,00 | 26.009.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 25.441.450,00 | 10.156.450,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 15.750.400,00 | 7.786.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 19.587.700,00 | 34.153.450,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 26.001.900,00 | 13.003.900,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 20.497.500,00 | 10.237.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 17.170.450,00 | 32.726.250,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 10.252.300,00 | 11.041.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 28.462.600,00 | 44.542.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 15.796.300,00 | 12.108.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 21.952.900,00 | 14.427.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 27.703.800,00 | 19.753.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 26.680.100,00 | 23.720.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 24.934.100,00 | 10.309.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 98.748.300,00 | 133.452.300,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 144.285.300,00 | 149.285.400,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 86.160.250,00 | 146.160.200,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 220.173.400,00 | 230.173.200,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 200.350.000,00 | 210.350.100,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 101.770.300,00 | 142.483.800,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 15.450.300,00 | 15.450.300,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 24.925.600,00 | 24.925.600,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 57.899.700,00 | 57.899.700,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 24.666.250,00 | 24.666.250,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 65.472.950,00 | 115.472.950,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 153.132.800,00 | 153.132.800,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 251.012.066.500,00 | 259.388.728.500,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1.000.000.000,00 | 2.004.503.800,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 4.388.737.545,00 | 4.428.737.545,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Penyusunan Standar Harga | 25.326.000,00 | 25.326.000,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 26.679.000,00 | 26.679.000,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | 145.860.400,00 | 195.760.400,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 54.112.000,00 | 54.112.000,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 64.607.200,00 | 164.607.200,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 37.602.900,00 | 204.161.100,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 223.510.450,00 | 433.553.550,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 41.250.000,00 | 0,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | 176.946.500,00 | 194.646.500,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 52.997.800,00 | 161.707.800,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 9.964.850,00 | 9.964.850,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 54.220.150,00 | 85.572.150,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 15.000,00 | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 166.200.000,00 | 166.200.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | Mutasi dan Promosi ASN | Pengelolaan Mutasi ASN | 35.008.000,00 | 35.008.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 42.647.450,00 | 72.289.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | Pengelolaan Promosi ASN | 267.690.000,00 | 218.502.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Pengembangan Kompetensi ASN | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 165.500.000,00 | 165.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 182.413.400,00 | 215.413.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 28.971.000,00 | 28.971.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 14.610.800,00 | 14.610.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | Pembinaan Disiplin ASN | 50.054.500,00 | 50.054.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 342.533.550,00 | 342.533.550,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Penataan Administrasi Pemerintahan | 56.137.400,00 | 67.137.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 50.229.800,00 | 1.509.684.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 795.688.600,00 | 1.036.597.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.189.277.550,00 | 3.896.391.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 1.214.782.850,00 | 923.582.850,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 764.560.800,00 | 764.560.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 115.580.150,00 | 125.803.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | 400.323.200,00 | 410.825.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 123.568.600,00 | 135.508.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 567.176.000,00 | 1.414.696.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| **PN8** | Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 69.919.350,00 | 56.744.350,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 97.885.400,00 | 77.570.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 44.559.300,00 | 27.304.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 6.099.800,00 | 6.099.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 76.185.500,00 | 39.633.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19.965.871.238,00 | 19.745.304.987,00 | RSUD |

| No | Prioritas Nasional | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran RKUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 7.885.608.060,00 | 11.073.094.500,00 | RSUD |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 78.223.400,00 | 31.223.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 15.000.000,00 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 146.928.500,00 | 111.639.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 184.456.200,00 | 184.456.200,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pengembangan Cagar Budaya | 57.583.050,00 | 51.310.050,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

**Tabel 7.11**
**Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Dalam Mendukung Asta Cita**

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU RKPD | PAGU PRKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 133.460.406,00 | 133.460.406,00 |
| | | | | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 93.539. 600,00 | 44.039.600,00 |
| 2 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. . | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1.195.261.101, 00 | 1.317.958.602,00 |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 34.100.000.000 ,00 | 42.683.072.300,00 |
| | | | | | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 361.850.000,00 | 688.208.850,00 |
| 3 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 670.000.000,00 | 350.000.000,00 |
| 4 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 451.001.900,00 | 640.001.900,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 46.514.400,00 | 22.027.800,00 |
| | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 90.000.000,00 | 44.999.900,00 |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 316.890.000,00 | 348.490.000,00 |
| | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 21.186.600,00 | 242.736.600,00 |
| 7 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | 201.700.000,00 | 250.700.000,00 |
| 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | Penanganan sampah melalui pengangkutan | 1.835.580.000,00 | 2.299.308.784,00 |
| 9 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 3.561.047.836,00 | 3.892.047.836,00 |
| 10 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | Pelayanan Informasi Publik | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 |
| | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 40.080.000,00 | 43.080.000,00 |
| 11 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | 39.999.950,00 | 39.999.950,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 49.999.950,00 | 49.999.950,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | USAHA MIKRO (UMKM) | | | | |
| 12 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | Pengawasan Penanaman Modal | 79.999.900,00 | 79.999.900,00 |
| 13 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | 408.245.600,00 | 1.240.231.500,00 |
| 14 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | 3.423.800,00 | 3.423.800,00 |
| 15 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 78.223.400,00 | 31.223.400,00 |
| | | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya | | PROGRAM PELESTARIAN | | Pengembangan Cagar Budaya | 57.583.050,00 | 51.310.050,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | | DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | |
| 16 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | 68.046.000,00 | 0,00 |
| 17 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industrI kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 18 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 578.737.750,00 | 557.539.750,00 |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | | | | | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 72.250.000,00 | 216.775.700,00 |
| 19 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 135.800.000,00 | 385.711.000,00 |

**Tabel 7.12**
**Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026**

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| 1 | Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (10 Orang) | 142.049.100,00 | 142.049.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (7 Ruang) | 250.000.000,00 | 250.000.00,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (538 Peserta Didik) | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (21 Unit) | 1.200.000.000,00 | 1.260.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (8 Ruang) | 0 | 0 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (10 Ruang) | 1.280.000.000,00 | 1.920.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (20 Ruang) | 2.400.000.000,00 | 1.760.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (50 Peserta Didik) | 48.906.300,00 | 45.238.300,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pengadaan Mebel Sekolah (1 Paket) | 480.000.000,00 | 420.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (1 Dokumen) | 93.539.600,00 | 44.039.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1 Komunitas) | 41.316.600,00 | 41.316.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (13 Unit) | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (14 Ruang) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (8 Ruang) | 1.005.000.000,00 | 1.005.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (33 Orang) | 32.000.000,00 | 0 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (150 Satuan Pendidikan) | 156.853.100,00 | 150.103.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1 Komunitas) | 9.460.400,00 | 9.460.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1 Ruang) | 600.000.000,00 | 600.000.000,0 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik (100 Pesreta Didik) | 26.528.000,00 | 0 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| **2** | Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (42 Lembaga) | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (50 Orang) | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | | Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (10 Lembaga) | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Lembaga) | 100.000.000,00 | 0 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (13 Organisasi) | 925.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | 2.330.044.006,00 | 2.653.276.506,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (50 Orang) | 1.721.499.900,00 | 1.561.949.300,00 | DINAS SOSIAL |
| | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (12 Orang) | 762.855.376,00 | 510.234.976,00 | DINAS SOSIAL |
| 3 | Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.675.000.000,00 | 3.845.734.350,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 530.949.000,00 | 530.949.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 176.493.000,00 | 85.274.850,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 6.071.867.501,00 | 2.765.004.932,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 2.413.935.800,00 | 1.742.954.568,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 907.500.000,00 | 235.802.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 10.500.000,00 | 431.341.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 245.461.200,00 | 245.461.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 938.849.000,00 | 828.495.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 524.267.000,00 | 451.917.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 979.289.950,00 | 1.375.336.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 45.996.800,00 | 15.900.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3.738.894.000,00 | 2.904.479.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 314.801.000,00 | 0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 291.314.000,00 | 729.840.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 362.680.000,00 | 329.079.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 608.500.000,00 | 913.578.050,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 188.100.000,00 | 409.066.450,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1.195.261.101,00 | 1.317.958.602,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 34.100.000.000,00 | 42.683.072.300,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | 4.228.010.400,00 | 8.121.004.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.600.691.900,00 | 1.467.091.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 24.000.000,00 | 29.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 22.500.000,00 | 0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 9.000.000,00 | 0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 4.500.000,00 | 0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 0 | 16.941.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 323.199.000,00 | 0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 361.850.000,00 | 688.208.850,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 248.700.000,00 | 0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 854.850.000,00 | 979.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA | Penyediaan Fasilitas Pelayanan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (1 Unit) | 913.390.000,00 | 1.907.687.789,00 | RSUD |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 949.227.469,00 | 1.304.980.000,00 | RSUD |
| | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (1 Unit) | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 | RSUD |
| | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 3.000.000.000,00 | 4.315.138.500,00 | RSUD |
| | | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1.223.580.000,00 | 1.463.580.000,00 | RSUD |
| | | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 2.040.734.899,00 | 1.659.698.800,00 | RSUD |
| | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Rumah Sakit (1 Dok) | 7.885.608.060,00 | 11.073.094.500,00 | RSUD |
| 4 | Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan PemberdayaanMasyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (20 Orang) | 316.890.000,00 | 348.490.000,00 | DINAS KETENAGA KERJAAN |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Kesempatan Kerja (14 Orang) | 60.224.600,00 | 60.224.600,00 | DINAS KETENAGA KERJAAN |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia | 1.721.499.900,00 | 1.561.949.300,00 | DINAS SOSIAL |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (50 Orang) | | | |
| | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 762.855.376,00 | 510.234.976,00 | DINAS SOSIAL |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (1 Laporan) | 26.636.000,00 | 17.366.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (2 Laporan) | 28.668.100,00 | 13.638.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 15.462.600,00 | 26.009.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 5 | Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 144.285.300,00 | 149.285.400,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 86.160.250,00 | 146.160.200,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 220.173.400,00 | 230.173.200,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 200.350.000,00 | 210.350.100,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 101.770.300,00 | 142.483.800,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 57.899.700,00 | 57.899.700,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 65.472.950,00 | 115.472.950,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 153.132.800,00 | 153.132.800,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah | 145.860.400,00 | 195.760.400,00 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (3 Dok) | 161.204.650,00 | 150.168.650,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (2 Laporan) | 82.401.900,00 | 88.334.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Pembangunan Daerah | | | | |
| | | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (2 Dokumen) | 783.701.800,00 | 120.211.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (1 Laporan) | 15.750.400,00 | 7.786.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (1 Laporan) | 20.497.500,00 | 10.237.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (10 Laporan) | 1.905.199.950,00 | 1.672.555.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (10 Laporan) | 1.265.846.900,00 | 938.745.100,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (1 Dokumen) | 239.866.450,00 | 317.760.100,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (1 Kegiatan Orang) | 48.828.900,00 | 48.828.900,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (55 Orang/ kali Keluarga) | 99.903.000,00 | 99.903.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7 | Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (500 Ekor) | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (3 Unit) | 109.000.000,00 | 81.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 27.750.000,00 | 0 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (2 Kelompok) | 152.695.280,00 | 486.297.130,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (1 Laporan) | 27.150.000,00 | 27.150.000,00 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (1 Laporan) | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1 Laporan | 50.001.000,00 | 50.001.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang | Pameran Dagang Lokal (20 Pelaku Usaha) | 135.800.000,00 | 385.711.000,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (20 UMKM) | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (10 UMKM) | 500.000.000,00 | 599.999.000,00 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **9** | Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 0 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| **10** | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penataan Organisasi | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (1 Dokumen ) | 57.255.900,00 | 54.255.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (1 Laporan) | 123.911.200,00 | 117.911.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (1 Dokumen) | 32.541.400,00 | 7.679.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
| **11** | Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada | PROGRAM PENGELOLAAN | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (8 Komunitas) | 145.000.000,00 | 319.460.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat. | INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Informasi Publik (3 Permohonan) | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik (3 Media) | 40.080.000,00 | 43.080.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | Relasi Media | 37.500.000,00 | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (100 Laporan) | 7.200.000,00 | 0 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Pelayanan Pencatatan Sipil | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (100 Layanan) | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (1 Laporan) | 24.934.100,00 | 10.309.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| **12** | Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal. | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 229.374.500,00 | 39.824.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Rekonstruksi Jalan (11 KM) | 17.488.695.000,00 | 43.118.265.160,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan (3 Jembatan) | 550.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | Pembangunan Jembatan (600 M) | 2.800.000.000,00 | 42.206.642.750,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan (6 KM) | 850.000.000,00 | 2.167.803.450,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (6,5 KM) | 400.000.000,00 | 741.050.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (3 Laporan) | 28.462.600,00 | 44.542.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (1 Laporan) | 27.703.800,00 | 19.753.800,0 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| **14** | Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (4 Kawasan) | 1.133.750.000,00 | 895.504.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 46.514.400,00 | 22.027.800,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (1 Dokumen) | 239.866.450,00 | 317.760.100,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (1 Kegiatan Orang) | 48.828.900,00 | 48.828.900,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (55 Orang/Kali Keluarga) | 99.903.000,00 | 99.903.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan (1000 Orang) | 84.277.650,00 | 88.818.850,00 | DINAS SOSIAL |
| 15 | Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (1 Dokumen) | 98.750.000,00 | 82.120.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |
| | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 44.162.500,00 | 44.160.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |
| | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 40.060.700,00 | 60.046.900,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | | | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 110.333.800,00 | 152.062.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (50 Lembaga) | 746.860.100,00 | 946.928.250,00 | DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA |
| 16 | Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun. | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 15.000.000,00 | 0 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar | 69.919.350,00 | 56.744.350,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Prioritas Provinsi Sumatera Utara | RKUA Padang Lawas Tahun 2026 | | | | | OPD Penangung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran KUA | Anggaran PKUA | |
| | | PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (KOMINDA 1 Dokumen) | | | |
| | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (TIM TERPADU 50 Orang) | 97.885.400,00 | 77.570.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 17 | Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (10 Dokumen) | 66.980.000,00 | 66.980.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (5 Dokumen) | 68.566.800,00 | 145.089.600,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 30.628.000,00 | 30.628.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 51.690.000,00 | 72.237.596,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |

## Tabel 7.13
## Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC Provinsi Sumatera Utara pelaksanaan Tahun 2026

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| **2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program *Universal Health Coverage* (UHC) (mulai Oktober tah un 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).** | 2026 | - Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara | Dinas Kesehatan | 1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada | - Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, |
| | | • 33 Kabupaten/Kota | | 2. Dinsos kab/kota untuk mela kukan penginputan, pemutakhi ran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kem ensos setiap bulannya), | tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. |
| | | | | 3. Dinas PMD Dukcapil (Penye diaan data kependudukan Pro vsu) | - Melakukan penginputan, pemuta khiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Na sional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya |
| | | | | 3. Diskominfo (Publikasi Kegia tan), | - Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/ Kota) |
| **4. Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif" (CERDAS)** | 2026 | Pembangunan integrasi portal apl ikasi | Dinas Kominfo | DPMPTSP | 1. Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | 1. Pengembangan dan Implemen tasi Aplikasi . | | Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM | 2. Penyiapan Peningkatan kapasit as SDM di kabupaten/kota. 3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. |
| | | 2. Integrasi Sistem (Layanan). | | Biro Adpem | 4. Penentuan lokasi |
| | | 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. | | | |
| | | 4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. | | BUMD: PDAM, Bank Sumut | |
| | | Lokasi Kegiatan: | | | |
| | | • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. | | | 1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/ Kota. |
| | | | | | 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan |
| **5 a. Pembangunan Infrastruktur Terntegrasi (INSTANSI)** | 2026 | 1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan | Dinas PUPR | OPD Dinas LHK terkait penyia pan dokumen lingkungan/ AM DAL, Dinas Kominfo untuk pub likasi Media, Dinas Perhubung an terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan | 1. Dukungan penanganan akses j alan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. |
| | | Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo | | | 2.Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak |
| | | Kab. Simalungun, Kab. Batu B ara, Kab. Deli Serdang, Kab. Hu mbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pak pak Bharat, Kota Binjai, Kota Pad angsidimpuan | | monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi | sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA). |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. T apanuli Selatan | | | |
| | | Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbat u, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Sel atan, Kab. Nias Barat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir | | | |
| | | Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal Kawasan Konservasi/Rawan Bencana: Kab. Langkat | | | |
| | | target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m. | | | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| **c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah** | 2026 | - Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya | Dinas PKP | Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang,Jalan, dan Keciptakaryaan (sanitasi dan air minum), | Bupati/Wali Kota: |
| | | - Survei Lokasi di setiap Kabupaten/Kota | | BPBD koordinasi terhadap Re hab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan mo nev terhadap pelaksanaan dan | 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = *by name by a ddress*) |
| | | - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) | | | 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewen ang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha |
| | | - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah | | evaluasi | 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota |
| | | - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN | | Biro Pemotda (memfasilitasi k erja sama antar Pemerintah D aerah) | 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN |
| | | - Pembangunan Fisik setiap tahun | | Badan Kepegawaian dan BP T apera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik ruma h | |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan | | Dinas Kominfo untuk publikasi Media | Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksan a teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, ve rifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. |
| | | | | | Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruk si, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaks ana di lapangan. |
| | | •Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara | | | Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan: Ujung tombak identifik asi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. |
| | | | | | Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memilik rumah |
| **6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).** | 2026 | - Pembentukan kelembagaan *Prestice*, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi *Prestice* di 25 kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas | Biro Hukum | Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas k egiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik ya ng tinggi) | 1. Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota |

| PHTC | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN | DUKUNGAN OPD PROVSU | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | | | Diskominfo (Publikasi), | 2. Edukasi dan Sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. |
| | | | | | 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE |
| | | Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba) | | | |
| | | - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba | | | |
| | | - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan | | | |
| | | - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) | | | |

## Tabel 7.14
## Dukungan Kab/Kota Terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD)
## RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| **6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030** | 2026 | Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 | Dispora | Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegia tan) | - Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli |
| | | Penguatan Pembinaan & Kemitra an Tahun 2026 | | | - Melaksanakan *side event* pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya |
| | | • Provinsi Sumatera Utara | | | |
| **7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030** | 2026 | 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 | Dispora | Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) | NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota |
| | | 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 | | Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) | |
| | | •Kota Medan dan Kab. Deli Serda ng | | | |
| **8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi *(Sumut e-Health Integration system)*** | 2026 | Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi *Sumut e- Health Integration System* Tahun 2026-2029 | Dinas Kesehatan | Dinas Kominfo (Penyediaan W eb,Server dan Publikasi Kegiat an) | -Penyediaan data kepesertaan J KN Kabupaten/Kota |
| | | 33 Kabupaten/Kota | | | -Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kabupaten |
| | | | | | /Kota |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| **9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)** | 2026 | - Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM | Dinas Kesehatan | Badan Kepegawaian (Pelaksa naan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) | -Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah |
| | | - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 | | Biro Pemkotda (Fasilitasi Penyu sunan Dokumen kerja sama de ngan USU dan UGM) | - Menyiapkan surat komitmen ber sama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat |
| | | | | | |
| | | •Sisa Pemenuhan 4 Dokter | | | |
| | | Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten) DTPK Kepulauan Nias RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato (3 Orang) Nias Barat, Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten), RSUD Lausimomo UPT Dinkes Kabupaten Mandailing Natal, RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, RSUD Pintu Padang Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, RSUD Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan. Lanjutan Sasaran 2025 : 21 Peserta | | Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) | - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan<br>- Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD<br>- Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal<br>- penyediaan Akomodasi dokter residen |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | | | | |
| **12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)** | 2026 | Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) | Disperindag ESDM | • Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok | Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): |
| | | | | • Dinas Perhubungan : Transportasi logistik | 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; |
| | | | | • Dinas Sosial : Data P3KE *by name by address* (untuk mene ntukan titik titik PMB dilakukan) | 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; |
| | | | | • Dinas Koperasi & UMKM : Pe libatan UMKM dan Koperasi da lam penyediaan stok | 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; |
| | | | | • Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi | 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok |
| | | | | • Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan | 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; |
| | | | | • Bappelitbang: Monitoring, Pe ngendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | 6. Monitoring dan evaluasi |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah pe rbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK) | | • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan | |
| **13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)** | 2026 | Perluasan kepesertaan pekerja re ntan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema pengangga ran 20% Provinsi dan 80% kab/ko ta | Disnaker | • Dinas Sosial | Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: |
| | | -33 Kabupaten/Kota di Provinsi S umatera Utara informal prioritas M asyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 | | • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTK S (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. | 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target *Universal C overage Jamsostek* (UCJ) sebes ar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | | | • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. | 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan |
| | | | | • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil | 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2 |
| | | | | • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas | |
| | | | | • Menyediakan data kependud ukan yang valid (NIK, KK, KT P) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. | |
| | | | | • Melakukan verifikasi dan sink ronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | | | • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. | |
| | | | | • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kepe ndudukan lengkap. | |
| | | | | | |
| | | | | • BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan berper an menyelenggarakan perlindu ngan sosial bagi pekerja melal | |
| | | | | ui program Jaminan Kecelakaa n Kerja (JKK): Perlindungan at as risiko kecelakaan selama be kerja. | |
| | | | | • Jaminan Kematian (JKm): Sa ntunan kepada ahli waris peker ja yang meninggal. | |
| | | | | • Jaminan Hari Tua (JHT): Tab ungan jangka panjang bagi pek erja saat pensiun. | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | | | • Jaminan Pensiun (JP): Pengh asilan berkala untuk pekerja se telah pensiun. | |
| | | | | • Jaminan Kehilangan Pekerjaa n (JKP): Bantuan uang tunai, a kses informasi kerja, dan pelati han bagi pekerja yang terkena PHK. | |
| | | | | • Kominfo: Publikasi Kegiatan | |
| **14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi** | 2026 | Penyusunan dokumen *appraisal*/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR | | PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) | - kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja |
| | | Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial | | Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pel atihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) | - Kabupaten/Kota bersama Provi nsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat. |
| | | Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| **18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi** | 2026 | • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil in ventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) | BKAD | Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan | Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepal a Desa) |
| | | • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi | | Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi | |
| | | • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah | | OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemelihara an BMD | |
| | | • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang | | | |
| **23. Pengembangan Energi Baru Ter barukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)** | 2026 | Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perenca naan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan d an pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek | Disperindag ESDM | TPH : Pembinaan Kelompok P etani dalam penggunaan PLTS | Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, E nergi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: |
| | | - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara | | . | 1. Data Kelompok Tani (CPCL) |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | | | • Bappelitbang : Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | 2. data penentual lokasi |
| | | | | • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan | 3. pengadaan lahan |
| | | | | • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan | 4. Data produksi pertanian; kondisi air |
| | | | | | 5. Data readiness criteria |
| **27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani** | 2026 | Mulai pelaksanaan Temu Pembia yaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta | Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyedi aan data kelompok ta ni, pelatihan manajem en usaha tani, serta p embentukan kelemba gaan petani yang kua t, dinas membantu pet ani memenuhi persyar atan administratif dan teknis agar layak men gakses program Kredi t Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiaya an pertanian lainnya. | a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan kopera si tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. | Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | | | b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisas i produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Me lalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal a tau premi asuransi. | |
| | | | | c) Dinas Kominfo memainkan p eran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, m eningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. | | e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdes dukcapil memastikan | |
| | | • 33 Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi d iberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. | |
| | | | | f) Diskominfo (Publikasi) | |
| **34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif** | 2026 | Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan *platform* logistik & *payment gateway*. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*; | Diskop UMKM | KOMINFO : Publikasi Media | Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: |
| | | • PLUT | | | - Pendataan UMKM binaan kab/kota |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | | | DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan | - Kurasi Produk UMKM |
| | | | | DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan | - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri |
| | | | | | - *Capacity Building* |
| **35. Implementasi Tujuan Pembang unan Berkelanjutan/SDGs** | 2026 | 1. Inovasi *Business Registration System Policy TPB/SDGs* | Bappelitbang | Seluruh Perangkat Daerah | 1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SD Gs kab/kota se-Sumut tahun 202 5-2030 |
| | | 2. Diseminasi Skema BRS TPB/S DGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) | | | 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berk elanjutan/SDGs : identifikasi UM KM/IMK serta pelaku usaha |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | 3. Menyusun Laporan Monev TPB | | | 3. Dukungan pelaksanaan *North Sumatera SDGs Action Awards* |
| | | /SGDs Tahun 2025 | | | 4. Dukungan proses penginputan E-Monev Kabupaten/Kota |
| | | 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs | | | 5. Peningkatan Kapasitas untuk i mplementasi Tujuan Pembangun an Berkelanjutan/SDGs |
| | | 5. *Launching* Aplikasi e-Monev | | | |
| | | 6. Pelaksanaan skema *Declaratio n and Registration System BRS TPB/SDGs* | | | |
| | | 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 | | | |
| | | 8. Penyusunan Rancang Bangun | | | |
| | | aplikasi e-Monev SDGs (INOVAS I) | | | |
| | | 9. *Workshop* Penyusunan *Volunta ry Local Review (VLR)* Kabupaten | | | |
| | | /Kota | | | |
| | | 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | 11. Sosialisasi *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) | | | |
| **36. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis** | 2026 | - Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara | Inspektorat | Dinas Kominfo (Publikasi Kegi atan) | Inspektorat kab/kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota |
| | | - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara | | Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis | |
| | | - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara | | | |
| **37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan** | 2026 | - Pemanfaatan SADAINA Reborn | Dinas Kominfo | Seluruh OPD menginput data statistik sektoral | Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait |
| | | - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD | | | |
| | | - Forum Satu Data tingkat Daerah | | | |
| | | - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu | | | |
| | | - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial | | | |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs | | | |
| **46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati** | 2026 | Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan | DLHK | 1. Biro Pem Otda | 1. Dukungan terhadap pengadaan lahan |
| | | | | - SK Penlok | 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota |
| | | | | 2. BPN | |
| | | | | - Sertifikat Lahan | |
| | | | | 3. Diskominfo | |
| | | | | - Publikasi Media | |
| **48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES** | 2026 | - Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDe sma | | Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) | - Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. |
| | | - Monitoring dan Evaluasi kegiatan | | Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa). | - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. |
| | | •Tapteng, Tapanuli Utara, Nias, Si malungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang | | | - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi. |

| PROYEK STRATEGIS | TAHUN | RENCANA AKSI DAN LOKUS | PERANGKAT DAERAH | | DUKUNGAN KABUPATEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | PADANG LAWAS |
| | | Lawas Utara, Padang Lawas, Labura, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Karo, Toba, Labusel, Tapanuli | | | |
| | | Selatan, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota) | | | |
| **49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota** | 2026 | -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 | Biro Kesra | Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) | - |
| | | -*Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 | | Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah) | |
| | | 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | | | |

Perubahan program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 merupakan tindak lanjut nyata dari hasil evaluasi pelaksanaan KUA sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi berkala pada semester pertama ini berfungsi untuk menilai tingkat kesesuaian antara target yang telah direncanakan dengan realisasi di lapangan. Melalui langkah evaluatif tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh penyesuaian program dan anggaran tetap berorientasi langsung pada upaya mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta target Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

Penyesuaian perencanaan dan penganggaran ini didasari oleh dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II, penyesuaian mencakup perubahan target kinerja, penambahan atau pengurangan program dan subkegiatan, serta rasionalisasi pagu anggaran. Kebijakan ini diarahkan agar alokasi sumber daya finansial lebih efektif dan akuntabel, serta mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak dan strategis.

Implikasi dari evaluasi tersebut terlihat pada penyesuaian pagu anggaran di berbagai perangkat daerah yang difokuskan pada sektor-sektor krusial pencapaian IKD. Sebagai contoh, penyesuaian anggaran pada bidang kesehatan diarahkan untuk memperkuat pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, peningkatan signifikan juga dialokasikan pada Dinas PUPR untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta BPBD guna memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, yang seluruhnya merujuk pada analisis capaian kinerja sampai dengan semester pertama.

Secara keseluruhan, rangkaian perubahan program, kegiatan, dan pendanaan ini tidak hanya memperkuat pencapaian sasaran lokal, tetapi juga diselaraskan secara sinergis dengan prioritas nasional serta Proyek Strategis Daerah (PSD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Keterpaduan antara hasil evaluasi Triwulan II, realisasi anggaran, dan target kinerja akhir menjadi landasan utama agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas berjalan terukur, selaras, serta dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

# BAB VIII

# PENUTUP

Perubahan KUA (P-KUA) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 merupakan penyesuaian atas visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dinamika pembangunan, perubahan asumsi dasar, perkembangan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta kondisi keuangan daerah yang terjadi selama tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih responsif, efektif, dan akuntabel.

Penyusunan dokumen perubahan KUA Tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah serta menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan alokasi anggaran. Perubahan KUA menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan KUA ini telah melalui seluruh tahapan secara sistematis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar yang ditempuh dalam merampungkan dokumen Perubahan KUA ini yaitu melalui dokumen Perubahan RKPD serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Hasil penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Padang Lawas merupakan panduan untuk penyusunan Perubahan PPAS tahun 2026.

Akhirnya, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan KUA ini, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BUPATI PADANG LAWAS**

**PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN**

# RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
## Tahun Anggaran 2026

| KODE | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **58.153.306.303,00** | **59.599.234.896,00** | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 37.637.420.659,00 | 38.242.845.606,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 4.053.784.132,00 | 4.269.684.132,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.958.461.193,00 | 3.561.124.949,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 12.503.640.319,00 | 13.525.580.209,00 | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **950.610.175.559,00** | **1.071.878.242.836,00** | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 924.744.217.000,00 | 1.005.796.803.000,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 25.865.958.559,00 | 66.081.439.836,00 | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **26.905.000.000,00** | **53.155.000.000,00** | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 26.905.000.000,00 | 53.155.000.000,00 | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.035.668.481.862,00** | **1.184.632.477.732,00** | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **12.000.000.000,00** | **46.134.208.571,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.000.000.000,00 | 46.134.208.571,00 | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **12.000.000.000,00** | **46.134.208.571,00** | |
| **JUMLAH PENERIMAAN DAERAH** | | **1.047.668.481.862,00** | **1.230.766.686.303,00** | |

## PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | | | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 190.035.200,00 | 20.017.600,00 | -170.017.600,00 |
| | | | - | | | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 190.035.200,00 | 220.017.600,00 | 29.982.400,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | |
| | | | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | | | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | |
| | | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 217.049.050,00 | 250.700.000,00 | 33.650.950,00 |
| | | | - | | | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 217.049.050,00 | 15.349.050,00 | -201.700.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m CPR) | | | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.469.039.000,00 | 257.300.000,00 | -1.211.739.000,00 |
| | | | - | | | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.469.039.000,00 | 1.186.552.000,00 | -282.487.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.178.000.000,00 | 0,00 | -2.178.000.000,00 |
| | | | - | | | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.178.000.000,00 | 2.178.000.000,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Persentase pemenuhan penyediaan layanan kesehatan sesuai standar | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 16.462.540.428,00 | 11.051.054.058,00 | -5.411.486.370,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase kegiatan administrasi umum RS yang terlaksana | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 39.849.536.670,00 | 1.257.955.700,00 | -38.591.580.970,00 |
| | | | Persentase pelaksanaan surat menyurat dan jasa komunikasi, sumber daya air serta listrik | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 39.849.536.670,00 | 1.193.016.432,00 | -38.656.520.238,00 |
| | | | Persentase tenaga kesehatan yang kompeten dan tersertifikasi | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 39.849.536.670,00 | 200.000.000,00 | -39.649.536.670,00 |
| | | | Persentase terlaksananya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 39.849.536.670,00 | 39.000.000.000,00 | -849.536.670,00 |
| | | | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 39.849.536.670,00 | 300.815.600,00 | -39.548.721.070,00 |
| **2** | **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.** | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Persentase Pelayanan RS yang dilakukan oleh SDM RSUD sesuai standar | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 16.462.540.428,00 | 11.073.094.500,00 | -5.389.445.928,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase ASN yang menerima gaji | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 39.849.536.670,00 | 19.745.938.854,00 | -20.103.597.816,00 |

## PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DATA LAPORAN KOSONG | | | | | |

# PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | [DIKUNCI] Meningkatkan Kualitas SDM | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.063.671.800,00 | 991.191.800,00 | 72.480.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 418.996.350,00 | 377.340.550,00 | 41.655.800,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 393.714.000,00 | -393.714.000,00 |
| | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 140.000.000,00 | 973.042.800,00 | -833.042.800,00 |
| | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 451.001.900,00 | 640.001.900,00 | -189.000.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 15.349.050,00 | 15.349.050,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2.317.600.000,00 | 2.748.147.500,00 | -430.547.500,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | 0,00 | 27.100.000,00 | -27.100.000,00 |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 144.076.400,00 | 144.076.400,00 | 0,00 |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 269.242.293.468,00 | 281.489.299.108,00 | -12.247.005.640,00 |
| | | | | | INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS | 297.000.000,00 | 297.000.000,00 | 0,00 |
| **2** | **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | 0,00 | 171.388.300,00 | -171.388.300,00 |

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | **1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.487.500,00 | 25.487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2613 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 269.242.293.468,00 | 281.489.299.108,00 | 12.247.005.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.902.550,00 | 22.202.550,00 | -2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.575.900,00 | 18.725.900,00 | -5.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.588.000,00 | 8.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.756.500,00 | 67.756.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.655.300,00 | 62.655.300,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.714.000,00 | 52.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.125.350,00 | 37.125.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 40 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.384.000,00 | 40.434.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 333.571.000,00 | 792.629.000,00 | 459.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.999.584,00 | 125.999.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 101 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.182.000,00 | 893.855.000,00 | 841.673.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.747.400,00 | 50.747.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.536.000,00 | 68.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.13 Penataan Organisasi | - | - | 1.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 4 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 6 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 21 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00 | 1.260.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 480.000.000,00 | 420.000.000,00 | -60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 46 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50 Peserta Didik | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 48.906.300,00 | 48.906.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 230 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 258.995.100,00 | 222.889.100,00 | -36.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 192 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 192 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.136.518.000,00 | 32.860.970.000,00 | -275.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 192 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.500.000,00 | 0,00 | -40.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 0 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 7 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 10 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 142.049.100,00 | 142.049.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 4 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 763.246.900,00 | 488.996.900,00 | -274.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.683.600,00 | 101.113.600,00 | -72.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.223.250,00 | 19.223.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 10 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.280.000.000,00 | 1.920.000.000,00 | 640.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 192 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 192 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 20 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.400.000.000,00 | 1.760.000.000,00 | -640.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 538 Peserta Didik | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 0 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 13 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 14 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 5 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 210 Peserta Didik | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.460.406,00 | 133.460.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50 Peserta Didik | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 315.401.900,00 | 315.401.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 33 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 0,00 | -32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 33 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.162.452.000,00 | 5.438.000.000,00 | 275.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.000.000,00 | 0,00 | -33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.127.050,00 | 40.127.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 6 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 275.200.000,00 | 400.000.000,00 | 124.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.539.600,00 | 44.039.600,00 | -49.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.316.600,00 | 41.316.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 33 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 8 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.005.000.000,00 | 1.005.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 10 Buku | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 150 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.853.100,00 | 150.103.100,00 | -6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 200 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.186.640.000,00 | 4.186.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.075.800,00 | 7.825.800,00 | -29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 4 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.000.000,00 | 0,00 | -128.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 9.460.400,00 | 9.460.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100 Peserta didik | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 26.528.000,00 | 26.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 2 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 68 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 41.326.100,00 | 28.846.100,00 | -12.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 2 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 14 Satuan Pendidikan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.524.990.000,00 | 1.524.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.015.300,00 | 7.515.300,00 | -16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.950.000,00 | 0,00 | -19.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 480.000.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 200 Peserta Didik | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.246.150,00 | 17.556.150,00 | -3.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 3 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - | - | 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 150 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 1 Objek | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.223.400,00 | 31.223.400,00 | -47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 0 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 2 Objek | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 146.928.500,00 | 146.928.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.456.200,00 | 184.456.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | - | 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | 1 Objek | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.583.050,00 | 51.310.050,00 | -6.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 35 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.816.300,00 | 75.532.050,00 | -174.284.250,00 | 324.065.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 820 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.599.410.702,00 | 62.880.942.078,00 | -718.468.624,00 | 70.183.483.099,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 24 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.578.000,00 | 164.674.800,00 | 30.096.800,00 | 237.205.760,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 28 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | 57.481.985,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 21.994.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.981.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 314.646.000,00 | 680.508.000,00 | 365.862.000,00 | 333.993.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.419.000,00 | 16.419.000,00 | 0,00 | 18.067.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 396.953.672,00 | 396.953.672,00 | 0,00 | 153.494.228,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.690.000,00 | 83.100.000,00 | 12.410.000,00 | 64.350.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 7 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.675.000.000,00 | 3.840.734.350,00 | 2.165.734.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 7 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 530.949.000,00 | 530.949.000,00 | 0,00 | 268.221.360,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 162.190.383,00 | 162.190.383,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 266 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 176.493.000,00 | 85.274.850,00 | -91.218.150,00 | 194.142.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.071.867.501,00 | 2.765.004.932,00 | -3.306.862.569,00 | 7.823.241.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 244.841.200,00 | 237.240.700,00 | -7.600.500,00 | 186.278.180,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6959 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.413.935.800,00 | 1.742.954.568,00 | -670.981.232,00 | 2.262.364.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6936 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 907.500.000,00 | 235.802.000,00 | -671.698.000,00 | 986.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6754 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.500.000,00 | 431.341.600,00 | 420.841.600,00 | 54.999.703,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 26107 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 245.461.200,00 | 245.461.200,00 | 0,00 | 253.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 56800 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 938.849.000,00 | 828.495.500,00 | -110.353.500,00 | 861.960.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 179551 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.500.000,00 | 0,00 | -10.500.000,00 | 109.999.967,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 20325 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.300.000,00 | 51.300.000,00 | 0,00 | 44.880.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 37414 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2816 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 407 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 524.267.000,00 | 451.917.000,00 | -72.350.000,00 | 583.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 4073 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 979.289.950,00 | 1.375.336.900,00 | 396.046.950,00 | 473.220.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 11122 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.996.800,00 | 15.900.000,00 | -30.096.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 13 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.738.894.000,00 | 2.904.479.000,00 | -834.415.000,00 | 4.189.782.520,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 18 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 314.801.000,00 | 0,00 | -314.801.000,00 | 346.281.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 18 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 291.314.000,00 | 729.840.000,00 | 438.526.000,00 | 320.445.400,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 362.680.000,00 | 329.079.000,00 | -33.601.000,00 | 398.953.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 608.500.000,00 | 913.578.050,00 | 305.078.050,00 | 669.350.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 300 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.100.000,00 | 409.066.450,00 | 220.966.450,00 | 206.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 21 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.195.261.101,00 | 1.317.958.602,00 | 122.697.501,00 | 1.319.218.999,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 17 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.100.000.000,00 | 42.683.072.300,00 | 8.583.072.300,00 | 19.843.749.333,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 18 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.345.000,00 | 228.625.000,00 | 115.280.000,00 | 124.679.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.228.010.400,00 | 8.121.004.400,00 | 3.892.994.000,00 | 8.796.421.480,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.600.691.900,00 | 1.467.091.900,00 | -133.600.000,00 | 1.662.623.545,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 17 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.000.000,00 | 29.800.000,00 | 5.800.000,00 | 533.390.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.500.000,00 | 0,00 | -22.500.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 838 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 62 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 393 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 0 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 16.941.000,00 | 16.941.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 17 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 323.199.000,00 | 0,00 | -323.199.000,00 | 355.518.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.200.000,00 | 45.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 29 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 361.850.000,00 | 688.208.850,00 | 326.358.850,00 | 398.035.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.700.000,00 | 0,00 | -248.700.000,00 | 273.570.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 854.850.000,00 | 979.500.000,00 | 124.650.000,00 | 940.335.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 277 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.299.550,00 | 158.299.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.369.800,00 | 119.050.500,00 | 10.680.700,00 | 173.799.780,00 | 0,00 | |
| | **1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 393.714.000,00 | 393.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 100 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.074.503.000,00 | 974.177.278,00 | -100.325.722,00 | 1.181.953.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | - | 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.055.000,00 | 96.858.000,00 | 8.803.000,00 | 96.860.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | - | - | 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | - | - | 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 254.383.000,00 | 250.227.980,00 | -4.155.020,00 | 279.821.300,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.295.650,00 | 273.253.650,00 | 237.958.000,00 | 43.999.010,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.752.000,00 | 548.428.250,00 | 351.676.250,00 | 216.427.200,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase ASN yang menerima gaji | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 253 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 19.965.871.238,00 | 19.745.938.854,00 | -219.932.384,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 161.496.200,00 | 624.581.700,00 | 463.085.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 150.000.000,00 | 210.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 50.001.000,00 | 50.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 101.440.000,00 | 173.440.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 199.933.000,00 | 199.933.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 35.000.000,00 | 75.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 714.979.632,00 | 753.764.632,00 | 38.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 364.251.800,00 | 364.251.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 270.815.600,00 | 300.815.600,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 18.000.000.000,00 | 39.000.000.000,00 | 21.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase pemenuhan penyediaan layanan kesehatan sesuai standar | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 913.390.000,00 | 1.915.187.789,00 | 1.001.797.789,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.063.088.969,00 | 1.353.088.969,00 | 290.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 2.836.138.500,00 | 4.315.138.500,00 | 1.479.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 7 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.223.580.000,00 | 1.307.940.000,00 | 84.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 2.040.734.899,00 | 1.659.698.800,00 | -381.036.099,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 7.885.608.060,00 | 11.073.094.500,00 | 3.187.486.440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | - | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 7.206.250,00 | 7.441.450,00 | 235.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 31.925.000,00 | 1.925.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 8.179.200,00 | 28.071.100,00 | 19.891.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 42.709.600,00 | 4.686.400,00 | -38.023.200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Berita Acara | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 79.980.000,00 | 0,00 | -79.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 490 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 4.482.495.583,00 | 4.349.527.402,00 | -132.968.181,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 8.203.300,00 | 8.203.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 36.399.800,00 | 58.310.100,00 | 21.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 5.017.000,00 | 5.017.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 20.226.000,00 | 20.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 13.041.950,00 | 24.141.950,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 20 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 216.982.000,00 | 1.589.832.000,00 | 1.372.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 8 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.000.000,00 | 1.406.000.000,00 | 1.310.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 3.003.000,00 | 3.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 286.995.964,00 | 142.733.556,00 | -144.262.408,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 378.995.950,00 | 487.970.000,00 | 108.974.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 33.470.000,00 | 33.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 247.280.000,00 | 201.006.000,00 | -46.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 3 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 215.977.750,00 | 181.017.750,00 | -34.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 22 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 35.860.000,00 | 43.050.000,00 | 7.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3,5 KM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 450.000.000,00 | 900.000.000,00 | 450.000.000,00 | 2.425,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan | 11 KM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 1 KM | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 6,5 KM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 400.000.000,00 | 891.050.000,00 | 491.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun | 7 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 203.710.500,00 | 243.894.500,00 | 40.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.02.0054 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 6 UNIT | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 162.294.992,00 | 432.294.992,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 70 SR | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 670.000.000,00 | 350.000.000,00 | -320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 3 Sistem Drainase Perkotaan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | - | 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 5 Bangunan Gedung | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 970.000.000,00 | 3.900.000.000,00 | 2.930.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | - | 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 15 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 13.000.000.000,00 | 11.700.000.000,00 | -1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | - | 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya | 6 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 750.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | - | 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 334.532.750,00 | 73.692.750,00 | -260.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 6 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 1.143.000.000,00 | 2.537.000.000,00 | 1.394.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 6 KM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 850.000.000,00 | 2.667.803.450,00 | 1.817.803.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | 13 KM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 216.752.900,00 | 39.824.900,00 | -176.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan | 2 KM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 6.400.000.000,00 | 6.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 11 KM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 17.488.695.000,00 | 43.118.265.160,00 | 25.629.570.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.10.2.01.0060 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi | 7 KM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 214.000.000,00 | 1.936.000.000,00 | 1.722.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 3 Jembatan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 550.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun | 600 Meter | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 2.800.000.000,00 | 42.206.642.750,00 | 39.406.642.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar | Jumlah data SHP Peta Dasar | 1 Peta | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 463.530.600,00 | 346.152.600,00 | -117.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 1 Tahun Liter/Detik | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 135.941.200,00 | 135.941.200,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun | 1 Tahun $M^3$/Hari | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 319.938.800,00 | 494.938.800,00 | 175.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 12.948.600,00 | 12.948.600,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 2.671.477.161,00 | 2.674.714.946,00 | 3.237.785,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 106.116.500,00 | 106.116.500,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Tahun Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 101.140.000,00 | 101.140.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Tahun Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 11.695.800,00 | 11.695.800,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Tahun Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 231.204.000,00 | 278.194.000,00 | 46.990.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 6.513.000,00 | 6.513.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 72.180.000,00 | 72.180.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 571.288.000,00 | 638.970.000,00 | 67.682.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Tahun Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 236.173.600,00 | 236.173.500,00 | -100,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Tahun Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 19.080.000,00 | 19.080.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | - | 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Tahun Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | - | 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | - | 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | - | 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | 1 Ha | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00 | 973.042.800,00 | 833.042.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | - | 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1 Tahun Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 10 Unit Rumah | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 451.001.900,00 | 640.001.900,00 | 189.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Tahun Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 3.021.047.836,00 | 3.922.047.836,00 | 901.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 509.950.000,00 | 479.950.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.971.800.383,00 | 1.906.882.552,00 | -64.917.831,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.006.000,00 | 151.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.956.000,00 | 38.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.440.000,00 | 52.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.980.000,00 | 66.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.566.800,00 | 145.089.600,00 | 81.522.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 0 laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 44.999.900,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 0 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | - | - | 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.628.000,00 | 30.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | - | - | 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.690.000,00 | 72.237.596,00 | 20.547.596,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | - | - | 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 50 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.571.135.100,00 | 1.883.474.800,00 | 312.339.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai SAKIP | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.568.794.436,00 | 1.322.679.011,00 | -246.115.425,00 | 1.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 77.500.000,00 | 22.500.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.509.100,00 | 4.509.100,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.728.300,00 | 0,00 | -22.728.300,00 | 92.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.939.350,00 | 50.254.250,00 | 30.314.900,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.100.000,00 | 102.100.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 52 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 260.000.000,00 | 322.430.000,00 | 62.430.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.200.000,00 | 9.100.000,00 | -4.100.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.547.000,00 | 24.547.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.429.500,00 | 119.429.500,00 | 75.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Indeks Risiko Bencana | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | - | 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 14 Kawasan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.500.000,00 | 0,00 | -22.500.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | - | 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 40 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.514.400,00 | 22.027.800,00 | -24.486.600,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | - | 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 4 Kawasan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.083.750.000,00 | 895.504.000,00 | -188.246.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | - | 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 600 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.925.000.000,00 | 1.925.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | - | 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1200 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | - | 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 4 Kegiatan | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.822.105.600,00 | 5.822.105.600,00 | 6.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 224 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.982.864.062,00 | 1.817.766.559,00 | -165.097.503,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 224 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 219.094.000,00 | 219.094.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 287.000.000,00 | 607.067.200,00 | 320.067.200,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Lembaga | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | - | 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 542.855.376,00 | 510.234.976,00 | -32.620.400,00 | 1.100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | - | 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.603.499.900,00 | 1.561.949.300,00 | -41.550.600,00 | 2.300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | - | 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 115.002.000,00 | 115.002.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | - | - | 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | - | - | 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 1000 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 869.841.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 1000 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 1000 Usulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 188.200,00 | 76.230.750,00 | 76.042.550,00 | 19.056.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.06.05.2.02.0010 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah | 30 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | - | 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1000 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 84.277.650,00 | 88.818.850,00 | 4.541.200,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 4.553.150,00 | 4.553.150,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 1.586.038.970,00 | 1.329.943.844,00 | -256.095.126,00 | 1.649.038.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 4.689.900,00 | 3.089.550,00 | -1.600.350,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 2.444.900,00 | 2.444.900,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 48 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 41.080.000,00 | 41.080.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 6.286.900,00 | 6.286.900,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 50.250.300,00 | 50.250.300,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.089.100,00 | 3.089.100,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 22.720.000,00 | 14.136.000,00 | -8.584.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 16.970.050,00 | 17.420.150,00 | 450.100,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 122.365.000,00 | 164.739.000,00 | 42.374.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 36.236.500,00 | 293.412.175,00 | 257.175.675,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 870 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 11.310.000,00 | 6.318.000,00 | -4.992.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 19.724.128,00 | 26.496.628,00 | 6.772.500,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 44.632.000,00 | 53.035.600,00 | 8.403.600,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 10.190.000,00 | 10.190.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | - | - | 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 20 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 316.890.000,00 | 348.490.000,00 | 31.600.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 14 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 60.224.600,00 | 60.224.600,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 3 Perusahaan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 21.186.600,00 | 242.736.600,00 | 221.550.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 4 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | - | 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.995.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | - | 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 3 laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 64.731.000,00 | 64.731.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | - | 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.001.000,00 | 50.001.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | - | 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | - | 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | - | - | 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 14,5 Ton | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.955.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | - | - | 2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | - | - | 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 34.288.000,00 | 34.288.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 17 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.600.000,00 | 48.600.000,00 | 18.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 171 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 4.499.691.544,00 | 3.214.565.374,00 | -1.285.126.170,00 | 12.953.045.697,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 47.361.000,00 | 47.361.000,00 | 0,00 | 40.695.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 11.512.000,00 | 11.512.000,00 | 0,00 | 17.984.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 220.848.000,00 | 220.848.000,00 | 0,00 | 400.177.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 45.806.400,00 | 45.806.400,00 | 0,00 | 36.696.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 571.584.720,00 | 712.692.800,00 | 141.108.080,00 | 925.478.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 84.631.000,00 | 76.923.400,00 | -7.707.600,00 | 108.755.450,00 | 0,00 | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | - | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 557.539.750,00 | 757.439.750,00 | 199.900.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | - | 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | 15 Ton | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | - | - | 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 150.000.000,00 | 300.088.230,00 | 150.088.230,00 | 50.567.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | - | - | 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | - | - | 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | - | - | 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | - | 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 17 Unit | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | - | 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | - | 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.520.000,00 | 20.520.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.548.333.128,00 | 1.254.959.410,00 | -293.373.718,00 | 1.709.050.338,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 38 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.648.900,00 | 17.648.900,00 | 0,00 | 51.953.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.175.500,00 | 1.175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 500 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.855.000,00 | 6.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.963.850,00 | 21.963.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.286.000,00 | 84.286.000,00 | 0,00 | 161.986.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.698.500,00 | 20.697.800,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.674.680,00 | 22.674.680,00 | 0,00 | 13.134.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.539.000,00 | 377.198.000,00 | 185.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 11 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.076.400,00 | 144.076.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 19.850.000,00 | 19.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | - | 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 239.866.450,00 | 397.759.789,00 | 157.893.339,00 | 3.821.375.200,00 | 0,00 | |
| | **2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 1 kegiatan Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.828.900,00 | 48.828.900,00 | 0,00 | 630.886.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | 55 orang / kali Keluarga | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.903.000,00 | 99.903.000,00 | 0,00 | 27.928.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | - | - | 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 12 Kelompok | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.991.000,00 | 134.986.500,00 | -4.500,00 | 41.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | - | - | 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 2.317.600.000,00 | 2.748.147.500,00 | 430.547.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | - | - | 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 10000 Ton | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.835.580.000,00 | 2.299.308.784,00 | 463.728.784,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | **2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 2.458.760.436,00 | 2.116.016.691,00 | -342.743.745,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 205.680.200,00 | 697.826.982,00 | 492.146.782,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 14.930.000,00 | 14.930.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 59.971.650,00 | 59.980.750,00 | 9.100,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 211.607.000,00 | 218.807.000,00 | 7.200.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 4.992.000,00 | 4.992.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 71.040.000,00 | 71.040.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 382.552.400,00 | 471.622.200,00 | 89.069.800,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 66.896.700,00 | 66.896.700,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital<br>Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | - | 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 7.200.000,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | - | 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 100 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | - | 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 100 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | - | - | 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 100 Layanan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | - | 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | - | 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 20.633.000,00 | 20.633.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 140.427.000,00 | 0,00 | -140.427.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daera | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan & Penganggaran yang Disusun Tepat Waktu | - | 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 12.389.300,00 | 12.389.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN | - | 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.085.606.863,00 | 2.109.736.807,00 | 24.129.944,00 | 1.650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN | - | 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 10.560.000,00 | 20.228.400,00 | 9.668.400,00 | 10.560.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat daerah | - | 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 4.027.400,00 | 4.027.400,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 24.532.300,00 | 24.532.300,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 29.255.300,00 | 41.755.300,00 | 12.500.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 15.080.000,00 | 15.080.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 10.000.500,00 | 10.000.500,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 10.008.000,00 | 10.008.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 153.985.000,00 | 153.985.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan | - | 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 8.021.000,00 | 8.021.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan | - | 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 45.719.600,00 | 45.719.600,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan | - | 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 313.800.000,00 | 352.545.000,00 | 38.745.000,00 | 422.160.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 23 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 52.170.000,00 | 52.170.000,00 | 0,00 | 87.590.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | - | 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.162.500,00 | 44.160.400,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | - | 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 82.120.000,00 | 82.120.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | - | 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 40.060.700,00 | 60.046.900,00 | 19.986.200,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | - | 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 110.333.800,00 | 152.062.800,00 | 41.729.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang meningkat kapasitasnya | - | 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 50 Lembaga | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 746.860.100,00 | 946.928.250,00 | 200.068.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 0,05 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 1,5 Persen | 2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan | 42 Lembaga | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 | 0,00 | 20.017.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 47 Persen | 2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan | 50 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.017.600,00 | 20.017.600,00 | 0,00 | 20.017.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG | 5 Lembaga | 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan | 10 Lembaga | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 1,45 Persen | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan | 10 Lembaga | 2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Lembaga | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 Persen | 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota | 50 Kegiatan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.349.050,00 | 15.349.050,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 Persen | 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota | 20 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.700.000,00 | 250.700.000,00 | 49.000.000,00 | 201.700,00 | 0,00 | |
| | **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 20.182.500,00 | 20.182.500,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang | 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 3.753.764.208,00 | 3.378.888.459,00 | -374.875.749,00 | 3.662.445.784,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 22.817.100,00 | 22.817.100,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 9.458.900,00 | 9.458.900,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 20 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 12.003.000,00 | 12.003.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 6.005.000,00 | 6.005.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 112.347.000,00 | 112.347.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 35.602.240,00 | 35.602.240,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.722.712.000,00 | 2.071.212.000,00 | 348.500.000,00 | 1.728.483.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 52.820.000,00 | 52.820.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) | 85 Persen | 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.711.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) | 85 Persen | 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.800.000,00 | 214.800.000,00 | 0,00 | 209.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) | 85 Persen | 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m CPR) | 81 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | 985 Poktan | 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 15 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 631.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | 985 Poktan | 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 17 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | 985 Poktan | 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | 985 Poktan | 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 10 Organisasi | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) | 85 Persen | 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 608 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 | 0,00 | 2.293.330.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) | 85 Persen | 2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.940.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 32 Persen | 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 6 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 32 Persen | 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2687 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 934.252.000,00 | 934.252.000,00 | 0,00 | 1.768.389.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 32 Persen | 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 25.187.000,00 | 25.187.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 32 Persen | 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 3 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | 985 Poktan | 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB | 94 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | 985 Poktan | 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 70 Kampung | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.500.000,00 | 0,00 | |
| | **2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) | 10 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | 985 Poktan | 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 12 Laporan / Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | 985 Poktan | 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 10 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | 25 Stakeholder | 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 10 laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | 25 Stakeholder | 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 10 laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.178.000.000,00 | 2.178.000.000,00 | 0,00 | 1.166.400.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 2.278.900,00 | 2.278.900,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.076.439.605,00 | 1.561.537.720,00 | -514.901.885,00 | 2.598.469.457,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.301.300,00 | 2.301.300,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.525.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 19 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.123.700,00 | 5.123.700,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.537.800,00 | 26.537.800,00 | 0,00 | 49.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.696.000,00 | 44.096.000,00 | 10.400.000,00 | 38.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.603.300,00 | 16.675.300,00 | 4.072.000,00 | 39.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 30 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.999.000,00 | 19.999.000,00 | 0,00 | 52.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1213 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.819.000,00 | 381.147.000,00 | 140.328.000,00 | 467.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 350.202.000,00 | 350.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 5.280.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 13 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.168.000,00 | 42.168.000,00 | 0,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 28 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 297.394.000,00 | 416.394.000,00 | 119.000.000,00 | 540.751.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.180.000,00 | 48.180.000,00 | 0,00 | 67.870.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.050.000,00 | 123.580.000,00 | 101.530.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 8 Komunitas | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.460.000,00 | 319.460.000,00 | 199.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 3 Permohonan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | 0,00 | 96.305.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 3 Media | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.080.000,00 | 43.080.000,00 | 3.000.000,00 | 63.800.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 16 Perangkat Daerah | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.077.100,00 | 8.077.100,00 | 0,00 | 1.337.419.050,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.281.300,00 | 110.281.300,00 | -4.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.322.200,00 | 13.322.200,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | 2 Perangkat Daerah | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.423.800,00 | 3.423.800,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 204 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.651.736.946,00 | 1.589.897.321,00 | -61.839.625,00 | 2.171.870.902,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 3.657.400,00 | 3.657.400,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 14.260.750,00 | 14.260.750,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 83.923.000,00 | 239.794.000,00 | 155.871.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.17.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | - | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.300.000.000,00 | 5.300.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 14.449.104,00 | 29.449.872,00 | 15.000.768,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 256.331.000,00 | 284.862.500,00 | 28.531.500,00 | 305.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 49.020.000,00 | 49.020.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 4.880.000,00 | 9.260.000,00 | 4.380.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan | - | 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 304 Unit Usaha | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 100.000.000,00 | 136.655.950,00 | 36.655.950,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan | - | 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 0 Unit Usaha | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan | - | 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 10 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 85.000.000,00 | 95.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | 17 Kelompok Masyarakat | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 39.999.950,00 | 39.999.950,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | - | 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 30 Unit Usaha | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 49.999.950,00 | 49.999.950,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | - | 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | - | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 299.999.850,00 | 299.999.850,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | - | - | 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 10 Unit Usaha | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | - | 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | - | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | - | - | 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 406.971.850,00 | 406.971.850,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | - | 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | - | 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 25.999.950,00 | 25.999.950,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | - | 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 20 Pelaku Usaha | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 135.800.000,00 | 385.711.000,00 | 249.911.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | - | 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 20 UMKM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | - | 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 10 UMKM | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 500.000.000,00 | 746.634.800,00 | 246.634.800,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.411.858.504,00 | 1.267.881.685,00 | -143.976.819,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 5.503.900,00 | 5.503.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 46.726.100,00 | 85.726.100,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 10.085.600,00 | 10.085.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 30.261.000,00 | 30.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 21.020.150,00 | 21.020.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 174.880.000,00 | 174.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 53.954.248,00 | 53.954.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 93.671.840,00 | 193.938.000,00 | 100.266.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 69.734.000,00 | 69.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 31.670.000,00 | 31.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | - | - | 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | - | - | 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 29.975.000,00 | 29.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 500 Pelaku Usaha | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 90.000.000,00 | 79.733.600,00 | -10.266.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 50 Pelaku Usaha | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan Usaha | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 79.999.900,00 | 79.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 1.513.473.651,00 | 1.423.014.251,00 | -90.459.400,00 | 1.525.337.970,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 17 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 18.014.100,00 | 18.014.100,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 21 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.533.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 208.824.000,00 | 766.506.000,00 | 557.682.000,00 | 296.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | - | - | 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | 12 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | - | - | 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 100 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.799.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 13 Organisasi | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 925.000.000,00 | 1.570.000.000,00 | 645.000.000,00 | 1.395.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | **2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 257.642.304,00 | 397.643.256,00 | 140.000.952,00 | 548.757.056,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.494.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | 25 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.065.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | - | - | 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | 15 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | - | - | 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 5 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 408.245.600,00 | 1.240.231.500,00 | 831.985.900,00 | 102.175.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | - | - | 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 84.111.800,00 | 85.353.600,00 | 1.241.800,00 | 188.148.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | - | - | 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 345.500.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | - | 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 1 Kegiatan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | - | 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Promosi | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.733.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | **3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | - | 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.193.227,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | - | 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | - | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 tahun Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.331.351.443,00 | 1.202.889.718,00 | -128.461.725,00 | 1.501.951.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 4.809.400,00 | 8.219.200,00 | 3.409.800,00 | 5.441.370,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 57.134.000,00 | 64.572.300,00 | 7.438.300,00 | 63.882.280,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 25.703.168,00 | 19.997.600,00 | -5.705.568,00 | 12.754.979,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 6.750.000,00 | 9.997.000,00 | 3.247.000,00 | 3.458.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 34.737.850,00 | 45.066.450,00 | 10.328.600,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 8.000.000,00 | 5.000.000,00 | -3.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 86.429.000,00 | 121.809.000,00 | 35.380.000,00 | 100.412.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 4.992.000,00 | 4.992.000,00 | 0,00 | 5.491.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 9 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 116.460.112,00 | 100.660.760,00 | -15.799.352,00 | 128.106.123,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 19 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 196.166.000,00 | 270.450.000,00 | 74.284.000,00 | 187.110.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 59.981.400,00 | 56.977.900,00 | -3.003.500,00 | 65.459.790,00 | 0,00 | |
| | **2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 1 Perpustakaan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 0 Perpustakaan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 167.954.500,00 | 167.954.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | 0 Layanan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 1 Perpustakaan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 68.046.000,00 | 0,00 | -68.046.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 0 Eksemplar | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 20 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.998.900,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 0 Eksemplar | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 0 Eksemplar | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 141.528.000,00 | 141.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 0 Perpustakaan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | 0 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 1 Perpustakaan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 97.043.000,00 | 0,00 | -97.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 0 Perpustakaan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 150 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 133.856.000,00 | 0,00 | -133.856.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 5 Lokus | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 109.500.000,00 | 188.971.000,00 | 79.471.000,00 | 120.450.000,00 | 0,00 | |
| | **2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 0 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 0 Eksemplar | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 0 Eksemplar | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 0 Eksemplar | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 250 Berkas | [object Object] | 41.671.000,00 | 35.000.000,00 | -6.671.000,00 | 55.738.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 250 Berkas | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 6.417.800,00 | 0,00 | -6.417.800,00 | 14.058.220,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.549.780,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis | 6 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.394.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 0 Lembaga | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0006 Penyusunan Database Arsiparis | Jumlah arsiparis | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0007 Pemilihan Arsiparis Teladan | Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya | 0 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0008 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip | Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip | 0 Lembaga | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | 27 Instansi | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 9.900.000,00 | 0,00 | -9.900.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.02.0003 Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip | Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip | 0 Naskah | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.02.0005 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan | Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 0 Pengguna | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - | - | 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 0 Berkas | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - | - | 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | - | - | 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 3 Daftar | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | - | - | 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | - | - | 2.24.03.2.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | - | - | 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | - | - | 2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | - | - | 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | 0 SOP | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | - | - | 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 0 Arsip | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 13.931.200,00 | 13.931.200,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 5.238.900,00 | 5.238.900,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 2.605.421.094,00 | 2.489.675.755,00 | -115.745.339,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 5.091.150,00 | 5.091.150,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 4.023.200,00 | 4.023.200,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 41.034.000,00 | 41.034.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 8.909.950,00 | 8.918.350,00 | 8.400,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 142.312.000,00 | 241.988.000,00 | 99.676.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 39.126.800,00 | 31.526.810,00 | -7.599.990,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 155.998.300,00 | 214.897.800,00 | 58.899.500,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 27.550.000,00 | 49.043.800,00 | 21.493.800,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 9.940.000,00 | 14.240.000,00 | 4.300.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.000.000,00 | 0,00 | -21.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 3 Unit | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 109.000.000,00 | 81.000.000,00 | -28.000.000,00 | 123.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | - | - | 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 2 Kelompok | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 139.745.780,00 | 486.297.130,00 | 346.551.350,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | - | - | 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.150.000,00 | 0,00 | -18.150.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | - | - | 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 92.510.887,00 | 45.030.450,00 | -47.480.437,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | - | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | - | 3.27.02.2.01.0017 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | 2500 Anakan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.539.200,00 | 75.539.200,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | - | - | 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 500 Ekor | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 3.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | - | - | 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 24.439.300,00 | 92.177.279,00 | 67.737.979,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | - | - | 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 100 Ha | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.250.000,00 | 216.775.700,00 | 144.525.700,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | - | - | 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 151.396.350,00 | 151.396.350,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | - | - | 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | - | - | 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima | 27.150.000,00 | 27.150.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - | - | 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | 5 Unit Usaha | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.998.100,00 | 49.998.100,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 119.645.600,00 | 119.645.600,00 | 370.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | - | 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 565.151.400,00 | 565.151.400,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.120.500,00 | 31.120.500,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.241.700,00 | 33.241.700,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.694.300,00 | 48.192.300,00 | 9.498.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.967.300,00 | 59.967.300,00 | -6.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.631.309.972,00 | 7.294.721.368,00 | -336.588.604,00 | 8.500.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.518.600,00 | 39.518.600,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.802.700,00 | 37.802.700,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.932.200,00 | 37.321.000,00 | 22.388.800,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.517.100,00 | 118.997.100,00 | 68.480.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.084.100,00 | 150.205.500,00 | 50.121.400,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.749.000,00 | 173.286.000,00 | 106.537.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 435.460.000,00 | 545.600.000,00 | 110.140.000,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 276.236.000,00 | 276.236.000,00 | 0,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 251.100.000,00 | 348.600.000,00 | 97.500.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 454.615.000,00 | 1.567.339.000,00 | 1.112.724.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.750.000.000,00 | 0,00 | -2.750.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.085.000.000,00 | 2.652.500.000,00 | 567.500.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 560.810.200,00 | 1.715.310.200,00 | 1.154.500.000,00 | 1.100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.061.800.712,00 | 1.061.800.712,00 | 0,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 237.500.000,00 | 424.500.000,00 | 187.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.701.644.000,00 | 1.866.059.500,00 | 164.415.500,00 | 1.950.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 768.142.400,00 | 768.142.400,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.179.400,00 | 232.179.400,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 226.512.200,00 | 361.416.200,00 | 134.904.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.000.000,00 | 213.810.000,00 | 135.810.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 177.260.508,00 | 177.513.228,00 | 252.720,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | - | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 570.084.600,00 | 600.084.600,00 | 30.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | - | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 392.829.000,00 | 392.829.000,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | - | 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 321.000.000,00 | 321.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | - | - | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 57.255.900,00 | 54.255.900,00 | -3.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | - | - | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 123.911.200,00 | 117.911.200,00 | -6.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | - | - | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 32.541.400,00 | 7.679.400,00 | -24.862.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - | - | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 88.296.100,00 | 88.296.100,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - | - | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 36.675.100,00 | 36.675.100,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | - | - | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 56.137.400,00 | 67.137.400,00 | 11.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | - | - | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 1.550.229.800,00 | 1.509.684.800,00 | -40.545.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | - | - | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 795.688.600,00 | 1.036.597.500,00 | 240.908.900,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - | - | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 3.189.277.550,00 | 3.896.391.100,00 | 707.113.550,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - | - | 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 1.214.782.850,00 | 923.582.850,00 | -291.200.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - | - | 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 8 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 764.560.800,00 | 864.560.800,00 | 100.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | - | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 115.580.150,00 | 125.803.750,00 | 10.223.600,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | - | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 10 Kasus | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 400.323.200,00 | 411.575.200,00 | 11.252.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | - | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 123.568.600,00 | 134.734.850,00 | 11.166.250,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah | - | - | 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 567.176.000,00 | 1.414.696.000,00 | 847.520.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah | - | - | 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | - | 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 227.817.000,00 | 0,00 | -227.817.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | - | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 148.713.100,00 | 201.759.000,00 | 53.045.900,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | - | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 21.455.700,00 | 70.057.900,00 | 48.602.200,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | - | 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 6.237.600,00 | 83.522.600,00 | 77.285.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | - | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 15.806.700,00 | 115.806.400,00 | 99.999.700,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | - | 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 63.349.600,00 | 87.349.600,00 | 24.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 376.098.100,00 | 376.098.100,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 275.515.300,00 | 275.515.300,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 2.538.447.034,00 | 2.275.344.039,00 | -263.102.995,00 | 2.538.236.784,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 114.900.000,00 | 114.900.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12000 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 3.444.720.250,00 | 5.167.080.200,00 | 1.722.359.950,00 | 1.750.519.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 14 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 150.000.000,00 | 75.000.000,00 | -75.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 29.577.600,00 | 29.577.600,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 235.893.800,00 | 235.893.800,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 700.550.000,00 | 749.741.000,00 | 49.191.000,00 | 640.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 210.369.950,00 | 210.369.950,00 | 0,00 | 145.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 30 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 800 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.501.743.000,00 | 2.074.435.000,00 | 572.692.000,00 | 2.300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 83.161.400,00 | 135.450.500,00 | 52.289.100,00 | 86.637.058,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 101.562.712,00 | 106.562.408,00 | 4.999.696,00 | 102.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 2.053.048.500,00 | 2.411.583.500,00 | 358.535.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 845.785.200,00 | 972.601.200,00 | 126.816.000,00 | 836.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 45 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 93.620.000,00 | 93.620.000,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | - | 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 30 Orang/Bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 14.236.918.546,00 | 13.813.911.052,00 | -423.007.494,00 | 15.316.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | - | 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 30 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 240.000.000,00 | 0,00 | -240.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | - | - | 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 1500 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 5.100.278.000,00 | 5.392.640.000,00 | 292.362.000,00 | 8.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | - | - | 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 247.025.000,00 | 412.467.000,00 | 165.442.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | - | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 95.034.500,00 | 95.034.500,00 | 0,00 | 97.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | - | 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 95.183.000,00 | 95.183.000,00 | 0,00 | 97.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | - | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 93.626.400,00 | 93.626.400,00 | 0,00 | 73.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | - | - | 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 30 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 900.000.000,00 | 950.000.000,00 | 50.000.000,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | - | - | 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.398.150,00 | 1.398.150,00 | 0,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | - | 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 250 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 50.625.000,00 | 33.750.000,00 | -16.875.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | - | 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 30 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 4.886.880.000,00 | 7.330.320.000,00 | 2.443.440.000,00 | 2.468.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.162.400,00 | 13.162.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 2.344.630.554,00 | 2.012.450.403,00 | -332.180.151,00 | 3.466.293.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 9.930.500,00 | 29.930.500,00 | 20.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 32.970.000,00 | 32.970.000,00 | 0,00 | 105.690.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 39.697.400,00 | 65.651.600,00 | 25.954.200,00 | 94.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 30.001.550,00 | 30.001.550,00 | 0,00 | 93.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 7.250.000,00 | 0,00 | -7.250.000,00 | 24.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 439.808.000,00 | 1.242.956.000,00 | 803.148.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 54.000.000,00 | 293.614.750,00 | 239.614.750,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 14.294.100,00 | 14.294.100,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 138.570.112,00 | 158.309.440,00 | 19.739.328,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 783.000.000,00 | 971.898.000,00 | 188.898.000,00 | 888.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 283.521.000,00 | 283.521.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 71.002.500,00 | 71.002.500,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 35.055.000,00 | 35.055.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | - | 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 13.297.050,00 | 13.297.050,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | - | 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 141.737.700,00 | 117.059.300,00 | -24.678.400,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | - | 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 194.205.650,00 | 150.168.650,00 | -44.037.000,00 | 760.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | - | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 0,00 | 49.999.850,00 | 49.999.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 82.401.900,00 | 88.334.200,00 | 5.932.300,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | - | - | 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 675.701.800,00 | 120.211.800,00 | -555.490.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | - | 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 20.663.050,00 | 11.943.050,00 | -8.720.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | - | 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 26.636.000,00 | 17.366.000,00 | -9.270.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | - | 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 17.545.500,00 | 9.042.500,00 | -8.503.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | - | 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 31.447.850,00 | 38.344.550,00 | 6.896.700,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | - | 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 28.668.100,00 | 13.638.100,00 | -15.030.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | - | 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 40.459.400,00 | 26.009.400,00 | -14.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 25.441.450,00 | 10.156.450,00 | -15.285.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 15.750.400,00 | 7.786.100,00 | -7.964.300,00 | 70.385.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 3 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 19.587.700,00 | 34.153.450,00 | 14.565.750,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 26.001.900,00 | 13.003.900,00 | -12.998.000,00 | 73.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 20.497.500,00 | 10.237.500,00 | -10.260.000,00 | 89.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 17.170.450,00 | 32.726.250,00 | 15.555.800,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 10.252.300,00 | 11.041.100,00 | 788.800,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 28.462.600,00 | 29.542.600,00 | 1.080.000,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 15.796.300,00 | 12.108.100,00 | -3.688.200,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 21.952.900,00 | 14.427.000,00 | -7.525.900,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 27.703.800,00 | 19.753.800,00 | -7.950.000,00 | 91.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 26.680.100,00 | 23.720.100,00 | -2.960.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | - | - | 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 24.934.100,00 | 10.309.800,00 | -14.624.300,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | - | - | 5.05.03.2.01.0006 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik | 98.748.300,00 | 106.998.300,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 49.560.300,00 | 49.560.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 24.066.900,00 | 24.066.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 28.198.578.029,00 | 33.990.859.991,00 | 5.792.281.962,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 11.275.500,00 | 11.275.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 9.999.850,00 | 9.999.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 135 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 % Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 % Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 26.677.200,00 | 172.521.500,00 | 145.844.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 % Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 75.285.500,00 | 127.057.900,00 | 51.772.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100 % Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 59.977.000,00 | 158.047.000,00 | 98.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 % Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 73.251.900,00 | 151.873.000,00 | 78.621.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 368.881.000,00 | 888.600.000,00 | 519.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 100 % Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 3.400.000.000,00 | 4.821.450.000,00 | 1.421.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.004.800,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100 % Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 285.336.432,00 | 305.336.688,00 | 20.000.256,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 2.388.000.000,00 | 2.453.890.000,00 | 65.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100 % Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 10.250.000,00 | 220.371.900,00 | 210.121.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 27.100.000,00 | 27.100.000,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100 % Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 60.150.000,00 | 160.900.000,00 | 100.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 144.285.300,00 | 149.285.400,00 | 5.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 86.160.250,00 | 146.160.200,00 | 59.999.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 220.173.400,00 | 230.173.200,00 | 9.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 200.350.000,00 | 210.350.100,00 | 10.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 101.770.300,00 | 142.483.800,00 | 40.713.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 15.450.300,00 | 15.450.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 76.544.500,00 | 76.544.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 24.925.600,00 | 24.925.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 57.899.700,00 | 57.899.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 59.849.000,00 | 59.849.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | - | 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 24.666.250,00 | 24.666.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | - | 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | - | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 34.994.800,00 | 34.994.800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | - | 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 65.472.950,00 | 115.472.950,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | - | 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 153.132.800,00 | 153.132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 251.212.066.500,00 | 259.388.728.500,00 | 8.176.662.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 1.704.503.800,00 | 704.503.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 4.428.737.545,00 | 4.428.737.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 25.326.000,00 | 25.326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 26.679.000,00 | 26.679.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 145.860.400,00 | 195.760.400,00 | 49.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 54.112.000,00 | 54.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 64.607.200,00 | 164.607.200,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100 % Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 37.602.900,00 | 204.161.100,00 | 166.558.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 223.510.450,00 | 433.553.550,00 | 210.043.100,00 | 547.989.312,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 41.250.000,00 | 0,00 | -41.250.000,00 | 79.052.480,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 100 % Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 176.946.500,00 | 224.646.500,00 | 47.700.000,00 | 233.916.176,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 52.997.800,00 | 181.807.800,00 | 128.810.000,00 | 273.174.304,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 100 % Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 9.964.850,00 | 9.964.850,00 | 0,00 | 109.768.672,00 | 0,00 | |
| | **5.03 KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.405.600,00 | 15.405.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.482.800.161,00 | 2.256.034.896,00 | -226.765.265,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.671.000,00 | 15.631.000,00 | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.704.650,00 | 9.704.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 80 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.984.600,00 | 9.984.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.414.700,00 | 45.414.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2500 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.075.000,00 | 13.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.015.700,00 | 20.015.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 38 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 500 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.302.000,00 | 172.474.000,00 | 54.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 45 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.997.000,00 | 9.997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.720.000,00 | 48.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 41 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 221.805.000,00 | 265.805.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.590.000,00 | 52.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 45 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.030.000,00 | 21.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | - | 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | - | 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 3264 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.220.150,00 | 85.572.150,00 | 31.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | - | 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | - | 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 300 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 166.200.000,00 | 166.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | - | - | 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 162 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.008.000,00 | 35.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | - | - | 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 162 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.647.450,00 | 72.289.100,00 | 29.641.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | - | - | 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 162 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.240.000,00 | 218.502.100,00 | 1.262.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | - | - | 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 20 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.500.000,00 | 165.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | - | - | 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 100 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.413.400,00 | 215.413.400,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | - | - | 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 100 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | - | 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.971.000,00 | 28.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | - | 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 43 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.610.800,00 | 14.610.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | - | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 10 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.054.500,00 | 50.054.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | - | - | 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 342.533.550,00 | 342.533.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.443.141.557,00 | 3.305.000.305,00 | -138.141.252,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.153.650,00 | 30.153.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.791.200,00 | 29.791.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.018.200,00 | 129.431.400,00 | 53.413.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.146.800,00 | 77.146.800,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.719.000,00 | 232.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.188.000,00 | 129.233.850,00 | 45.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.999.760,00 | 179.999.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.500.000,00 | 200.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.500.000,00 | 96.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.500.000,00 | 64.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | - | 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.451.031.950,00 | 1.672.555.800,00 | 221.523.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | - | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 893.235.100,00 | 938.745.100,00 | 45.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | - | 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 5 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 565.348.650,00 | 522.306.650,00 | -43.042.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | - | 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 5 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.206.450,00 | 104.706.450,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | - | - | 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 5 Rekomendasi | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 776.048.900,00 | 572.097.800,00 | -203.951.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | - | - | 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 5 perangkat daerah | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 227.868.800,00 | 326.868.800,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 5.638.400,00 | 5.638.400,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 1.400.847.636,00 | 1.547.908.588,00 | 147.060.952,00 | 1.547.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 3.320.200,00 | 3.320.200,00 | 0,00 | 12.450.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 34.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 60.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 119.209.000,00 | 205.609.000,00 | 86.400.000,00 | 146.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 9.450.000,00 | 19.450.000,00 | 10.000.000,00 | 29.500.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 7.627.000,00 | 7.627.000,00 | 0,00 | 23.450.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 120.086.750,00 | 120.086.750,00 | 0,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 11.620.000,00 | 11.620.000,00 | 0,00 | 35.450.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa | 675.200.000,00 | 675.200.000,00 | 0,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong | 52.523.000,00 | 52.523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong | 1.822.545.759,00 | 1.822.546.078,00 | 319,00 | 1.739.720.285,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.875.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong | 22.000.000,00 | 36.280.000,00 | 14.280.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong | 113.479.200,00 | 145.234.000,00 | 31.754.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong | 15.336.800,00 | 15.336.800,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong | 77.801.000,00 | 51.007.150,00 | -26.793.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 112 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak | 1.073.576.025,00 | 987.587.911,00 | -85.988.114,00 | 1.150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak | 21.850.000,00 | 21.850.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak | 60.240.500,00 | 60.240.500,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak | 14.700.000,00 | 13.200.000,00 | -1.500.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak | 8.636.600,00 | 8.636.600,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak | 79.000.000,00 | 150.168.000,00 | 71.168.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Huristak, Semua Kel/Desa | 95.647.500,00 | 95.647.500,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak | 29.951.200,00 | 30.081.200,00 | 130.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 752.406.643,00 | 776.034.572,00 | 23.627.929,00 | 737.256.062,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 24.200.000,00 | 24.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 5.773.700,00 | 5.773.700,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 30.570.600,00 | 30.570.600,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 36.281.500,00 | 36.281.500,00 | 0,00 | 9.069.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 2.052.000,00 | 2.052.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 82.140.000,00 | 156.396.000,00 | 74.256.000,00 | 145.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 64.476.700,00 | 64.476.700,00 | 0,00 | 83.373.950,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa | 20.140.350,00 | 19.684.300,00 | -456.050,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20 Berita Acara | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 1.719.004.269,00 | 1.357.102.373,00 | -361.901.896,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik | 10.874.700,00 | 10.874.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 2.107.500,00 | 2.107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 18.198.000,00 | 0,00 | -18.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik | 15.180.500,00 | 15.180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik | 80.026.000,00 | 142.776.000,00 | 62.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik | 2.796.000,00 | 2.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 3 Laporan | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik | 27.822.000,00 | 27.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 3 Laporan | Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa | 68.609.000,00 | 68.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 336 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 2.117.508.253,00 | 1.821.339.882,00 | -296.168.371,00 | 2.100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 3.948.500,00 | 3.948.500,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 10.205.800,00 | 10.205.800,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 3.000.480,00 | 3.000.480,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 13.551.000,00 | 13.551.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 127.596.000,00 | 160.740.000,00 | 33.144.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 28.700.000,00 | 28.700.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 9.809.000,00 | 9.809.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa | 87.685.000,00 | 87.685.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 144 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 1.274.262.903,00 | 1.111.332.979,00 | -162.929.924,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15 Laporan | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 9.540.280,00 | 9.540.280,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 264 Laporan | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 138.824.000,00 | 215.185.000,00 | 76.361.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 77.254.050,00 | 76.253.900,00 | -1.000.150,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 10 Laporan | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 61.350.000,00 | 61.350.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Berita Acara | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 7.080.000,00 | 7.080.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.756.252.032,00 | 1.714.020.140,00 | -42.231.892,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 20.425.600,00 | 20.425.600,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 9.489.950,00 | 9.489.950,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 25.350.000,00 | 25.350.000,00 | 0,00 | 36.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 23.254.400,00 | 23.254.400,00 | 0,00 | 20.450.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 TA Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 160.966.000,00 | 156.950.000,00 | -4.016.000,00 | 213.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 21.140.000,00 | 21.140.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 10 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa | 78.950.000,00 | 78.950.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 1.735.709.609,00 | 1.521.288.704,00 | -214.420.905,00 | 1.739.207.116,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 19.225.200,00 | 19.225.200,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 10.356.000,00 | 10.356.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 16.796.588,00 | 16.796.588,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 73.026.000,00 | 145.710.000,00 | 72.684.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 29.920.000,00 | 29.920.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga | 89.523.700,00 | 88.816.500,00 | -707.200,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 4.805.700,00 | 4.805.700,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 154 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 1.242.414.209,00 | 1.047.227.046,00 | -195.187.163,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 7.486.400,00 | 7.486.400,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 9.100.000,00 | 15.400.000,00 | 6.300.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 7.750.000,00 | 22.250.000,00 | 14.500.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 15.000.000,00 | 13.746.000,00 | -1.254.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 11.415.218,00 | 11.415.218,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 7.297.900,00 | 7.297.900,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 95.000.000,00 | 133.254.000,00 | 38.254.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 15.700.500,00 | 26.500.500,00 | 10.800.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Semua Kel/Desa | 17.915.600,00 | 17.915.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 13 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 13.632.500,00 | 13.632.500,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang | 72.083.400,00 | 72.083.400,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.140.448.301,00 | 973.538.756,00 | -166.909.545,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.695.700,00 | 1.785.700,00 | 90.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan | 10.599.100,00 | 29.969.100,00 | 19.370.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan | 8.298.900,00 | 8.298.900,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan | 1.001.000,00 | 2.552.000,00 | 1.551.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan | 5.003.752,00 | 5.003.752,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan | 18.582.500,00 | 8.229.500,00 | -10.353.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 15 Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan | 159.482.000,00 | 180.144.000,00 | 20.662.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan | 58.865.600,00 | 58.865.600,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.927.000,00 | 12.360.600,00 | 4.433.600,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Orang | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.274.300,00 | 25.649.300,00 | 7.375.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 15 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.151.750,00 | 19.202.100,00 | 5.050.350,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Tahun Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 10.080.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 242 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 919.866.893,00 | 904.849.917,00 | -15.016.976,00 | 1.011.853.582,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane | 968.800,00 | 968.800,00 | 0,00 | 1.021.335,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane | 19.135.300,00 | 19.135.300,00 | 0,00 | 20.092.065,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 1.018.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 5.588.100,00 | 5.588.100,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 114 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 0,00 | 58.688.070,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 44.924.687,00 | 44.924.687,00 | 0,00 | 47.170.922,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu | 4.903.026,00 | 4.903.026,00 | 0,00 | 5.393.329,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane | 109.705.100,00 | 104.105.100,00 | -5.600.000,00 | 120.705.640,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 TA Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa | 21.631.100,00 | 21.631.100,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa | 18.253.800,00 | 18.253.800,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 TA Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa | 16.073.000,00 | 16.073.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 500 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa | 149.999.950,00 | 149.999.950,00 | 0,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa | 28.085.600,00 | 28.085.600,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 5.157.400,00 | 5.157.400,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 120 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 982.826.090,00 | 980.309.750,00 | -2.516.340,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 1.494.100,00 | 1.494.100,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 4.125.600,00 | 4.125.600,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 3.213.000,00 | 3.213.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 11.432.900,00 | 11.432.900,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 2.998.400,00 | 2.998.400,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 4.394.000,00 | 4.394.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 5.965.500,00 | 5.965.500,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 208 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 132.710.000,00 | 130.794.000,00 | -1.916.000,00 | 200.510.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 9.860.000,00 | 9.860.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 9 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa | 113.861.950,00 | 113.861.950,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 2 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 4.025.000,00 | 4.025.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa | 16.472.000,00 | 16.472.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 168 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok | 1.067.265.537,00 | 1.026.134.135,00 | -41.131.402,00 | 1.067.265.537,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco | 12.494.600,00 | 5.320.300,00 | -7.174.300,00 | 10.000.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok | 30.870.000,00 | 15.078.000,00 | -15.792.000,00 | 11.305.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco | 18.821.800,00 | 25.873.500,00 | 7.051.700,00 | 18.153.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco | 40.692.400,00 | 40.815.000,00 | 122.600,00 | 19.021.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | 0,00 | 5.019.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 20 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco | 121.710.000,00 | 195.252.000,00 | 73.542.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco | 12.781.200,00 | 13.231.200,00 | 450.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok<br>Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa | 808.900,00 | 808.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 9 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 1.056.700.458,00 | 963.389.228,00 | -93.311.230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1Paket Paket | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun Paket | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 1.000.400,00 | 1.000.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun Paket | Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa | 6.248.100,00 | 6.248.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Tahun Paket | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 4.253.500,00 | 4.315.100,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Tahun Dokumen | Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa | 1.544.000,00 | 1.544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 109 orang/hari Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Tahun Unit | Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa | 9.332.800,00 | 9.271.200,00 | -61.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa | 5.494.200,00 | 5.494.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 Lembar Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa | 83.965.100,00 | 119.565.100,00 | 35.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Tahun Unit | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 5.494.500,00 | 5.494.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 kegiatan Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa | 10.421.550,00 | 10.421.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Tahun Laporan | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 37.947.100,00 | 37.947.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 kegiatan Orang | Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa | 22.858.200,00 | 22.858.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 1 kegiatan Orang | Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa | 77.725.400,00 | 77.725.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 1.375.430.838,00 | 1.126.356.949,00 | -249.073.889,00 | 1.430.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 2.405.200,00 | 2.405.200,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 7.775.000,00 | 7.775.000,00 | 0,00 | 5.670.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 6.007.800,00 | 5.042.600,00 | -965.200,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 97.368.000,00 | 106.740.000,00 | 9.372.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 126.961.750,00 | 126.961.750,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.748.000,00 | 7.748.000,00 | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.214.350,00 | 10.100.250,00 | -114.100,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.171.835.257,00 | 1.007.500.036,00 | -164.335.221,00 | 1.130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.130.500,00 | 5.130.500,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.930.900,00 | 19.930.900,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.912.000,00 | 136.626.000,00 | 43.714.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0 Unit | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi | - | - | 7.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.459.700,00 | 105.459.700,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 0 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.250,00 | 30.000.250,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 0 Laporan | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.075.000,00 | 5.075.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 0 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.162.700,00 | 8.162.700,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | - | - | 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | ORMAS,PASKIB,BLNGRA Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 2.330.044.006,00 | 2.801.276.506,00 | 471.232.500,00 | 3.651.917.059,00 | 0,00 | |
| | **8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 8 Orang/bulan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 1.303.923.677,00 | 1.129.387.284,00 | -174.536.393,00 | 1.372.437.130,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 6.570.200,00 | 6.578.000,00 | 7.800,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 14.322.100,00 | 14.322.100,00 | 0,00 | 60.780.145,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 13.158.650,00 | 17.351.400,00 | 4.192.750,00 | 18.568.590,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 172.712.000,00 | 205.452.000,00 | 32.740.000,00 | 310.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 13.624.700,00 | 28.587.700,00 | 14.963.000,00 | 40.275.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 14.290.640,00 | 9.027.304,00 | -5.263.336,00 | 21.035.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 0,00 | 14.616.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | TKS 13 orang/ Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 161.482.000,00 | 260.166.000,00 | 98.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | BBM&PAJAK 2 Unit | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 24.000.000,00 | 23.345.686,00 | -654.314,00 | 29.888.500,00 | 0,00 | |
| | **8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | - | 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | 32 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 213.834.284,00 | 513.814.394,00 | 299.980.110,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | - | 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | MONEV PARPOL 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 8.165.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | - | - | 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | MONEV ORMAS 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 5.807.385,00 | 0,00 | |
| | **8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | KOMINDA 1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 54.800.350,00 | 56.744.350,00 | 1.944.000,00 | 105.885.503,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | TIM TERPADU 50 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 75.626.400,00 | 77.570.400,00 | 1.944.000,00 | 136.935.503,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | PUSKOMIN 5 Orang | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 41.295.300,00 | 27.304.300,00 | -13.991.000,00 | 51.243.195,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | MONEV UNJUK RASA 1 Laporan | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 6.099.800,00 | 6.099.800,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | FORKOPIMDA 30 ORG/1 Dokumen | Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan | 76.185.500,00 | 39.633.500,00 | -36.552.000,00 | 67.157.125,00 | 0,00 | |

# PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **325.780.723.208,00** | **338.699.213.848,00** | **12.918.490.640,00** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **325.780.723.208,00** | **338.699.213.848,00** | **12.918.490.640,00** | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **55.525.704.656,00** | **54.895.958.656,00** | **-629.746.000,00** | |
| **1.01.02.2.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **40.478.122.250,00** | **39.779.148.250,00** | **-698.974.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 250.000.000,00 | **250.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.200.000.000,00 | **1.260.000.000,00** | **60.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | 480.000.000,00 | **420.000.000,00** | **-60.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 48.906.300,00 | **48.906.300,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 258.995.100,00 | **222.889.100,00** | **-36.106.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 50.000.000,00 | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 33.136.518.000,00 | **32.860.970.000,00** | **-275.548.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 142.049.100,00 | **142.049.100,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 763.246.900,00 | **488.996.900,00** | **-274.250.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 173.683.600,00 | **101.113.600,00** | **-72.570.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 19.223.250,00 | **19.223.250,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.280.000.000,00 | **1.920.000.000,00** | **640.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.400.000.000,00 | **1.760.000.000,00** | **-640.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 235.000.000,00 | **235.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.01.02.2.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **7.591.497.556,00** | **7.877.345.556,00** | **285.848.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 120.000.000,00 | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 340.000.000,00 | **340.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 133.460.406,00 | **133.460.406,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 315.401.900,00 | **315.401.900,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 5.162.452.000,00 | **5.438.000.000,00** | **275.548.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 40.127.050,00 | **40.127.050,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 275.200.000,00 | **400.000.000,00** | **124.800.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 93.539.600,00 | **44.039.600,00** | **-49.500.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 41.316.600,00 | **41.316.600,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.005.000.000,00 | **1.005.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.01.02.2.03** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **5.344.557.300,00** | **5.180.557.300,00** | **-164.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 200.000.000,00 | **200.000.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 156.853.100,00 | **150.103.100,00** | **-6.750.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4.186.640.000,00 | **4.186.640.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 37.075.800,00 | **7.825.800,00** | **-29.250.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 9.460.400,00 | **9.460.400,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 600.000.000,00 | **600.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | 26.528.000,00 | **26.528.000,00** | **0,00** | |
| **1.01.02.2.04** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **2.111.527.550,00** | **2.058.907.550,00** | **-52.620.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 41.326.100,00 | **28.846.100,00** | **-12.480.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.524.990.000,00 | **1.524.990.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 24.015.300,00 | **7.515.300,00** | **-16.500.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 480.000.000,00 | **480.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 21.246.150,00 | **17.556.150,00** | **-3.690.000,00** | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **270.255.018.552,00** | **283.803.255.192,00** | **13.548.236.640,00** | |
| **1.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **25.487.500,00** | **25.487.500,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 25.487.500,00 | **25.487.500,00** | **0,00** | |
| **1.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **269.267.196.018,00** | **281.511.501.658,00** | **12.244.305.640,00** | |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 269.242.293.468,00 | **281.489.299.108,00** | **12.247.005.640,00** | |
| 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 24.902.550,00 | **22.202.550,00** | **-2.700.000,00** | |
| **1.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.575.900,00** | **18.725.900,00** | **-5.850.000,00** | |
| 1.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.575.900,00 | **18.725.900,00** | **-5.850.000,00** | |
| **1.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **633.794.150,00** | **1.101.902.150,00** | **468.108.000,00** | |
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.588.000,00 | **8.588.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.756.500,00 | **67.756.500,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 53.655.300,00 | **62.655.300,00** | **9.000.000,00** | |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 52.714.000,00 | **52.714.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 37.125.350,00 | **37.125.350,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 40.000.000,00 | **40.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 40.384.000,00 | **40.434.000,00** | **50.000,00** | |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 333.571.000,00 | **792.629.000,00** | **459.058.000,00** | |
| **1.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **184.681.584,00** | **1.026.354.584,00** | **841.673.000,00** | |
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.500.000,00 | **6.500.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 125.999.584,00 | **125.999.584,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 52.182.000,00 | **893.855.000,00** | **841.673.000,00** | |
| **1.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **119.283.400,00** | **119.283.400,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.747.400,00 | **50.747.400,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 68.536.000,00 | **68.536.000,00** | **0,00** | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **186.822.395.624,00** | **225.142.361.487,00** | **38.319.965.863,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KESEHATAN** | **130.510.318.526,00** | **141.310.486.343,00** | **10.800.167.817,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **63.884.816.202,00** | **74.281.697.585,00** | **10.396.881.383,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **8.699.150.701,00** | **7.621.394.215,00** | **-1.077.756.486,00** | |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.675.000.000,00 | **3.840.734.350,00** | **2.165.734.350,00** | |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 530.949.000,00 | **530.949.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0,00 | **162.190.383,00** | **162.190.383,00** | |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 176.493.000,00 | **85.274.850,00** | **-91.218.150,00** | |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 6.071.867.501,00 | **2.765.004.932,00** | **-3.306.862.569,00** | |
| 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi  Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 244.841.200,00 | **237.240.700,00** | **-7.600.500,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **55.077.295.701,00** | **66.541.252.870,00** | **11.463.957.169,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 2.413.935.800,00 | **1.742.954.568,00** | **-670.981.232,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 907.500.000,00 | **235.802.000,00** | **-671.698.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 10.500.000,00 | **431.341.600,00** | **420.841.600,00** | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 245.461.200,00 | **245.461.200,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 938.849.000,00 | **828.495.500,00** | **-110.353.500,00** | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 51.300.000,00 | **51.300.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 40.500.000,00 | **40.500.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 100.500.000,00 | **100.500.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 524.267.000,00 | **451.917.000,00** | **-72.350.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 979.289.950,00 | **1.375.336.900,00** | **396.046.950,00** | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 45.996.800,00 | **15.900.000,00** | **-30.096.800,00** | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3.738.894.000,00 | **2.904.479.000,00** | **-834.415.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 291.314.000,00 | **729.840.000,00** | **438.526.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 362.680.000,00 | **329.079.000,00** | **-33.601.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 608.500.000,00 | **913.578.050,00** | **305.078.050,00** | |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 188.100.000,00 | **409.066.450,00** | **220.966.450,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1.195.261.101,00 | **1.317.958.602,00** | **122.697.501,00** | |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 34.100.000.000,00 | **42.683.072.300,00** | **8.583.072.300,00** | |
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 113.345.000,00 | **228.625.000,00** | **115.280.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 4.228.010.400,00 | **8.121.004.400,00** | **3.892.994.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.600.691.900,00 | **1.467.091.900,00** | **-133.600.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 24.000.000,00 | **29.800.000,00** | **5.800.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 15.000.000,00 | **16.941.000,00** | **1.941.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi  Penerapan SPM Bidang Kesehatan  Kabupaten/Kota | 45.200.000,00 | **45.200.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 361.850.000,00 | **688.208.850,00** | **326.358.850,00** | |
| 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 854.850.000,00 | **979.500.000,00** | **124.650.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 158.299.550,00 | **158.299.550,00** | **0,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **108.369.800,00** | **119.050.500,00** | **10.680.700,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 108.369.800,00 | **119.050.500,00** | **10.680.700,00** | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **1.074.503.000,00** | **1.367.891.278,00** | **293.388.278,00** | |
| **1.02.03.2.02** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **393.714.000,00** | **393.714.000,00** | |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0,00 | **393.714.000,00** | **393.714.000,00** | |
| **1.02.03.2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.074.503.000,00** | **974.177.278,00** | **-100.325.722,00** | |
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.074.503.000,00 | **974.177.278,00** | **-100.325.722,00** | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **342.438.000,00** | **347.085.980,00** | **4.647.980,00** | |
| **1.02.04.2.01** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **88.055.000,00** | **96.858.000,00** | **8.803.000,00** | |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 88.055.000,00 | **96.858.000,00** | **8.803.000,00** | |
| **1.02.04.2.03** | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **254.383.000,00** | **250.227.980,00** | **-4.155.020,00** | |
| 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 254.383.000,00 | **250.227.980,00** | **-4.155.020,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **232.047.650,00** | **821.681.900,00** | **589.634.250,00** | |
| **1.02.05.2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **35.295.650,00** | **273.253.650,00** | **237.958.000,00** | |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 35.295.650,00 | **273.253.650,00** | **237.958.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **196.752.000,00** | **548.428.250,00** | **351.676.250,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 196.752.000,00 | **548.428.250,00** | **351.676.250,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **64.976.513.674,00** | **64.492.129.600,00** | **-484.384.074,00** | |
| **1.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **249.816.300,00** | **75.532.050,00** | **-174.284.250,00** | |
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 249.816.300,00 | **75.532.050,00** | **-174.284.250,00** | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **63.599.410.702,00** | **62.880.942.078,00** | **-718.468.624,00** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 63.599.410.702,00 | **62.880.942.078,00** | **-718.468.624,00** | |
| **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **643.224.000,00** | **1.039.182.800,00** | **395.958.800,00** | |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 134.578.000,00 | **164.674.800,00** | **30.096.800,00** | |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 47.000.000,00 | **47.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 27.000.000,00 | **27.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 120.000.000,00 | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 314.646.000,00 | **680.508.000,00** | **365.862.000,00** | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **413.372.672,00** | **413.372.672,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.419.000,00 | **16.419.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 396.953.672,00 | **396.953.672,00** | **0,00** | |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **70.690.000,00** | **83.100.000,00** | **12.410.000,00** | |
| 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.690.000,00 | **83.100.000,00** | **12.410.000,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.02.0000** | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** | **56.312.077.098,00** | **83.831.875.144,00** | **27.519.798.046,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **16.462.540.428,00** | **22.134.148.558,00** | **5.671.608.130,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **8.576.932.368,00** | **11.051.054.058,00** | **2.474.121.690,00** | |
| 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 913.390.000,00 | **1.915.187.789,00** | **1.001.797.789,00** | |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.063.088.969,00 | **1.353.088.969,00** | **290.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2.836.138.500,00 | **4.315.138.500,00** | **1.479.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 500.000.000,00 | **500.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1.223.580.000,00 | **1.307.940.000,00** | **84.360.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 2.040.734.899,00 | **1.659.698.800,00** | **-381.036.099,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **7.885.608.060,00** | **11.083.094.500,00** | **3.197.486.440,00** | |
| 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 7.885.608.060,00 | **11.073.094.500,00** | **3.187.486.440,00** | |
| 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 0,00 | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **39.849.536.670,00** | **61.697.726.586,00** | **21.848.189.916,00** | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **19.965.871.238,00** | **19.745.938.854,00** | **-219.932.384,00** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19.965.871.238,00 | **19.745.938.854,00** | **-219.932.384,00** | |
| **1.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 200.000.000,00 | **200.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **662.870.200,00** | **1.257.955.700,00** | **595.085.500,00** | |
| 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 161.496.200,00 | **624.581.700,00** | **463.085.500,00** | |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150.000.000,00 | **210.000.000,00** | **60.000.000,00** | |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.001.000,00 | **50.001.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 101.440.000,00 | **173.440.000,00** | **72.000.000,00** | |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 199.933.000,00 | **199.933.000,00** | **0,00** | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **749.979.632,00** | **1.193.016.432,00** | **443.036.800,00** | |
| 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.000.000,00 | **75.000.000,00** | **40.000.000,00** | |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 714.979.632,00 | **753.764.632,00** | **38.785.000,00** | |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0,00 | **364.251.800,00** | **364.251.800,00** | |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **270.815.600,00** | **300.815.600,00** | **30.000.000,00** | |
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 270.815.600,00 | **300.815.600,00** | **30.000.000,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **18.000.000.000,00** | **39.000.000.000,00** | **21.000.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 18.000.000.000,00 | **39.000.000.000,00** | **21.000.000.000,00** | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **47.377.090.389,00** | **130.682.081.710,00** | **83.304.991.321,00** | |
| **1.03.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG** | **46.908.261.789,00** | **130.038.253.110,00** | **83.129.991.321,00** | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **1.053.710.500,00** | **2.034.944.500,00** | **981.234.000,00** | |
| **1.03.02.2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **450.000.000,00** | **900.000.000,00** | **450.000.000,00** | |
| 1.03.02.2.01.0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | 450.000.000,00 | **900.000.000,00** | **450.000.000,00** | |
| **1.03.02.2.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **603.710.500,00** | **1.134.944.500,00** | **531.234.000,00** | |
| 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 400.000.000,00 | **891.050.000,00** | **491.050.000,00** | |
| 1.03.02.2.02.0050 | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | 203.710.500,00 | **243.894.500,00** | **40.184.000,00** | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **832.294.992,00** | **982.294.992,00** | **150.000.000,00** | |
| **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **832.294.992,00** | **982.294.992,00** | **150.000.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 162.294.992,00 | **432.294.992,00** | **270.000.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 670.000.000,00 | **350.000.000,00** | **-320.000.000,00** | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **15.054.532.750,00** | **18.023.692.750,00** | **2.969.160.000,00** | |
| **1.03.08.2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **15.054.532.750,00** | **18.023.692.750,00** | **2.969.160.000,00** | |
| 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 970.000.000,00 | **3.900.000.000,00** | **2.930.000.000,00** | |
| 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 13.000.000.000,00 | **11.700.000.000,00** | **-1.300.000.000,00** | |
| 1.03.08.2.01.0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 750.000.000,00 | **2.350.000.000,00** | **1.600.000.000,00** | |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 334.532.750,00 | **73.692.750,00** | **-260.840.000,00** | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **23.262.447.900,00** | **100.055.536.260,00** | **76.793.088.360,00** | |
| **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **23.262.447.900,00** | **100.055.536.260,00** | **76.793.088.360,00** | |
| 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 1.143.000.000,00 | **2.537.000.000,00** | **1.394.000.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 850.000.000,00 | **2.667.803.450,00** | **1.817.803.450,00** | |
| 1.03.10.2.01.0052 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 216.752.900,00 | **39.824.900,00** | **-176.928.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | 0,00 | **6.400.000.000,00** | **6.400.000.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan | 17.488.695.000,00 | **43.118.265.160,00** | **25.629.570.160,00** | |
| 1.03.10.2.01.0060 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 214.000.000,00 | **1.936.000.000,00** | **1.722.000.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 550.000.000,00 | **1.150.000.000,00** | **600.000.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan | 2.800.000.000,00 | **42.206.642.750,00** | **39.406.642.750,00** | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **463.530.600,00** | **346.152.600,00** | **-117.378.000,00** | |
| **1.03.12.2.02** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **463.530.600,00** | **346.152.600,00** | **-117.378.000,00** | |
| 1.03.12.2.02.0004 | Penyusunan Peta Dasar | 463.530.600,00 | **346.152.600,00** | **-117.378.000,00** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.241.745.047,00** | **8.595.632.008,00** | **2.353.886.961,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **170.000.050,00** | **42.123.950,00** | **-127.876.100,00** | |
| 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.206.250,00 | **7.441.450,00** | **235.200,00** | |
| 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 31.925.000,00 | **1.925.000,00** | **-30.000.000,00** | |
| 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.179.200,00 | **28.071.100,00** | **19.891.900,00** | |
| 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 42.709.600,00 | **4.686.400,00** | **-38.023.200,00** | |
| **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.482.495.583,00** | **4.349.527.402,00** | **-132.968.181,00** | |
| 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.482.495.583,00 | **4.349.527.402,00** | **-132.968.181,00** | |
| **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **291.666.750,00** | **1.705.730.350,00** | **1.414.063.600,00** | |
| 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | **8.203.300,00** | **8.203.300,00** | |
| 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36.399.800,00 | **58.310.100,00** | **21.910.300,00** | |
| 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.017.000,00 | **5.017.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.226.000,00 | **20.226.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.041.950,00 | **24.141.950,00** | **11.100.000,00** | |
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 216.982.000,00 | **1.589.832.000,00** | **1.372.850.000,00** | |
| **1.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **96.000.000,00** | **1.406.000.000,00** | **1.310.000.000,00** | |
| 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 96.000.000,00 | **1.406.000.000,00** | **1.310.000.000,00** | |
| **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **668.994.914,00** | **633.706.556,00** | **-35.288.358,00** | |
| 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.003.000,00 | **3.003.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 286.995.964,00 | **142.733.556,00** | **-144.262.408,00** | |
| 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 378.995.950,00 | **487.970.000,00** | **108.974.050,00** | |
| **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **532.587.750,00** | **458.543.750,00** | **-74.044.000,00** | |
| 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.470.000,00 | **33.470.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 247.280.000,00 | **201.006.000,00** | **-46.274.000,00** | |
| 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 215.977.750,00 | **181.017.750,00** | **-34.960.000,00** | |
| 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35.860.000,00 | **43.050.000,00** | **7.190.000,00** | |
| **1.04.2.15.1.03.01.0000** | **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN** | **468.828.600,00** | **643.828.600,00** | **175.000.000,00** | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **135.941.200,00** | **135.941.200,00** | **0,00** | |
| **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **135.941.200,00** | **135.941.200,00** | **0,00** | |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 135.941.200,00 | **135.941.200,00** | **0,00** | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **319.938.800,00** | **494.938.800,00** | **175.000.000,00** | |
| **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **319.938.800,00** | **494.938.800,00** | **175.000.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 319.938.800,00 | **494.938.800,00** | **175.000.000,00** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.039.816.661,00** | **4.157.726.346,00** | **117.909.685,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.684.425.761,00** | **2.687.663.546,00** | **3.237.785,00** | |
| 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 12.948.600,00 | **12.948.600,00** | **0,00** | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **4.917.869.961,00** | **6.057.822.446,00** | **1.139.952.485,00** | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.04.02.2.01** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | **100.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **140.000.000,00** | **973.042.800,00** | **833.042.800,00** | |
| **1.04.03.2.03** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **140.000.000,00** | **973.042.800,00** | **833.042.800,00** | |
| 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | 140.000.000,00 | **973.042.800,00** | **833.042.800,00** | |
| **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **651.001.900,00** | **840.001.900,00** | **189.000.000,00** | |
| **1.04.04.2.01** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **651.001.900,00** | **840.001.900,00** | **189.000.000,00** | |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 451.001.900,00 | **640.001.900,00** | **189.000.000,00** | |
| 1.04.04.2.01.0007 | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 200.000.000,00 | **200.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.039.816.661,00** | **4.157.726.346,00** | **117.909.685,00** | |
| **1.04.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.684.425.761,00** | **2.687.663.546,00** | **3.237.785,00** | |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.671.477.161,00 | **2.674.714.946,00** | **3.237.785,00** | |
| **1.04.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **450.156.300,00** | **497.146.300,00** | **46.990.000,00** | |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 106.116.500,00 | **106.116.500,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 101.140.000,00 | **101.140.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.695.800,00 | **11.695.800,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 231.204.000,00 | **278.194.000,00** | **46.990.000,00** | |
| **1.04.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **649.981.000,00** | **717.663.000,00** | **67.682.000,00** | |
| 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.513.000,00 | **6.513.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.180.000,00 | **72.180.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 571.288.000,00 | **638.970.000,00** | **67.682.000,00** | |
| **1.04.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **255.253.600,00** | **255.253.500,00** | **-100,00** | |
| 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 236.173.600,00 | **236.173.500,00** | **-100,00** | |
| 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.080.000,00 | **19.080.000,00** | **0,00** | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **7.460.814.369,00** | **15.241.480.709,00** | **7.780.666.340,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** | **4.104.802.283,00** | **4.454.294.448,00** | **349.492.165,00** | |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **310.364.800,00** | **412.435.096,00** | **102.070.296,00** | |
| **1.05.02.2.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **228.046.800,00** | **309.569.500,00** | **81.522.700,00** | |
| 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 66.980.000,00 | **66.980.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 63.566.800,00 | **145.089.600,00** | **81.522.800,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 45.000.000,00 | **44.999.900,00** | **-100,00** | |
| 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 52.500.000,00 | **52.500.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.02.2.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **82.318.000,00** | **102.865.596,00** | **20.547.596,00** | |
| 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 30.628.000,00 | **30.628.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 51.690.000,00 | **72.237.596,00** | **20.547.596,00** | |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **1.571.135.100,00** | **1.883.474.800,00** | **312.339.700,00** | |
| **1.05.04.2.04** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **1.571.135.100,00** | **1.883.474.800,00** | **312.339.700,00** | |
| 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 1.571.135.100,00 | **1.883.474.800,00** | **312.339.700,00** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.223.302.383,00** | **2.158.384.552,00** | **-64.917.831,00** | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.971.800.383,00** | **1.906.882.552,00** | **-64.917.831,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.971.800.383,00 | **1.906.882.552,00** | **-64.917.831,00** | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **160.106.000,00** | **160.106.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.100.000,00 | **9.100.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 151.006.000,00 | **151.006.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **38.956.000,00** | **38.956.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38.956.000,00 | **38.956.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **52.440.000,00** | **52.440.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 52.440.000,00 | **52.440.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.0000** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | **3.356.012.086,00** | **10.787.186.261,00** | **7.431.174.175,00** | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **1.152.764.400,00** | **8.664.637.400,00** | **7.511.873.000,00** | |
| **1.05.03.2.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **1.152.764.400,00** | **917.531.800,00** | **-235.232.600,00** | |
| 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 46.514.400,00 | **22.027.800,00** | **-24.486.600,00** | |
| 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 1.083.750.000,00 | **895.504.000,00** | **-188.246.000,00** | |
| **1.05.03.2.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **0,00** | **1.925.000.000,00** | **1.925.000.000,00** | |
| 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0,00 | **1.925.000.000,00** | **1.925.000.000,00** | |
| **1.05.03.2.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **0,00** | **5.822.105.600,00** | **5.822.105.600,00** | |
| 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 0,00 | **5.822.105.600,00** | **5.822.105.600,00** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.203.247.686,00** | **2.122.548.861,00** | **-80.698.825,00** | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.568.794.436,00** | **1.322.679.011,00** | **-246.115.425,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.568.794.436,00 | **1.322.679.011,00** | **-246.115.425,00** | |
| **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **55.000.000,00** | **77.500.000,00** | **22.500.000,00** | |
| 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 55.000.000,00 | **77.500.000,00** | **22.500.000,00** | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **497.276.750,00** | **569.293.350,00** | **72.016.600,00** | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.509.100,00 | **4.509.100,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 90.000.000,00 | **90.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.939.350,00 | **50.254.250,00** | **30.314.900,00** | |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100.100.000,00 | **102.100.000,00** | **2.000.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 260.000.000,00 | **322.430.000,00** | **62.430.000,00** | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **37.747.000,00** | **33.647.000,00** | **-4.100.000,00** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 13.200.000,00 | **9.100.000,00** | **-4.100.000,00** | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.547.000,00 | **24.547.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **44.429.500,00** | **119.429.500,00** | **75.000.000,00** | |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.429.500,00 | **119.429.500,00** | **75.000.000,00** | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **4.819.779.188,00** | **5.126.063.635,00** | **306.284.447,00** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS SOSIAL** | **4.819.779.188,00** | **5.126.063.635,00** | **306.284.447,00** | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **2.146.355.276,00** | **2.187.186.276,00** | **40.831.000,00** | |
| **1.06.04.2.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **2.146.355.276,00** | **2.187.186.276,00** | **40.831.000,00** | |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 542.855.376,00 | **510.234.976,00** | **-32.620.400,00** | |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 1.603.499.900,00 | **1.561.949.300,00** | **-41.550.600,00** | |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 0,00 | **115.002.000,00** | **115.002.000,00** | |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **100.188.200,00** | **176.230.750,00** | **76.042.550,00** | |
| **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **100.188.200,00** | **176.230.750,00** | **76.042.550,00** | |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | **100.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 188.200,00 | **76.230.750,00** | **76.042.550,00** | |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **84.277.650,00** | **88.818.850,00** | **4.541.200,00** | |
| **1.06.06.2.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **84.277.650,00** | **88.818.850,00** | **4.541.200,00** | |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | 84.277.650,00 | **88.818.850,00** | **4.541.200,00** | |
| **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.488.958.062,00** | **2.673.827.759,00** | **184.869.697,00** | |
| **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.982.864.062,00** | **1.817.766.559,00** | **-165.097.503,00** | |
| 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.982.864.062,00 | **1.817.766.559,00** | **-165.097.503,00** | |
| **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **219.094.000,00** | **219.094.000,00** | **0,00** | |
| 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 219.094.000,00 | **219.094.000,00** | **0,00** | |
| **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **287.000.000,00** | **616.967.200,00** | **329.967.200,00** | |
| 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0,00 | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | |
| 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 287.000.000,00 | **607.067.200,00** | **320.067.200,00** | |
| **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **0,00** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **2.391.882.098,00** | **2.688.936.497,00** | **297.054.399,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.07.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KETENAGAKERJAAN** | **2.391.882.098,00** | **2.688.936.497,00** | **297.054.399,00** | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **316.890.000,00** | **348.490.000,00** | **31.600.000,00** | |
| **2.07.03.2.01** | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **316.890.000,00** | **348.490.000,00** | **31.600.000,00** | |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 316.890.000,00 | **348.490.000,00** | **31.600.000,00** | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **60.224.600,00** | **60.224.600,00** | **0,00** | |
| **2.07.04.2.01** | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **60.224.600,00** | **60.224.600,00** | **0,00** | |
| 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | 60.224.600,00 | **60.224.600,00** | **0,00** | |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **21.186.600,00** | **242.736.600,00** | **221.550.000,00** | |
| **2.07.05.2.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **21.186.600,00** | **242.736.600,00** | **221.550.000,00** | |
| 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 21.186.600,00 | **242.736.600,00** | **221.550.000,00** | |
| **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.993.580.898,00** | **2.037.485.297,00** | **43.904.399,00** | |
| **2.07.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.553.150,00** | **4.553.150,00** | **0,00** | |
| 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.553.150,00 | **4.553.150,00** | **0,00** | |
| **2.07.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.590.728.870,00** | **1.333.033.394,00** | **-257.695.476,00** | |
| 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.586.038.970,00 | **1.329.943.844,00** | **-256.095.126,00** | |
| 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.689.900,00 | **3.089.550,00** | **-1.600.350,00** | |
| **2.07.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **2.444.900,00** | **2.444.900,00** | **0,00** | |
| 2.07.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.444.900,00 | **2.444.900,00** | **0,00** | |
| **2.07.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **41.080.000,00** | **41.080.000,00** | **0,00** | |
| 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 41.080.000,00 | **41.080.000,00** | **0,00** | |
| **2.07.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **232.681.350,00** | **266.921.450,00** | **34.240.100,00** | |
| 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.286.900,00 | **6.286.900,00** | **0,00** | |
| 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.250.300,00 | **50.250.300,00** | **0,00** | |
| 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.089.100,00 | **3.089.100,00** | **0,00** | |
| 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.720.000,00 | **14.136.000,00** | **-8.584.000,00** | |
| 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.970.050,00 | **17.420.150,00** | **450.100,00** | |
| 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11.000.000,00 | **11.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 122.365.000,00 | **164.739.000,00** | **42.374.000,00** | |
| **2.07.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **36.236.500,00** | **293.412.175,00** | **257.175.675,00** | |
| 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.236.500,00 | **293.412.175,00** | **257.175.675,00** | |
| **2.07.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **31.034.128,00** | **32.814.628,00** | **1.780.500,00** | |
| 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.310.000,00 | **6.318.000,00** | **-4.992.000,00** | |
| 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 19.724.128,00 | **26.496.628,00** | **6.772.500,00** | |
| **2.07.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **54.822.000,00** | **63.225.600,00** | **8.403.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.632.000,00 | **53.035.600,00** | **8.403.600,00** | |
| 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.190.000,00 | **10.190.000,00** | **0,00** | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **407.084.250,00** | **506.084.250,00** | **99.000.000,00** | |
| **2.14.2.08.0.00.01.0000** | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **407.084.250,00** | **506.084.250,00** | **99.000.000,00** | |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **190.035.200,00** | **240.035.200,00** | **50.000.000,00** | |
| **2.08.02.2.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **20.017.600,00** | **20.017.600,00** | **0,00** | |
| 2.08.02.2.01.0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.017.600,00 | **20.017.600,00** | **0,00** | |
| **2.08.02.2.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **20.017.600,00** | **20.017.600,00** | **0,00** | |
| 2.08.02.2.02.0009 | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.017.600,00 | **20.017.600,00** | **0,00** | |
| **2.08.02.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **150.000.000,00** | **200.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| 2.08.02.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | **200.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **217.049.050,00** | **266.049.050,00** | **49.000.000,00** | |
| **2.08.07.2.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **15.349.050,00** | **15.349.050,00** | **0,00** | |
| 2.08.07.2.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.349.050,00 | **15.349.050,00** | **0,00** | |
| **2.08.07.2.02** | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **201.700.000,00** | **250.700.000,00** | **49.000.000,00** | |
| 2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | 201.700.000,00 | **250.700.000,00** | **49.000.000,00** | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **80.601.000,00** | **197.620.000,00** | **117.019.000,00** | |
| **2.09.3.27.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN** | **80.601.000,00** | **197.620.000,00** | **117.019.000,00** | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **50.001.000,00** | **114.732.000,00** | **64.731.000,00** | |
| **2.09.03.2.01** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **50.001.000,00** | **114.732.000,00** | **64.731.000,00** | |
| 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 0,00 | **64.731.000,00** | **64.731.000,00** | |
| 2.09.03.2.01.0009 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 50.001.000,00 | **50.001.000,00** | **0,00** | |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **0,00** | **34.288.000,00** | **34.288.000,00** | |
| **2.09.04.2.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **0,00** | **34.288.000,00** | **34.288.000,00** | |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 0,00 | **34.288.000,00** | **34.288.000,00** | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **30.600.000,00** | **48.600.000,00** | **18.000.000,00** | |
| **2.09.05.2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **30.600.000,00** | **48.600.000,00** | **18.000.000,00** | |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 30.600.000,00 | **48.600.000,00** | **18.000.000,00** | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **6.755.870.308,00** | **7.700.320.013,00** | **944.449.705,00** | |
| **2.11.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | **6.755.870.308,00** | **7.700.320.013,00** | **944.449.705,00** | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **239.866.450,00** | **397.759.789,00** | **157.893.339,00** | |
| **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **239.866.450,00** | **397.759.789,00** | **157.893.339,00** | |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 239.866.450,00 | **397.759.789,00** | **157.893.339,00** | |
| **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **148.731.900,00** | **148.731.900,00** | **0,00** | |
| **2.11.08.2.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **148.731.900,00** | **148.731.900,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 48.828.900,00 | **48.828.900,00** | **0,00** | |
| 2.11.08.2.01.0004 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | 99.903.000,00 | **99.903.000,00** | **0,00** | |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **4.288.171.000,00** | **5.182.442.784,00** | **894.271.784,00** | |
| **2.11.11.2.01** | **Pengelolaan Sampah** | **4.288.171.000,00** | **5.182.442.784,00** | **894.271.784,00** | |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 134.991.000,00 | **134.986.500,00** | **-4.500,00** | |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 2.317.600.000,00 | **2.748.147.500,00** | **430.547.500,00** | |
| 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | 1.835.580.000,00 | **2.299.308.784,00** | **463.728.784,00** | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.079.100.958,00** | **1.971.385.540,00** | **-107.715.418,00** | |
| **2.11.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.548.333.128,00** | **1.254.959.410,00** | **-293.373.718,00** | |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.548.333.128,00 | **1.254.959.410,00** | **-293.373.718,00** | |
| **2.11.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **131.929.250,00** | **131.929.250,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.648.900,00 | **17.648.900,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.175.500,00 | **1.175.500,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6.855.000,00 | **6.855.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.963.850,00 | **21.963.850,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 84.286.000,00 | **84.286.000,00** | **0,00** | |
| **2.11.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **20.698.500,00** | **20.697.800,00** | **-700,00** | |
| 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.698.500,00 | **20.697.800,00** | **-700,00** | |
| **2.11.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **214.213.680,00** | **399.872.680,00** | **185.659.000,00** | |
| 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 22.674.680,00 | **22.674.680,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 191.539.000,00 | **377.198.000,00** | **185.659.000,00** | |
| **2.11.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **163.926.400,00** | **163.926.400,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 144.076.400,00 | **144.076.400,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.850.000,00 | **19.850.000,00** | **0,00** | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **3.651.890.386,00** | **3.749.945.323,00** | **98.054.937,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **3.651.890.386,00** | **3.749.945.323,00** | **98.054.937,00** | |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **7.200.000,00** | **7.200.000,00** | **0,00** | |
| **2.12.03.2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **7.200.000,00** | **7.200.000,00** | **0,00** | |
| 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 7.200.000,00 | **7.200.000,00** | **0,00** | |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **161.060.000,00** | **20.633.000,00** | **-140.427.000,00** | |
| **2.12.04.2.01** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **20.633.000,00** | **20.633.000,00** | **0,00** | |
| 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 20.633.000,00 | **20.633.000,00** | **0,00** | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.476.430.386,00** | **3.722.112.323,00** | **245.681.937,00** | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.458.760.436,00** | **2.116.016.691,00** | **-342.743.745,00** | |
| 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.458.760.436,00 | **2.116.016.691,00** | **-342.743.745,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **492.188.850,00** | **991.544.732,00** | **499.355.882,00** | |
| 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.680.200,00 | **697.826.982,00** | **492.146.782,00** | |
| 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14.930.000,00 | **14.930.000,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 59.971.650,00 | **59.980.750,00** | **9.100,00** | |
| 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 211.607.000,00 | **218.807.000,00** | **7.200.000,00** | |
| **2.12.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **458.584.400,00** | **547.654.200,00** | **89.069.800,00** | |
| 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.992.000,00 | **4.992.000,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 71.040.000,00 | **71.040.000,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 382.552.400,00 | **471.622.200,00** | **89.069.800,00** | |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **66.896.700,00** | **66.896.700,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 66.896.700,00 | **66.896.700,00** | **0,00** | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **3.798.692.363,00** | **4.145.516.957,00** | **346.824.594,00** | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA** | **3.798.692.363,00** | **4.145.516.957,00** | **346.824.594,00** | |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **276.677.000,00** | **338.390.100,00** | **61.713.100,00** | |
| **2.13.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **276.677.000,00** | **338.390.100,00** | **61.713.100,00** | |
| 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 44.162.500,00 | **44.160.400,00** | **-2.100,00** | |
| 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 82.120.000,00 | **82.120.000,00** | **0,00** | |
| 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 40.060.700,00 | **60.046.900,00** | **19.986.200,00** | |
| 2.13.04.2.01.0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 110.333.800,00 | **152.062.800,00** | **41.729.000,00** | |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **746.860.100,00** | **946.928.250,00** | **200.068.150,00** | |
| **2.13.05.2.01** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **746.860.100,00** | **946.928.250,00** | **200.068.150,00** | |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 746.860.100,00 | **946.928.250,00** | **200.068.150,00** | |
| **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.775.155.263,00** | **2.860.198.607,00** | **85.043.344,00** | |
| **2.13.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.389.300,00** | **12.389.300,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.389.300,00 | **12.389.300,00** | **0,00** | |
| **2.13.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.096.166.863,00** | **2.129.965.207,00** | **33.798.344,00** | |
| 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.085.606.863,00 | **2.109.736.807,00** | **24.129.944,00** | |
| 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 10.560.000,00 | **20.228.400,00** | **9.668.400,00** | |
| **2.13.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **4.027.400,00** | **4.027.400,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.027.400,00 | **4.027.400,00** | **0,00** | |
| **2.13.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **242.861.100,00** | **255.361.100,00** | **12.500.000,00** | |
| 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.532.300,00 | **24.532.300,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.255.300,00 | **41.755.300,00** | **12.500.000,00** | |
| 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.080.000,00 | **15.080.000,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.500,00 | **10.000.500,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.008.000,00 | **10.008.000,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 153.985.000,00 | **153.985.000,00** | **0,00** | |
| **2.13.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **367.540.600,00** | **406.285.600,00** | **38.745.000,00** | |
| 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.021.000,00 | **8.021.000,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 45.719.600,00 | **45.719.600,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 313.800.000,00 | **352.545.000,00** | **38.745.000,00** | |
| **2.13.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **52.170.000,00** | **52.170.000,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 52.170.000,00 | **52.170.000,00** | **0,00** | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **9.616.730.948,00** | **9.590.355.199,00** | **-26.375.749,00** | |
| **2.14.2.08.0.00.01.0000** | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **9.616.730.948,00** | **9.590.355.199,00** | **-26.375.749,00** | |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **214.800.000,00** | **214.800.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.02.2.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **214.800.000,00** | **214.800.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 214.800.000,00 | **214.800.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **1.469.039.000,00** | **1.469.039.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.03.2.01** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **257.300.000,00** | **257.300.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 225.000.000,00 | **225.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 32.300.000,00 | **32.300.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.03.2.02** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **228.000.000,00** | **228.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 228.000.000,00 | **228.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.03.2.03** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **983.739.000,00** | **983.739.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 24.300.000,00 | **24.300.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 934.252.000,00 | **934.252.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.03.0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 25.187.000,00 | **25.187.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **2.178.000.000,00** | **2.178.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.04.2.02** | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **2.178.000.000,00** | **2.178.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 2.178.000.000,00 | **2.178.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.754.891.948,00** | **5.728.516.199,00** | **-26.375.749,00** | |
| **2.14.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **20.182.500,00** | **20.182.500,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.182.500,00 | **20.182.500,00** | **0,00** | |
| **2.14.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.753.764.208,00** | **3.378.888.459,00** | **-374.875.749,00** | |
| 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.753.764.208,00 | **3.378.888.459,00** | **-374.875.749,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.14.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **162.631.000,00** | **162.631.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.817.100,00 | **22.817.100,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.458.900,00 | **9.458.900,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.003.000,00 | **12.003.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.005.000,00 | **6.005.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 112.347.000,00 | **112.347.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.758.314.240,00** | **2.106.814.240,00** | **348.500.000,00** | |
| 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35.602.240,00 | **35.602.240,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.722.712.000,00 | **2.071.212.000,00** | **348.500.000,00** | |
| **2.14.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52.820.000,00 | **52.820.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.180.000,00 | **7.180.000,00** | **0,00** | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **3.051.047.836,00** | **4.431.997.836,00** | **1.380.950.000,00** | |
| **1.04.2.15.1.03.01.0000** | **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN** | **3.051.047.836,00** | **4.431.997.836,00** | **1.380.950.000,00** | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **3.051.047.836,00** | **4.431.997.836,00** | **1.380.950.000,00** | |
| **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **3.021.047.836,00** | **3.922.047.836,00** | **901.000.000,00** | |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 3.021.047.836,00 | **3.922.047.836,00** | **901.000.000,00** | |
| **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **30.000.000,00** | **509.950.000,00** | **479.950.000,00** | |
| 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | **509.950.000,00** | **479.950.000,00** | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **3.144.587.005,00** | **3.558.217.120,00** | **413.630.115,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **3.144.587.005,00** | **3.558.217.120,00** | **413.630.115,00** | |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **190.038.000,00** | **397.038.000,00** | **207.000.000,00** | |
| **2.16.02.2.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **190.038.000,00** | **397.038.000,00** | **207.000.000,00** | |
| 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | 25.000.000,00 | **30.000.000,00** | **5.000.000,00** | |
| 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | 120.460.000,00 | **319.460.000,00** | **199.000.000,00** | |
| 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | 4.498.000,00 | **4.498.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 40.080.000,00 | **43.080.000,00** | **3.000.000,00** | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **122.358.400,00** | **118.358.400,00** | **-4.000.000,00** | |
| **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **122.358.400,00** | **118.358.400,00** | **-4.000.000,00** | |
| 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 8.077.100,00 | **8.077.100,00** | **0,00** | |
| 2.16.03.2.02.0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | 114.281.300,00 | **110.281.300,00** | **-4.000.000,00** | |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.832.190.605,00** | **3.042.820.720,00** | **210.630.115,00** | |
| **2.16.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.278.900,00** | **2.278.900,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.278.900,00 | **2.278.900,00** | **0,00** | |
| **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.078.740.905,00** | **1.563.839.020,00** | **-514.901.885,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.076.439.605,00 | **1.561.537.720,00** | **-514.901.885,00** | |
| 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.301.300,00 | **2.301.300,00** | **0,00** | |
| **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **338.778.800,00** | **493.578.800,00** | **154.800.000,00** | |
| 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.123.700,00 | **5.123.700,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.537.800,00 | **26.537.800,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 33.696.000,00 | **44.096.000,00** | **10.400.000,00** | |
| 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.603.300,00 | **16.675.300,00** | **4.072.000,00** | |
| 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 19.999.000,00 | **19.999.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.819.000,00 | **381.147.000,00** | **140.328.000,00** | |
| **2.16.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0,00** | **350.202.000,00** | **350.202.000,00** | |
| 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | **350.202.000,00** | **350.202.000,00** | |
| **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **342.162.000,00** | **461.162.000,00** | **119.000.000,00** | |
| 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.600.000,00 | **2.600.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 42.168.000,00 | **42.168.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 297.394.000,00 | **416.394.000,00** | **119.000.000,00** | |
| **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **70.230.000,00** | **171.760.000,00** | **101.530.000,00** | |
| 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 48.180.000,00 | **48.180.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.050.000,00 | **123.580.000,00** | **101.530.000,00** | |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **2.364.658.100,00** | **8.171.257.543,00** | **5.806.599.443,00** | |
| **2.17.3.31.3.30.01.0000** | **DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **2.364.658.100,00** | **8.171.257.543,00** | **5.806.599.443,00** | |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **100.000.000,00** | **136.655.950,00** | **36.655.950,00** | |
| **2.17.03.2.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **100.000.000,00** | **136.655.950,00** | **36.655.950,00** | |
| 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 100.000.000,00 | **136.655.950,00** | **36.655.950,00** | |
| **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **85.000.000,00** | **95.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| **2.17.05.2.01** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **85.000.000,00** | **95.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 85.000.000,00 | **95.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **39.999.950,00** | **39.999.950,00** | **0,00** | |
| **2.17.06.2.01** | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **39.999.950,00** | **39.999.950,00** | **0,00** | |
| 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | 39.999.950,00 | **39.999.950,00** | **0,00** | |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **49.999.950,00** | **349.999.800,00** | **299.999.850,00** | |
| **2.17.07.2.01** | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **49.999.950,00** | **349.999.800,00** | **299.999.850,00** | |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 49.999.950,00 | **49.999.950,00** | **0,00** | |
| 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | 0,00 | **299.999.850,00** | **299.999.850,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.089.658.200,00** | **7.549.601.843,00** | **5.459.943.643,00** | |
| **2.17.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.651.736.946,00** | **1.589.897.321,00** | **-61.839.625,00** | |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.651.736.946,00 | **1.589.897.321,00** | **-61.839.625,00** | |
| **2.17.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **111.941.150,00** | **267.812.150,00** | **155.871.000,00** | |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.657.400,00 | **3.657.400,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.100.000,00 | **10.100.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.260.750,00 | **14.260.750,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 83.923.000,00 | **239.794.000,00** | **155.871.000,00** | |
| **2.17.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0,00** | **5.300.000.000,00** | **5.300.000.000,00** | |
| 2.17.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | **5.300.000.000,00** | **5.300.000.000,00** | |
| **2.17.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **272.080.104,00** | **315.612.372,00** | **43.532.268,00** | |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.300.000,00 | **1.300.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 14.449.104,00 | **29.449.872,00** | **15.000.768,00** | |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 256.331.000,00 | **284.862.500,00** | **28.531.500,00** | |
| **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **53.900.000,00** | **76.280.000,00** | **22.380.000,00** | |
| 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.020.000,00 | **49.020.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.880.000,00 | **9.260.000,00** | **4.380.000,00** | |
| 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | **18.000.000,00** | **18.000.000,00** | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **2.203.340.242,00** | **2.138.363.183,00** | **-64.977.059,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | **2.203.340.242,00** | **2.138.363.183,00** | **-64.977.059,00** | |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **29.975.000,00** | **29.975.000,00** | **0,00** | |
| **2.18.03.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **29.975.000,00** | **29.975.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 29.975.000,00 | **29.975.000,00** | **0,00** | |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **90.000.000,00** | **79.733.600,00** | **-10.266.400,00** | |
| **2.18.04.2.01** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **90.000.000,00** | **79.733.600,00** | **-10.266.400,00** | |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 90.000.000,00 | **79.733.600,00** | **-10.266.400,00** | |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **79.999.900,00** | **79.999.900,00** | **0,00** | |
| **2.18.05.2.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **79.999.900,00** | **79.999.900,00** | **0,00** | |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 79.999.900,00 | **79.999.900,00** | **0,00** | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.953.365.342,00** | **1.948.654.683,00** | **-4.710.659,00** | |
| **2.18.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.411.858.504,00** | **1.267.881.685,00** | **-143.976.819,00** | |
| 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.411.858.504,00 | **1.267.881.685,00** | **-143.976.819,00** | |
| **2.18.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **288.476.750,00** | **327.476.750,00** | **39.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.503.900,00 | **5.503.900,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 46.726.100,00 | **85.726.100,00** | **39.000.000,00** | |
| 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.085.600,00 | **10.085.600,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30.261.000,00 | **30.261.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.020.150,00 | **21.020.150,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.880.000,00 | **174.880.000,00** | **0,00** | |
| **2.18.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **151.626.088,00** | **251.892.248,00** | **100.266.160,00** | |
| 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000,00 | **4.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 53.954.248,00 | **53.954.248,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 93.671.840,00 | **193.938.000,00** | **100.266.160,00** | |
| **2.18.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **101.404.000,00** | **101.404.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.734.000,00 | **69.734.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.670.000,00 | **31.670.000,00** | **0,00** | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **5.727.341.361,00** | **8.302.039.213,00** | **2.574.697.852,00** | |
| **2.19.3.26.0.00.01.0000** | **DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA** | **3.397.297.355,00** | **5.500.762.707,00** | **2.103.465.352,00** | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **925.000.000,00** | **1.570.000.000,00** | **645.000.000,00** | |
| **2.19.02.2.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **925.000.000,00** | **1.570.000.000,00** | **645.000.000,00** | |
| 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 925.000.000,00 | **1.570.000.000,00** | **645.000.000,00** | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **749.999.704,00** | **1.723.228.356,00** | **973.228.652,00** | |
| **2.19.03.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **257.642.304,00** | **397.643.256,00** | **140.000.952,00** | |
| 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 257.642.304,00 | **397.643.256,00** | **140.000.952,00** | |
| **2.19.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **408.245.600,00** | **1.240.231.500,00** | **831.985.900,00** | |
| 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | 408.245.600,00 | **1.240.231.500,00** | **831.985.900,00** | |
| **2.19.03.2.05** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **84.111.800,00** | **85.353.600,00** | **1.241.800,00** | |
| 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 84.111.800,00 | **85.353.600,00** | **1.241.800,00** | |
| **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.722.297.651,00** | **2.207.534.351,00** | **485.236.700,00** | |
| **2.19.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.513.473.651,00** | **1.423.014.251,00** | **-90.459.400,00** | |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.513.473.651,00 | **1.423.014.251,00** | **-90.459.400,00** | |
| **2.19.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **0,00** | **18.014.100,00** | **18.014.100,00** | |
| 2.19.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 0,00 | **18.014.100,00** | **18.014.100,00** | |
| **2.19.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **208.824.000,00** | **766.506.000,00** | **557.682.000,00** | |
| 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 208.824.000,00 | **766.506.000,00** | **557.682.000,00** | |
| **8.01.2.19.0.00.01.0000** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **2.330.044.006,00** | **2.801.276.506,00** | **471.232.500,00** | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **2.330.044.006,00** | **2.801.276.506,00** | **471.232.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.19.02.2.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **2.330.044.006,00** | **2.801.276.506,00** | **471.232.500,00** | |
| 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | 2.330.044.006,00 | **2.801.276.506,00** | **471.232.500,00** | |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **13.322.200,00** | **13.322.200,00** | **0,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **13.322.200,00** | **13.322.200,00** | **0,00** | |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **13.322.200,00** | **13.322.200,00** | **0,00** | |
| **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **13.322.200,00** | **13.322.200,00** | **0,00** | |
| 2.20.02.2.01.0022 | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 13.322.200,00 | **13.322.200,00** | **0,00** | |
| **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **3.423.800,00** | **3.423.800,00** | **0,00** | |
| **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **3.423.800,00** | **3.423.800,00** | **0,00** | |
| **2.21.02.2.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **3.423.800,00** | **3.423.800,00** | **0,00** | |
| 2.21.02.2.01.0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | 3.423.800,00 | **3.423.800,00** | **0,00** | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **562.191.150,00** | **493.918.150,00** | **-68.273.000,00** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **562.191.150,00** | **493.918.150,00** | **-68.273.000,00** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **504.608.100,00** | **442.608.100,00** | **-62.000.000,00** | |
| **2.22.02.2.01** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **93.223.400,00** | **31.223.400,00** | **-62.000.000,00** | |
| 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 78.223.400,00 | **31.223.400,00** | **-47.000.000,00** | |
| **2.22.02.2.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **331.384.700,00** | **331.384.700,00** | **0,00** | |
| 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 146.928.500,00 | **146.928.500,00** | **0,00** | |
| 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 184.456.200,00 | **184.456.200,00** | **0,00** | |
| **2.22.02.2.03** | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **80.000.000,00** | **80.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | 80.000.000,00 | **80.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **57.583.050,00** | **51.310.050,00** | **-6.273.000,00** | |
| **2.22.05.2.02** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **57.583.050,00** | **51.310.050,00** | **-6.273.000,00** | |
| 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | 57.583.050,00 | **51.310.050,00** | **-6.273.000,00** | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **2.340.959.373,00** | **2.409.085.428,00** | **68.126.055,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **2.340.959.373,00** | **2.409.085.428,00** | **68.126.055,00** | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **408.445.000,00** | **498.453.500,00** | **90.008.500,00** | |
| **2.23.02.2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **68.046.000,00** | **309.482.500,00** | **241.436.500,00** | |
| 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | **167.954.500,00** | **167.954.500,00** | |
| 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 0,00 | **141.528.000,00** | **141.528.000,00** | |
| **2.23.02.2.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **340.399.000,00** | **188.971.000,00** | **-151.428.000,00** | |
| 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 109.500.000,00 | **188.971.000,00** | **79.471.000,00** | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.932.514.373,00** | **1.910.631.928,00** | **-21.882.445,00** | |
| **2.23.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.331.351.443,00** | **1.202.889.718,00** | **-128.461.725,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.331.351.443,00 | **1.202.889.718,00** | **-128.461.725,00** | |
| **2.23.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **223.563.418,00** | **274.661.550,00** | **51.098.132,00** | |
| 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.809.400,00 | **8.219.200,00** | **3.409.800,00** | |
| 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 57.134.000,00 | **64.572.300,00** | **7.438.300,00** | |
| 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.703.168,00 | **19.997.600,00** | **-5.705.568,00** | |
| 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6.750.000,00 | **9.997.000,00** | **3.247.000,00** | |
| 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.737.850,00 | **45.066.450,00** | **10.328.600,00** | |
| 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.000.000,00 | **5.000.000,00** | **-3.000.000,00** | |
| 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 86.429.000,00 | **121.809.000,00** | **35.380.000,00** | |
| **2.23.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **317.618.112,00** | **376.102.760,00** | **58.484.648,00** | |
| 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.992.000,00 | **4.992.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 116.460.112,00 | **100.660.760,00** | **-15.799.352,00** | |
| 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 196.166.000,00 | **270.450.000,00** | **74.284.000,00** | |
| **2.23.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **59.981.400,00** | **56.977.900,00** | **-3.003.500,00** | |
| 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 59.981.400,00 | **56.977.900,00** | **-3.003.500,00** | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **57.988.800,00** | **35.000.000,00** | **-22.988.800,00** | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **57.988.800,00** | **35.000.000,00** | **-22.988.800,00** | |
| **2.24.02.2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **57.988.800,00** | **35.000.000,00** | **-22.988.800,00** | |
| 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 41.671.000,00 | **35.000.000,00** | **-6.671.000,00** | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **3.441.323.261,00** | **3.734.276.545,00** | **292.953.284,00** | |
| **3.25.3.27.0.00.01.0000** | **DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN** | **3.441.323.261,00** | **3.734.276.545,00** | **292.953.284,00** | |
| **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **130.000.000,00** | **81.000.000,00** | **-49.000.000,00** | |
| **3.25.03.2.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **130.000.000,00** | **81.000.000,00** | **-49.000.000,00** | |
| 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 109.000.000,00 | **81.000.000,00** | **-28.000.000,00** | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **157.895.780,00** | **486.297.130,00** | **328.401.350,00** | |
| **3.25.04.2.02** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **139.745.780,00** | **486.297.130,00** | **346.551.350,00** | |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 139.745.780,00 | **486.297.130,00** | **346.551.350,00** | |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **92.510.887,00** | **45.030.450,00** | **-47.480.437,00** | |
| **3.25.06.2.01** | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **92.510.887,00** | **45.030.450,00** | **-47.480.437,00** | |
| 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | 92.510.887,00 | **45.030.450,00** | **-47.480.437,00** | |
| **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.060.916.594,00** | **3.121.948.965,00** | **61.032.371,00** | |
| **3.25.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **19.170.100,00** | **19.170.100,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.931.200,00 | **13.931.200,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.238.900,00 | **5.238.900,00** | **0,00** | |
| **3.25.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.610.512.244,00** | **2.494.766.905,00** | **-115.745.339,00** | |
| 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.605.421.094,00 | **2.489.675.755,00** | **-115.745.339,00** | |
| 3.25.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.091.150,00 | **5.091.150,00** | **0,00** | |
| **3.25.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **196.279.150,00** | **295.963.550,00** | **99.684.400,00** | |
| 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.023.200,00 | **4.023.200,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.034.000,00 | **41.034.000,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.909.950,00 | **8.918.350,00** | **8.400,00** | |
| 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 142.312.000,00 | **241.988.000,00** | **99.676.000,00** | |
| **3.25.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **197.465.100,00** | **248.764.610,00** | **51.299.510,00** | |
| 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.340.000,00 | **2.340.000,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 39.126.800,00 | **31.526.810,00** | **-7.599.990,00** | |
| 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 155.998.300,00 | **214.897.800,00** | **58.899.500,00** | |
| **3.25.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **37.490.000,00** | **63.283.800,00** | **25.793.800,00** | |
| 3.25.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.550.000,00 | **49.043.800,00** | **21.493.800,00** | |
| 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.940.000,00 | **14.240.000,00** | **4.300.000,00** | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **50.000.000,00** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| **2.19.3.26.0.00.01.0000** | **DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA** | **50.000.000,00** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **50.000.000,00** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| **3.26.02.2.03** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **6.492.651.014,00** | **6.944.890.583,00** | **452.239.569,00** | |
| **2.09.3.27.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN** | **6.229.474.414,00** | **5.598.256.954,00** | **-631.217.460,00** | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **557.539.750,00** | **757.439.750,00** | **199.900.000,00** | |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **557.539.750,00** | **757.439.750,00** | **199.900.000,00** | |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 557.539.750,00 | **757.439.750,00** | **199.900.000,00** | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **150.000.000,00** | **450.088.230,00** | **300.088.230,00** | |
| **3.27.03.2.01** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **150.000.000,00** | **300.088.230,00** | **150.088.230,00** | |
| 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 150.000.000,00 | **300.088.230,00** | **150.088.230,00** | |
| **3.27.03.2.02** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **0,00** | **150.000.000,00** | **150.000.000,00** | |
| 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 0,00 | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | |
| 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 0,00 | **90.000.000,00** | **90.000.000,00** | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **30.000.000,00** | **50.520.000,00** | **20.520.000,00** | |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **30.000.000,00** | **50.520.000,00** | **20.520.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 30.000.000,00 | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.07.2.01.0007 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | 0,00 | **20.520.000,00** | **20.520.000,00** | |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.491.934.664,00** | **4.340.208.974,00** | **-1.151.725.690,00** | |
| **3.27.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.499.691.544,00** | **3.214.565.374,00** | **-1.285.126.170,00** | |
| 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.499.691.544,00 | **3.214.565.374,00** | **-1.285.126.170,00** | |
| **3.27.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **290.221.000,00** | **290.221.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 47.361.000,00 | **47.361.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.500.000,00 | **10.500.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.512.000,00 | **11.512.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 220.848.000,00 | **220.848.000,00** | **0,00** | |
| **3.27.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **617.391.120,00** | **758.499.200,00** | **141.108.080,00** | |
| 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 45.806.400,00 | **45.806.400,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 571.584.720,00 | **712.692.800,00** | **141.108.080,00** | |
| **3.27.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **84.631.000,00** | **76.923.400,00** | **-7.707.600,00** | |
| 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 84.631.000,00 | **76.923.400,00** | **-7.707.600,00** | |
| **3.25.3.27.0.00.01.0000** | **DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN** | **263.176.600,00** | **1.346.633.629,00** | **1.083.457.029,00** | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **89.339.200,00** | **124.339.200,00** | **35.000.000,00** | |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **75.539.200,00** | **110.539.200,00** | **35.000.000,00** | |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 0,00 | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | |
| 3.27.02.2.01.0017 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | 75.539.200,00 | **75.539.200,00** | **0,00** | |
| **3.27.02.2.06** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **13.800.000,00** | **13.800.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 13.800.000,00 | **13.800.000,00** | **0,00** | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **96.689.300,00** | **460.349.329,00** | **363.660.029,00** | |
| **3.27.03.2.01** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **96.689.300,00** | **460.349.329,00** | **363.660.029,00** | |
| 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 24.439.300,00 | **92.177.279,00** | **67.737.979,00** | |
| 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 72.250.000,00 | **216.775.700,00** | **144.525.700,00** | |
| 3.27.03.2.01.0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | 0,00 | **151.396.350,00** | **151.396.350,00** | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **77.148.100,00** | **77.148.100,00** | **0,00** | |
| **3.27.04.2.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **27.150.000,00** | **27.150.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 27.150.000,00 | **27.150.000,00** | **0,00** | |
| **3.27.04.2.04** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **49.998.100,00** | **49.998.100,00** | **0,00** | |
| 3.27.04.2.04.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | 49.998.100,00 | **49.998.100,00** | **0,00** | |
| **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **0,00** | **119.645.600,00** | **119.645.600,00** | |
| **3.27.06.2.01** | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **119.645.600,00** | **119.645.600,00** | |
| 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 0,00 | **119.645.600,00** | **119.645.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **0,00** | **565.151.400,00** | **565.151.400,00** | |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **0,00** | **565.151.400,00** | **565.151.400,00** | |
| 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 0,00 | **565.151.400,00** | **565.151.400,00** | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **1.228.671.800,00** | **2.025.217.600,00** | **796.545.800,00** | |
| **2.17.3.31.3.30.01.0000** | **DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **1.228.671.800,00** | **2.025.217.600,00** | **796.545.800,00** | |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **406.971.850,00** | **706.971.850,00** | **300.000.000,00** | |
| **3.30.03.2.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **0,00** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 0,00 | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | |
| **3.30.03.2.02** | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | **406.971.850,00** | **406.971.850,00** | **0,00** | |
| 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 406.971.850,00 | **406.971.850,00** | **0,00** | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **165.999.950,00** | **165.999.950,00** | **0,00** | |
| **3.30.04.2.02** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **165.999.950,00** | **165.999.950,00** | **0,00** | |
| 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 25.999.950,00 | **25.999.950,00** | **0,00** | |
| 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 140.000.000,00 | **140.000.000,00** | **0,00** | |
| **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **135.800.000,00** | **385.711.000,00** | **249.911.000,00** | |
| **3.30.05.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **135.800.000,00** | **385.711.000,00** | **249.911.000,00** | |
| 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | 135.800.000,00 | **385.711.000,00** | **249.911.000,00** | |
| **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **519.900.000,00** | **766.534.800,00** | **246.634.800,00** | |
| **3.30.07.2.01** | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | **519.900.000,00** | **766.534.800,00** | **246.634.800,00** | |
| 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 19.900.000,00 | **19.900.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 500.000.000,00 | **746.634.800,00** | **246.634.800,00** | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **31.516.609.242,00** | **34.024.485.158,00** | **2.507.875.916,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN** | **31.516.609.242,00** | **34.024.485.158,00** | **2.507.875.916,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **8.777.324.950,00** | **10.384.764.250,00** | **1.607.439.300,00** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **2.402.055.800,00** | **2.613.419.700,00** | **211.363.900,00** | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 56.137.400,00 | **67.137.400,00** | **11.000.000,00** | |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1.550.229.800,00 | **1.509.684.800,00** | **-40.545.000,00** | |
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 795.688.600,00 | **1.036.597.500,00** | **240.908.900,00** | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **5.168.621.200,00** | **5.684.534.750,00** | **515.913.550,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.189.277.550,00 | **3.896.391.100,00** | **707.113.550,00** | |
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 1.214.782.850,00 | **923.582.850,00** | **-291.200.000,00** | |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 764.560.800,00 | **864.560.800,00** | **100.000.000,00** | |
| **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **639.471.950,00** | **672.113.800,00** | **32.641.850,00** | |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 115.580.150,00 | **125.803.750,00** | **10.223.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 400.323.200,00 | **411.575.200,00** | **11.252.000,00** | |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 123.568.600,00 | **134.734.850,00** | **11.166.250,00** | |
| **4.01.02.2.04** | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **567.176.000,00** | **1.414.696.000,00** | **847.520.000,00** | |
| 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 567.176.000,00 | **1.414.696.000,00** | **847.520.000,00** | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **1.134.993.100,00** | **1.210.108.900,00** | **75.115.800,00** | |
| **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **397.985.800,00** | **271.816.900,00** | **-126.168.900,00** | |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 148.713.100,00 | **201.759.000,00** | **53.045.900,00** | |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 21.455.700,00 | **70.057.900,00** | **48.602.200,00** | |
| **4.01.03.2.02** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **85.393.900,00** | **286.678.600,00** | **201.284.700,00** | |
| 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 6.237.600,00 | **83.522.600,00** | **77.285.000,00** | |
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 15.806.700,00 | **115.806.400,00** | **99.999.700,00** | |
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 63.349.600,00 | **87.349.600,00** | **24.000.000,00** | |
| **4.01.03.2.03** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **651.613.400,00** | **651.613.400,00** | **0,00** | |
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 376.098.100,00 | **376.098.100,00** | **0,00** | |
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 275.515.300,00 | **275.515.300,00** | **0,00** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **21.604.291.192,00** | **22.429.612.008,00** | **825.320.816,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **169.023.800,00** | **172.521.800,00** | **3.498.000,00** | |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 31.120.500,00 | **31.120.500,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 33.241.700,00 | **33.241.700,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 38.694.300,00 | **48.192.300,00** | **9.498.000,00** | |
| 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65.967.300,00 | **59.967.300,00** | **-6.000.000,00** | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.723.563.472,00** | **7.409.363.668,00** | **-314.199.804,00** | |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.631.309.972,00 | **7.294.721.368,00** | **-336.588.604,00** | |
| 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 39.518.600,00 | **39.518.600,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 37.802.700,00 | **37.802.700,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 14.932.200,00 | **37.321.000,00** | **22.388.800,00** | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.694.761.200,00** | **3.240.263.600,00** | **1.545.502.400,00** | |
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.517.100,00 | **118.997.100,00** | **68.480.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.084.100,00 | **150.205.500,00** | **50.121.400,00** | |
| 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 66.749.000,00 | **173.286.000,00** | **106.537.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 435.460.000,00 | **545.600.000,00** | **110.140.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 276.236.000,00 | **276.236.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 60.000.000,00 | **60.000.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 251.100.000,00 | **348.600.000,00** | **97.500.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 454.615.000,00 | **1.567.339.000,00** | **1.112.724.000,00** | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **5.395.810.200,00** | **4.367.810.200,00** | **-1.028.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.085.000.000,00 | **2.652.500.000,00** | **567.500.000,00** | |
| 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 560.810.200,00 | **1.715.310.200,00** | **1.154.500.000,00** | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.020.444.712,00** | **3.371.860.212,00** | **351.415.500,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.500.000,00 | **19.500.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.061.800.712,00 | **1.061.800.712,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 237.500.000,00 | **424.500.000,00** | **187.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.701.644.000,00 | **1.866.059.500,00** | **164.415.500,00** | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.304.834.000,00** | **1.575.548.000,00** | **270.714.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 768.142.400,00 | **768.142.400,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 232.179.400,00 | **232.179.400,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 226.512.200,00 | **361.416.200,00** | **134.904.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 78.000.000,00 | **213.810.000,00** | **135.810.000,00** | |
| **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **673.260.508,00** | **673.513.228,00** | **252.720,00** | |
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 177.260.508,00 | **177.513.228,00** | **252.720,00** | |
| 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 96.000.000,00 | **96.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 400.000.000,00 | **400.000.000,00** | **0,00** | |
| **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **1.283.913.600,00** | **1.313.913.600,00** | **30.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 570.084.600,00 | **600.084.600,00** | **30.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 392.829.000,00 | **392.829.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 321.000.000,00 | **321.000.000,00** | **0,00** | |
| **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **213.708.500,00** | **179.846.500,00** | **-33.862.000,00** | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 57.255.900,00 | **54.255.900,00** | **-3.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 123.911.200,00 | **117.911.200,00** | **-6.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 32.541.400,00 | **7.679.400,00** | **-24.862.000,00** | |
| **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **124.971.200,00** | **124.971.200,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 88.296.100,00 | **88.296.100,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 36.675.100,00 | **36.675.100,00** | **0,00** | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **38.170.348.042,00** | **42.990.489.299,00** | **4.820.141.257,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN** | **38.170.348.042,00** | **42.990.489.299,00** | **4.820.141.257,00** | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **6.122.747.050,00** | **8.599.312.050,00** | **2.476.565.000,00** | |
| **4.02.02.2.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **283.843.900,00** | **283.843.900,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | 95.034.500,00 | **95.034.500,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | 95.183.000,00 | **95.183.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 93.626.400,00 | **93.626.400,00** | **0,00** | |
| **4.02.02.2.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **901.398.150,00** | **951.398.150,00** | **50.000.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 900.000.000,00 | **950.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 1.398.150,00 | **1.398.150,00** | **0,00** | |
| **4.02.02.2.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **4.937.505.000,00** | **7.364.070.000,00** | **2.426.565.000,00** | |
| 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 50.625.000,00 | **33.750.000,00** | **-16.875.000,00** | |
| 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 4.886.880.000,00 | **7.330.320.000,00** | **2.443.440.000,00** | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **32.047.600.992,00** | **34.391.177.249,00** | **2.343.576.257,00** | |
| **4.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.538.447.034,00** | **2.275.344.039,00** | **-263.102.995,00** | |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.538.447.034,00 | **2.275.344.039,00** | **-263.102.995,00** | |
| **4.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **3.709.620.250,00** | **5.356.980.200,00** | **1.647.359.950,00** | |
| 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 114.900.000,00 | **114.900.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 3.444.720.250,00 | **5.167.080.200,00** | **1.722.359.950,00** | |
| 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 150.000.000,00 | **75.000.000,00** | **-75.000.000,00** | |
| **4.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **2.798.134.350,00** | **3.420.017.350,00** | **621.883.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 29.577.600,00 | **29.577.600,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 235.893.800,00 | **235.893.800,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 700.550.000,00 | **749.741.000,00** | **49.191.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 210.369.950,00 | **210.369.950,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 120.000.000,00 | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.501.743.000,00 | **2.074.435.000,00** | **572.692.000,00** | |
| **4.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **83.161.400,00** | **135.450.500,00** | **52.289.100,00** | |
| 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 83.161.400,00 | **135.450.500,00** | **52.289.100,00** | |
| **4.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.154.611.212,00** | **2.518.145.908,00** | **363.534.696,00** | |
| 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 101.562.712,00 | **106.562.408,00** | **4.999.696,00** | |
| 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.053.048.500,00 | **2.411.583.500,00** | **358.535.000,00** | |
| **4.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **939.405.200,00** | **1.066.221.200,00** | **126.816.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 845.785.200,00 | **972.601.200,00** | **126.816.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 93.620.000,00 | **93.620.000,00** | **0,00** | |
| **4.02.01.2.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **14.476.918.546,00** | **13.813.911.052,00** | **-663.007.494,00** | |
| 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 14.236.918.546,00 | **13.813.911.052,00** | **-423.007.494,00** | |
| **4.02.01.2.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **5.347.303.000,00** | **5.805.107.000,00** | **457.804.000,00** | |
| 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 5.100.278.000,00 | **5.392.640.000,00** | **292.362.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 247.025.000,00 | **412.467.000,00** | **165.442.000,00** | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **5.824.954.516,00** | **6.128.888.043,00** | **303.933.527,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH** | **5.824.954.516,00** | **6.128.888.043,00** | **303.933.527,00** | |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **1.107.344.100,00** | **539.070.850,00** | **-568.273.250,00** | |
| **5.01.02.2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **349.240.400,00** | **280.525.000,00** | **-68.715.400,00** | |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 13.297.050,00 | **13.297.050,00** | **0,00** | |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 141.737.700,00 | **117.059.300,00** | **-24.678.400,00** | |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 194.205.650,00 | **150.168.650,00** | **-44.037.000,00** | |
| **5.01.02.2.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **82.401.900,00** | **138.334.050,00** | **55.932.150,00** | |
| 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 0,00 | **49.999.850,00** | **49.999.850,00** | |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 82.401.900,00 | **88.334.200,00** | **5.932.300,00** | |
| **5.01.02.2.04** | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **675.701.800,00** | **120.211.800,00** | **-555.490.000,00** | |
| 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 675.701.800,00 | **120.211.800,00** | **-555.490.000,00** | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **420.717.300,00** | **334.999.950,00** | **-85.717.350,00** | |
| **5.01.03.2.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **165.419.900,00** | **116.343.600,00** | **-49.076.300,00** | |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 20.663.050,00 | **11.943.050,00** | **-8.720.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 26.636.000,00 | **17.366.000,00** | **-9.270.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 17.545.500,00 | **9.042.500,00** | **-8.503.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 31.447.850,00 | **38.344.550,00** | **6.896.700,00** | |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 28.668.100,00 | **13.638.100,00** | **-15.030.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 40.459.400,00 | **26.009.400,00** | **-14.450.000,00** | |
| **5.01.03.2.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **124.449.400,00** | **108.063.650,00** | **-16.385.750,00** | |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 25.441.450,00 | **10.156.450,00** | **-15.285.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 15.750.400,00 | **7.786.100,00** | **-7.964.300,00** | |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 19.587.700,00 | **34.153.450,00** | **14.565.750,00** | |
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 26.001.900,00 | **13.003.900,00** | **-12.998.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 20.497.500,00 | **10.237.500,00** | **-10.260.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 17.170.450,00 | **32.726.250,00** | **15.555.800,00** | |
| **5.01.03.2.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **130.848.000,00** | **110.592.700,00** | **-20.255.300,00** | |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 10.252.300,00 | **11.041.100,00** | **788.800,00** | |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 28.462.600,00 | **29.542.600,00** | **1.080.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 15.796.300,00 | **12.108.100,00** | **-3.688.200,00** | |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 21.952.900,00 | **14.427.000,00** | **-7.525.900,00** | |
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 27.703.800,00 | **19.753.800,00** | **-7.950.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 26.680.100,00 | **23.720.100,00** | **-2.960.000,00** | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.296.893.116,00** | **5.254.817.243,00** | **957.924.127,00** | |
| **5.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.162.400,00** | **13.162.400,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.162.400,00 | **13.162.400,00** | **0,00** | |
| **5.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.344.630.554,00** | **2.012.450.403,00** | **-332.180.151,00** | |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.344.630.554,00 | **2.012.450.403,00** | **-332.180.151,00** | |
| **5.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **559.657.450,00** | **1.401.509.650,00** | **841.852.200,00** | |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.930.500,00 | **29.930.500,00** | **20.000.000,00** | |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 32.970.000,00 | **32.970.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.697.400,00 | **65.651.600,00** | **25.954.200,00** | |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.001.550,00 | **30.001.550,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 439.808.000,00 | **1.242.956.000,00** | **803.148.000,00** | |
| **5.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **54.000.000,00** | **293.614.750,00** | **239.614.750,00** | |
| 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 54.000.000,00 | **293.614.750,00** | **239.614.750,00** | |
| **5.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **935.864.212,00** | **1.144.501.540,00** | **208.637.328,00** | |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.294.100,00 | **14.294.100,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 138.570.112,00 | **158.309.440,00** | **19.739.328,00** | |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 783.000.000,00 | **971.898.000,00** | **188.898.000,00** | |
| **5.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **389.578.500,00** | **389.578.500,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 283.521.000,00 | **283.521.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 71.002.500,00 | **71.002.500,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 35.055.000,00 | **35.055.000,00** | **0,00** | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **293.625.237.756,00** | **312.087.167.374,00** | **18.461.929.618,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH** | **293.625.237.756,00** | **312.087.167.374,00** | **18.461.929.618,00** | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **257.735.090.895,00** | **266.963.358.445,00** | **9.228.267.550,00** | |
| **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **650.968.950,00** | **735.968.900,00** | **84.999.950,00** | |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 144.285.300,00 | **149.285.400,00** | **5.000.100,00** | |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 86.160.250,00 | **146.160.200,00** | **59.999.950,00** | |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 220.173.400,00 | **230.173.200,00** | **9.999.800,00** | |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 200.350.000,00 | **210.350.100,00** | **10.000.100,00** | |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **200.045.900,00** | **377.152.900,00** | **177.107.000,00** | |
| 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 101.770.300,00 | **142.483.800,00** | **40.713.500,00** | |
| 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 15.450.300,00 | **15.450.300,00** | **0,00** | |
| 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | **76.544.500,00** | **76.544.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 24.925.600,00 | **24.925.600,00** | **0,00** | |
| 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 57.899.700,00 | **57.899.700,00** | **0,00** | |
| 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 0,00 | **59.849.000,00** | **59.849.000,00** | |
| **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **243.272.000,00** | **328.266.800,00** | **84.994.800,00** | |
| 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 24.666.250,00 | **24.666.250,00** | **0,00** | |
| 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 0,00 | **34.994.800,00** | **34.994.800,00** | |
| 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 65.472.950,00 | **115.472.950,00** | **50.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 153.132.800,00 | **153.132.800,00** | **0,00** | |
| **5.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **256.640.804.045,00** | **265.521.969.845,00** | **8.881.165.800,00** | |
| 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 251.212.066.500,00 | **259.388.728.500,00** | **8.176.662.000,00** | |
| 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1.000.000.000,00 | **1.704.503.800,00** | **704.503.800,00** | |
| 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 4.428.737.545,00 | **4.428.737.545,00** | **0,00** | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **316.584.600,00** | **466.484.600,00** | **149.900.000,00** | |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **316.584.600,00** | **466.484.600,00** | **149.900.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | 25.326.000,00 | **25.326.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 26.679.000,00 | **26.679.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 145.860.400,00 | **195.760.400,00** | **49.900.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 54.112.000,00 | **54.112.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 64.607.200,00 | **164.607.200,00** | **100.000.000,00** | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **542.272.500,00** | **1.054.133.800,00** | **511.861.300,00** | |
| **5.02.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **542.272.500,00** | **1.054.133.800,00** | **511.861.300,00** | |
| 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 37.602.900,00 | **204.161.100,00** | **166.558.200,00** | |
| 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 223.510.450,00 | **433.553.550,00** | **210.043.100,00** | |
| 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | 176.946.500,00 | **224.646.500,00** | **47.700.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 52.997.800,00 | **181.807.800,00** | **128.810.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 9.964.850,00 | **9.964.850,00** | **0,00** | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **35.031.289.761,00** | **43.603.190.529,00** | **8.571.900.768,00** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **73.627.200,00** | **73.627.200,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 49.560.300,00 | **49.560.300,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.066.900,00 | **24.066.900,00** | **0,00** | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **28.209.853.529,00** | **34.012.135.341,00** | **5.802.281.812,00** | |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 28.198.578.029,00 | **33.990.859.991,00** | **5.792.281.962,00** | |
| 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 11.275.500,00 | **11.275.500,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0,00 | **9.999.850,00** | **9.999.850,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **604.072.600,00** | **1.528.099.400,00** | **924.026.800,00** | |
| 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 26.677.200,00 | **172.521.500,00** | **145.844.300,00** | |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 75.285.500,00 | **127.057.900,00** | **51.772.400,00** | |
| 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 59.977.000,00 | **158.047.000,00** | **98.070.000,00** | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 73.251.900,00 | **151.873.000,00** | **78.621.100,00** | |
| 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0,00 | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 368.881.000,00 | **888.600.000,00** | **519.719.000,00** | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **3.400.000.000,00** | **4.821.450.000,00** | **1.421.450.000,00** | |
| 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3.400.000.000,00 | **4.821.450.000,00** | **1.421.450.000,00** | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.673.336.432,00** | **2.759.506.688,00** | **86.170.256,00** | |
| 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0,00 | **280.000,00** | **280.000,00** | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 285.336.432,00 | **305.336.688,00** | **20.000.256,00** | |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.388.000.000,00 | **2.453.890.000,00** | **65.890.000,00** | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **70.400.000,00** | **408.371.900,00** | **337.971.900,00** | |
| 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10.250.000,00 | **220.371.900,00** | **210.121.900,00** | |
| 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | **27.100.000,00** | **27.100.000,00** | |
| 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60.150.000,00 | **160.900.000,00** | **100.750.000,00** | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **4.054.395.711,00** | **4.023.003.196,00** | **-31.392.515,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.03.0000** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **4.054.395.711,00** | **4.023.003.196,00** | **-31.392.515,00** | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **956.880.300,00** | **1.052.121.050,00** | **95.240.750,00** | |
| **5.03.02.2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **220.435.150,00** | **251.772.150,00** | **31.337.000,00** | |
| 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 54.220.150,00 | **85.572.150,00** | **31.352.000,00** | |
| 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 166.200.000,00 | **166.200.000,00** | **0,00** | |
| **5.03.02.2.02** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **294.895.450,00** | **325.799.200,00** | **30.903.750,00** | |
| 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 35.008.000,00 | **35.008.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 42.647.450,00 | **72.289.100,00** | **29.641.650,00** | |
| 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 217.240.000,00 | **218.502.100,00** | **1.262.100,00** | |
| **5.03.02.2.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **347.913.400,00** | **380.913.400,00** | **33.000.000,00** | |
| 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 165.500.000,00 | **165.500.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 182.413.400,00 | **215.413.400,00** | **33.000.000,00** | |
| **5.03.02.2.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **93.636.300,00** | **93.636.300,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 28.971.000,00 | **28.971.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 14.610.800,00 | **14.610.800,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 50.054.500,00 | **50.054.500,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.097.515.411,00** | **2.970.882.146,00** | **-126.633.265,00** | |
| **5.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.405.600,00** | **15.405.600,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.405.600,00 | **15.405.600,00** | **0,00** | |
| **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.506.175.811,00** | **2.281.370.546,00** | **-224.805.265,00** | |
| 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.482.800.161,00 | **2.256.034.896,00** | **-226.765.265,00** | |
| 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 13.671.000,00 | **15.631.000,00** | **1.960.000,00** | |
| 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.704.650,00 | **9.704.650,00** | **0,00** | |
| **5.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **221.792.000,00** | **275.964.000,00** | **54.172.000,00** | |
| 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.984.600,00 | **9.984.600,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.414.700,00 | **45.414.700,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.075.000,00 | **13.075.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.015.700,00 | **20.015.700,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 118.302.000,00 | **172.474.000,00** | **54.172.000,00** | |
| **5.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **280.522.000,00** | **324.522.000,00** | **44.000.000,00** | |
| 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.997.000,00 | **9.997.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 48.720.000,00 | **48.720.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 221.805.000,00 | **265.805.000,00** | **44.000.000,00** | |
| **5.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **73.620.000,00** | **73.620.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52.590.000,00 | **52.590.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.030.000,00 | **21.030.000,00** | **0,00** | |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **342.533.550,00** | **342.533.550,00** | **0,00** | |
| **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **342.533.550,00** | **342.533.550,00** | **0,00** | |
| **5.04.02.2.02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **342.533.550,00** | **342.533.550,00** | **0,00** | |
| 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 342.533.550,00 | **342.533.550,00** | **0,00** | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **123.682.400,00** | **117.308.100,00** | **-6.374.300,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH** | **123.682.400,00** | **117.308.100,00** | **-6.374.300,00** | |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **24.934.100,00** | **10.309.800,00** | **-14.624.300,00** | |
| **5.05.02.2.01** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **24.934.100,00** | **10.309.800,00** | **-14.624.300,00** | |
| 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 24.934.100,00 | **10.309.800,00** | **-14.624.300,00** | |
| **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | **98.748.300,00** | **106.998.300,00** | **8.250.000,00** | |
| **5.05.03.2.01** | **Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan** | **98.748.300,00** | **106.998.300,00** | **8.250.000,00** | |
| 5.05.03.2.01.0006 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 98.748.300,00 | **106.998.300,00** | **8.250.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **8.586.446.017,00** | **8.664.304.565,00** | **77.858.548,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS** | **8.578.698.017,00** | **8.656.556.565,00** | **77.858.548,00** | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **2.994.822.150,00** | **3.238.314.000,00** | **243.491.850,00** | |
| **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **2.994.822.150,00** | **3.238.314.000,00** | **243.491.850,00** | |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1.451.031.950,00 | **1.672.555.800,00** | **221.523.850,00** | |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 893.235.100,00 | **938.745.100,00** | **45.510.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 565.348.650,00 | **522.306.650,00** | **-43.042.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 85.206.450,00 | **104.706.450,00** | **19.500.000,00** | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **1.003.917.700,00** | **898.966.600,00** | **-104.951.100,00** | |
| **6.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **776.048.900,00** | **572.097.800,00** | **-203.951.100,00** | |
| 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 776.048.900,00 | **572.097.800,00** | **-203.951.100,00** | |
| **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **227.868.800,00** | **326.868.800,00** | **99.000.000,00** | |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 227.868.800,00 | **326.868.800,00** | **99.000.000,00** | |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.579.958.167,00** | **4.519.275.965,00** | **-60.682.202,00** | |
| **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.443.141.557,00** | **3.305.000.305,00** | **-138.141.252,00** | |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.443.141.557,00 | **3.305.000.305,00** | **-138.141.252,00** | |
| **6.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **30.153.650,00** | **30.153.650,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 30.153.650,00 | **30.153.650,00** | **0,00** | |
| **6.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **550.863.200,00** | **628.322.250,00** | **77.459.050,00** | |
| 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 29.791.200,00 | **29.791.200,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 76.018.200,00 | **129.431.400,00** | **53.413.200,00** | |
| 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 53.146.800,00 | **77.146.800,00** | **24.000.000,00** | |
| 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 232.719.000,00 | **232.719.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 129.188.000,00 | **129.233.850,00** | **45.850,00** | |
| 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 30.000.000,00 | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **194.299.760,00** | **194.299.760,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.300.000,00 | **14.300.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 179.999.760,00 | **179.999.760,00** | **0,00** | |
| **6.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **361.500.000,00** | **361.500.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 200.500.000,00 | **200.500.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 96.500.000,00 | **96.500.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 64.500.000,00 | **64.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000** | **KECAMATAN SOSOPAN** | **7.748.000,00** | **7.748.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **102.180.000,00** | **145.894.000,00** | **43.714.000,00** | |
| 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.748.000,00 | **7.748.000,00** | **0,00** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | **28.650.938.993,00** | **27.465.831.525,00** | **-1.185.107.468,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **KECAMATAN BARUMUN** | **2.380.698.986,00** | **2.624.159.938,00** | **243.460.952,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **127.713.750,00** | **127.713.750,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **7.627.000,00** | **7.627.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7.627.000,00 | **7.627.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **120.086.750,00** | **120.086.750,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 120.086.750,00 | **120.086.750,00** | **0,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **686.820.000,00** | **686.820.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **11.620.000,00** | **11.620.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 11.620.000,00 | **11.620.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **675.200.000,00** | **675.200.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 675.200.000,00 | **675.200.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.566.165.236,00** | **1.809.626.188,00** | **243.460.952,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.638.400,00** | **5.638.400,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.638.400,00 | **5.638.400,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.400.847.636,00** | **1.547.908.588,00** | **147.060.952,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.400.847.636,00 | **1.547.908.588,00** | **147.060.952,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **31.020.200,00** | **31.020.200,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.320.200,00 | **3.320.200,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.200.000,00 | **5.200.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 22.500.000,00 | **22.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **119.209.000,00** | **205.609.000,00** | **86.400.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 119.209.000,00 | **205.609.000,00** | **86.400.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **9.450.000,00** | **19.450.000,00** | **10.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 9.450.000,00 | **19.450.000,00** | **10.000.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **KECAMATAN LUBUK BARUMUN** | **2.103.685.759,00** | **2.122.927.028,00** | **19.241.269,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **77.801.000,00** | **51.007.150,00** | **-26.793.850,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **77.801.000,00** | **51.007.150,00** | **-26.793.850,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 77.801.000,00 | **51.007.150,00** | **-26.793.850,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.025.884.759,00** | **2.071.919.878,00** | **46.035.119,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **52.523.000,00** | **52.523.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.523.000,00 | **52.523.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.822.545.759,00** | **1.822.546.078,00** | **319,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.822.545.759,00 | **1.822.546.078,00** | **319,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **135.479.200,00** | **181.514.000,00** | **46.034.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22.000.000,00 | **36.280.000,00** | **14.280.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 113.479.200,00 | **145.234.000,00** | **31.754.800,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **15.336.800,00** | **15.336.800,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.336.800,00 | **15.336.800,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **KECAMATAN HURISTAK** | **1.383.601.825,00** | **1.367.411.711,00** | **-16.190.114,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **95.647.500,00** | **95.647.500,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **95.647.500,00** | **95.647.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 95.647.500,00 | **95.647.500,00** | **0,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **29.951.200,00** | **30.081.200,00** | **130.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **29.951.200,00** | **30.081.200,00** | **130.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 29.951.200,00 | **30.081.200,00** | **130.000,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.258.003.125,00** | **1.241.683.011,00** | **-16.320.114,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.073.576.025,00** | **987.587.911,00** | **-85.988.114,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.073.576.025,00 | **987.587.911,00** | **-85.988.114,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **96.790.500,00** | **95.290.500,00** | **-1.500.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.850.000,00 | **21.850.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.240.500,00 | **60.240.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14.700.000,00 | **13.200.000,00** | **-1.500.000,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **87.636.600,00** | **158.804.600,00** | **71.168.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8.636.600,00 | **8.636.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 79.000.000,00 | **150.168.000,00** | **71.168.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **KECAMATAN BARUMUN SELATAN** | **1.040.546.493,00** | **1.137.974.372,00** | **97.427.879,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **64.476.700,00** | **64.476.700,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **64.476.700,00** | **64.476.700,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 64.476.700,00 | **64.476.700,00** | **0,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **20.140.350,00** | **19.684.300,00** | **-456.050,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **20.140.350,00** | **19.684.300,00** | **-456.050,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 20.140.350,00 | **19.684.300,00** | **-456.050,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **955.929.443,00** | **1.053.813.372,00** | **97.883.929,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **752.406.643,00** | **776.034.572,00** | **23.627.929,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 752.406.643,00 | **776.034.572,00** | **23.627.929,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **24.200.000,00** | **24.200.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 24.200.000,00 | **24.200.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **77.625.800,00** | **77.625.800,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.773.700,00 | **5.773.700,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.570.600,00 | **30.570.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 36.281.500,00 | **36.281.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.000.000,00 | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **12.500.000,00** | **12.500.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.500.000,00 | **12.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **89.197.000,00** | **163.453.000,00** | **74.256.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.005.000,00 | **5.005.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.052.000,00 | **2.052.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 82.140.000,00 | **156.396.000,00** | **74.256.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM** | **1.999.027.969,00** | **1.681.678.073,00** | **-317.349.896,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **2.796.000,00** | **2.796.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **2.796.000,00** | **2.796.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2.796.000,00 | **2.796.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **96.431.000,00** | **96.431.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **96.431.000,00** | **96.431.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 27.822.000,00 | **27.822.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 68.609.000,00 | **68.609.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.899.800.969,00** | **1.582.451.073,00** | **-317.349.896,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000,00 | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.719.004.269,00** | **1.357.102.373,00** | **-361.901.896,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.719.004.269,00 | **1.357.102.373,00** | **-361.901.896,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **25.000.000,00** | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **26.367.200,00** | **26.367.200,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.385.000,00 | **1.385.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.874.700,00 | **10.874.700,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.107.500,00 | **2.107.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12.000.000,00 | **12.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **30.898.000,00** | **12.700.000,00** | **-18.198.000,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.700.000,00 | **12.700.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95.531.500,00** | **158.281.500,00** | **62.750.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 325.000,00 | **325.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.180.500,00 | **15.180.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 80.026.000,00 | **142.776.000,00** | **62.750.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN** | **1.614.031.233,00** | **1.526.462.159,00** | **-87.569.074,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **77.254.050,00** | **76.253.900,00** | **-1.000.150,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **77.254.050,00** | **76.253.900,00** | **-1.000.150,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 77.254.050,00 | **76.253.900,00** | **-1.000.150,00** | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **61.350.000,00** | **61.350.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **61.350.000,00** | **61.350.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 61.350.000,00 | **61.350.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **5.600.000,00** | **5.600.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **5.600.000,00** | **5.600.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 5.600.000,00 | **5.600.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.469.827.183,00** | **1.383.258.259,00** | **-86.568.924,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.274.262.903,00** | **1.111.332.979,00** | **-162.929.924,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.274.262.903,00 | **1.111.332.979,00** | **-162.929.924,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **13.200.000,00** | **13.200.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.200.000,00 | **13.200.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **155.364.280,00** | **231.725.280,00** | **76.361.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.000.000,00 | **7.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.540.280,00 | **9.540.280,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 138.824.000,00 | **215.185.000,00** | **76.361.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **27.000.000,00** | **27.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 27.000.000,00 | **27.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **KECAMATAN SOSA** | **2.112.407.982,00** | **2.066.160.090,00** | **-46.247.892,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **100.090.000,00** | **100.090.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **21.140.000,00** | **21.140.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 21.140.000,00 | **21.140.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **78.950.000,00** | **78.950.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 78.950.000,00 | **78.950.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.012.317.982,00** | **1.966.070.090,00** | **-46.247.892,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7.080.000,00** | **7.080.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.080.000,00 | **7.080.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.756.252.032,00** | **1.714.020.140,00** | **-42.231.892,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.756.252.032,00 | **1.714.020.140,00** | **-42.231.892,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **57.315.550,00** | **57.315.550,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.425.600,00 | **20.425.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.489.950,00 | **9.489.950,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.050.000,00 | **2.050.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.350.000,00 | **25.350.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **184.220.400,00** | **180.204.400,00** | **-4.016.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.254.400,00 | **23.254.400,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 160.966.000,00 | **156.950.000,00** | **-4.016.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **7.450.000,00** | **7.450.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7.450.000,00 | **7.450.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **KECAMATAN BARUMUN TENGAH** | **2.008.707.097,00** | **1.866.262.992,00** | **-142.444.105,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **26.500.000,00** | **26.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **26.500.000,00** | **26.500.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 26.500.000,00 | **26.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **119.443.700,00** | **118.736.500,00** | **-707.200,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **119.443.700,00** | **118.736.500,00** | **-707.200,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 29.920.000,00 | **29.920.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 89.523.700,00 | **88.816.500,00** | **-707.200,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.862.763.397,00** | **1.721.026.492,00** | **-141.736.905,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.735.709.609,00** | **1.521.288.704,00** | **-214.420.905,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.735.709.609,00 | **1.521.288.704,00** | **-214.420.905,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **37.231.200,00** | **37.231.200,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.225.200,00 | **19.225.200,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.356.000,00 | **10.356.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7.650.000,00 | **7.650.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **89.822.588,00** | **162.506.588,00** | **72.684.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 16.796.588,00 | **16.796.588,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 73.026.000,00 | **145.710.000,00** | **72.684.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN** | **1.523.501.427,00** | **1.396.914.264,00** | **-126.587.163,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **17.915.600,00** | **17.915.600,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **17.915.600,00** | **17.915.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 17.915.600,00 | **17.915.600,00** | **0,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **13.632.500,00** | **13.632.500,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **13.632.500,00** | **13.632.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 13.632.500,00 | **13.632.500,00** | **0,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **72.083.400,00** | **72.083.400,00** | **0,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **72.083.400,00** | **72.083.400,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 72.083.400,00 | **72.083.400,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.419.869.927,00** | **1.293.282.764,00** | **-126.587.163,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.805.700,00** | **4.805.700,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.805.700,00 | **4.805.700,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.242.414.209,00** | **1.047.227.046,00** | **-195.187.163,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.242.414.209,00 | **1.047.227.046,00** | **-195.187.163,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **39.336.400,00** | **58.882.400,00** | **19.546.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.486.400,00 | **7.486.400,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.100.000,00 | **15.400.000,00** | **6.300.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.750.000,00 | **22.250.000,00** | **14.500.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15.000.000,00 | **13.746.000,00** | **-1.254.000,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **117.613.118,00** | **155.867.118,00** | **38.254.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.900.000,00 | **3.900.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 11.415.218,00 | **11.415.218,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.297.900,00 | **7.297.900,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 95.000.000,00 | **133.254.000,00** | **38.254.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **15.700.500,00** | **26.500.500,00** | **10.800.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15.700.500,00 | **26.500.500,00** | **10.800.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000** | **KECAMATAN ULU BARUMUN** | **1.447.929.903,00** | **1.329.199.308,00** | **-118.730.595,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **66.792.600,00** | **71.226.200,00** | **4.433.600,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **58.865.600,00** | **58.865.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 58.865.600,00 | **58.865.600,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **7.927.000,00** | **12.360.600,00** | **4.433.600,00** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7.927.000,00 | **12.360.600,00** | **4.433.600,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **32.426.050,00** | **44.851.400,00** | **12.425.350,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **32.426.050,00** | **44.851.400,00** | **12.425.350,00** | |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 18.274.300,00 | **25.649.300,00** | **7.375.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 14.151.750,00 | **19.202.100,00** | **5.050.350,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.348.711.253,00** | **1.213.121.708,00** | **-135.589.545,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.140.448.301,00** | **973.538.756,00** | **-166.909.545,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.140.448.301,00 | **973.538.756,00** | **-166.909.545,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **24.193.700,00** | **43.653.700,00** | **19.460.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.695.700,00 | **1.785.700,00** | **90.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.599.100,00 | **29.969.100,00** | **19.370.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.298.900,00 | **8.298.900,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.600.000,00 | **3.600.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **184.069.252,00** | **195.929.252,00** | **11.860.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.001.000,00 | **2.552.000,00** | **1.551.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5.003.752,00 | **5.003.752,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18.582.500,00 | **8.229.500,00** | **-10.353.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 159.482.000,00 | **180.144.000,00** | **20.662.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000** | **KECAMATAN SOSOPAN** | **1.477.990.657,00** | **1.357.255.336,00** | **-120.735.321,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **30.000.250,00** | **30.000.250,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **30.000.250,00** | **30.000.250,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 30.000.250,00 | **30.000.250,00** | **0,00** | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **5.075.000,00** | **5.075.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **5.075.000,00** | **5.075.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5.075.000,00 | **5.075.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **8.162.700,00** | **8.162.700,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **8.162.700,00** | **8.162.700,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 8.162.700,00 | **8.162.700,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.442.500.707,00** | **1.321.765.386,00** | **-120.735.321,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.214.350,00** | **10.100.250,00** | **-114.100,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.214.350,00 | **10.100.250,00** | **-114.100,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.171.835.257,00** | **1.007.500.036,00** | **-164.335.221,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.171.835.257,00 | **1.007.500.036,00** | **-164.335.221,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **44.711.400,00** | **44.711.400,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.130.500,00 | **5.130.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.930.900,00 | **19.930.900,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5.250.000,00 | **5.250.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.750.000,00 | **4.750.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9.650.000,00 | **9.650.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **102.180.000,00** | **145.894.000,00** | **43.714.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.520.000,00 | **1.520.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 92.912.000,00 | **136.626.000,00** | **43.714.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **8.100.000,00** | **8.100.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8.100.000,00 | **8.100.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **105.459.700,00** | **105.459.700,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 105.459.700,00 | **105.459.700,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000** | **KECAMATAN BARUMUN BARU** | **1.375.305.356,00** | **1.354.688.380,00** | **-20.616.976,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **21.631.100,00** | **21.631.100,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **21.631.100,00** | **21.631.100,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 21.631.100,00 | **21.631.100,00** | **0,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **18.253.800,00** | **18.253.800,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **18.253.800,00** | **18.253.800,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 18.253.800,00 | **18.253.800,00** | **0,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **166.072.950,00** | **166.072.950,00** | **0,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **166.072.950,00** | **166.072.950,00** | **0,00** | |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 16.073.000,00 | **16.073.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 149.999.950,00 | **149.999.950,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **28.085.600,00** | **28.085.600,00** | **0,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **28.085.600,00** | **28.085.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 28.085.600,00 | **28.085.600,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.141.261.906,00** | **1.120.644.930,00** | **-20.616.976,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.600.000,00** | **9.600.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.600.000,00 | **9.600.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **919.866.893,00** | **904.849.917,00** | **-15.016.976,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 919.866.893,00 | **904.849.917,00** | **-15.016.976,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **41.662.200,00** | **41.662.200,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 968.800,00 | **968.800,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.135.300,00 | **19.135.300,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 970.000,00 | **970.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.588.100,00 | **5.588.100,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **50.774.687,00** | **50.774.687,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 5.850.000,00 | **5.850.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.924.687,00 | **44.924.687,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **115.908.126,00** | **110.308.126,00** | **-5.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.300.000,00 | **1.300.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.903.026,00 | **4.903.026,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 109.705.100,00 | **104.105.100,00** | **-5.600.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.450.000,00** | **3.450.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.450.000,00 | **3.450.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000** | **KECAMATAN BARUMUN BARAT** | **1.315.535.940,00** | **1.311.103.600,00** | **-4.432.340,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **113.861.950,00** | **113.861.950,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **113.861.950,00** | **113.861.950,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 113.861.950,00 | **113.861.950,00** | **0,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **4.025.000,00** | **4.025.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **4.025.000,00** | **4.025.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4.025.000,00 | **4.025.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **16.472.000,00** | **16.472.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **16.472.000,00** | **16.472.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 16.472.000,00 | **16.472.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.181.176.990,00** | **1.176.744.650,00** | **-4.432.340,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.157.400,00** | **5.157.400,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.157.400,00 | **5.157.400,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **982.826.090,00** | **980.309.750,00** | **-2.516.340,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 982.826.090,00 | **980.309.750,00** | **-2.516.340,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **25.832.700,00** | **25.832.700,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.494.100,00 | **1.494.100,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.125.600,00 | **4.125.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3.213.000,00 | **3.213.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.000.000,00 | **2.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **11.432.900,00** | **11.432.900,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 11.432.900,00 | **11.432.900,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **146.067.900,00** | **144.151.900,00** | **-1.916.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.998.400,00 | **2.998.400,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.394.000,00 | **4.394.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.965.500,00 | **5.965.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 132.710.000,00 | **130.794.000,00** | **-1.916.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **9.860.000,00** | **9.860.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9.860.000,00 | **9.860.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.15.0000** | **KECAMATAN SOSA JULU** | **1.418.975.537,00** | **1.436.044.135,00** | **17.068.598,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 30.000.000,00 | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **70.000.000,00** | **70.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **70.000.000,00** | **70.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 70.000.000,00 | **70.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.318.975.537,00** | **1.336.044.135,00** | **17.068.598,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.067.265.537,00** | **1.026.134.135,00** | **-41.131.402,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.067.265.537,00 | **1.026.134.135,00** | **-41.131.402,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **50.864.600,00** | **27.898.300,00** | **-22.966.300,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.494.600,00 | **5.320.300,00** | **-7.174.300,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.870.000,00 | **15.078.000,00** | **-15.792.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7.500.000,00 | **7.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **18.821.800,00** | **25.873.500,00** | **7.051.700,00** | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 18.821.800,00 | **25.873.500,00** | **7.051.700,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **169.242.400,00** | **242.907.000,00** | **73.664.600,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.692.400,00 | **40.815.000,00** | **122.600,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.840.000,00 | **6.840.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 121.710.000,00 | **195.252.000,00** | **73.542.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12.781.200,00** | **13.231.200,00** | **450.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12.781.200,00 | **13.231.200,00** | **450.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.16.0000** | **KECAMATAN ULU SOSA** | **1.339.840.208,00** | **1.282.128.978,00** | **-57.711.230,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **48.368.650,00** | **48.368.650,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **10.421.550,00** | **10.421.550,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10.421.550,00 | **10.421.550,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **37.947.100,00** | **37.947.100,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 37.947.100,00 | **37.947.100,00** | **0,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **100.583.600,00** | **100.583.600,00** | **0,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100.583.600,00** | **100.583.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 22.858.200,00 | **22.858.200,00** | **0,00** | |
| 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 77.725.400,00 | **77.725.400,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.190.887.958,00** | **1.133.176.728,00** | **-57.711.230,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **808.900,00** | **808.900,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 808.900,00 | **808.900,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.056.700.458,00** | **963.389.228,00** | **-93.311.230,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.056.700.458,00 | **963.389.228,00** | **-93.311.230,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **4.550.000,00** | **4.550.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 4.550.000,00 | **4.550.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **22.546.000,00** | **22.607.600,00** | **61.600,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.000.400,00 | **1.000.400,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.248.100,00 | **6.248.100,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.253.500,00 | **4.315.100,00** | **61.600,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.544.000,00 | **1.544.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.000.000,00 | **2.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7.500.000,00 | **7.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **14.827.000,00** | **14.765.400,00** | **-61.600,00** | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 9.332.800,00 | **9.271.200,00** | **-61.600,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.494.200,00 | **5.494.200,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **85.961.100,00** | **121.561.100,00** | **35.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 780.000,00 | **780.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.216.000,00 | **1.216.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 83.965.100,00 | **119.565.100,00** | **35.600.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **5.494.500,00** | **5.494.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.494.500,00 | **5.494.500,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.17.0000** | **KECAMATAN SOSA TIMUR** | **1.664.048.588,00** | **1.423.381.499,00** | **-240.667.089,00** | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **126.961.750,00** | **126.961.750,00** | **0,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **126.961.750,00** | **126.961.750,00** | **0,00** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 126.961.750,00 | **126.961.750,00** | **0,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **20.500.000,00** | **20.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **20.500.000,00** | **20.500.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 20.500.000,00 | **20.500.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.516.586.838,00** | **1.275.919.749,00** | **-240.667.089,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.375.430.838,00** | **1.126.356.949,00** | **-249.073.889,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.375.430.838,00 | **1.126.356.949,00** | **-249.073.889,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **37.780.200,00** | **37.780.200,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.405.200,00 | **2.405.200,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.400.000,00 | **8.400.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.775.000,00 | **7.775.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.800.000,00 | **5.800.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 13.400.000,00 | **13.400.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **103.375.800,00** | **111.782.600,00** | **8.406.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.007.800,00 | **5.042.600,00** | **-965.200,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 97.368.000,00 | **106.740.000,00** | **9.372.000,00** | |
| **7.01.7.01.0.00.06.0000** | **KECAMATAN HUTARAJA TINGGI** | **2.445.104.033,00** | **2.182.079.662,00** | **-263.024.371,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **28.700.000,00** | **28.700.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **28.700.000,00** | **28.700.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 28.700.000,00 | **28.700.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **97.494.000,00** | **97.494.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **97.494.000,00** | **97.494.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 9.809.000,00 | **9.809.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 87.685.000,00 | **87.685.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.318.910.033,00** | **2.055.885.662,00** | **-263.024.371,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.000.000,00 | **4.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.117.508.253,00** | **1.821.339.882,00** | **-296.168.371,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.117.508.253,00 | **1.821.339.882,00** | **-296.168.371,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **48.154.300,00** | **48.154.300,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.948.500,00 | **3.948.500,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.205.800,00 | **10.205.800,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000,00 | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24.000.000,00 | **24.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **149.247.480,00** | **182.391.480,00** | **33.144.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.100.000,00 | **5.100.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.000.480,00 | **3.000.480,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.551.000,00 | **13.551.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 127.596.000,00 | **160.740.000,00** | **33.144.000,00** | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **2.210.405.601,00** | **2.433.864.218,00** | **223.458.617,00** | |
| **8.01.2.19.0.00.01.0000** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **2.210.405.601,00** | **2.433.864.218,00** | **223.458.617,00** | |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **213.834.284,00** | **513.814.394,00** | **299.980.110,00** | |
| **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **213.834.284,00** | **513.814.394,00** | **299.980.110,00** | |
| 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | 213.834.284,00 | **513.814.394,00** | **299.980.110,00** | |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 3.600.000,00 | **3.600.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **4.200.000,00** | **4.200.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **4.200.000,00** | **4.200.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 4.200.000,00 | **4.200.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **254.007.350,00** | **207.352.350,00** | **-46.655.000,00** | |
| **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **254.007.350,00** | **207.352.350,00** | **-46.655.000,00** | |
| 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 54.800.350,00 | **56.744.350,00** | **1.944.000,00** | |
| 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 75.626.400,00 | **77.570.400,00** | **1.944.000,00** | |
| 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 41.295.300,00 | **27.304.300,00** | **-13.991.000,00** | |
| 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 6.099.800,00 | **6.099.800,00** | **0,00** | |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 76.185.500,00 | **39.633.500,00** | **-36.552.000,00** | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.734.763.967,00** | **1.704.897.474,00** | **-29.866.493,00** | |
| **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.303.923.677,00** | **1.129.387.284,00** | **-174.536.393,00** | |
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.303.923.677,00 | **1.129.387.284,00** | **-174.536.393,00** | |
| **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **206.762.950,00** | **243.703.500,00** | **36.940.550,00** | |
| 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.570.200,00 | **6.578.000,00** | **7.800,00** | |
| 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14.322.100,00 | **14.322.100,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.158.650,00 | **17.351.400,00** | **4.192.750,00** | |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 172.712.000,00 | **205.452.000,00** | **32.740.000,00** | |
| **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **200.077.340,00** | **308.461.004,00** | **108.383.664,00** | |
| 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 13.624.700,00 | **28.587.700,00** | **14.963.000,00** | |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 14.290.640,00 | **9.027.304,00** | **-5.263.336,00** | |
| 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.680.000,00 | **10.680.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 161.482.000,00 | **260.166.000,00** | **98.684.000,00** | |
| **8.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **24.000.000,00** | **23.345.686,00** | **-654.314,00** | |
| 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 24.000.000,00 | **23.345.686,00** | **-654.314,00** | |

## Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | BELANJA OPERASI | | | |
| | Belanja Pegawai | 477.311.364.175,00 | 486.416.417.155,00 | 9.105.052.980,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 241.592.224.534,00 | 314.081.163.120,00 | 72.488.938.586,00 |
| | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Subsidi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Hibah | 12.475.768.606,00 | 14.507.800.306,00 | 2.032.031.700,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 1.788.760.406,00 | 1.588.760.406,00 | -200.000.000,00 |
| | Belanja Imbalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BELANJA MODAL | | | |
| | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.284.397.716,00 | 19.407.101.109,00 | 122.703.393,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.530.000.000,00 | 17.924.234.350,00 | 6.394.234.350,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 23.458.695.000,00 | 101.508.843.500,00 | 78.050.148.500,00 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.886.467.380,00 | 7.362.396.512,00 | 1.475.929.132,00 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| | Belanja Tidak Terduga | 1.200.000.000,00 | 1.704.503.800,00 | 504.503.800,00 |
| 4 | BELANJA TRANSFER | | | |
| | Belanja Bagi Hasil | 4.428.737.545,00 | 4.428.737.545,00 | 0,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 248.512.066.500,00 | 256.021.728.500,00 | 7.509.662.000,00 |

# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
## Tahun Anggaran 2026

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **12.000.000.000,00** | **46.134.208.571,00** | **34.134.208.571,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.000.000.000,00 | **46.134.208.571,00** | **34.134.208.571,00** | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **12.000.000.000,00** | **46.134.208.571,00** | **34.134.208.571,00** | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **0,00** | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0,00** | **600.000.000,00** | **0,00** | |
| | **Pembiayaan Netto** | **12.000.000.000,00** | **45.534.208.571,00** | **33.534.208.571,00** | |